



LKPI
2015

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA BONTANG

TAHUN
ANGGARAN
2015



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA BONTANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015**



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu kewajiban setiap Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah ikut mengambil peran aktif dalam proses pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kota menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan Anggota DPRD Kota Bontang atas partisipasinya dengan harapan dimasa datang partisipasi serupa dapat lebih ditingkatkan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebaliknya Pemerintah Kota menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat Kota Bontang mengingat berbagai keterbatasan kemampuan Pemerintah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan dan penyelesaian laporan ini Kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kota Bontang senantiasa mendapat petunjuk serta ridho Allah SWT, Amien.

Bontang, 21 Maret 2016

Walikota

H. ADI DARMA

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab. I Pendahuluan	Bab I-1
A. Dasar Hukum	Bab I-2
B. Gambaran Umum Daerah	Bab I-5
C. Sistematika Penulisan	Bab I-13
Bab. II Kebijakan Pemerintahan Daerah	Bab II-1
A. Visi dan Misi	Bab II-1
B. Strategi Dan Arah Pembangunan Kota Bontang	Bab II-9
C. Prioritas Pembangunan Daerah	Bab II-38
Bab. III Kebijakan Umum Dan Keuangan Daerah	Bab III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bab III-3
B. Pengelolaan Belanja	Bab III-18
Bab. IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Bab IV-1
A. Urusan Wajib	Bab IV-8
B. Urusan Pilihan	Bab IV-69
Bab. V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Bab V-1
A. Dasar Hukum	Bab V-2
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung	Bab V-3
C. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung.....	Bab V-5
D. Permasalahan Dan Solusi	Bab V-7
Bab. VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Bab VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah.....	Bab VI-1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	Bab VI-3
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	Bab VI-11
D. Pembinaan Batas Wilayah	Bab VI-14
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	Bab VI-15
Bab. VII Penutup	Bab VII-1
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel. 2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang.....	Bab II-4
Tabel. 3.1	Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2013-2015.....	Bab III-6
Tabel. 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2015.....	Bab III-12
Tabel. 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang TA 2015.....	Bab III-25
Tabel. 3.4	Daftar Hutang Pemerintah Kota Bontang TA 2015.....	Bab III-30
Tabel. 4.1	Jumlah Deep Well dan WaterTreatment Plan.....	Bab IV-2
Tabel. 4.2	Jumlah Gedung sekolah.....	Bab IV-4
Tabel. 4.3	Jumlah Komitmen Bersama yang Terealisasi.....	Bab IV-7
Tabel. 4.4	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pendidikan.....	Bab IV-10
Tabel. 4.5	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesehatan.....	Bab IV-14
Tabel. 4.6	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum...	Bab IV-17
Tabel. 4.7	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat.	Bab IV-20
Tabel. 4.8	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penataan Ruang....	Bab IV-22
Tabel. 4.9	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan.....	Bab IV-24
Tabel. 4.10	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perhubungan.....	Bab IV-26
Tabel. 4.11	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup..	Bab IV-29
Tabel. 4.12	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanahan.....	Bab IV-31
Tabel. 4.13	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	Bab IV-33
Tabel. 4.14	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	Bab IV-35
Tabel. 4.15	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	Bab IV-38
Tabel. 4.16	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Sosial.....	Bab IV-40
Tabel. 4.17	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan...	Bab IV-42
Tabel. 4.18	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	Bab IV-44
Tabel. 4.19	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal dan Investasi.....	Bab IV-46
Tabel. 4.20	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan.....	Bab IV-48
Tabel. 4.21	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	Bab IV-50

Tabel. 4.22	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	Bab IV-54
Tabel. 4.23	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	Bab IV-56
Tabel. 4.24	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	Bab IV-61
Tabel. 4.25	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kearsipan.....	Bab IV-64
Tabel. 4.26	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika.....	Bab IV-66
Tabel. 4.27	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan.....	Bab IV-68
Tabel. 4.28	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanian.....	Bab IV-69
Tabel. 4.29	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan.....	Bab IV-71
Tabel. 4.30	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata.....	Bab IV-73
Tabel 4.31	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	Bab IV-74
Tabel 4.32	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perdagangan.....	Bab IV-75
Tabel 4.33	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Industri.....	Bab IV-78
Tabel. 5.1	Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015.....	Bab V-3
Tabel. 5.2	Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015.....	Bab V-4
Tabel. 5.3	Bantuan Langsung Pemerintah Pusat.....	Bab V-4
Tabel. 6.1	Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Ekonomi.....	Bab VI-6
Tabel. 6.2	Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Sosial.....	Bab VI-8
Tabel. 6.3	Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Infrastruktur.....	Bab VI-10

Daftar Gambar

Gambar. 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Bontang	Bab I-6
Gambar. 1.2	Persentase Luas Wilayah Daratan per Kelurahan Kota Bontang.....	Bab I-7
Gambar. 1.3	Jumlah Penduduk Tahun 2011 – 2015.....	Bab I-8
Gambar. 1.4	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah).....	Bab I-10
Gambar. 1.5	Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2011-2015.....	Bab I-11
Gambar. 1.6	Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2015.....	Bab I-13
Gambar. 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 (dalam Milyar Rp).....	Bab III-10
Gambar. 3.2	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015 (dalam Milyar Rp).....	Bab III-11
Gambar. 3.3	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015 (dalam Milyar Rp).....	Bab III-12
Gambar. 3.4	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015, (dalam milyar Rupiah).....	Bab III-28
Gambar. 3.5	Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015, (dalam milyar Rupiah).....	Bab III-29
Gambar. 4.1	Jumlah Pelanggan / Sambungan Rumah (SR).....	Bab IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan hak, kewenangan dan kewajiban kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015. Sejalan hal tersebut, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, sebagai pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011–2016, dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

A. DASAR HUKUM

1) Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Kota Bontang merupakan salah satu daerah pemekaran di Kalimantan Timur hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;

2) Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bontang Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

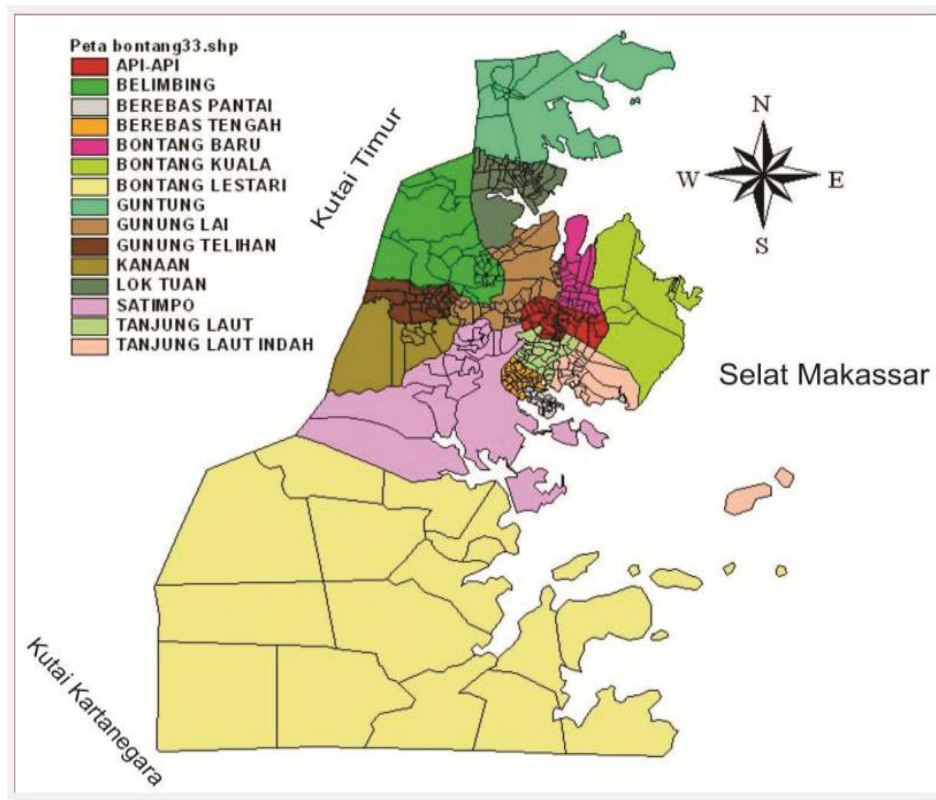
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Geografis

Kota Bontang terletak sekitar 120 km ke arah Utara dari Kota Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis berada di antara 0°01' Lintang Utara – 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur – 117°38' Bujur Timur dengan luas wilayah seluas 497,57 Km² yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77 Km² (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 147,80 Km² (29,70%).

Gambar. 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Bontang

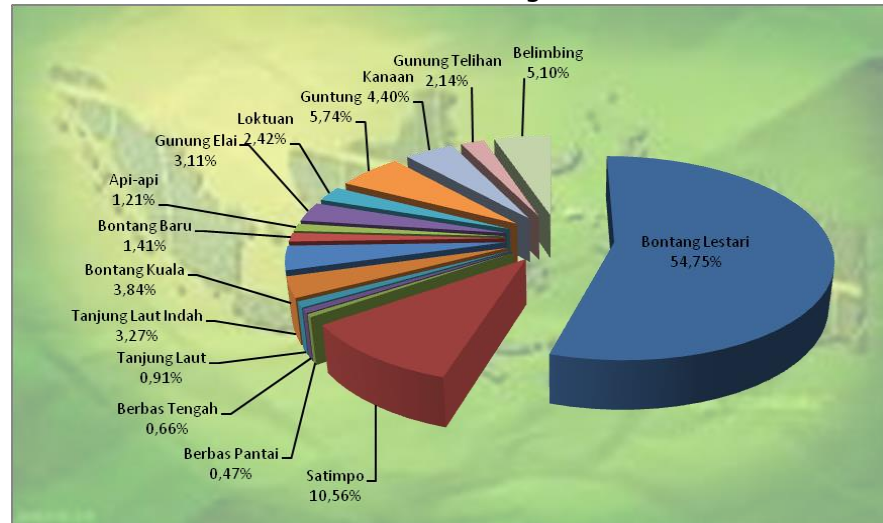


Secara administratif Kota Bontang berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Kota Bontang mempunyai 3 kecamatan dan 15 Kelurahan. Berikut merupakan persentase luas wilayah daratan Kota Bontang per Kelurahan.

Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Daratan per Kelurahan Kota Bontang



Topografi kawasan Bontang memiliki ketinggian antara 1-120 meter dpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi dari Pantai Timur dan Selatan hingga bagian Barat. Kemiringan lahan Kota Bontang dengan kemiringan 0-2% (datar) mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79%. Kemiringan lahan bergelombang (3-15%) seluas 4.001 ha atau 27,07%.

Proporsi luas lahan dengan kemiringan yang curam (16-40%) hampir sama dengan yang bergelombang yaitu 24,14% atau 3.568 ha. Morfologi wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai dan berbukit dan bergelombang.

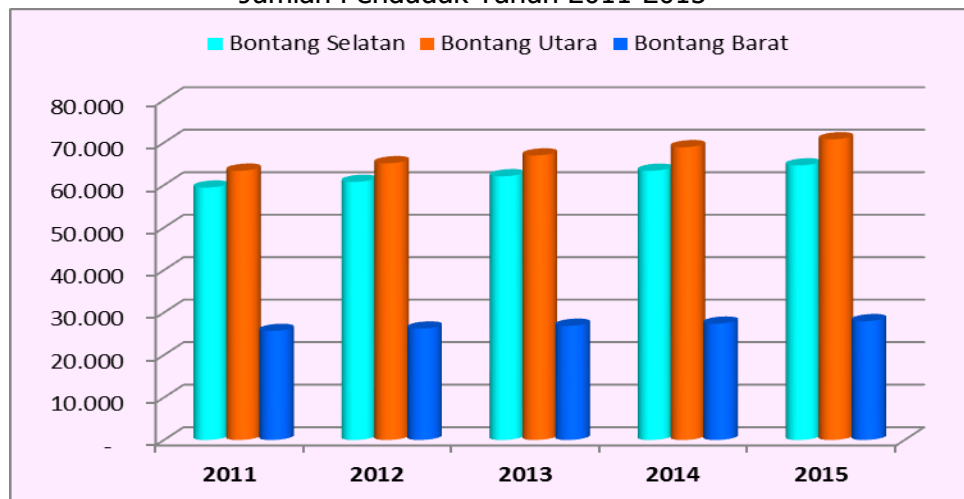
Sebagai daerah khatulistiwa, Kota Bontang dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang dicirikan dengan hujan yang terjadi sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 23 – 30⁰C. Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23–34 ⁰C dengan kelembaban udara

antara 55–97 persen. Curah hujan sebesar 176,00 – 200,00 mm/th dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau hampir tidak ada. Data curah hujan bulanan, kisaran antara 128,30 - 222,65 mm. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Juni dan terendah terjadi pada bulan September.

2. Demografis

Jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2011-2015 tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat.

Gambar. 1.3
Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015



Jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 14.914 jiwa yaitu dari 148.412 jiwa pada tahun 2011 menjadi sebanyak 163.326 pada tahun 2015. Jumlah penduduk pada tahun 2015 terdiri dari 85.522 (52,36%) penduduk laki-laki dan 77.804 (47,64%) penduduk perempuan. Sedangkan pertambahan penduduk Kota Bontang berdasarkan jenis kelamin tahun 2011 sampai tahun 2015, laki-laki 7.808 jiwa dan perempuan 7.107 jiwa.

Penyebaran penduduk Kota Bontang tahun 2015 yaitu untuk Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 64.621 jiwa (39,57%); Bontang Utara sebanyak 70.751 jiwa (43,32%) dan Bontang Barat sebanyak 27.954 jiwa (17,12%). Kepadatan penduduk Kota Bontang yaitu 1.105/km.

Rasio ketergantungan total penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar 47 per seratus penduduk. Dengan rasio sebesar ini, artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Bontang menanggung beban sebanyak 47 penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >65 tahun). Rasio ketergantungan total ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (<15 tahun) sebesar 44,76% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 2,01%. Ditinjau dari kelompok umur, pada tahun 2015 dari jumlah penduduk yang sebesar 163.326 jiwa terdapat 49.805 jiwa penduduk berusia dibawah 15 tahun atau 30,49%, 2.239 jiwa penduduk berusia diatas 65 tahun atau 1,37% dan 111.282 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 68,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk usia produktif (68,13%) di Kota Bontang masih cukup tinggi jika dibandingkan penduduk usia tidak produktif (46,77%) sehingga dengan kesempatan kerja yang ada dan Sumber Daya Manusia yang handal maka penduduk usia produktif masih bisa menanggung penduduk usia tidak produktif dengan baik.

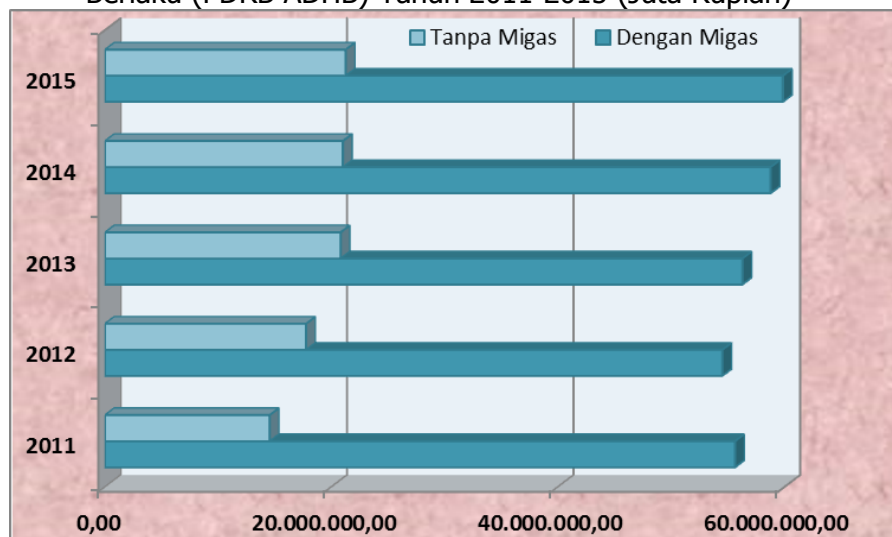
3. Kondisi Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sejumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PRDB menurut tahun 2010 diukur berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

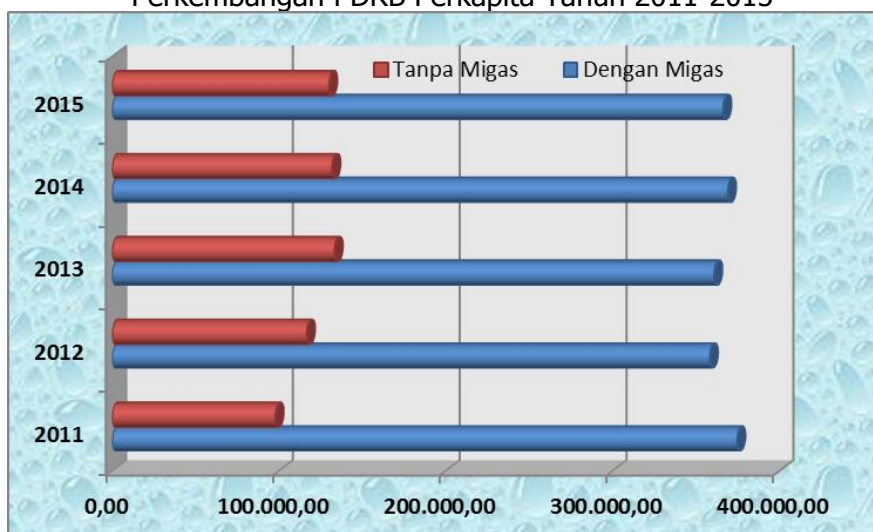
Gambar. 1.4
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)



PDRB perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu

daerah, yang secara agregat dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita memberikan informasi pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga barang dan jasa yang berlaku dipasar.

Gambar 1.5
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2011-2015



b. Struktur Perekonomian

Ketergantungan Kota Bontang terhadap industri pengolahan gas alam cair masih cukup besar. Kondisi perekonomian Kota Bontang secara riil dapat dilihat pada PDRB tanpa migas.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tanpa migas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut : 4,85% pada tahun 2011; 15,62% pada tahun 2012; 8,64% pada tahun 2013;

3,71% pada tahun 2014; serta 7,74% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut tidak lepas dari kenaikan maupun penurunan produksi pada semua sektor dan sub sektor pembentuk PDRB. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB tanpa migas.

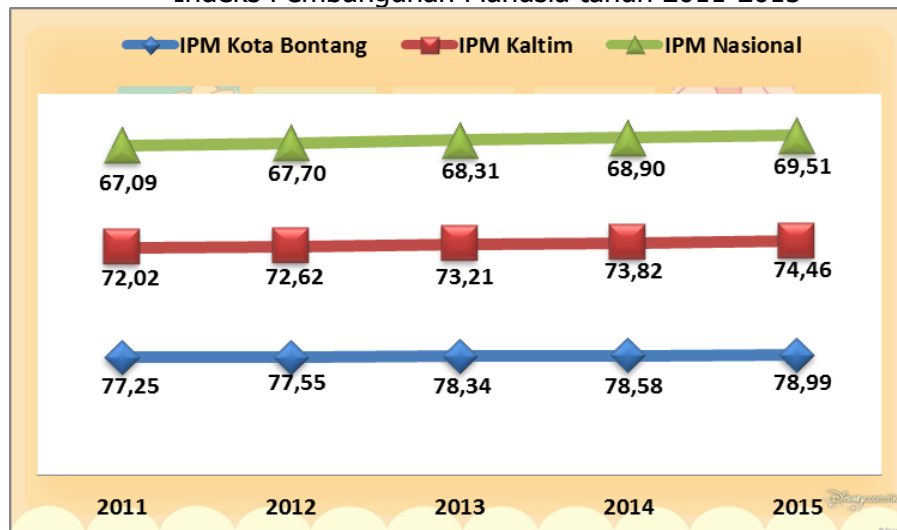
4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari 4 (empat) indikator, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahun.

Capaian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Bontang sampai dengan tahun 2015 telah mengalami peningkatan.

Berikut adalah gambaran Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur dan Indeks Pembangunan Manusia Nasional:

Gambar. 1.6
Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2015



C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
- BAB VII : PENUTUP



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Pembangunan Kota Bontang 2011–2016 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”**. Dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Bontang, visi pembangunan dalam RPJMD 2011-2016 ini merupakan penjabaran pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Bontang 2005 - 2025. Dengan visi pembangunan ini diharapkan akan mengarahkan proses dan tahapan pembangunan untuk mewujudkan harapan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Bontang. Sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka penetapan kebijakan pembangunan Kota Bontang tetap mengacu dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan secara vertikal selaras dengan RPJM Nasional 2009-2013 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2018.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, dituntut adanya komitmen dan dukungan semua pihak sehingga pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya Kota Bontang yang merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan

masyarakat sebagai "*main goal*" dari visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun makna dari butir-butir visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berbudi Luhur dimaksudkan sebagai suatu karakter masyarakat yang berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat adalah cinta kebenaran, kesabaran, kasih sayang, kederwanan, dan keberanian.

Maju dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang memiliki daya saing dan unggul baik dalam skala regional maupun nasional dalam berbagai bidang pembangunan.

Adil dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dapat mewujudkan pemerataan distribusi dan akses terhadap sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan.

Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat Kota Bontang yang secara lahiriah dan batiniah mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalankan kehidupan.

2. Misi

Misi pembangunan Kota Bontang 2011-2016, yakni:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.



Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan profesional.

Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dalam arti berakhlak mulia dan profesional merupakan suatu yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang menuntut sumberdaya manusia untuk lebih berketerampilan, berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

b. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik.

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga keadilan dan kepentingan masyarakat luas selalu diutamakan, meningkatkan martabat dan integritas bangsa, dan pada akhirnya makin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan

pembangunan di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga seiring dengan meningkatnya kualitas dan keletarian lingkungan hidup Kota Bontang keberlanjutan pembangunan di daerah ini dapat lebih terjamin.

- d. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuhkembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat regional, nasional dan internasional.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

MISI	TUJUAN	SASARAN
V I S I : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONTANG YANG BERBUDI LUHUR, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA		
Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang Yang Berakhlak Mulia Dan Profesional	1. Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Berakhlak Mulia, memiliki nilai-nilai kebenaran, kesabaran, kasih sayang, kedermawaman dan keberanian.	1.1. Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat 1.2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan 1.3. Meningkatnya kurikulum mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, Bobot Kurikulum Pendidikan Agama dan Budi Pekerti pada Sekolah Negeri maupun Swasta

MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Sehat	2.1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Sehat 2.2. Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas SDm Kesehatan 2.3. Meningkatnya Pola Hidup Sehat Masyarakat
	3. Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Produktif dan Berdaya Saing	3.1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Produktif dan Berdaya Saing
	4. Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia	4.1. Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
	5. Mengembangkan & Melestarikan Seni Budaya Tradisional	5.1. Berkembang dan lestariannya Seni Budaya Tradisional 5.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Masyarakat
	6. Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang	6.1. Meningkatnya Organisasi dan Kegiatan Pemuda dalam Pembangunan 6.2. Terlaksananya Pembangunan Balai Remaja (Graha) (selain milik swasta) sebanyak 1 unit
	7. Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dalam Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang	7.1. Meningkatnya Peran Organisasi Keolahragaan dalam Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang
	8. Pengembangan Pengarusutamaan Gender Melalui Fasilitas Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan Gender dalam Berbagai	8.1. Berkembangnya Pengarusutamaan Gender melalui Fasilitas Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai

MISI	TUJUAN	SASARAN
	Bidang Kehidupan serta perlindungan Anak Remaja dan Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi 9. Pengembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 10. Pengembangan Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat 11. Meningkatkan Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah	Bidang Kehidupan serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi 9.1. Berkembangnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 10.1. Berkembangnya Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca masyarakat 11.1. Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah
Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Yang Baik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 1.2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 1.3. Aparatur Pengawas/pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi mencapai 100%. 1.4. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% 2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan publik

MISI	TUJUAN	SASARAN
	3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3.1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah 3.2. Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai yang mencapai 100% 3.3. Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan 3.4. Meningkatnya manajemen kepegawaian daerah
	4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif	4.1. Meningkatnya kinerja lembaga lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan 4.2. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan
	5. Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah.	5.1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah
	6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.	6.1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
	7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta kewaspadaan dini terhadap potensi bencana	7.1. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 7.2. Terwujudnya Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Bencana 7.3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dalam Masyarakat
	8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan pemerintahan	8.1. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Yang Efektif dan Efisien
	9. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka penyediaan data dan informasi kependudukan	9.1. Terwujudnya administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

MISI	TUJUAN	SASARAN
	sebagai acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan.	
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mewujudkan Kota Bontang yang Bersih Hijau dan Asri 2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 3. Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta penataan Ruang	1.1. Terwujudnya Kota Bontang yang Bersih Hijau dan Asri 2.1. Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan 2.2. Meningkatnya Pengendalian dan Pemantauan Mutu Sumber Air menjadi 90% 2.3. Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjadi 42,5% 2.4. Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan 2.5. Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan pengelolaan Air Limbah menjadi 10% 3.1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penataan Ruang
Misi Keempat : Memperkuat Struktur Ekonomi dan Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air Bersih Serta Infrastruktur Lainnya	1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan	1.1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 2.1. Meningkatnya Akses Pelayanan dan Sumber Pendanaan UMKM 2.2. Meningkatnya Aktivitas dan Kualitas Manajemen Koperasi menjadi 85% 2.3. Terwujudnya Penataan Pasar Tradisional sebanyak 3 Unit 2.4. Ketersediaan pangan Utama sebesar 100%

MISI	TUJUAN	SASARAN
		2.5. Meningkatnya Pelayanan, Pengawasan dan Penertiban di Bidang Usaha dan Sumber Daya Mineral 2.6. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 25% 2.7. Meningkatnya Produksi Perikanan sebesar 10% 2.8. Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan Petani dan Peternak menjadi 20% 2.9. Meningkatnya Nilai Ekspor menjadi US\$ 23.146.383.348 2.10. Meningkatnya Jumlah Industri kecil dan Menengah sebesar 5%
	3. Penciptaan Iklim Berinvestasi dan Penanaman Modal serta Sektor Ekonomi Basis	3.1. Penciptaan Iklim Investasi dan Penanaman Modal serta Sektor Ekonomi Basis 3.2. Terbangunnya Kawasan Industri Baru Kota Bontang
	4. Penanggulangan Masalah Kemiskinan	4.1. Tertanggulangnya Permasalahan Kemiskinan

B. STRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BONTANG

Dalam rangka pencapaian visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011–2016 yang merupakan penjabaran visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011–2016 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah. Kebijakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan program Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011–2016 sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan hal tersebut pemerintah Kota Bontang menyusun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kota Bontang 2011–2016 pada setiap misi yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Kota Bontang yang Berakhlak Mulia dan Profesional.

Untuk melaksanakan misi tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Berakhlak Mulia, Memiliki Nilai-Nilai Luhur, Cinta Kebenaran, Kesabaran, Kasih Sayang, Kedermawanan, dan Keberanian.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pembiayaan pendidikan melalui BOSNAS, DBO, beasiswa berprestasi dan beasiswa siswa tidak mampu, kuota warga tidak mampu, dan subsidi satuan pendidikan.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- 5) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Agama dan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)
- 6) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 3) Program Pendidikan Menengah

- 4) Program Pendidikan Non Formal
 - 5) Program Pendidikan Luar Biasa
 - 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 8) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan
 - 9) Program Pembinaan Olahraga sebagai Bagian Fungsi Pendidikan
 - 10) Program Pembinaan Kesenian dan Keagamaan sebagai Bagian Fungsi Pendidikan
 - 11) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan
 - 12) Program Pemerataan Mutu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - 13) Program Pengembangan Kebermaknaan Pendidikan
 - 14) Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 15) Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan
 - 16) Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang
 - 17) Program Pendidikan Inklusif
 - 18) Program Pendidikan Technopark
- b) Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Sehat.
- Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan peningkatan pemantauan terhadap kelompok rawan terutama ibu dan bayi
 - 2) Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pengembangan regulasi bidang kesehatan

- 3) Revitalisasi peran Puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
- 4) Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 5) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- 6) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 7) Program obat dan perbekalan kesehatan
- 8) Program pengembangan lingkungan sehat
- 9) Program penanggulangan masalah kesehatan, wabah dan bencana
- 10) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- 11) Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
- 12) Program pengembangan manajemen kesehatan
- 13) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- 14) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- 15) Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
 - 16) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - 17) Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - 18) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - 19) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
 - 20) Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
- c) Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Produktif dan Berdaya Saing.
- Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif
 - 2) Fasilitasi informasi bursa kerja
 - 3) Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga / serikat perburuhan
- Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :
- 1) Program Penataan Kebijakan Ketenagakerjaan
 - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 4) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d) Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Promosi sampai kepada tingkat kepala keluarga
 - 2) Pemantapan dan pemahaman 4 pilar program KB (PUP, Pengaturan Kelahiran, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)
 - 3) Sistem pelayanan/pengendalian kependudukan terpadu (terkait Disdukcapil)
 - 4) Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan
 - 5) Fasilitasi dan penguatan profesionalisme tenaga penyuluh
- Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 3) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 4) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- 5) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- 6) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- 7) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- 8) Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR
- 9) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

10) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

e) Mengembangkan dan Melestarikan Seni Budaya Tradisional

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan kebudayaan lokal

2) Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan
Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3) Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

6) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

7) Program Pengembangan Nilai Budaya

f) Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan

2) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga

Implementasi kebijakan tersebut selama tahun 2011 – 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - 2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - 4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 7) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- g) Meningkatkan Peran Organisasi Keolahragaan dalam Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga
- 2) Fasilitasi kelompok dan atlet berprestasi
- 3) Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga
- 4) Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- h) Pengembangan Pengarusutamaan Gender melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesenjangan, dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Kehidupan serta Perlindungan

Anak, Remaja, dan Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 2) Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan
- 3) Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan
- 4) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- 5) Fasilitasi dan advokasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 6) Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak
- 7) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
- 8) Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
- 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- 6) Program Pengembangan Pusat pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR
 - 7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV AIDS
 - 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- i) Pengembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan HIV AIDS
- 3) Penguatan peran serta masyarakat dan lembaga peduli permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masalah sosial lainnya
- 4) Pengembangan rasa kesetiakawanan sosial

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 5) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 6) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

- 7) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- 8) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- j) Pengembangan Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
 - 2) Pengembangan manajemen perpustakaan modern
- Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui "Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan".
- k) Meningkatkan Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan masyarakat
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasarana wilayah

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 3) Program Keberdayaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Pedesaan
- 5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- 6) Program Pelatihan bagi Rumah Tangga Miskin
- 7) Program Upaya Perubahan Sikap, Tingkah Laku, dan Moral
- 8) Program Pendataan Rumah Tangga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 9) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

2. Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan misi tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif
- 2) Implementasi e-Audit
- 3) Implementasi e-Government
- 4) Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- 5) Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pengawas
- 6) Pengembangan akses masyarakat dalam penyampaian pengaduan

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
- 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 6) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 8) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
- 9) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Pengembangan norma dan standar pelayanan publik
- 3) Penataan norma dan standar prosedur kerja.

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 3) Program Peningkatan Tata Pemerintahan

c) Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kecakapan, ketrampilan, dan kompetensi SDM aparatur yang berakhlak mulia dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan sesuai analisis kebutuhan
- 2) Pengembangan akuntabilitas kinerja
- 3) Optimalisasi peran lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam peningkatan profesionalisme aparatur
- 4) Pengembangan budaya kerja dan karakter aparatur
- 5) Penataan kelembagaan
- 6) Pengembangan pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi Anjab, ABK, SKJ, dan Kamus Jabatan
- 7) Pengembangan pelayanan yang dapat diakses cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pendidikan Kedinasan
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 3) Program Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
 - 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 6) Program Penataan Kelembagaan
- d) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif

- 2) Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Pengembangan peraturan perundang-undangan dan kerja sama pemerintah daerah
- 4) Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 3) Program Penataan Perundang-Undangan
- 4) Program Fasilitasi Pelayanan dan Bantuan Hukum
- 5) Program Peningkatan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah
- 6) Program Penataan Daerah Otonomi
- 7) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- 8) Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
- 9) Program Peningkatan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- 10) Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- 11) Program Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
- 12) Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/ Prasarana dan Lingkungan Kecamatan
- 13) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- 14) Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

15) Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

16) Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan Kelurahan

e) Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 2) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu
- 3) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan aset daerah secara terpadu

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
- 2) Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah

f) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah
- 2) Fasilitasi perencanaan strategis bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, pengembangan wilayah, dan infrastruktur
- 3) Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR)
- 4) Pengembangan data dan informasi daerah

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengembangan Data/Informasi
- 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- 9) Program Perencanaan Tata Ruang
- 10) Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
- 11) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 12) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 13) Program Penelitian dan Pengembangan
- 14) Program Kerja Sama Pembangunan
- 15) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
- 16) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 17) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 18) Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 19) Program Pemanfaatan Ruang
- 20) Program Kerjasama Pembangunan

- g) Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat serta Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Bencana.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Fasilitasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana
- 3) Fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 4) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
- 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 8) Program Pengembangan Wawasan Pembangunan

h) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Daerah.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah pembinaan dan penyelenggaraan akuisisi, pengolahan, dan pelestarian serta pelayanan arsip sebagai sumber informasi.

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- 4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

i) Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi Secara Nasional Dalam Rangka Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan sebagai Acuan bagi Perumusan Kebijakan dan Pembangunan

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan misi tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a) Mewujudkan Kota Bontang yang Bersih, Hijau, dan Asri.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan
- 2) Pemenuhan sarana prasarana persampahan
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
- 4) Gerakan Bontang Green dan one man five tree
- 5) Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH
- 6) Pembangunan dan revitalisasi taman kota dan RTH
- 7) Penanaman pohon di catchment area Kota Bontang
- 8) Perumusan kebijakan ruang terbuka hijau

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - 2) Program pengelolaan ruang terbuka hijau pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 5) Program peningkatan sarana prasarana aparatur dan administrasi pertanahan
 - 6) Program Perencanaan Penataan Ruang
 - 7) Program Pemaanfaatan Ruang
 - 8) Program Pemanfaatan Ruang
 - 9) Program pengelolaan ruang terbuka hijau
- b) Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan
- 2) pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan industri
- 3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 4) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara adil
- 5) Fasilitasi pengelolaan air limbah bagi masyarakat tidak mampu

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - 2) Program peningkatan pengendalian polusi
 - 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- c) Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penataan Ruang.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi rehabilitasi terumbu karang
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan
- 3) Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan
- 5) Fasilitasi rehabilitasi hutan lindung
- 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan
- 7) Penyusunan Rencana Tata Ruang Rinci dan Zonasi
- 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang

- 9) Pengkajian potensi air bawah tanah dan recharge dan discharge area
- 10) Pemantauan penurunan air muka bawah tanah
- 11) Pembuatan sumur pantau
- 12) Pembuatan sumur imbuhan (injection well)

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- 2) Program rehabilitasi hutan dan lahan
- 3) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- 4) Program perencanaan penataan ruang
- 5) Program pemanfaatan ruang
- 6) Program pengendalian pemanfaatan ruang
- 7) Program lingkungan sehat perumahan
- 8) Program perencanaan dan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil
- 9) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- 10) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 11) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

4. Memperkuat Struktur Ekonomi dan Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air Bersih, dan Infrastruktur Lainnya.

Untuk melaksanakan misi tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Jalan dan Jembatan
- 2) Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 3) Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Normalisasi saluran drainase perkotaan
- 5) Pengembangan waduk dan dam pengendali
- 6) Normalisasi saluran drainase perkotaan
- 7) Penurapan sungai
- 8) Pembuatan drainase
- 9) Fasilitas pembangunan dan optimalisasi Water Treatment Plant (WTP)
- 10) Fasilitas Penyediaan air minum/air bersih bagi masyarakat tidak mampu
- 11) Fasilitas pengadaan mobil pemadam kebakaran
- 12) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran
- 13) Fasilitas Pengembangan TPU Masyarakat
- 14) Fasilitas dan Pembangunan TPU Baru
- 15) Fasilitas perbaikan rumah dengan bantuan aladin (atap, lantai dan dinding)
- 16) Bedah Kampung
- 17) Rehab/pemeliharaan rumah tidak layak huni
- 18) Pemasangan tiang dan jaringan lampu jalan
- 19) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
- 20) Pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 21) Pembangunan sistem informasi pertanahan
- 22) Peningkatan administrasi pertanahan

23) penataan administrasi pertanahan

24) Fasilitasi peningkatan penyediaan energi listrik

25) Pengembangan energi listrik alternatif

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- 3) Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan
- 5) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
- 6) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- 7) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- 8) Program Pengendali Banjir
- 9) Program Perbaikan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- 10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 11) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 12) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- 13) Program Penataan Permukiman Lingkungan
- 14) Program Pengembangan Perumahan
- 15) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 17) Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan

- 18) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 19) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 20) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
 - 21) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - 22) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu lintas
 - 23) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 24) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan
 - 25) Program Peningkatan Administrasi Pertanahan
 - 26) Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Perbatasan
 - 27) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi
 - 28) Program Fasilitas Peningkatan Cakupan Pelayanan Listrik Masyarakat
 - 29) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
 - 30) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
 - 31) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
- b) Meningkatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan.
Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Fasilitas permodalan UMKM

- 2) Peningkatan akses permodalan usaha
- 3) Penerapan manajemen modern pada koperasi
- 4) Penyehatan koperasi
- 5) Fasilitasi permodalan koperasi
- 6) Pendampingan usaha produktif koperasi
- 7) Revitalisasi pasar-pasar tradisional
- 8) Penataan PKL
- 9) Ketersediaan dan cadangan pangan
- 10) Pengembangan pangan lokal (non beras)
- 11) Penanganan kerawanan pangan
- 12) Meningkatkan konsumsi bahan pangan yang seimbang
- 13) Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas untuk rumah tangga
- 14) Pengawasan kegiatan penambangan galian C
- 15) Monitoring eksplorasi air bawah tanah
- 16) Fasilitasi pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan
- 17) Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan
- 18) Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata
- 19) Pengembangan event wisata unggulan
- 20) Pengembangan teknologi penangkapan tangkap dan budidaya perikanan yang efektif
- 21) Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari
- 22) Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan
- 23) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya skala menengah dan besar
- 24) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir
- 25) Fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia
- 26) Fasilitasi usaha peningkatan ekspor

27) Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis klaster

28) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
- 2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 4) Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- 5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
- 7) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 8) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 9) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- 10) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 11) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 13) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 14) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 15) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 16) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 17) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- 18) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 19) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 20) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana dan Prasarana Energi
 - 21) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
 - 22) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - 23) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 24) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 25) Program Pengembangan Kemitraan
 - 26) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - 27) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
 - 28) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 29) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - 30) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
 - 31) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 32) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - 33) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
- c) Penciptaan Iklim Berinvestasi dan Penanaman Modal serta Sektor Ekonomi Basis.
- Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan pelayanan perijinan investasi

- 2) Pengembangan kewirausahaan dan produk unggulan yang berdaya saing.
- 3) Fasilitasi kerjasama dan promosi antar pelaku usaha
- 4) Penyediaan lahan untuk kawasan industri baru
- 5) Perencanaan kawasan industri baru Bontang Lestari
- 6) Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola kawasan industri.

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2015 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan
- 5) Program Perencanaan Penataan Ruang
- 6) Program Penataan Struktur Industri

d) Penanggulangan Masalah Kemiskinan.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan melalui bantuan sosial berbasis keluarga (Bantuan Langsung)
- 2) Menurunkan angka kemiskinan melalui bidang pemberdayaan masyarakat (pelatihan)
- 3) Menurunkan angka kemiskinan melalui bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (permodalan)

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 7) Program Pelatihan Berusaha bagi Keluarga Miskin
- 8) Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil
- 9) Program Pendidikan Nonformal
- 10) Program Pelatihan bagi Rumah Tangga Miskin
- 11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 12) Program Keluarga Berencana
- 13) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya
- 14) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 15) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2015 merupakan penjabaran Arah Kebijakan Umum pembangunan Kota Bontang dan tindak lanjut hasil analisis isu-isu strategis dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016.

Arah Kebijakan Umum pembangunan Kota Bontang, menempatkan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai prioritas pelaksanaan pembangunan, untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencakup

transportasi, perumahan, gedung perkantoran pemerintah, ketenagalistrikan, telekomunikasi, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan.

Sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan tersebut, program unggulan pembangunan berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 adalah:

- a) Membangunan infrastruktur yang mencakup listrik dan instalasi air bersih.
- b) Pendidikan dan kesehatan
- c) Bantuan Rp. 50 juta per RT
- d) Kesempatan bekerja/berusaha
- e) Lingkungan hidup
- f) Membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan program unggulan pembangunan Walikota Terpilih di atas, ditetapkan program-program prioritas tahunan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan pemerintah (RKPD).

Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- Pengembangan teknologi informasi
- Pengembangan manajemen pendidikan dan pelayanan fungsi pendidikan
- Pengembangan manajemen dan pelayanan kesehatan masyarakat
- Peningkatan cakupan layanan air bersih, listrik dan energi lainnya
- Pengembangan iklim investasi dan peluang usaha

- Penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat
- Pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup.
- Peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- Pengembangan teknologi informasi



BAB III

KEBIJAKAN UMUM DAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas

tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bontang ditetapkan APBD TA 2015 dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 Tanggal 8 Desember 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah sebagaimana dituangkan dalam APBD Kota Bontang merupakan dasar perhitungan anggaran biaya belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian secara arif dan bijaksana, sehingga dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana prinsip pelaksanaan otonomi daerah yakni otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan semua urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kerangka kebijakan pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang menetapkan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2015, sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada anggaran 2015 menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi;
- e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah merupakan elemen penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik, dan bila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bontang.

Sektor Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memiliki peranan yang penting dan merupakan sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya upaya ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun upaya intensifikasi yang dilakukan melalui perbaikan ke dalam secara terus menerus serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, adalah mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik ditubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bontang maupun pada setiap perusahaan daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya dibidang keuangan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap semua sumber Pendapatan Daerah yang potensial, yang antara lain dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;

- b. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah, khususnya percepatan penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
- c. Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar;
- d. Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalan/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
- f. Membuat kajian akademik mengenai potensi Pajak Daerah di Kota Bontang.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Sejak terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom sampai dengan saat ini, penerimaan pendapatan daerah sebagian besar masih bersumber dari dana perimbangan keuangan, terutama dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam, yang merupakan sumber pendapatan utama. Sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusinya terhadap APBD Kota Bontang relatif masih kecil, meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan realisasi yang cukup signifikan.

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan APBD Kota Bontang Tahun 2013 – 2015

No.	Uraian	2013	2014	2015	Trend
1	PENDAPATAN	1.409.777.375.146,63	1.455.043.424.236,08	1.352.095.857.339,46	Menurun 92,92%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	125.663.166.385,87	160.367.872.157,65	142.424.670.015,36	Menurun 88,81%
1.1.1	Pajak daerah	51.768.747.070,00	85.510.814.538,48	56.524.423.482,00	Menurun 66,10%

No.	Uraian	2013	2014	2015	Trend
1.1.2	Retribusi daerah	5.729.690.011,51	4.834.719.564,38	6.699.402.397,14	Meningkat 138,57%
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	7.243.464.076,74	6.300.524.567,09	5.154.371.245,26	Menurun 81,81%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	60.921.265.227,62	63.721.813.487,70	74.046.472.890,96	Meningkat 116,20%
1.2.	Dana Perimbangan	1.004.128.296.521,00	1.028.580.014.543,00	1.004.702.597.328,00	Menurun 97,68%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	864.018.968.521,00	875.394.238.543,00	797.314.031.328,00	Menurun 91,08%
1.2.2	Dana alokasi umum	140.109.328.000,00	153.185.776.000,00	104.682.726.000,00	Menurun 68,34%
1.2.3	Dana alokasi khusus		-	102.705.840.000,00-	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	279.985.912.239,76	266.095.537.535,43	204.968.589.996,10	Menurun 77,03%
1.3.1	Hibah		-	-	-
1.3.2	Dana darurat		-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	166.434.296.600,00	146.236.046.600,00	145.108.405.050,00	Menurun 99,23%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	24.694.230.000,00	37.364.636.000,0	28.887.693.000,00	Meningkat 77,31%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	86.532.600.000,00	78.989.105.250,00	28.905.300.000,00	Menurun 36,59%
1.3.6	Penerimaan Lain-lain	2.324.785.639,76	3.505.749.685,43	2.067.191.946,10	Meningkat 58,97%

Sumber : DPPKA Kota Bontang 2016

Memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2015, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tercapai sebesar Rp.1.352.095.857.339,46, lebih rendah dari target sebesar Rp.1.613.505.415.987,47. Berdasarkan sumber penerimaan pendapatan daerah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

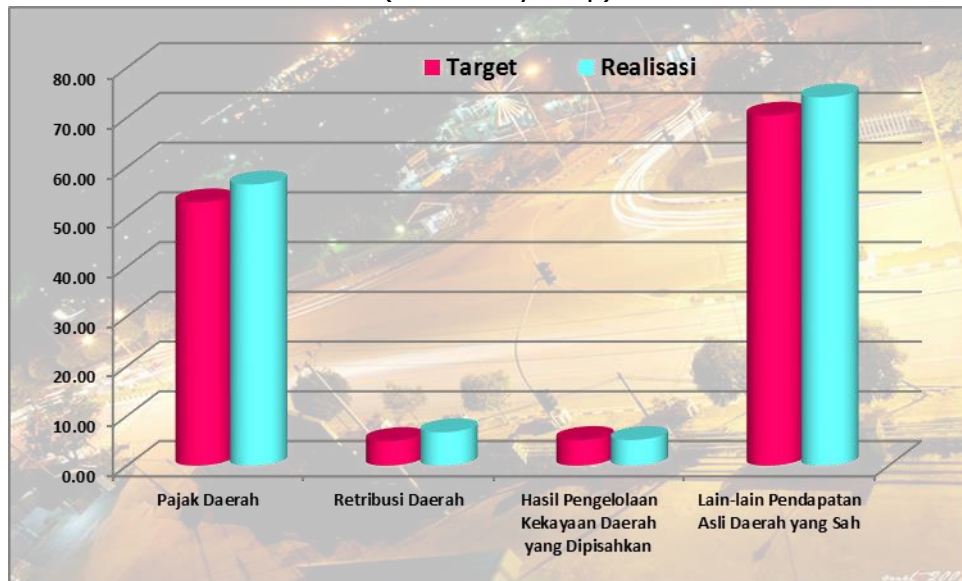
- a. Penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup empat pos penerimaan yakni Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, realisasinya sebesar Rp.142.424.670.015,36 atau 106,76% dari target penerimaan sebesar Rp.133.406.475.244,47. Hal ini menunjukkan pula adanya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan dari tahun anggaran 2014 sebesar Rp.160.367.872.157,65.

Kontribusi yang cukup signifikan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Hasil Pajak Daerah, yakni dari target sebesar Rp.52.930.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.56.524.423.482,00 atau sebesar 106,79%. Besarnya kontribusi Hasil Pajak Daerah tersebut disebabkan adanya penerimaan yang melebihi target dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB serta berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Peningkatan penerimaan dari beberapa Pajak Daerah tersebut diantaranya disebabkan adanya penambahan beberapa wajib pajak restoran yang cukup tinggi realisasi pembayarannya, bertambahnya objek pajak hiburan dan pajak penerangan jalan, serta adanya pemutakhiran data PBB P2. Selain itu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Hasil Retribusi Daerah dari target sebesar Rp.4.940.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.699.402.397,14 atau sebesar 135,60%. Penerimaan Retribusi Daerah yang melebihi target tersebut berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan

Retribusi Perijinan Tertentu. Jenis retribusi yang memiliki kontribusi cukup besar adalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi tempat Khusus Parkir. Hal ini menunjukkan semakin baiknya proses pemungutan retribusi, baik dari sisi penerimaan maupun kesadaran wajib retribusi di Kota Bontang. Sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba Deviden BPD Kalimantan Timur, dari target sebesar Rp.5.154.371.245,26 realisasinya tercapai sebesar Rp.5.154.371.245,26 atau sebesar 100,00% dari target. Tercapainya target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan disebabkan sektor ini diperoleh dari deviden atas proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada BPD Kaltim, porsi Bagi Hasil deviden berbanding lurus dengan jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang pada BPD Kaltim. Selanjutnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dari target sebesar Rp.70.381.503.999,47 terealisasi sebesar Rp.74.046.472.890,96 atau sebesar 105,21%.

Gambar. 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015
(dalam milyar Rp)



- b. Selanjutnya, penerimaan dari sumber Dana Perimbangan yang mencakup pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, pos Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dari target penerimaan sebesar Rp.1.230.328.430.693,00 terealisasi sebesar Rp.1.004.702.597.328,00 atau sebesar 81,66% dari target yang telah ditetapkan.

Penerimaan dari pos Bagi hasil pajak dan bukan pajak, dari target sebesar Rp.1.021.763.404.693,00 terealisasi sebesar Rp.797.314.031.328,00 atau sebesar 78,03% dari target yang ditetapkan.

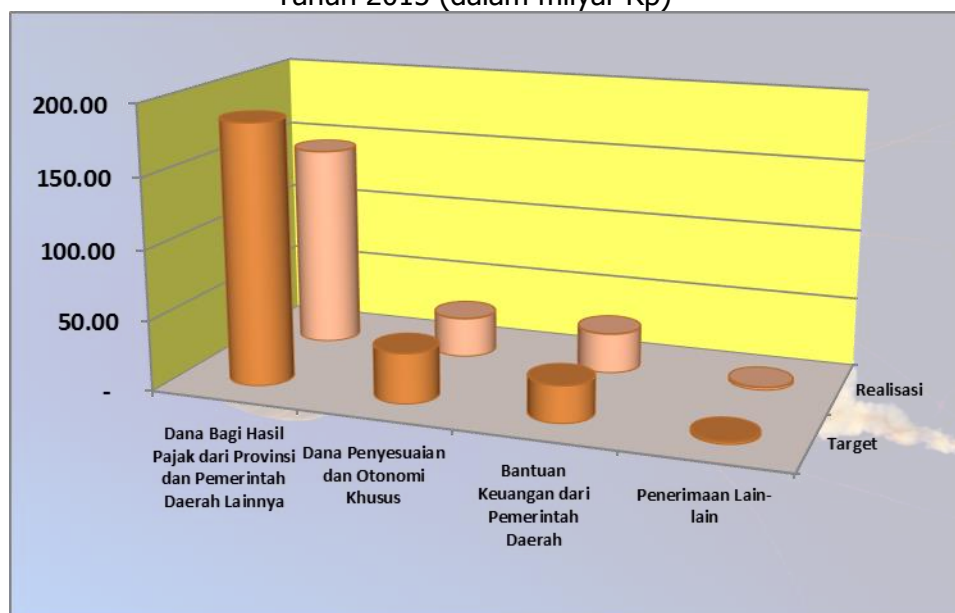
Selanjutnya penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum sebesar Rp.104.682.726.000,00 telah memenuhi target yang ditentukan atau sebesar 100%.

Gambar. 3.2. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015
(dalam milyar Rp)



- c. Penerimaan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dari target sebesar Rp.249.770.510.050,00 terealisasi sebesar Rp.204.968.589.996,10 atau tercapai sebesar 82,06 % dari target. Dari Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya tidak tercapai target yakni sebesar Rp.145.108.405.050,00 atau sebesar 78,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.185.369.720.050,00. Sedangkan penerimaan Dana Penyesuaian tercapai sebesar Rp.28.887.693.000,00 atau 80,25% dari target 35.995.490.000,00 yang ditentukan. Sedangkan realisasi target penerimaan pendapatan daerah dari pos Bantuan Keuangan dari Provinsi yang ditetapkan sebesar Rp.28.905.300.000,00 tercapai sebesar 109,47% dari target RP.26.405.300.000,00 yang ditetapkan. Dari pos Penerimaan Lain-Lain dari target sebesar Rp.2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.067.191.946,10 atau 103,36% dari target yang sudah ditetapkan.

Gambar. 3.3. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015 (dalam milyar Rp)



Secara rinci target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2015

No.	Uraian	Pendapatan Daerah TA 2015		%
		Target	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	133.406.475.244,47	142.424.670.015,36	106,76
1.1.	Pajak Daerah	52.930.000.000,00	56.524.423.482,00	106,79
	Pajak Hotel	950.000.000,00	889.678.196,00	93,65
	Pajak Restoran	6.500.000.000,00	7.220.898.451,00	111,09
	Pajak Hiburan	450.000.000,00	461.650.819,00	102,59
	Pajak Reklame	700.000.000,00	588.974.175,00	84,14
	Pajak Penerangan Jalan	20.500.000.000,00	21.449.474.846,00	104,63
	Pajak Parkir	80.000.000,00	61.384.124,00	76,73
	Pajak Air Tanah	6.750.000.000,00	6.091.765.626,00	90,25
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	18.956.875,00	100,00

No.	Uraian	Pendapatan Daerah TA 2015		%
		Target	Realisasi	
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.500.000.000,00	11.669.567.012,00	101,47
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.500.000.000,00	8.072.073.358,00	146,76
1.2.	Retribusi Daerah	4.940.600.000,00	6.699.402.397,14	135,60
	Retribusi Jasa Umum	2.175.000.000,00	2.017.240.295,00	92,75
	Retribusi Jasa Usaha	754.600.000,00	866.743.181,50	114,86
	Retribusi Perijinan Tertentu	2.011.000.000,00	3.815.418.920,64	189,73
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.154.371.245,00	5.154.371.245,26	100,00
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.154.371.245,00	5.154.371.245,26	100,00
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	70.381.503.999,47	74.046.472.890,96	105,21
	Penerimaan Jasa Giro	6.084.999.999,47	4.991.111.979,68	82,02
	Pendapatan Bunga Deposito	8.000.000.000,00	11.844.863.013,48	148,06
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	250.879.510,00	100,00
	Pendapatan Denda Pajak	200.000.000,00	257.571.128,80	128,79
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	170.000.000,00	168.802.150,00	99,30
	Pendapatan dari Pengembalian	3.000.000.000,00	773.117.014,00	25,77
	Pendapatan dari BLUD	49.500.000.000,00	51.187.938.095,00	103,41
	Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.426.504.000,00	4.572.190.000,00	133,44
2	Dana Perimbangan	1.230.328.430.693,00	1.004.702.597.328,00	81,66
2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1.021.763.404.693,00	797.314.031.328,00	78,03
	Bagi Hasil Pajak	222.577.474.850,00	165.208.479.551,00	74,23
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	799.185.929.843,00	632.105.551.777,00	79,09
2.2.	Dana Alokasi Umum	104.682.726.000,00	104.682.726.000,00	100,00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	103.882.300.000,00	102.705.840.000,00	

No.	Uraian		Pendapatan Daerah TA 2015		%
			Target	Realisasi	
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		249.770.510.050,00	204.968.589.996,10	109,04
	3.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	185.369.720.050,00	145.108.405.050,00	78,28
	3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.995.490.000,00	28.887.693.000,00	80,25
	3.3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	26.405.300.000,00	28.905.300.000,00	109,47
	3.4.	Penerimaan Lain-Lain	2.000.000.000,0	2.067.191.946,10	103,36
	Jumlah		1.613.505.415.987,47	1.352.095.857.339,46	83,80

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang 2015

Disamping penerimaan yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat satu pos penerimaan lainnya, yaitu Penerimaan Daerah yang berasal dari Pembiayaan.

Rencana penerimaan dari pos ini untuk Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.345.448.213.309,53 yang merupakan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 penerimaan dari pos ini terealisasi sebesar Rp.345.448.213.309,53 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kendala dan hambatan yang terjadi dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 telah dapat diminimalisasi. Namun khusus dari penerimaan yang bersifat Dana Transfer baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut lebih disebabkan faktor kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan. Akibat terhambatnya penyaluran

dana transper utamanya dana transper dari Pemerintah Pusat berimplikasi terhadap defisitnya APBD Kota Bontang Tahun 2015. Adapun secara lebih rinci permasalahan dan solusi dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Dengan PAD yang relatif kecil, akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh sumber pembiayaan lain, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
- b. Kinerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang belum memenuhi realisasi target pendapatan sampai akhir tahun;
- c. Masih terdapat Regulasi mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat;
- d. Untuk realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan akibat dari tidak tercapainya target penerimaan Pajak dalam APBN. Hal ini tergambar dari penetapan Target Dana Bagi Hasil Pajak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015. Namun realisasi penyaluran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015

yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember Tahun 2015 dan dirilis secara resmi pada tanggal 31 Desember 2015;

- e. Adapun tidak tercapainya realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak juga diakibatkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencapai target, sehingga mempengaruhi proporsi Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga tergambar dari Penetapan Target Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015, namun dalam prakteknya penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember Tahun 2015 dan dirilis secara resmi pada tanggal 31 Desember 2015.

Berbagai permasalahan yang telah dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah, memerlukan titik temu dan upaya pemecahan masalah, sebagai berikut :

- a. Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terus menerus secara komprehensif, sebagai tindak lanjut dari Peraturan yang berlaku;
- b. Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pencapaian target kinerja

diantaranya dengan melaksanakan reviu atas Sistem Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah pelaksana pemungutan Pendapatan Daerah;

- c. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi senantiasa dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi, melakukan pemutakhiran data obyek pajak terutama yang potensial, sekaligus melakukan stimulasi atau penghargaan bagi para wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
- d. Dalam rangka memaksimalkan kinerja dan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah, maka secara rutin dilaksanakan evaluasi dan pengendalian agar terus diperoleh peningkatan pendapatan daerah;
- e. Perlu dilakukan penegakan Perda dengan pendekatan persuasif dan koordinatif dengan tim terpadu terhadap pelanggaran pembayaran pajak atau retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi regulasi secara reguler, sebagai upaya menciptakan stabilitas dan suasana yang kondusif serta kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi objektif masyarakat.
- g. Membuat Kajian mengenai Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bontang sebagai bagian dari proses intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi riil.

B. PENGELOLAAN BELANJA

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran Belanja Daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari kerangka kebijakan belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran yang bersifat kewajiban dan akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, maka anggaran belanja daerah Kota Bontang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penetapan besarnya alokasi anggaran belanja daerah tahun 2015, didasarkan pada kemampuan anggaran pendapatan daerah dan Pembiayaan Daerah serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, perencanaan Anggaran Belanja Daerah tahun 2015 diarahkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2015, dan merupakan tahun lima pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016. Disamping itu dalam perencanaan anggaran belanja daerah tersebut memperhatikan pula dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya, aspirasi dan atau tuntutan masyarakat serta dinamika masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik pada skala lokal, regional maupun nasional.

Selanjutnya, untuk maksud menjamin terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah, Pemerintah Kota Bontang menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah Kota Bontang yang diarahkan pada:

- a. Pembangunan infrastruktur daerah;
- b. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Pendidikan;
- c. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kesehatan;
- d. Penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan social;
- e. Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan;
- f. Pengembangan ekonomi masyarakat ;
- g. Peningkatan daya dukung lingkungan ;
- h. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peruntukannya;
- i. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- j. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri baru.

Prioritas pembangunan tersebut diatas diarahkan pada pencapaian visi dan misi pembangunan melalui, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang, secara bertahap dilaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai fungsi pemerintahan guna mewujudkan sumber daya manusia Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional serta meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik.

Untuk mendorong percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia tersebut, di bidang kependudukan pemerintah berupaya untuk mengembangkan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis teknologi dan jaringan informasi.

Untuk bidang pendidikan, prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2015 yaitu penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Kemudian untuk bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial, prioritas pembangunan daerah menitikberatkan pada peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya serta peningkatan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, yatim – piatu, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Besarnya perhatian pemerintah terhadap hal ini terlihat dengan adanya pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini perlu ditingkatkan karena kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas dalam arti manusia yang tangguh, sehat, cerdas, kreatif dan produktif yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan pembangunan di daerah ini.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan maka fokus dan prioritas kelima bidang tersebut di atas meliputi:

- a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal;
- e. Peningkatan manajemen dan administrasi kependudukan;
- f. Pemberian Jaminan kesehatan;
- g. Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar;
- h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- i. Pemberdayaan pemuda;
- j. Penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga secara signifikan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan perilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan maka fokus pada prioritas ini adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Peningkatan PAD;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah;
- d. Menciptakan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan;
- e. Mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Bontang.

3. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dinilai penting artinya dalam rangka menjamin terpeliharanya kualitas dan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pemanfaatan, pengendalian, pemulihan dan pelestarian, Pemerintah Kota telah dan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan maka fokus pada prioritas ini adalah :

- a) Peningkatan fungsi kawasan lindung, hutan kota dan hutan mangrove;
- b) Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
- c) Pengawasan dan Pengendalian pencemaran udara, tanah dan air;
- d) Pengendalian dan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang;
- e) Konservasi Tanah dan Air;

- f) Pengembangan wisata berbasis lingkungan hidup (ekowisata).

4. Pembangunan perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur mencakup transportasi, perumahan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan maka fokus pada prioritas ini adalah :

1. Peningkatan ketersediaan air bersih yang berkualitas;
2. Peningkatan ketersediaan energi listrik untuk rumah tangga;
3. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar dan penanggulangan banjir;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan umum Loktuan;
5. Pembangunan bandar udara komersil Kota Bontang;
6. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran drainase dilingkungan RT melalui program 50 juta/RT/tahun;
7. Pengembangan sektor industri kecil menengah dan koperasi;
8. Pengembangan sektor riil;

Berdasarkan kebijakan umum belanja daerah tersebut selanjutnya ditetapkanlah prioritas program dan kegiatan tahun 2015 serta

kegiatan-kegiatan lanjutan dari pelaksanaan program tahun anggaran sebelumnya, yang meliputi antara lain:

- a. Pembangunan Pasar Rawa indah
- b. Pembangunan Graha Pemuda;
- c. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
- d. Peningkatan Jalan Dalam Kota;
- e. Pengadaan Sarana Prasarana Labkesda;
- f. Pembangunan Rusunawa;
- g. Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang;
- h. Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kota Bontang;
- i. Peningkatan sumberdaya manusia, dilakukan melalui pembangunan gedung-gedung Sekolah, penambahan Ruang Kelas Baru beserta fasilitasnya, peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah, atas dan luar sekolah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, baik pada sekolah negeri maupun swasta, serta pembebasan biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Negeri dan keluarga miskin. Sedangkan bagi siswa sekolah swasta diberikan dalam bentuk subsidi biaya pendidikan siswa;
- j. Peningkatan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita, serta pengembangan manajemen kesehatan;

- k. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui bantuan pembebasan biaya berobat dan rawat inap, pelatihan ketrampilan, pemberian alat-alat usaha dan kerja, bantuan modal dan pembinaan usaha, bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni berupa "ALADIN" (atap, lantai dan dinding), bantuan biaya anak sekolah keluarga miskin, pinjaman modal bagi usaha kecil menengah (UKM);
- l. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang dilaksanakan melalui program pembangunan kelurahan dengan kegiatan yang mencakup bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia.

2. Target dan Realisasi Belanja

Sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Bontang TA 2015, Rencana Anggaran Belanja Daerah tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 1.952.027.334.297,00. Adapun realisasinya sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.664.595.109.458,00 atau sebesar 85,28% dari target belanja. Secara rinci, target dan realisasi anggaran belanja daerah tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang TA 2015

No.	URAIAN	Belanja Daerah TA 2015		%
		Target	Realisasi	
	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Tidak Langsung	504.496.787.640,00	436.074.019.636,00	86,44
	1.1 Belanja Pegawai	433.654.724.429,00	374.793.455.166,00	86,43
	1.2 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	1.3 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	1.4 Belanja Hibah	62.564.728.500,00	58.804.311.220,00	93,99

No.	URAIAN	Belanja Daerah TA 2015		%
		Target	Realisasi	
	1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.472.189.511,00	0,00	0,00
	1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
	1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	475.000.000,00	358.308.050,00	75,43
	1.8. Belanja Tak Terduga	3.330.145.200,00	2.117.945.200,00	63,60
2	Belanja Langsung	1.447.530.546.657,00	1.228.521.089.822,00	84,87
	2.1 Belanja Pegawai	118.568.925.445,00	104.318.039.434,00	87,98
	2.2 Belanja Barang dan Jasa	609.662.792.587,00	532.581.490.489,00	87,36
	2.3 Belanja Modal	719.298.828.625,00	591.621.559.899,00	82,25
JUMLAH BELANJA		1.952.027.334.297,00	1.664.595.109.458,00	85,28

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang 2015

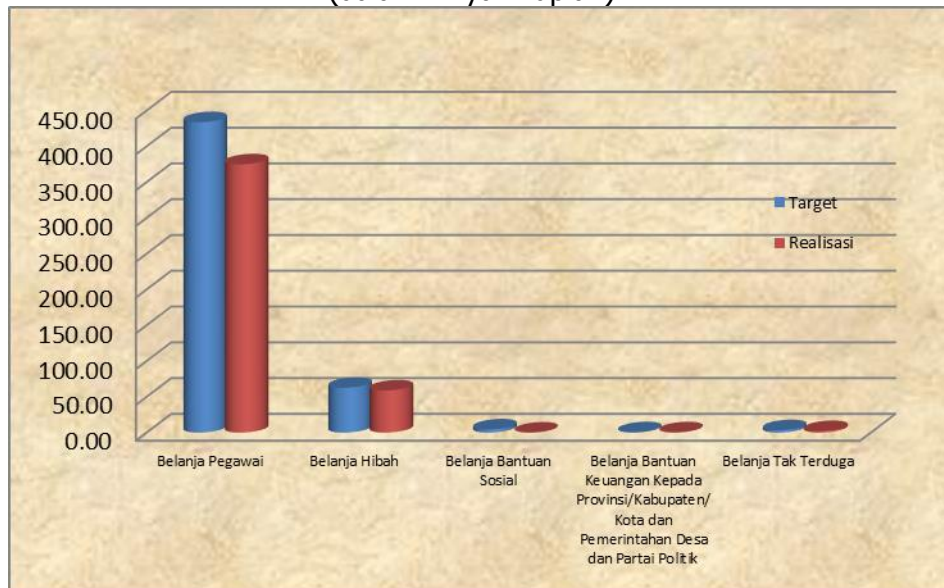
a. Belanja Tidak Langsung

Rencana Belanja Tidak Langsung dalam APBD kota Bontang Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.504.496.787.640,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tak Terduga. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.436.074.019.636,00 dengan persentase pencapaian sebesar 86,44% dari plafon yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp.433.654.724.429,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.374.793.455.166,00 dengan persentase pencapaian sebesar 86,43% dari plafon yang ditetapkan.
- Belanja Hibah, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp.62.564.728.500,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.58.804.311.220,00 dengan persentase pencapaian sebesar 93,99% dari plafon yang ditetapkan.
- Belanja Bantuan Sosial, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp.4.472.189.511,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 tidak terealisasi.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik dengan plafon Rp.475.000.000,00 dan realisasi Rp. 358.308.050,00 atau 75,43%.
- Belanja Tak Terduga, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp.3.330.145.200,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.2.117.945.200,00 dengan persentase pencapaian sebesar 63,60% dari plafon yang ditetapkan.

Dari Komposisi Belanja Tidak Langsung tersebut, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 terlihat bahwa belanja pegawai merupakan pos belanja terbesar. Secara grafis komposisi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar. 3.4. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015, (dalam milyar Rupiah)



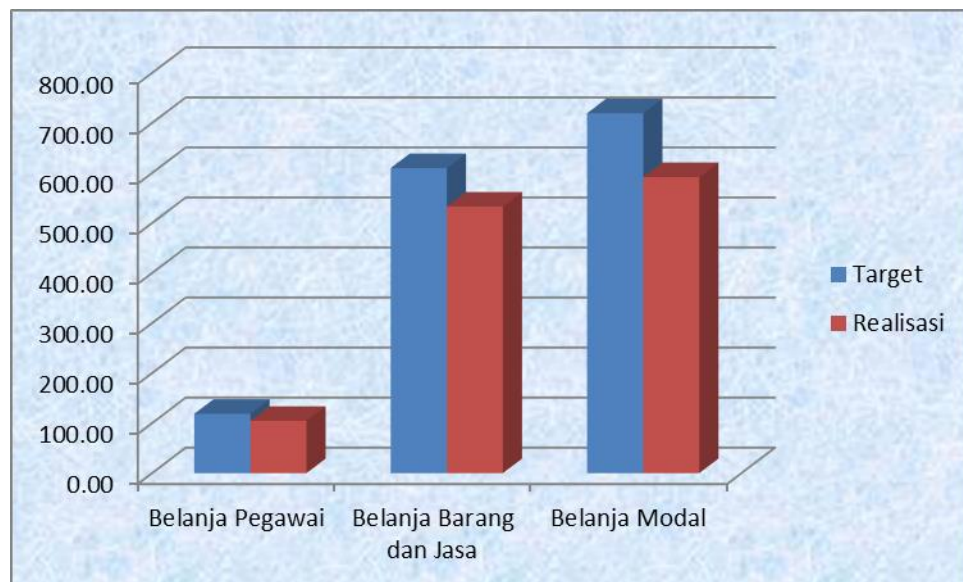
b. Belanja Langsung

Rencana Belanja Langsung dalam APBD Kota Bontang Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.1.447.530.546.657,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.1.228.521.089.822,00 atau sebesar 84,87%. Jumlah ini meliputi:

- *Belanja Pegawai*, rencana belanja ditetapkan dengan pagu sebesar Rp.118.568.925.445,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp.104.318.039.434,00 atau sebesar 87,98%.
- *Belanja Barang dan Jasa*, rencana belanja ditetapkan dengan pagu sebesar Rp.609.662.792.587,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp.532.581.490.489,00 atau sebesar 87,36%.
- *Belanja Modal*, rencana belanja ditetapkan dengan pagu sebesar Rp.719.298.828.625,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp.591.621.559.899,00 atau sebesar 82,25%.

Dari komposisi belanja langsung tersebut di atas, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 terlihat bahwa belanja modal merupakan pos belanja terbesar. Secara diagram komposisi Belanja Operasi dan Pemeliharaan dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar. 3.5. Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015, (dalam milyar Rupiah)



Dalam APBD Kota Bontang Tahun 2015 selain Belanja sebagaimana tersebut di atas masih terdapat pengeluaran dari pos Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan.

Secara kumulatif, pagu pengeluaran pada pos ini adalah sebesar Rp.6.926.295.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.6.926.295.000,00 yang merupakan realisasi untuk penyertaan modal kepada Perusda AUJ.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan berimplikasi terhadap realisasi belanja daerah sehingga perlu

ditindaklanjuti agar pelaksanaan belanja daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Anggaran belanja langsung yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, realisasinya tidak dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya ada yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat sepenuhnya direalisasikan karena kendala teknis. Berkaitan hal tersebut untuk program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sebagai solusinya diusulkan anggaran dan pelaksanaannya pada APBD Tahun 2016.

Selain itu pada pelaksanaan APBD Bontang Tahun Anggaran 2015 sebagai implikasi defisit APBD Bontang Tahun Anggaran 2015, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pembayarannya kepada pihak ketiga sebesar Rp.61.795.804.025,00. Dan sebagai solusinya penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga ini direalisasikan pada tahun anggaran 2016, melalui mekanisme pergeseran mendahului perubahan APBD TA 2016.

Beberapa kegiatan dimaksud terdapat pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, secara rinci hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.
Daftar Kegiatan Yang Tertunda Pembayarannya Pada APBD TA 2015

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	1.Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi A (Paket Peningkatan Jalan Selat Timor Kelurahan Tanjung Laut)	198.500.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	2.Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan Seksi A (Paket Pembuatan Badan Jalan dan Parit Gg. Belibis 4 Kelurahan Kanaan)	198.447.000,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
3.	Dinas Pekerjaan Umum	3.Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi B (Paket Pembuatan Parit dan Badan Jalan Jl. Kapal Layar 5 RT.24 Kelurahan Loktuan)	172.771.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	4.Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung Seksi A	49.758.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	5.peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A (Paket Pembuatan Drainase Jl. Balikpapan V RT.12 dan RT.14 Kelurahan Gunung Telihan)	197.635.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum	6.Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai Seksi B (Paket Peningkatan Jalan Lingkungan RT.11 Kelurahan Berbas Pantai)	128.850.000,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi A (Paket Pembuatan Badan Jalan Gg. Kapal Layar Kelurahan Loktuan)	199.916.000,00
8.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Pembuatan Badan Jalan RT.22 Kuburan Baru Kelurahan Loktuan)	179.795.000,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi E (Paket Pembuatan Parit dan Jalan Mushola Al - Sakinah Kelurahan Api - Api)	99.304.000,00
10.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Pembuatan Badan Jalan RT.22 Belakang Koramil Kelurahan Loktuan)	116.628.000,00
11.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Bangunan Balai Pertemuan Umum Selambai Kelurahan Loktuan	551.531.000,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A (Paket Pembangunan Jembatan Ulin RT.24 Kelurahan Berbas Tengah)	100.077.000,00
13.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi A (Paket Peningkatan Jalan dan Drainase RT.23 Kelurahan Tanjung Laut)	75.510.000,00
14.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala Seksi A (Paket Pembuatan Jembatan Ulin RT.02 Kelurahan Bontang Kuala)	148.000.000,00
15.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi E (Paket Pembuatan Parit RT.28	119.505.000,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
		Kelurahan Api - Api)	
16.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi D (Paket Pembuatan Parit Lingkungan RT.30 Kelurahan Api - Api)	103.971.000,00
17.	Dinas Pekerjaan Umum	Baayr Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi B (Paket Semenisasi dan Pembuatan Parit Lingkungan RT.22 Kelurahan Loktuan)	114.338.000,00
18.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Lanjutan Semenisasi Jembatan Ulin RT.07 Kelurahan Loktuan)	179.844.000,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi C (Paket Semenisasi Jalan Pramuka 3 RT.02 Baltim Kelurahan Bontang Lestari)	177.511.000,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemerintah Daerah Kota Bontang (Paket Rehab Kantor Koramil 0908 - 01 Bontang)	149.370.000,00
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A (Paket Pembangunan Turap Samping Posyandu RT.08 Kelurahan Gunung Telihan)	199.690.000,00
22.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi B	34.780.000,00
23.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi D (Paket Semenisasi Jalan dan Parit RT.29 Kelurahan Api - Api)	99.772.000,00
24.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi C (Paket Semenisasi Jalan Gg. Satya Lencana 1 RT.09 Kelurahan Bontang Lestari)	173.988.000,00
25.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A (Paket Pembuatan Jembatan Ulin RT.24 Kelurahan Berbas Tengah)	196.292.000,00
26.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi A	49.764.000,00
27.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Terpadu (Termin Kedua)	365.746.900,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
28.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi C (Paket Perbaikan Parit Lingkungan RT.11 Kelurahan Bontang Baru)	107.465.000,00
29.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi A (Paket Semenisasi Jl. Gendang 4A Kelurahan Bontang Baru)	149.646.000,00
30.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi G (Paket Semenisasi Jalan RT.38 Kelurahan Loktuan)	157.498.000,00
31.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing Seksi C (Paket Semenisasi dan Parit RT.14 Kelurahan Belimbing)	193.426.000,00
32.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Rawa Indah	24.358.000,00
33.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Rehab Masjid Al-Hijrah Kota Bontang	881.451.000,00
34.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Semenisasi Phinisi 1 RT.48 Kelurahan Loktuan)	59.996.000,00
35.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A (Paket Pembuatan Parit Jl. Surabaya II Kelurahan Gunung Telihan)	99.690.000,00
36.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Keciptakaryaan (Paket Rehab TK Cendrawasih Kota Bontang)	149.203.000,00
37.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi G	29.370.000,00
38.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A (Paket Pembuatan Badan Jalan Jl. H. Ramlan Kelurahan Berbas Tengah)	198.241.000,00
39.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan (Paket Pembangunan Sumur Dalam Kelurahan Gunung Elai)	1.172.000.000,00
40.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi B	34.658.000,00
41.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	32.257.000,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
	Umum	Kelurahan Api-Api Seksi B	
42.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi A (Paket Pembuatan Semenisasi dan Parit Gg. Ende Kelurahan Loktuan)	122.690.000,00
43.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Rehab Masjid Al-Hikmah Kelurahan Guntung.	494.193.600,00
44.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi C	49.786.000,00
45.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi A (Paket Peningkatan Jalan dan Drainase RT.08 Kelurahan Gunung Elai)	196.254.000,00
46.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi C (Paket Pembuaatan Turap dan Semenisasi Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Laut)	169.125.000,00
47.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan.	8.641.157.616,00
48.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Perencanaan Teknis (review Design) Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan	49.574.000,00
49.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi B (Paket Pembuatan Parit Jalan A Yani Gang Rawa Indah Kelurahan Api - Api)	139.285.000,00
50.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi D	34.820.000,00
51.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	648.585.600,00
52.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bontang Kuala (Lanjutan).	2.316.364.500,00
53.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah	1.563.210.400,00
54.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Turap Bumi Perkemahan dan Agro Wisata di Bontang Lestari.	949.323.900,00
55.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo Kelurahan Bontang lestari	6.634.891.000,00
56.	Dinas	Bayar Kegiatan Peningkatan Jalan dr. Cipto	8.012.454.091,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
	Pekerjaan Umum	Mangun Kusumo Kelurahan Belimbing.	
57.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) Kelurahan Belimbing.	3.947.689.000,00
58.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bontang (Lanjutan).	3.145.426.000,00
59.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Sport Center Loktuan..	3.653.958.600,00
60.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Revitalisasi POLRES Kota Bontang	4.180.680.800,00
61.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pembangunan Kantor KODIM 0908.	4.582.115.900,00
62.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Keciaptakaryaan (Rehab Kantor Kelurahan Belimbing)	197.410.000,00
63.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi A (Paket Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan RT.22 dan RT.23 Kelurahan Bontang Baru)	148.262.000,00
64.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan Letjen S. Parman	967.899.000,00
65.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi A (Paket Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Laut Indah)	198.892.000,00
66.	Dinas Pekerjaan Umum	Bayar Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi A (Paket Pembangunan Pos Balakar Kelurahan Tanjung Laut Indah)	126.800.000,00
67.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja dan Bayar Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja pada Kegiatan Penyelenggaraan BOSTK SMAN 3 Bontang Tahun 2015 'an' CV .Jasa Santosa	40.500.000,00
68.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan An. CV. Mentari Jaya	49.925.700,00
69.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 BS An. CV. Mentari Jaya	37.422.000,00
70.	Dinas	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan	49.863.000,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
	Pendidikan	Perpustakaan SMPN 8 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah An. CV. Rumah Kutai	
71.	Dinas Pendidikan	Perencanaan Perpustakaan SDN 010 BU (Gunung Elay) (2 Lantai) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah An. Rekacipta	48.840.000,00
72.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 BS An. CV. Mentari Jaya	58.241.700,00
73.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Publikasi Pendidikan Di Radio Pada Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tahun Anggaran 2015 Dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 569/XI/PBJ.Disdik.Sek/2015 Tanggal 10 Desember 2015	30.195.000,00
74.	Dinas Pendidikan	Belanja Makanan Dan Minuman Pada Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang Pada CV. Rizky Barokha.	88.336.050,00
75.	Dinas Pendidikan	Belanja Termin Akhir Kegiatan, Pembangunan Bengkel SMKN 3 An. CV. Fajar Pratama Teknik Tahun 2015	601.478.520,00
76.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Konsultan Perencanaan Gedung AK Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Tahun Anggaran 2015 Dengan Kontrak Nomer:420/002/Kontrak/Perencanaan Disdik/2015 Tanggal 13 Oktober 2015	559.075.000,00
77.	Dinas Pendidikan	Pembangunan/Revitalisasi Gedung Sekolah SDN 002 BB Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah An. CV. Inti Bumi Mandiri	549.535.000,00
78.	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Pada Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang Pada CV. Sinar Gemilang	105.952.000,00
79.	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulik elektronik Pada Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang Pada CV. Sinar Gemilang	56.958.000,00
80.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi An. CV. Cahaya Printing Grafika	205.980.948,00
81.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan An. CV. Mita Perkasa	17.915.700,00
82.	Dinas Pendidikan	Bayar Belanja Bahan Dan Peralatan Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan An. Mitra Perkasa	23.919.500,00

No.	SKPD	Kegiatan	Nilai (Rp)
83.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Modal Tenda/Tarup Pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya Daerah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2015	103.400.000,00
84.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	belanja Jasa Artis Tahun baru Pada Kegiatan Festival Kesenian Rakyat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bontang	297.000.000,00
85.	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pembangunan Fasilitas PPI/TPI	29.865.000,00

Sumber : Bappeda diolah, 2016

BAB IV

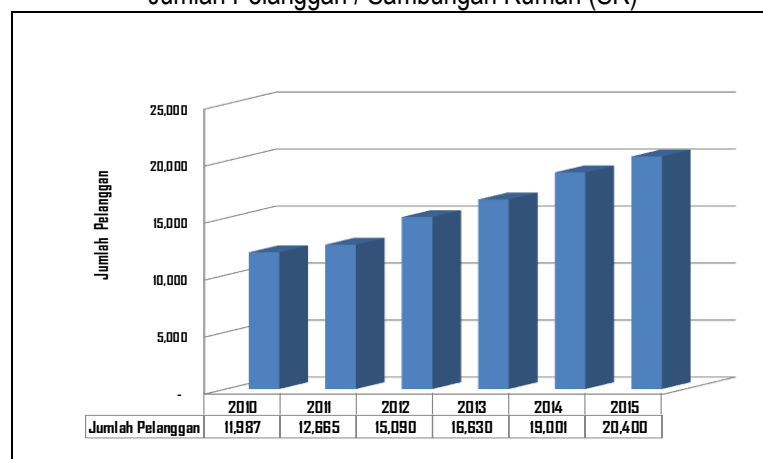
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arah kebijakan umum pembangunan Daerah Kota Bontang dilaksanakan sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih, dilaksanakan melalui program unggulan pembangunan berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016. Program unggulan pembangunan tersebut terdiri dari:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Listrik.
 - a. Air Bersih

Dalam rangka pemerataan pelayanan air bersih, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya memperluas cakupan layanannya tidak hanya terbatas kepada kelompok masyarakat mampu, akan tetapi dilakukan juga pemasangan sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pelaksanaan program dimaksud selama tahun 2013—2015 telah terpasang sebanyak 1887 Sambungan Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bontang. Jumlah pelanggan pada akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 12.146 Sambungan Rumah (SR), jumlah pelanggan tersebut sampai dengan Tahun 2015 mengalami pertambahan sebanyak 8.413 Sambungan Rumah (SR), sehingga total pelanggan menjadi sebanyak 20.400 Sambungan Rumah (SR).

Gambar 4.1
Jumlah Pelanggan / Sambungan Rumah (SR)



Pembangunan Deep well (sumur dalam) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah terbangun sebanyak 15 Unit, dengan kapasitas terpasang sebesar 540 liter/detik, water treatment plan (WTP) sebanyak 10 Unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 470 liter/detik. Sedangkan jaringan pipa air bersih selama tahun 2011–2015 terbangun sepanjang 506,856 meter yang terdiri dari jaringan Transmisi sepanjang 19.209 meter, jaringan Distribusi sepanjang 112.510 meter dan jaringan tersier sepanjang 375.137 meter.

Tabel 4.1
Jumlah Deep Well dan WaterTreatment Plan

No	Tahun	Jumlah Deep Well (Unit)	Jumlah WTP (Unit)	Jumlah Jaringan Distribusi (m)
1	2010	13	7	422,624
2	2011	13	7	431,257
3	2012	14	8	437,584
4	2013	16	9	463,184
5	2014	18	9	482,213
6	2015	18	10	506,856

b. Listrik

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, maka mulai tahun 2011 Pemerintah Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penyediaan listrik. Pembentukan perusahaan daerah PT. Bontang Migas dan Energi (BME) yang diberi mandat untuk menangani migas dan energi di daerah ini diharapkan dapat membantu pemerintah kota menyelesaikan permasalahan energi yang ketersediaan listrik pada yang saat itu hanya memiliki kapasitas

mampu sebesar 12,6 MW dari 2 unit PLTMG dan 9 Unit PLTD. Sebagai langkah awal PT. Bontang Migas dan Energi BME bekerja sama dengan PT. Bayu Bumi Gemilang (BBG) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 11 MW. Disamping membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas untuk menambah dan mem-backup kapasitas daya terpasang, Pemerintah Kota Bontang juga telah membangun jaringan listrik berupa pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) maupun Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan pengadaan travo ke beberapa wilayah kota Bontang meliputi Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan, Kelurahan Lok Tuan dan Kelurahan Guntung yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN. Dengan terbangunnya jaringan listrik di beberapa wilayah ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan listrik dari PLN. Demikian pula di 5 wilayah pemukiman atas laut yang meliputi Gusung, Melahing, Selangan, Tihi-Tihi dan Lok Tunggul, Pemerintah Kota membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal masing 15 kWp (Kilo Watt Peak) terhadap 248 KK yang tersebar di 5 wilayah pemukiman tersebut. Rasio elektrifikasi di Kota Bontang sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 100 % yang terdiri dari sumber penerangan Listrik PLN sebesar 94.97 % sedangkan Non PLN sebesar 5.03%.

2. Pendidikan dan Kesehatan.

a. Pendidikan.

Mewujudkan pendidikan "Tuntas Berkualitas" dengan membangun dan meningkatkan sarana/prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik/kependidikan, membiayai pendidikan di sekolah negeri dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi baik dari keluarga mampu maupun dari Keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM). Sementara itu untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai, Pemerintah Kota Bontang merintis pembangunan Akademi Komunitas, dan "Bontang Techno Park".

Dukungan Pemerintah Kota Bontang terhadap terwujudnya pendidikan tuntas berkualitas dilaksanakan melalui:

- 1) Penyediaan gedung Laboratorium bahasa, IPA, komputer, untuk Sekolah dasar dan Sekolah menengah melalui program :
 - Program belajar pendidikan dasar 9 tahun.
 - Program pendidikan menengah.
- 2) Ketersediaan gedung sekolah mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sampai Sekolah Menengah, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Gedung sekolah

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri (Unit)				Sekolah Swasta (Unit)			
		Tahun				Tahun			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	TK	3	3	3	3	45	50	49	50
2	SD	30	30	30	30	25	25	26	26
3	SMP	8	8	8	9	20	20	20	20
4	SMA	3	3	3	3	7	8	8	8
5	SMK	3	3	3	3	8	10	10	10
6	SLB	1	1	1	1	2	2	3	3

- 3) Pemberian beasiswa bagi anak berprestasi melalui beasiswa program menengah.

b. Kesehatan

Program unggulan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan melalui program:

- 1) Fasilitasi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan peningkatan pemantauan terhadap kelompok rawan terutama ibu dan bayi.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pengembangan regulasi bidang kesehatan.

- 3) Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
- 4) Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah.
- 5) Revitalisasi peran Puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
- 6) Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Bantuan Rp. 50 juta per RT

Komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam upaya mempercepat pembangunan di kelurahan dalam bidang infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan sosial kemasyarakatan, telah dirasakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat manfaat dan dampaknya. Pelaksanaan bantuan Rp.50 juta per RT telah melibatkan langsung masyarakat di tingkat RT dan seluruh warga diposisikan sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan bukan sebagai objek pembangunan.

Hasil pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa proporsi pelaksanaan program yang telah memasuki tahun keempat sejak dimulai tahun 2012 ini, sebagian besar didominasi kegiatan Bidang Infrastruktur, dan hal ini terbukti mampu menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang secara teknis dapat diselesaikan di tingkat RT.

4. Kesempatan bekerja/berusaha

Peningkatan kesempatan bekerja/berusaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui beberapa program peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka membuka kesempatan bekerja/berusaha tersebut telah dilaksanakan melalui program:

- a. Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan, melalui:
 - ✓ peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
 - ✓ peningkatan kesempatan kerja.

- b. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri, melalui:
 - ✓ Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - ✓ Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - ✓ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - c. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, melalui:
 - ✓ Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif.
 - ✓ Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
 - ✓ Pengembangan sistem pendukung bagi usaha kecil mikro kecil dan menengah.
 - ✓ penguatan pemberdayaan usaha kecil.
5. Lingkungan hidup
- Upaya Pemerintah dan Masyarakat Kota Bontang untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan beberapa program yang meliputi:
- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
 - b. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata.
 - c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan karang hias.
 - d. Peningkatan kawasan ruang terbuka hijau.
6. Membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah komitmen yang terealisasi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Komitmen Bersama yang Terealisasi

No	Kelurahan	Fisik dan Prasarana	Ekonomi	Sosial Budaya	Jumlah	%
1	Api-api	61	8	32	101	89,38
2	Belimbing	21	6	12	39	92,86
3	Berbas Pantai	19	14	32	65	80,25
4	Berbas Tengah	24	8	20	52	78,79
5	Bontang Baru	6	3	11	20	74,07
6	Bontang Kuala	4	1	4	9	56,25
7	Bontang Lestari	23	8	9	40	93,02
8	Guntung	25	7	12	44	73,33
9	Gunung Elai	39	5	13	57	87,69
10	Gunung Telihan	5	2	9	16	76,19
11	Kanaan	3	1	5	9	81,82
12	Loktuan	12	6	12	30	71,43
13	Satimpo	1	0	3	4	80,00
14	Tanjung Laut	19	9	34	62	88,57
15	Tanjung Laut Indah	11	2	9	22	84,62
16	Umum	3	21	82	106	93,81
	Total	276	101	299	676	84,39

Sejalan dengan pelaksanaan program unggulan tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkat dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan program pembangunan yang disusun pemerintah dikelompokkan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pada dasarnya merupakan implementasi dari program Kepala Daerah yang direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011 – 2016 dan perubahannya.

Urusan pemerintahan daerah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016, dijabarkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 26 urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mendorong terjadinya percepatan perbaikan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dengan sasaran meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan

Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025.

Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan mutu pendidikan melakukan terobosan dengan menetapkan 6 (enam) program unggulan yang salah satu poinnya adalah **“Peningkatan Kualitas Pendidikan”**.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan ini terdiri dari 20 program yang diimplementasikan dalam 179 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.153.759.940.499,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.127.763.264.197,00 atau 83,09% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 96,11%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.1 Urusan Pendidikan.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan tersebut telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dari target yang ditetapkan sebesar 848,46 melampaui target 1000,61 hal ini disebabkan adanya warga diluar wilayah Kota Bontang yang bersekolah di Kota Bontang. Demikian pula Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah dari target yang ditetapkan sebesar 612,49 melampaui target 803,38 hal ini disebabkan adanya warga diluar wilayah Kota Bontang yang bersekolah di Kota Bontang. Secara rinci capaian indikator pembangunan pada urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Angka melek huruf	98,96	99,97	99,07	99,60	99,71	99,71	100,00
2.	Angka rata-rata lama sekolah	12	12	12	12	12	12	12
3.	Angka partisipasi kasar							
3.1	SD/MI/Paket A (%)	113,54	113,53	106,54	107,19	108,93	109,93	107,55
3.2	SMP/MTs/Paket B (%)	107,67	106,47	100,57	104,60	108,62	108,64	103,49
3.3	SMA/SMK/MA/Paket C (%)	108,26	105,01	97,56	99,64	101,94	105,19	99,26
4.	Angka pendidikan yang ditamatkan							
4.1	SD/MI/Paket A	14,07	12,40	1,98	1,86	1,96	1,85	1,88
4.2	SMP/MTs/Paket B	5,80	5,41	1,87	1,71	1,68	1,74	1,87
4.3	SMA/SMK/MA/Paket C	5,42	5,07	1,61	1,59	1,59	1,45	1,53
5.	Angka Partisipasi Murni							
5.1	SD/MI/Paket A	98,14	99,29	98,40	107,19	98,77	98,75	100,00
5.2	SMP/MTs/Paket B	71,76	78,35	79,06	104,60	80,14	80,44	80,45
5.3	SMA/SMK/MA/Paket C	61,86	68,80	72,24	99,64	72,80	75,15	73,50
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Pendidikan dasar:							
1.1.	Angka partisipasi sekolah	848,46	925,12	928,77	1041,51	1025,20	1000,61	944,99
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	31,12	31,24	32,94	32,67	33,10	33,49	29,75
1.3.	Rasio guru/murid	601,70	589,4	576,94	569,55	562,83	541,52	533,82
1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	60,17	58,94	55,69	56,96	56,28	54,15	53,38
2.	Pendidikan menengah:							
2.1.	Angka partisipasi sekolah	612,49	604,55	576,94	911,28	775,69	803,38	587,01
2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	27,81	18,41	19,82	29,61	30,16	29,90	16,63

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2.3.	Rasio guru terhadap murid	816,84	803,75	828,19	812,43	813,88	730,67	821,59
2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	81,68	80,37	81,16	81,24	81,38	73,07	76,63
2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,96	99,97	99,07	99,60	99,71	99,71	100,00
3.	Fasilitas Pendidikan:							
3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,55	87,38	96,61	68,33	73,33	95,00	100,00
3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	94,44	92,02	96,43	89,66	74,58	95,00	98,18
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,70	60,52	76,41	83,54	65,32	92,64	77,75
5.	Angka Putus Sekolah:							
5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,005	0,005	0,015	0,039	0,054	0,024	0,000
5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,025	0,013	0,012	0,167	0,075	0,033	0,000
5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,110	0,013	0,171	0,091	0,166	0,085	0,000
6.	Angka Kelulusan:							
6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,63	99,96	99,96	99,96	100,00	100,00	99,96
6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,81	99,80	99,91	99,87	99,92	100,00	100,00
6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,56	95,02	103,44	107,45	101,37	103,25	100,00
6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	109,73	113,03	97,16	102,69	105,10	103,21	100,00
6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	73,05	69,44	74,30	83,34	86,17	88,21	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Masih terdapat beberapa tenaga pendidik yang tidak menerima TPP Bankue karena belum mempunyai kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), untuk itu telah diusulkan agar tenaga pendidik mendapatkan kartu NUPTK sebagai salah satu syarat penerima TPP.
- ✓ Pada urusan pendidikan terdapat 15 Kegiatan ditahun 2015 dengan jumlah Rp. 2.524.138.118,00 belum terbayarkan, dikarenakan pencairan DBH migas dari pemerintah pusat belum terealisasi. Untuk pembayarannya dianggarkan di tahun 2016 dengan merasionalkan beberapa kegiatan melalui pergeseran mendahului perubahan.
- ✓ Kegiatan Operasional Lembaga Akademi Komunitas dan Bontang Teckno Park tidak Terlaksana karena Kelembagaan Akademi Komunitas belum terbentuk.

2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan dimaksudkan dalam rangka pemerataan, keterjangkauan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah yang dirumuskan sebagai visi INDONESIA SEHAT 2015.

Upaya ini sejalan dengan program unggulan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang yakni **"Peningkatan Kualitas Kesehatan"**

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan ini terdiri dari 28 program yang diimplementasikan dalam 156 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 146.766.784.123 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.356.708.435 atau 91,54% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 92,66%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.2 Urusan Kesehatan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016 telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Pada Tahun 2014 target 993,7 tercapai sebesar 988,15 hal ini disebabkan adanya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia. Untuk mengurangi angka kematian bayi perlu meningkatkan deteksi dini dan penanganan ibu hamil resiko tinggi sebagai salah satu faktor terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Selain itu upaya perbaikan pelayanan kesehatan masih terus dilakukan ditingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam rangka menangani komplikasi neonatal.

Cakupan kunjungan bayi tidak mencapai target karena adanya bayi yang belum memenuhi indikator untuk dimasukkan dalam pelayanan kesehatan bayi. Untuk itu telah dilakukan pelayanan kesehatan dasar dengan menyediakan standar pelayanan yang berkualitas bagi bayi.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2014 pada urusan kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Angka kelangsungan hidup bayi	992,2	968,0	991,9	991,9	988,15	988,5	994,2
2.	Angka usia harapan hidup	72,25	72,42	72,60	72,60	73,12	73,12	72,85
3.	Persentase balita gizi buruk	2,00	0,17	0,44	0,44	0,40	0,30	1,40
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Rasio posyandu per satuan balita	6,47	6,58	7,00	6,64	6,33	6,61	9,27
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,09	0,09	0,084	0,08	0,08	0,10	0,10
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,28	0,028	0,03	0,03	0,03	0,03
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,54	0,60	0,63	1,00	0,98	1,02	0,63
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4,47	5,17	4,36	6,45	4,47	5,23	4,90
6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96,00	132,68	100,00	108,39	99,46	112,98	96,00
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,00	99,18	99,30	90,06	96,88	88,30	98,00
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	80,00	100,00	86,60	80,00	86,67	93,30	100,00
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	28,71	35,47	41,60	49,00	49,42	51,90	75,00
11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Cakupan pelayanan	100,00	100,00	105,45	100,00	100,00	29,01	100,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)							
13.	Cakupan kunjungan bayi (%)	85,00	72,88	94,40	88,53	97,52	83,70	90,00
14.	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
15.	Cakupan pembantu puskesmas	13,00	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	66,60

Sumber : Dinas Kesehatan

2) Permasalahan dan Solusi

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan dibagi dengan sasaran estimasi jumlah ibu hamil pada tahun berjalan. Menurunnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan karena tingginya estimasi jumlah ibu bersalin yaitu 3.862 ibu bersalin, sementara realitas persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 3.412 sehingga persentase persalinan sebesar 88,3 %.

Solusinya lebih mengoptimalkan sosialisasi oleh semua pihak yang terkait dalam penyampaian pentingnya ibu bersalin oleh tenaga kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah, pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan infrastruktur sebagai komitmen Pemerintah Kota Bontang guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bontang..Kebutuhan infrastruktur dasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah seperti jalan, jembatan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial yang ada di daerah sehingga dapat

terwujud kesinambungan dan keterkaitan antar wilayah khususnya sektor perdagangan. Disamping itu juga dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan pada setiap wilayah, maupun mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pekerjaan Umum ini terdiri dari 20 program yang diimplementasikan dalam 212 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.447.127.265.308,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.349.034.797.705,00 atau 78,06% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 98,13%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4.1 Urusan Pekerjaan Umum.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, proporsi jalan dalam kondisi baik tercapai sebesar 95,72% dimana ini melebihi target akhir capaian yang direncanakan dalam RPJMD sebesar 85% dan meningkat sebesar 12,90% dari kondisi awal sebesar 82,82%. Hal ini dikarenakan realisasi panjang jalan yang baik sampai dengan saat ini yaitu sepanjang 195,65 km melebihi dari target rencana panjang jalan yang baik pada akhir RPJMD sepanjang 144,83 km. Untuk rasio tempat pemakaman umum, target akhir RPJMD tidak tercapai dari rencana sebesar 32,30 per 100 penduduk dan hanya tercapai 30,02 per 100 penduduk. Hal ini dikarenakan penambahan maupun perluasan area pemakaman selama 5 tahun terakhir tidak sebanding dengan

peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang. Sampai dengan saat ini, jumlah daya tampung TPU sebanyak 49.035 buah untuk melayani 163.326 penduduk Kota Bontang.

Rasio rumah layak huni tidak mencapai target akhir karena penambahan jumlah rumah layak huni tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang.

Sesuai target akhir RPJMD 2011-2016 untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni ditetapkan sebesar 42,35 dan rasio permukiman layak huni sebesar 35,84, hal ini tidak sesuai dengan rumusan pada Permendagri nomor 54 tahun 2010 dimana target indikator tersebut tidak dikali 100 sehingga target akhir seharusnya masing-masing sebesar 0,42 dan 0,35.

Secara rinci capaian indikator pembangunan Kota Bontang urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	82,82	88,09	90,98	93,64	95,65	95,72	85
2.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,39	1,40	0,15	0,15	1,54	1,65	1,5
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	79,02	80,16	80,13	80,13	80,03	80,03	79,20
4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	32,3	25,37	19,53	22,66	20,80	30,02	32,30
5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2,98	2,34	3,56	3,91	4,36	6,05	3,73
6.	Rasio rumah layak huni	0,31	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,42
7.	Rasio permukiman layak huni	10,84	0,16	0,21	0,94	0,94	0,94	0,35
8.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,00110	0,00108	0,00112	0,00131	0,00128	0,00125	0,00138
9.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke	3,85	2,89	1,93	0,97	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi				2015	Target Akhir
			2011	2012	2013	2014		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)							
10.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	87,67	90,70	96,30	93,64	91,59	95,72	89,98
11.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	13,77	18,76	18,76	28,63	27,31	27,28	38,62
12.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	6,00	7,19	9,26	11,38	11,58	4,13	3,00
13.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	12	7,50
14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	6,00	5,10	4,18	3,82	2,73	2,36	3,00
15.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	55,56	55,56	55,56	55,56	44,44	33,33	44,44
16.	Lingkungan Pemukiman	12	1,49	1,49	1,49	1,49	1,25	15

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum

2. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK

3. Dinas Tata Ruang Kota

2) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum pada tahun 2015 terdapat 14 paket kegiatan yang fisiknya tidak mencapai 100% dengan rincian 9 paket kegiatan dilakukan putus kontrak dan 5 kegiatan dilakukan perpanjangan waktu. Untuk penyedia barang/jasa yang dilakukan pemutusan kontrak dikenai sanksi black list selama 2 tahun tidak dapat mengikuti kegiatan di Kota Bontang.

Selain itu terdapat kegiatan yang terkendala pelaksanaannya akibat lambatnya proses penyelesaian pembabasan lahan sehingga kegiatan seperti pembangunan jalan lingkar yang pelaksanaannya secara multi years tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi

dengan berbagai pihak untuk penyelesaian permasalahan tersebut sehingga rencana pembangunan diharapkan dapat terlaksana sesuai target rencana.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin, diperlukan adanya langkah-langkah kongkrit berupa peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya-upaya nyata sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama bagi warga miskin.

Urusan Perumahan Rakyat tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman yakni permukiman yang tertata, sehat, bersih dan layak.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perumahan Rakyat ini terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 2 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.485.010.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.299.352.000,00 atau 87,50% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan mencapai 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.3.1 Urusan Perumahan Rakyat.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Perumahan Rakyat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota

Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, persentase rumah tangga pengguna air bersih tercapai sebesar 77,01% dibawah target akhir RPJMD sebesar 80%. Nilai capaian tersebut terdiri atas 53,59% dari PDAM, 13,06% dari Perusahaan (PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim) dan 10,36% dari sumber lainnya. Keseluruhan terdapat 30.699 rumah tangga yang menggunakan air bersih dari total jumlah rumah tangga di Kota Bontang sebanyak 39.862 rumah tangga.

Nilai realisasi indikator kinerja lingkungan pemukiman kumuh lebih kecil dari nilai target akhir RPJMD berturut-turut 0,08 dan 0,14 dimana ini dapat diartikan bahwa indikator tersebut mencapai target karena pemukiman kumuh semakin berkurang. Luas lingkungan permukiman kumuh Kota Bontang sampai dengan saat ini tersisa sebesar 11,96 ha atau lebih rendah sebesar 10,68 ha dari luas lingkungan permukiman kumuh yang ditargetkan pada akhir RPJMD sebesar 20,54 ha.

Secara rinci capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	52,30	50,20	56,35	61,63	67,23	77,01	80,00
2.	Rumah tangga pengguna listrik	77,00	84,00	99,54	100,00	100,00	100,00	90,00
3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	79,02	80,16	80,13	80,13	80,03	80,03	79,20
4.	Lingkungan pemukiman kumuh	0,21	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,14
5.	Rumah layak huni	58,73	62,77	62,96	62,96	67,21	67,68	61,99

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
6.	Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%)	30,59	30,59	39,71	41,24	41,18	47,35	42,35

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Perumahan yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target dan tidak terdapat permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan.

5. Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penataan Ruang ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 35 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.6.547.071.700,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.6.331.277.865,00 atau 96,70% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100,00% yang berarti semua kegiatan terlaksana dengan baik.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.3.2 Urusan Penataan Ruang.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Penataan Ruang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	20	32,19	32,65	33,04	33,39	33,51	22,50
2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	33,40	42,00	36,60	45,45	44,12	43,91	58,40
3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	8,00	7,16	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR								
1.	Ketaatan terhadap RTRW	75,00	75,60	76,00	77,00	77,00	77,50	77,50
2.	Luas wilayah produktif	60,80	64,80	68,70	69,80	72,80	76,65	76,80
3.	Luas wilayah industri	6,00	10,66	11,02	11,02	13,18	14,80	6,30
4.	Luas wilayah banjir	0,28	0,24	0,21	0,45	0,15	0,44	0,14
5.	Luas wilayah perkotaan	72,00	73,40	74,80	76,20	77,60	78,68	79,00

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota, 2011 – 2014

2) Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang dalam tahun Anggaran 2015 secara umum berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan serta kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Bagi bangsa Indonesia, proses perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang sangat strategis dan vital untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perencanaan pembangunan ini terdiri 15 program yang diimplementasikan dalam 55 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagian besar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, namun ada pula yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.14.227.535.750,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.13.228.541.814,00 atau mencapai 92,98% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%, artinya semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2.1 Urusan Perencanaan Pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan dalam tahun Anggaran 2015 berjalan sesuai target dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan lima tahun Kota Bontang urusan Perencanaan Pembangunan semua terealisasi sesuai dengan target akhir.

7. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan Urusan Perhubungan ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara Kota Bontang.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Urusan perhubungan ini terdiri dari 16 program yang diimplementasikan dalam 77 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.26.363.998.648,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.24.265.638.234,00 atau 92,04% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 92,55%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4.2 Urusan Perhubungan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, jumlah arus penumpang angkutan umum menurun dari target RPJMD disebabkan masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi, dapat dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah pengguna angkutan darat sebesar 140.497 orang/tahun di banding tahun 2015 hanya 124.366 orang/tahun, tetapi ada peningkatan di angkutan laut sebesar 41.610 orang/tahun dibandingkan tahun 2014 karena adanya penambahan armada kapal 1 (satu) unit sehingga mengalami peningkatan.

Indikator angkutan darat mengalami peningkatan 7.539 kendaraan AKDP yang keluar masuk Kota Bontang tahu 2015 (6,06%) di banding tahun 2014 (5,12%) sebanyak 7.200 kendaraan, sedangkan jumlah penumpang angkutan darat mengalami penurunan 124.366 kendaran di banding 140.497 kendaraan di tahun 2014.

Indikator rasio ijin trayek tidak mencapai target karena tidak ada penambahan ijin trayek per 5 tahun, hanya perpanjangan ijin trayek dan Dinas Perhubungan hanya menerbitkan surat rekomendasi

perpanjangan ijin trayek sedangkan yang mengeluarkan ijin ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Indikator jumlah uji KIR angkutan umum tidak sesuai dengan target, disebabkan berkurangnya kendaraan di luar Kota Bontang yang melakukan uji kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) telah melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan pelayanan dilaksanakan secara maksimal.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]		[9]
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB							
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	194.723	175.501	164.271	154.881	156.155	165.976	242.329
2.	Rasio ijin trayek	0,002	0,13	0,13	0,13	0,13	0,01	0,82
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	309	324	222	190	195	167	361
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	7	7	7	7	7	7	9
5.	Angkutan darat	3,00	4,77	5,10	5,38	5,12	6,06	6,00
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	37,00	37,00	96,06	15,60	21,05	32,11	40,00
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	45	35	30	30	30	30	35
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	87.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	97.000
9.	Pemasangan Rambu-rambu	16,00	45,20	45,20	47,56	52,77	57,12	33,00
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR							
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	38	39	42	40	45	50	53
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	312.890	175.501	164.271	153.614	140.496	124.366	576.012
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	348.890	175.501	164.271	154.881	156.155	165,976	612.012

Sumber : 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2) Permasalahan dan Solusi

Indikator jumlah pelabuhan/laut/udara/terminal bis tidak sesuai target, dari 9 (sembilan) target yang ditetapkan dalam RPJMD 2011 - 2015 ada 2 (dua) target yang tidak terlaksana selama 5 tahun, yaitu :

- ✓ Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Bontang yang terkendala masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang belum terealisasi disebabkan berbagai faktor, salah satunya ketidaksepakatan harga dengan pihak pemilik lahan serta pemberkasan belum lengkap.

Perlu adanya upaya untuk pembebasan lahan tiap tahun dalam 5 tahun kedepan, karena saat ini pendataan kepemilikan lahan bandara baru sudah mencapai $\pm 90\%$.

- ✓ Rencana Pembangunan Terminal yang sampai saat ini belum ada kesepakatan penetapan lahan antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu perlu melakukan koordinasi ke berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan kesepakatan/MoU kepada Pemerintah Kutai Timur, perlu adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengelola lingkungan hidup secara terus menerus.

Pembangunan bidang Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*). Penyelenggaraan urusan Lingkungan juga mengacu pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup ini terdiri dari 15 program yang diimplementasikan dalam 56 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Ruang Kota.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.53.630.252.288,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.49.620.242.236,00 atau mencapai 92,52% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,36%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.3.3 Urusan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Kondisi Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Persentase penanganan sampah	71,29	79,09	81,33	71,52	97,77	95,07	74,08
2.	Persentase Penduduk berakses air minum	52,30	71,28	79,13	83,13	90,10	96,74	80,00
3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	74,10	79,19	84,10	89,10	94,10	99,10	99,10
4.	Pencemaran status mutu air (prosentase sumber air yang dipantau)	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,00	0,76	2,19	1,47	1,88	0,29	1,11
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,298	0,234	0,356	0,391	0,452	0,605	0,373
8.	Penegakan hukum lingkungan	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR								
1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	31,88	50,20	56,35	61,63	67,23	77,01	80,00

Sumber : 1. Badan Lingkungan Hidup

2. Dinas Pekerjaan Umum

3. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK

4. Dinas Tata Ruang Kota

5. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup melalui beberapa program dan kegiatan dalam tahun 2015 berjalan belum sesuai dengan target.

Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, antara lain :

- Pembangunan turap bumi perkemahan dan agrowisata di Bontang Lestari tidak selesai karena kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya

Untuk capaian indikator pembangunan lima tahun Kota Bontang urusan Lingkungan Hidup pada umumnya terealisasi sesuai dengan target akhir, bahkan ada yang melebihi dari target akhir. Adapun indikator persentase penanganan sampah sudah melebihi target akhir akan tetapi menurun dari capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2014 sebesar 97,77% menjadi 95,07% di tahun 2015. Penjelasan terhadap hal tersebut yakni terjadi penurunan volume sampah yang diangkut per harinya oleh petugas Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Bontang akibat kondisi armada angkutan sampah yang kurang layak, serta diikuti dengan penurunan volume sampah yang dihasilkan akibat kesadaran sebagian masyarakat untuk melakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sebagai solusi permasalahan dan kenyataan tersebut di atas maka perlu dilakukan peremajaan dan penambahan armada angkutan sampah sesuai dengan karakteristik Kota Bontang, serta peningkatan budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di masyarakat Kota Bontang.

9. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan di daerah ini yaitu Tertib hukum pertanahan, Tertib administrasi pertanahan, Tertib penggunaan tanah dan penguasaan tanah, dan Tertib pemeliharaan tanah.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pertanahan ini terdiri 2 program yang diimplementasikan dalam

5 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.92.725.808.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.71.986.757.398,00 atau 77,63% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 86,84%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4.3 Urusan Pertanahan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	56,39	56,90	57,61	58,05	58,48	58,12	61,68
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	25,17	26,59	29,00	26,43	26,43	26,63	32,23
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	65,63	71,88	84,37	96,40	96,40	83,33	96,88
3.	Penyelesaian izin lokasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : 1. Bagian Pemerintahan Setda

2. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Sertifikasi lahan pemkot yang bisa masuk dan diproses di BPN di tahun 2015 hanya 10 bidang dikarenakan banyaknya data pendukung untuk mengurus sertifikasi lahan yang tidak lengkap.
- ✓ Untuk permasalahan tanah masih terdapat satu permasalahan yang belum tuntas yaitu tanah di bukit kusnodo dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pemilik tanah yang tidak pernah datang pada saat rapat dan pembahasan bersama BPN.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga di Kota Bontang. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sistem Administrasi dilaksanakan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terdiri dari 6 program yang diimplementasikan dalam 21 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.5.024.437.493,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.4.527.999.381,00 atau 90,12% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2.2 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Indikator Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk tahun 2015 tidak mencapai target karena kurangnya tingkat kesadaran warga khususnya warga yang memasuki usia 17 tahun tidak secara otomatis langsung mendaftarkan diri membuat KTP-EL, terlebih masih ada yang bersekolah atau kuliah di luar Kota Bontang, Indikator Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2015 tidak mencapai target karena banyaknya kepemilikan akta yang lama (terbitan Bontang, Tenggarong, dll) tetapi belum dicatitkan atau dilaporkan ke Disdukcapil melalui aplikasi SIAK yang bar, sehingga pada saat input data ke dalam database operator mengosongkan data kepemilikan Akta Kelahiran. Dan untuk Indikator Rasio pasangan berakte nikah tahun 2015 tidak mencapai target karena belum ada kesadaran warga untuk mencatatkan perkawinannya (bagi warga non muslim) di Disdukcapil dan kurang maksimalnya pelaporan pencatatan perkawinan dari KUA di Kecamatan ke Disdukcapil (bagi warga muslim).

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi				2015	Kondisi Akhir
			2011	2012	2013	2014		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,69	0,76	0,77	0,80	0,80	0,88	1,00
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,62	0,99	0,67	0,65	0,65	1,00	1,00
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,76	0,35	0,99	0,79	0,43	0,41	1,00
4.	Kepemilikan KTP	85,60	76,25	77,37	99,44	86,44	87,77	100,00
5.	Kepemilikan akta	64,00	61,60	42,77	46,76	51,88	53,92	100,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Kondisi Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	kelahiran per 1000 penduduk							
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Ya

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2) Permasalahan dan Solusi

Pelayanan administrasi kependudukan belum berjalan optimal karena Kurang lancarnya distribusi Blanko KTP-EL Sehingga proses pelayanan terlambat dan Alat Blanko KK di Kecamatan dan Dinas Rudak. Untuk itu Perlu bersurat ke pemerintah pusat untuk minta tambahan blanko dan perlu diusulkan dalam anggaran tahun berikutnya.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengembangkan Pengarusutamaan Gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 44 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.5.134.942.688,00. Realisasi keuangan sebesar

Rp.4.914.807.967,00 atau 95,71% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, Indikator rasio KDRT lebih rendah 0,89% dari target yang direncanakan sebesar 1% dan terealisasi 0,112%. Hal tersebut disebabkan berkurangnya Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Bontang. Sementara indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan telah melebihi target sebesar 20% dari target yang ditetapkan yaitu 80,00% dan terealisasi sebesar 100%. Berdasarkan data tahun 2015, dari 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diadukan terdapat 103 kasus yang tertangani dengan baik. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam menangani kasus/tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,00	54,73	7,79	85,43	52,66	49,35	49,01
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	52,00	45,26	92,21	14,57	47,34	33,91	50,00
3.	Rasio KDRT	1,00	0,04	0,03	0,068	0,092	0,112	1,00
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	17,02	17,02	86,71	48,76	39,89	50,65	20,00
5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	61,90	87,50	92,31	100,00	98,81	100,00	80,00

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terlaksana dengan baik namun terdapat permasalahan yang tidak terlalu signifikan diantaranya: tahun 2015, indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal tersebut disebabkan pencari kerja perempuan belum sesuai dengan spesifikasi/kriteria yang diperlukan di lembaga swasta, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui berbagai pembinaan dan pelatihan agar dapat memenuhi kriteria permintaan tenaga kerja di lembaga swasta.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditujukan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk terkendali, serta meningkatkan jumlah akseptor KB (laki-laki dan perempuan) sebagaimana terdapat dalam salah satu tujuan pada misi Kepala Daerah Kota Bontang yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan sumberdaya manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, pada bagian lampiran disebutkan bahwa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diarahkan pada peningkatan kualitas SDM

Indonesia yang ditandai antara lain dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan Angka Reproduksi *Neto/Net Reproductive Rate* (NRR) sama dengan 1, atau Angka Kelahiran *Total/Total Fertility Rate* (TFR) sama dengan 2,1.

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini terdiri dari 10 program yang diimplementasikan dalam 37 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kelurahan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.3.047.078.900,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.2.953.307.847,00 atau 96,92% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.4 Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera sebagaimana ditetapkan

dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, indikator cakupan peserta KB aktif lebih rendah 3,48% dari target yang direncanakan sebesar 79,00% dan terealisasi 75,52%. Hal tersebut disebabkan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: penambahan usia (PUS) yang sudah menopause, adanya migrasi ke luar daerah, serta adanya peserta KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, atau dikenal dengan istilah *Drof out*. Sedangkan Indikator keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I telah melebihi target sebesar 33,97% dari target yang ditetapkan yaitu 45,00% dan terealisasi sebesar 11,03%. Berdasarkan data tahun 2015, dari data jumlah keluarga di Kota Bontang yaitu 36.453, telah mengalami penurunan menjadi 4.019 keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I, Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang dalam mensejahterakan masyarakat Kota Bontang.

Tabel 4.15

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,27	1,45	1,20	1,06	1,72	1,43	1,27
2.	Rasio akseptor KB	76,53	77,80	77,94	77,59	85,23	75,97	79,00
3.	Cakupan peserta KB aktif	76,53	77,79	77,94	77,59	77,06	75,52	79,00
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	43,00	8,82	15,69	12,52	14,34	11,03	45,00

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera telah terlaksana dengan baik namun terdapat permasalahan yang tidak terlalu signifikan diantaranya: tahun 2015, indikator Rasio Akseptor KB lebih rendah dari target yang terdapat dalam RPJMD. Hal tersebut disebabkan adanya peserta KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (*Drof Out*), dimana minat masyarakat dalam ber-KB masih rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

13. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dan PMKS secara bermartabat dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 45 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.12.109.915.123,00. Realisasi keuangan sebesar

Rp.10.638.655.002,00 atau 87,85% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,58%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.5 Urusan Sosial.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Salah satu inidikator yang tercapai dalam urusan ini adalah jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Sosial dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	7	6	7	7	7	7
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	3,18	3,30	3,63	19,65	27,64	21,75	3,76
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	3,86	3,92	4,33	58,42	43,07	24,86	4,17

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2) Permasalahan dan Solusi

Pada urusan ini terdapat permasalahan PMKS yang memperoleh bantuan sosial serta penanganan masalah kesejahteraan sosial cenderung menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peningkatan jumlah PMKS pada tahun 2015 daripada tahun sebelumnya dan jumlah PMKS yang dibantu sedikit akibat keterbatasan anggaran. Solusi untuk masalah ini adalah seluruh pemangku kepentingan harus bekerjasama untuk mengurangi angka PMKS

terutama fakir miskin dan korban bencana seperti kebakaran dan lainnya serta penambahan anggaran untuk penanganan PMKS.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja berkualitas akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun apabila tenaga kerja tersebut tidak dikelola dan dikendalikan secara baik akan berpotensi menjadi suatu permasalahan bagi daerah.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan ketenagakerjaan ini terdiri dari 4 program yang diimplementasikan dalam 23 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.297.227.700,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.2.215.179.185,00 atau 96,43% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.6 Urusan Ketenagakerjaan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang

tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,93	0,86	0,86	0,89	0,91	0,91	1,07
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	57,18	52,89	58,73	68,17	66,06	67,20	62,11
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	153,85	68,75	127,66	46,51	64,33	202,02	115,38
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	59,00	57,24	59,79	73,94	65,40	69,94	57,43
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	26,77	19,84	22,01	19,53	6,13	13,99	30,62
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	7,25	6,54	14,32	11,19	9,38	6,83
6.	Keselamatan dan perlindungan	79,49	75,00	63,83	100,00	100,00	100,00	79,23
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA								
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	54,49	67,69	73,87	62,08	115,43	115,43	132,30
2.	Rasio ketergantungan	49,66	49,32	48,56	48,23	47,62	46,77	49,48

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik

2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Angka pada indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah nol dikarenakan tidak ada kejadian perselisihan antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.

2) Permasalahan dan Solusi

Pada urusan ini terdapat beberapa permasalahan yakni :

- a. Angka sengketa pekerja dan pengusaha belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan angka sengketa masih terbilang cukup tinggi (20 sengketa) meskipun turun dari tahun sebelumnya.
- b. Masih belum tercapai target pencari kerja yang ditempatkan dan tingkat pengangguran terbuka dikarenakan jumlah pencari kerja terbilang cukup tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia.

Adapun solusi bagi permasalahan yang ada adalah :

- a. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bontang untuk menekan terjadinya angka perselisihan antara pengusaha dan pekerja.
- b. Meningkatkan usaha investasi yang meningkatkan lapangan kerja serta memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi para pencari kerja sehingga para pencari kerja dapat terserap lebih banyak baik di dalam dan luar wilayah kota Bontang.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 11 program yang diimplementasikan dalam 42 kegiatan. Program dan kegiatan

tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.11.438.698.678,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.10.758.149.398,00 atau 94,05% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 97,25%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4.4 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Indikator Usaha Mikro dan Kecil melebihi target capaian dikarenakan keberhasilan penyuluhan, adanya kegiatan pendampingan secara berkesinambungan serta kemudahan dalam pemberian modal usaha.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Persentase koperasi aktif	74,56	66,20	87,16	87,16	85,71	85,34	85,00
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	67	68	103	85	77	80	72
3.	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	3	3	3	3	3	3	3
4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	13.242	13.401	16.553	16.553	18.176	18.206	13.742

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan dalam pelaksanaannya

berjalan sesuai target dan tidak terdapat permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan.

16. Urusan Penanaman Modal dan Investasi

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi, akan mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi.

Pelaksanaan penanaman modal dan investasi adalah untuk mendorong terjadinya perluasan lapangan kerja serta peningkatan nilai investasi di sektor industri non migas, dan industri maritim dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan penanaman modal dan investasi terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 6 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.407.831.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.346.397.538,00 atau 95,64% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 97,05%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4.5 Urusan Penanaman Modal.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota

Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4.19
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal dan Investasi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)							
	- PMDN	10	22	14	15	14	23	24
	- PMA	11						
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
	- Rp	560.394	4.707.936	8.319.546	6.375.093	11.861.333	805.555	886.110
	- \$	236.314	497.024	1.683.881	896.946	452.599	297.017	323.749
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	1459,00	463.375	680,57	628,00	393,07	1597,00	1630,00
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	55,948	8,992	76,28	25,287	51,26	59,671	59,671

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

2) Permasalahan dan Solusi

Melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan sebagai implementasi dari urusan Penanaman Modal dan Investasi, dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target dan tidak terdapat permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan.

17. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap adat dan budaya bangsa sehingga dapat dialih generasikan secara berkesinambungan yang mampu

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan ini terdiri dari 8 program yang diimplementasikan dalam 40 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 12.731.780.233,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.10.919.317.448,00 atau 85,76% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 95,00%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.7 Urusan Kebudayaan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, untuk sasaran meningkatnya jumlah grup kesenian yang ada di Kota Bontang dengan menghitung satu tahun terakhir mengalami penurunan 51 (lima puluh satu) grup kesenian pada tahun 2014 dengan capaian kinerja 92,73% menjadi 35 (tiga puluh lima) grup pada tahun 2015 dengan capaian kinerja 58,33%. Penurunan pada tahun 2015 disebabkan kurangnya SDM Aparatur yang diberikan tugas untuk pendataan bidang kebudayaan.

Indikator kinerja jumlah gedung belum mencapai target RPJMD karena ada 1 (satu) kegiatan museum dan gedung kesenian yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena menyangkut tidak tersedianya lahan.

Indikator kinerja penyelenggaraan festival seni budaya meningkat dari 13 pada tahun 2014 menjadi 17 festival pada tahun 2015 dan sesuai dengan target akhir RPJMD 17 festival.

Indikator kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan merupakan nilai penting dan arti khusus untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Dalam capaian indikator sudah sesuai target akhir RPJMD dan ada 102 cagar budaya yang sudah di registrasi/terdaftar di pemerintah pusat.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 4.20
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA							
1.	Jumlah grup kesenian	1,81	1,77	1,96	2,45	3,12	2,14	3,98
2.	Jumlah gedung	0,14	0,20	0,0005	0,12	0,22	0,35	0,39
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB							
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	9	14	13	13	17	17
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	3 paket	4 paket	1 paket
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,07	0,14	1	0,21	0,42	0,42	0,42

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi urusan komunikasi dan informatika selama periode tahun 2015 sebagai berikut :

Indikator jumlah grup kesenian mengalami penurunan realisasi yang berdampak pada akhir periode Renstra SKPD dimana target kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah akumulasi penambahan jumlah grup kesenian selama 5 (lima) tahun yaitu 216 grup kesenian dengan realisasi hanya 187 grup kesenian sehingga terjadi selisih 29 grup kesenian dan harus diusulkan kembali menjadi indikator kinerja pada dokumen RPJMD dan Renstra 2016 – 2021. Menurunnya realisasi kinerja disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pembentukan grup kesenian yang baru dan tidak adanya SOP tentang pemberian izin atau rekomendasi berdirinya suatu kelompok / paguyuban / grup kesenian. Solusinya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya memberikan laporan pendirian kelompok/paguyuban/grup kesenian baru untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberian bantuan dalam melakukan aktivitas dan melakukan pendataan terhadap kelompok kesenian yang aktif.

Indikator penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan meskipun sudah sesuai dengan target akhir, akan tetapi didalam dokumen Renstra SKPD telah ditetapkan akumulasi target pada akhir periode RPJMD selama 5 (lima) tahun adalah 72 festival seni dan budaya, sementara hanya terlaksana 62 penyelenggara festival selama 5 tahun. Indikator kinerja periode Renstra 2016 – 2021 bisa mencapai target dengan mengikuti penyelenggaraan festival seni budaya baik dalam maupun luar daerah.

Indikator kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sudah sesuai target akhir RPJMD dan ada 102 cagar budaya yang sudah di registrasi/terdaftar di pemerintah pusat, hanya saja belum ditetapkan dan perlu melakukan koordinasi ke pusat terkait usulan 102 cagar budaya berdasarkan hasil Kajian Potensi Cagar Budaya Kota Bontang tahun 2015.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran pemuda, organisasi pemuda, dan organisasi keolahragaan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga ini terdiri dari 11 program yang diimplementasikan dalam 52 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.46.698.517.214,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.37.945.927.723,00 atau 81,26% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 89,81%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja	Kondisi	Realisasi	Target
----	-------------------	---------	-----------	--------

	Pembangunan Daerah	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	2011	2012	2013	2014	2015	Akhir
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA								
1.	Jumlah klub olahraga	2	0,270	0,263	1,475	1,817	1,776	2
2.	Jumlah gedung olahraga	0,33	1,213	1,184	1,155	1,128	1,102	0,33
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Jumlah organisasi pemuda	71	71	87	84	82	82	76
2.	Jumlah organisasi olahraga	44	46	51	69	46	46	49
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	8	13	16	16	16	15
4.	Jumlah kegiatan olahraga	5	8	19	37	13	15	15
5.	Balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006
6.	Lapangan olahraga	0,33	0,344	0,355	0,366	0,357	0,349	0,38

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga

Rumusan untuk indikator Jumlah Klub Olahraga dinyatakan sebagai jumlah klub olahraga untuk setiap 10.000 penduduk. Terdapat salah asumsi pada penentuan kondisi awal dan target akhir di mana angka yang disertakan merupakan jumlah Jumlah klub olahraga, dan hanya klub olahraga yang dianggap besar yang dicatat. Penyesuaian kemudian dilakukan, di mana semua klub olahraga yang resmi ikut dicatat, dan penghitungan disesuaikan dengan Permendagri No.54 tahun 2010. Pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 29 klub olahraga yang ada di Bontang. Dengan demikian untuk jumlah penduduk Bontang sebanyak 163.326 jiwa perhitungan jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dapat melebihi kondisi ideal dan mencapai nilai 1,776.

Permasalah dan penyesuaian penentuan indikator Jumlah Klub Olahraga dilakukan pula di indikator Jumlah Gedung Olahraga. Di Kota Bontang terdapat 18 gedung olahraga. Dengan demikian kondisi tersebut telah melebihi target akhir yang ingin dicapai untuk per 10.000 penduduk.

Perkembangan jumlah organisasi olahraga kurang berkembang di masyarakat karena Pengurus Kota Cabang Olahraga sudah mampu mengakomodir cabang olahraga yang ditangani. Organisasi olahraga yang ada terbentuk karena tidak memiliki Pengurus Kota Cabang Olahraga, misalnya Organisasi Perkumpulan Olahraga Tradisional.

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kurang sinergi dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda karena adanya dualisme kepengurusan dari KNPI Pusat yang berimbas hingga KNPI Kota Bontang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kemenpora dan Dispora Provinsi mengenai penyelesaian dualisme kepengurusan KNPI, serta kepengurusan KNPI yang legal dan diakui Pemerintah.
- ✓ KONI sebagai mitra dalam pembinaan olahraga sangat bergantung pada APBD baik dari hibah dan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- ✓ Pembekuan PSSI oleh Pemerintah RI mengakibatkan batal berjalannya kegiatan yang berhubungan dengan PSSI termasuk Pembinaan Pelatih Olahraga.
- ✓ Dinas Pemuda dan Olahraga kesulitan dalam memperoleh data-data keolahragaan dari pihak cabor hal ini disebabkan kurangnya pendataan yang dilaksanakan oleh cabor maka diperlukan inventarisir dan pendataan secara berkala sehingga mendapatkan data yang akurat terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- ✓ Penyusunan Grand Design Dispora tidak dapat dilaksanakan karena kesulitan untuk bertemu dengan tenaga ahli calon penyedia hingga memasuki triwulan III sehingga Pengguna Anggaran harus memutuskan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

- ✓ Pembangunan Sport Center di Kelurahan Loktuan tidak dapat selesai di tahun 2015 dan dilakukan perpanjangan untuk diselesaikan di tahun 2016.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditujukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini terdiri dari 15 program yang diimplementasikan dalam 77 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satpol Pamong Praja, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Serta Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.23.220.949.453,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.18.930.649.458,00 atau 81,52 % dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 87,47%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2.3 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4.22
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	34	39	28	18	47	20
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	10	15	10	10	12	24	15

Sumber : Badan Kesbangpol

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan dan berjalan sesuai dengan target.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditujukan dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ini terdiri dari 36 program yang diimplementasikan dalam 305 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kantor Satpol Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, Kecamatan, Kelurahan, Kantor Sekretariat KORPRI.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 299.239.105.521,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 268.419.115.610,00 atau 89,70% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 96,76%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2.4 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada tabel 4.23.

Tabel 4.23

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1.	Pertumbuhan PDRB							
	- Migas	-3,44	-7,42	-9,18	-5,72	-3,41	-3,13	-3,13
	- Non Migas	6,76	4,85	15,62	8,64	3,71	7,74	5,11
2.	Laju inflasi Kota Bontang	7,20	7,77	5,34	6,58	6,74	7,33	6,70
3.	PDRB per kapita							
	- Migas	369.510.315	374.803.765	358.418.517	361.034.412	369.276.325	366.451.466	253.435.031
	- Non Migas	57.332.416	97.986.212	116.776.088	133.440.309	131.609.485	130.146.019	92.635.220
4.	Indeks Gini	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,32
5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia							
	- Rendah	16,29	1,86	0,62	0,63	18,43	18,43	11,45
	- Sedang	40,14	39,27	45,62	47,23	36,93	36,93	43,59
	- Tinggi	45,57	58,87	53,76	52,15	43,64	43,64	45,52
6.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	85,71	98,14	94,67	94,67	94,84	94,91	89,10
7.	Angka kriminalitas yang tertangani	299	486	315	315	399	350	345
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,14	6,00	4,20	5,26	4,71	7,65	9,86
2.	Jumlah Linmas per 10.000	49	49	38,54	2,75	2,0	46,65	49,8

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penduduk							
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	348	23,2	26,33	26,33	20,20	18,87	459
4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penegakan PERDA	93,38	92,00	94,20	60,00	97,32	100	97,38
6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1.095	1.095	1.035	197	474	360	1.095
7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	68,18	100,00
8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	40	0,02	0,02	0,025	0,02	0,47	60
9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,000043	0,000033	0,003881	0,000061	0,00061	0,00551	0,000041
10.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	76,92	81,50	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
11.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik	60,00	66,67	73,33	73,33	86,67	93,33	93,33
12.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR								
1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	10	14	26	18	18	18	13
2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	4	6	9	9	9	9	6
3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	12	21	21	21	21	30	27

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	26	25	30	30	24	23	34
FOKUS IKLIM BERINVESTASI								
1.	Angka kriminalitas	20	51,77	10	8,9	8,9	14	18,3
2.	Jumlah demo	10	13	15	12	10	5	35
3.	Lama proses perijinan	12	15	10	18	11	11	5
4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8	21	25	28	24	22	9
5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	7	6	7	8	8	8	9

Sumber : 1. BPS Kota Bontang

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Badan Kesbanglinmaspol

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

6. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Faktor pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, antara lain: ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) belum tertata dengan baik, *event* budaya dalam skala besar belum ada, dan belum tersedianya kalender *event* sehingga agen perjalanan belum bisa membuat paket wisata. Selain itu, ada hotel yang ditutup (Hotel Kartika) karena persoalan manajemen internal. Penataan kembali sektor pariwisata dan dukungan iklim usaha yang baik dapat menjadi solusi untuk membangkitkan kembali bisnis penginapan/perhotelan.
- ✓ Kendala lama dalam proses perizinan di BPPM adalah karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum sepenuhnya berjalan. Namun hal tersebut sudah diperbaiki. Selain itu, hal yang menghambat proses perizinan pada saat survei izin lokasi yang bersangkutan tidak berada di tempat atau terjadi penundaan

pembayaran oleh pemohon izin sehingga penerbitan izin tertunda. Untuk itu, PTSP perlu diberlakukan sepenuhnya. Koordinasi yang baik dengan pemohon izin juga akan mempercepat proses perijinan.

- ✓ Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Bontang (BPPM) belum selesai karena masih Prolegda.
- ✓ Pada fokus layanan urusan wajib terdapat kesalahan persepsi dan penghitungan termasuk penetapan target awal dan akhir pada 2 indikator, yaitu rasio pos siskamling per jumlah kelurahan (indikator nomor 3) dan petugas perlindungan Linmas (indikator nomor 8). Pada 2 indikator tersebut, terdapat data series dari tahun 2011 sampai tahun 2014 sehingga besaran capaian dihitung ulang sesuai dengan data dan rumus yang semestinya.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penganeekaragaman pangan serta ketersediaan cadangan pangan di Kota Bontang.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Ketahanan Pangan ini terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 19 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.541.652.500,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.838.145.176,00 atau 72,32% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 97,84%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4.6 Urusan Ketahanan Pangan.

2) Permasalahan dan Solusi

Sejak terbentuknya Badan Ketahanan Pangan Kota Bontang hingga kini belum juga memiliki stock Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) karena belum ada Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Cadangan Pangan Kota Bontang dan Peraturan Daerah (PERDA) dan atau Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bontang.

Solusinya perlu dibentuk Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Kota Bontang dan dibuatkan Peraturan Daerah (PERDA) dan atau Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bontang.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditujukan untuk Meningkatkan Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah. Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini terdiri 9 program yang diimplementasikan dalam 41 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.6.073.689.673,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.4.896.689.755,00 atau 80,62% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,59%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana ditetapkan dalam

RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat melalui swadaya terhadap program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di seluruh kelurahan (15 kelurahan/100%) dengan demikian indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat telah tercapai.

Indikator kinerja pembangunan daerah untuk LPM berprestasi melebihi target hal ini disebabkan adanya koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh DPD LPM Kota Bontang bekerjasama dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk indikator kinerja pembangunan daerah tentang rata-rata jumlah kelompok binaan PKK melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan keaktifan tim penggerak PKK dalam pembentukan kelompok maupun pembinaan yang telah dilakukan.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel 4.24.

Tabel 4.24
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	15	0	0	11	15	15
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1448	1448	1384	1576	1686	1700	1600
3.	Jumlah LSM	42	22	70	70	40	60	102
4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	33,33	46,67	26,70
5.	PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100
6.	Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	27	47	60	100	100

Sumber : 1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
2. Badan Kesbanglinmaspol

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan dan berjalan sesuai dengan target.

23. Urusan Statistik

Urusan Statistik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Statistik mempunyai arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan urusan statistik bertujuan meningkatkan kualitas ketersediaan data untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Kegiatan Statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung Pembangunan Nasional.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik ini terdiri 1 program yang diimplementasikan dalam

4 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.598.585.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.488.369.369,00 atau 81,59% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

2) Permasalahan dan Solusi

Masih adanya perbedaan data jumlah penduduk berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam menghitung jumlah penduduk berbeda. Metode yang digunakan BPS dalam menghitung jumlah penduduk berdasarkan data penduduk yang berdomisili tetap dalam waktu tertentu (yang tidak berdomisili tetap tidak dihitung) sedangkan metode yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil data penduduk dihitung berdasarkan data penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau yang terdaftar pada Kartu Keluarga, walaupun berdomisili di tempat lain.

24. Urusan Kearsipan

Menyadari pentingnya manfaat kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Hal tersebut sejalan dengan pengertian arsip dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Penyelenggaraan urusan kearsipan dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan tertib kearsipan di instansi pemerintah.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kearsipan ini terdiri dari 4 program yang diimplementasikan dalam 12 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.217.048.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.171.874.600,00 atau 79,19% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2.5 Urusan Kearsipan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kearsipan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 4.25.

Tabel 4.25
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Pengelolaan arsip secara baku	5,60	15,91	11,11	25,00	33,33	36,17	24,10
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	4	3	3	3

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pengelolaan arsip secara baku telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah SKPD yang berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan arsip.

2) Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan arsip, permasalahan yang ditemui adalah masih banyak SKPD yang belum melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Solusi mengatasi permasalahan tersebut yakni mendorong SKPD untuk

menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan kearsipan dalam bentuk pelatihan.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pelaksanaan program urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah.

Urusan komunikasi dan informatika ini terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 12.306.277.200,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 12.016.267.088,00 atau 97,64% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2.6.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, rasio wartel/warnet terhadap penduduk tiap tahun mengalami penurunan dan tidak sesuai target RPJMD, karena meningkatnya jumlah penggunaan telepon genggam.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 4.26.

Tabel 4.26
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Jumlah jaringan komunikasi	14	26	16	14	17	21,25	17
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	9	2,31	3,39	3,39	2,31	0,26	12
3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	5	5	5	6
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	17	17	14	14	14	14	19
5.	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
FOKUS FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR								
1.	Rasio ketersediaan daya listrik	55	126,76	141,06	151,53	160,57	161,06	175
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	77,00	84	99,54	100	100	100	90

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2) Permasalahan dan Solusi

Indikator jumlah penyiaran radio/TV mengalami penurunan dari kondisi awal periode RPJMD dari 17 stasiun menjadi 14 stasiun dengan target akhir RPJMD 19 stasiun disebabkan banyak yang tidak beroperasi tanpa ijin (ilegal). Dari 14 stasiun, 5 stasiun radio yang masih beroperasi belum memiliki ijin, 7 stasiun radio dan 2 stasiun TV yang memiliki ijin (legal).

Perlu ditargetkan capaian indikator 5 tahun ke depan dan melakukan tindakan terhadap stasiun yang belum memiliki ijin.

Sedangkan untuk indikator dari kondisi akhir periode RPJMD dari 12 wartel/warnet menjadi 0,26 disebabkan perkembangan IT sehingga minat masyarakat untuk ke wartel/warnet sangat rendah, karena sudah terpenuhi oleh handphone, tablet dan sebagainya sehingga wartel/warnet akan terkikis oleh perkembangan jaman.

26.Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang, kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh bahan bacaan dan informasi data yang akurat serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kualitas pembaca perpustakaan.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perpustakaan ini terdiri dari 7 program yang diimplementasikan dalam 33 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.5.213.574.535,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.4.851.244.575,00 atau 93,05% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1.10 Urusan Perpustakaan.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Indikator presentasi jumlah perpustakaan melebihi dengan target yang ditetapkan dikarenakan meningkatnya minat budaya baca masyarakat dan adanya dukungan dari pemerintah pusat (perpustakaan nasional)

berupa buku dan rak buku untuk 15 kelurahan dan bantuan dari pemerintah provinsi (Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim) berupa buku, rak buku dan sistem IT untuk Kecamatan Bontang Barat.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 4.27.

Tabel 4.27
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Jumlah perpustakaan	1	-	197	174	174	214	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	46.843	74.523	86.147	28.888	36.663	37.017	59.785
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	69.596	70.523	78.254	87.774	98.691	104.952	112.085

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Dalam tahun 2015 pelaksanaan urusan Perpustakaan melalui beberapa program dan kegiatan dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target antara lain :
- ✓ namun perlu adanya Perwali pendukung perpustakaan mengenai jam pelayanan dan kewajiban SKPD untuk memiliki perpustakaan sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- ✓ Tingginya minat baca masyarakat masih kurang didukung khususnya ketersediaan transportasi menuju perpustakaan sehingga perlu adanya trayek atau jalur angkutan kota yang melalui perpustakaan.
- ✓ Perlunya menambah sarana dan prasarana pendukung perpustakaan seperti ketersediaan komputer, bandwitch internet serta mobil perpustakaan keliling.

B. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 5 urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pertanian ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 14 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan serta Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.635.430.800,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.2.355.164.786,00 atau 89,37% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 92,19%.

Untuk rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.4.1.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel 4.28

Tabel 4.28
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN							

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Cakupan bina kelompok petani	43,14	47,06	57,14	92,11	60,87	86,49	70,59

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi;

Pelaksanaan urusan Pertanian melalui beberapa program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan.

2. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan urusan Kehutanan dimaksudkan untuk rehabilitasi dan pemulihan kerusakan hutan dan lahan yang disebabkan oleh masyarakat maupun alam. Hutan dan masyarakat sekitarnya merupakan sebuah ekosistem yang perlu dikelola secara bersama-sama dengan cara meningkatkan peran masyarakat pada pelaksanaan peningkatan rehabilitasi dan pemulihan hutan serta lahan.

Untuk rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.3.1.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kehutanan ini terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 5 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.061.935.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.1.002.544.565,00 atau 94,41% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kehutanan dapat dilihat pada tabel 4.29.

Tabel 4.29
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,21	0	0,89	1,78	1,78	1,78	0,78
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	21,69	19,52	18,63	16,85	15,07	15,07	12,81

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi;

Permasalahan pada urusan kehutanan adalah masih sering terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia yang melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran.

Sebagai solusinya perlu dilakukan sosialisasi akan pentingnya memelihara kawasan hutan lindung serta pengawasan dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya energi guna menunjang perekonomian daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kehutanan ini terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 8 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.577.622.500,00. Dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.533.455.000,00 atau 92,35% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 88,99%.

4. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan Pariwisata dimaksudkan sebagai upaya mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Bontang sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kehutanan ini terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 8 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.952.891.400,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.589.839.431,00 atau 90,82% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.4.3 Urusan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja pembangunan urusan pariwisata mengalami peningkatan selama 5 tahun dan secara umum pelaksanaan urusan pariwisata telah berjalan dengan cukup baik, peningkatan tiap tahun telah terlaksana pembangunan/penataan beberapa objek wisata unggulan Kota Bontang. Jumlah kunjungan wisata sebanyak 5.300

pengunjung dengan prosentasi capaian kinerja 96,36% dengan kenaikan 1,36% dari tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa kunjungan wisata dari tahun ke tahun pluktuatif.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kehutanan dapat dilihat pada tabel 4.30.

Tabel 4.30
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Kunjungan wisata	3.915	4.111	4.307	4.503	4.750	5.300	6.000
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB							
	- Migas	0,05	1,27	1,42	1,50	1,55	1,77	0,46
	- Tanpa Migas	0,32	0,49	0,43	0,41	0,43	0,43	0,61

Sumber : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. BPS Kota Bontang

2) Permasalahan dan Solusi;

Permasalahan dan solusi urusan pariwisata selama periode tahun 2015 sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahunnya meningkat, hanya saja yang menjadi masalah dari target tahun 2015 sebesar 5.300 pengunjung tidak mencapai target RPJMD 6.000 pengunjung. Permasalahan lainnya adalah dengan meningkatnya pembangunan/penataan beberapa objek wisata unggulan Kota Bontang, namun begitu pembangunan/penataan objek wisata masih belum mampu menopang perekonomian masyarakat.

Kedepannya pelaksanaan urusan pariwisata harus mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat dan tidak hanya nilai fisik dari objek wisata, dengan kata lain mampu meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat setempat.

Solusi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dengan melakukan monitoring ojek wisata terkait jumlah pengunjung, pembenahan sarana dan prasarana, mengembangkan destinasi wisata, memfasilitasi para pelaku seni berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan melakukan kajian teknis terhadap penyusunan serta mengusulkan peraturan daerah tentang retribusi objek wisata.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari urusan Kelautan dan Perikanan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir serta Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kelautan dan perikanan ini terdiri dari 13 program yang diimplementasikan dalam 54 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.23.476.483.730,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.21.363.606.213,00 atau 91,00% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 98,52%.

Untuk rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.3.2.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 4.31

Tabel 4.31

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target 2014
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Produksi perikanan	79,73	86,87	91,52	89,29	106,92	91,78	82,37

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target 2014
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2.	Konsumsi ikan	193,40	76,29	117,49	195,54	254,25	223,36	161,23
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	6,54	52,00	25,00	60,00	18,93	28,30	32,26
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	79,73	86,77	91,52	110,05	158,25	91,78	82,33

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi;

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan melalui beberapa program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan.

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perdagangan terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 17 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.23.098.470.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.22.020.255.498,00 atau 95,33% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 96,93%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.4.4 Urusan Perdagangan.

Tabel 4.32
Indikator Pembangunan Kota Bontang, Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB							
	- Migas	1,13	1,36	1,35	1,47	1,55	2,17	10,13
	- Non Migas	8,09	8,86	8,42	8,21	7,96	6,08	9,01
2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	8,564	11,241	10,217	9,167	7,837	4,410	23,146
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	699	719	750	616	616	616	799

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2) Permasalahan dan Solusi

Target capaian indikator kinerja pembangunan daerah terkait kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB belum mencapai target yang ditetapkan karena harga gas LNG, methanol dan amoniak yang mengalami penurunan.

Target capaian indikator kinerja pembangunan daerah terkait ekspor bersih perdagangan belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan produksi PT. Badak NGL mengalami tren penurunan, terjadinya penurunan suplai gas dari Muara Badak, adanya kontrak jangka panjang yang kuotanya menurun setiap tahunnya, adanya perusahaan PT. Kaltim Pasific Amoniak yang tutup, negara pengimpor beralih membeli barang ke negara yang lain dengan kualitas yang lebih baik.

Target capaian indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami penurunan dikarenakan adanya kelompok pedagang yang beralih usaha bahkan menutup usahanya karena kurangnya

pengetahuan tentang manajemen usaha, kekurangan modal serta sulitnya untuk memasarkan hasil usaha mereka.

Solusi dari permasalahan ini yaitu meningkatkan pemberian bantuan modal, pelatihan dan pemasaran hasil usaha kepada bina kelompok pedagang. Melakukan promosi investasi dengan mengikutsertakan perusahaan-perusahaan dalam event pameran bertaraf nasional dan internasional, kemudahan dalam ijin produksi serta insentif bagi masuknya investor baru.

7. Urusan Industri

Pelaksanaan urusan industri dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sektor industri di Kota Bontang, khususnya industri kecil dan menengah yang diharapkan kedepan dapat memiliki peran yang lebih besar dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan industri terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 7 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.792.736.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.761.381.648,00 atau 96,04% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Indikator presentasi cakupan bina kelompok pengrajin sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.4.5 Urusan Industri.

Tabel 4.33
Indikator Pembangunan Kota Bontang, Urusan Industri

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi					Target Akhir
			2011	2012	2013	2014	2015	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB							
	- Migas	95,38	94,96	90,00	95,06	95,06	94,69	95,38
	- Non Migas	66,83	67,62	68,12	69,27	69,27	70,43	66,83
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0,16	0,00	0,01	0,01	0,01	0,05	2,16
3.	Pertumbuhan Industri							
	- Ind. Besar	0,00	20,00	6,14	0,00	-16,67	-14,28	20,00
	- Ind. Rumah	9,26	3,33	3,00	3,27	13,44	42,48	14,26
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	29,41	35,41	42,11	45,45	50,00	83,00	54,41

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2) Permasalahan dan Solusi

Target capaian indikator kinerja pembangunan daerah terkait pertumbuhan industri besar belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa perusahaan yang tutup seperti PT. Kaltim Pasific Amoniak dan PT. Kaltim Safarina Fajar, adanya rencana masuknya pembangunan pabrik pengolahan rumput laut yang batal masuk.

Solusi dari permasalahan ini yaitu melakukan promosi investasi dengan mengikutsertakan perusahaan-perusahaan dalam event pameran bertaraf nasional dan internasional, kemudahan dalam ijin produksi serta insentif bagi masuknya investor baru.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara serasi selaras dan seimbang maka pemerintahan pusat telah menetapkan 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yakni :

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Dekonsentrasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bantuan Langsung dari Kementrian Sosial.

Dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015, maka dalam bab ini akan diuraikan mengenai realisasi

pelaksanaan program-program pembangunan melalui anggaran masing-masing kementerian dimaksud baik yang secara teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui SKPD teknis maupun yang bersifat bantuan dan diterima langsung oleh kelompok sasaran.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.(Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung

Pada 2015 Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian. Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh SKPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015

Tahun	Kementrian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2015	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	499.000.000	488.805.000	97,96	100
	Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	4.028.308.000	3.640.329.580	90,37	100
	Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	1.450.000.000	1.125.195.931	77,60	100
	Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	898.027.000	823.929.816	91,75	100

Sumber : Laporan SKPD pelaksana Tugas Pembantuan 2015

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja khususnya bidang ketenagakerjaan dengan realisasi secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015

Tahun	Kementrian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2015	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	796.540.000	750.642.900	87,5	100,00

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2015

Disamping Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Kota Bontang pada tahun 2015 menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa program yang bersifat bantuan langsung. Pelaksanaan program ini dilaksanakan langsung oleh kementerian terkait dengan menyalurkan langsung pendanaan pembangunan kepada kelompok sasaran atau kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan program ini hanya sebatas membantu proses verifikasi data kelompok yang akan menjadi penerima bantuan program. Bantuan langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial ini dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Bantuan Langsung Pemerintah Pusat

Tahun	Kementerian	SKPD Pendamping	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2015	Kementerian Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	5.344.320.112	5.344.320.112	100	100,00

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2015

C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung

Pelaksanaan tugas pembantuan, dekonsentrasi dan bantuan langsung yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2015, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan sebagai berikut:

a. Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015

- 1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - SKPD Pelaksana; Dinas Kesehatan Kota Bontang.
 - Program; Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 - Kegiatan; Bantuan Operasional Kesehatan
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap;
 - SKPD Pelaksana; Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.
 - Program; Program Pengembangan dan Pengolahan Perikanan Tangkap
 - Kegiatan; Pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, tangguh dan maju (sekaya maritim) dan Pengembangan kelembagaan mendukung pengembangan kampung nelayan yang mandiri.
- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
 - SKPD Pelaksana; Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.
 - Program; Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
 - Kegiatan; Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan, dan Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

4) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- SKPD Pelaksana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- Program; Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kegiatan; Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

b. Dekonsentrasi Tahun 2015

Pelaksanaan program melalui dana dekonsentrasi disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan SKPD Pelaksana; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK), Kegiatan Sistem Informasi Pasar Kerja.
2. Program Pemagangan Dalam Negeri, kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri (PNBP).
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIPJSTK), kegiatan Penyuluhan Hub. Industrial di Kota Bontang (PUMC).
4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, kegiatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan.

c. Bantuan Langsung dari Kementrian Tahun 2015

Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementrian terkait di Kota Bontang pada tahun 2015 disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun SKPD yang melakukan verifikasi kepada kelompok sasaran adalah Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial:

- Fasilitasi usaha bagi gakin melalui KUBE (15 Kube)
- Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) (130 unit)
- Sarana Lingkungan (Sarling) (1 unit dermaga tambat dan TPA)
- UEP/ODHA (Usaha Ekonomi Produktif/ Orang dengan HIV/AIDS) (10 clien)
- UEP KTK (Korban Tindak Kekerasan) (48 clien)
- UEP WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) (50 clien)

2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti

- LK3 (Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga)

3. Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial penyandang cacat, fisik, mental, serta lansia terlantar:

- ASODKB (asistensi sosial orang dengan kecacatan berat) (9 orang)
- ASLUT (asistensi sosial lanjut usia terlantar)
- PKH (Program keluarga harapan) (802 keluarga miskin)
- ASKESOS (Asuransi Kesejahteraan Sosial) (1.101 KK)
- RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center)
- KIS (Kartu Indonesia Sehat) (36.436 KIS)
- Bansos untuk anak terlantar asuhan keluarga, AMPK, balita terlantar (35 anak)

D. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung dari Kementrian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan baik dengan

realisasi fisik rata-rata mencapai 100% dan keuangan mencapai 90,9%. Data realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program terkait dapat mencapai target yang ditetapkan dengan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun permasalahan utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah pusat tersebut adalah sebagai berikut:

- Koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program masih belum maksimal sehingga informasi tentang penyelenggaraan program terkait masih sangat terbatas pada SKPD teknis pelaksana.
- Penyampaian laporan progres pelaksanaan program belum secara rutin disampaikan kepada Pemerintah Kota Bontang melalui Bappeda sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.
- Upaya untuk meningkatkan alokasi program pembangunan melalui sumber-sumber pembiayaan APBN masih perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi beban fiskal daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud telah diupayakan meningkatkan koordinasi dengan masing-masing SKPD terkait melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda pada setiap triwulan tahun berjalan. Rapat koordinasi ini utamanya dimaksudkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang didanai APBD Kota, APBD provinsi, dan APBN (DAK, Dekon-TP) dan program-program lainnya yang dilaksanakan di Kota Bontang.



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

PEMERINTAHAN

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga dapat membantu pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling.

menguntungkan Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah beserta turunannya, saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan kerjasama daerah adalah untuk memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, serta dapat menunjang keserasian pembangunan daerah agar kesenjangan antar daerah dapat diminimalisir.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang dioptimalkan dalam upaya mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Kerjasama daerah dinilai memiliki beberapa peran yang strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mensejahterakan masyarakat.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, Pemerintah Kota Bontang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui berbagai program pembangunan.

Kerjasama antar daerah ini diyakini dapat menjadi salah satu media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, pelayanan lintas daerah, mencegah konflik antar daerah dan menjadi wadah untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2015 adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 188.6/35/HUK dan Nomor 134.4/623/OTDA. Adapun kerjasama melalui bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, perikanan, kelautan dan pertanian, sumber daya pengairan dan konservasi, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, penataan ruang dan sosial-budaya.

Selain itu telah dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kutai Kartanegara pada tanggal 17 April 2015, yang meliputi kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, perumahan, perhubungan, sumber daya pengairan, konservasi dan pemanfaatan ruang.



3. Permasalahan dan Solusi.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan pembahasan lebih detail dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu telah dilakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur agar kerjasama daerah tersebut dapat segera direalisasikan.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa sangat diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholders lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak terbentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.



1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan

kerjasama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama ini melibatkan Perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta serta pihak perbankan yang tergabung dalam Forum CSR Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 dan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Badan Usaha Milik Negara maupun swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a) Direktur PT. Pupuk Kaltim
- b) Direktur PT. Badak NGL
- c) Direktur PT. Indominco Mandiri
- d) Direktur G.A PT Kaltim Methanol Industri
- e) Direktur PT. Kaltim Parna Industri
- f) Direktur PT. Black Bear Resource
- g) Direktur PT. Kaltim Nitrate Indonesia
- h) Direktur PT. Kaltim Industrial Estate
- i) Direktur PT. Kaltim Daya Mandiri
- j) Direktur PT. Kaltim Nusa Etika
- k) Direktur PT. Kitadin
- l) Direktur PT. Pama Persada Nusantara
- m) Direktur PT. Chevron
- n) Direktur PT. Pertamina Gas
- o) Direktur PT. United Tractor
- p) Direktur PT IKPT
- q) Kepala Telkom Bontang
- r) Kepala PLN Bontang
- s) Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bontang
- t) Kepala Cabang Bank Mandiri Bontang
- u) Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bontang

- v) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bontang
- w) Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Bontang
- x) Kepala Cabang Bank Danamon Bontang
- y) Kepala Cabang Bank Muamallat Bontang
- z) Kepala Cabang Bank Mega Bontang
- aa) Kepala Cabang Bank Dhanarta Bontang
- bb) Kepala Cabang Bank Internasional Indonesia (BII) Bontang
- cc) Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Bontang

Bentuk kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran pihak perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility Funds (dukungan alokasi dana CSR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini diharapkan program-program CSR dapat bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan tepat sasaran. Sinergi program ini dapat terjadi dengan adanya koordinasi, penyusunan perencanaan bersama dan pelaksanaan program-program CSR dimasing-masing perusahaan.

Kerjasama yang dilaksanakan mencakup 15 (lima belas) program yang terdiri:

- a) Program Pengembangan Infrastruktur;
- b) Program Pendidikan;
- c) Program Keagamaan;
- d) Program Kesehatan;
- e) Program Pemberdayaan dan Kemitraan;
- f) Program Olah Raga dan Kesenian;
- g) Program Sosial dan Pengentasan Kemiskinan;
- h) Program Kelestarian Alam & Lingkungan Hidup
- i) Program bantuan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat (kegiatan bidang perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan)

- j) Program bantuan modal usaha (dana) bagi Usaha Kecil dan Mikro
- k) Program penyuluhan, pendampingan dan Peningkatan SDM bagi
- l) Program Nasional Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA).
- m) Program magang kerja dan pelatihan kerja
- n) Program pengadaan air bersih dan jaringannya
- o) Program Penerangan dan listrik

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan di Kota Bontang untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan diimplementasikan melalui sinergi program CSR perusahaan. Pelaksanaan kegiatan program CSR perusahaan pada tahun 2015 bidang ekonomi, sosial dan Lingkungan dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Ekonomi

No	PERUSAHAAN	Kegiatan	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4	5
1	PT Pupuk Kaltim	1. Pinjaman modal kerja	Bontang Utara, Bontang Barat, Bontang Selatan	Bontang Kuala, Bontang Baru, Guntung, Loktuan, Gunung Elai, Api api, Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Gunung Telihan
		2. Bimbingan dan perkuatan pemasaran	Bontang Utara	Loktuan
		3. Bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian	Bontang Barat	Kanaan
		4. Bantuan hibah teknik produksi	Bontang Utara, Bontang Selatan	Loktuan, Api-api, Tanjung Laut
2	PT Kaltim Methanol Industri	Pelatihan, bantuan alat dan modal untuk masyarakat dalam pembuatan amplang	Bontang Utara	Guntung
		1. Konservasi Kawasan Mangrove	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah
		Diversifikasi produk Tanaman Mangrove	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah
		Pelatihan membuat tingkat mahir	Bontang Barat	Gunung Telihan
		2. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		Pembentukan koperasi untuk pencacahan plastik	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		3. Produksi Tepung Mocaf	Bontang	
		Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Kelompok	Bontang	
		4. Budidaya Jamur Tiram	Bontang Barat	Kelurahan Telihan

No	PERUSAHAAN	Kegiatan	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4	5
3	PT Badak NGL	Pelatihan Diversifikasi Produk Pangan Berbasis Jamur	Bontang Barat	Kelurahan Telihan
		Pembentukan koperasi	Bontang Barat	Kelurahan Telihan
		5. Pendampingan Masyarakat TEKASALO	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		Pembangunan workshop produk olahan TEKASELO	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		6. Budidaya Ikan Air Tawar	Bontang Utara	Kelurahan Api-Api
		Diversifikasi Pangan Berbasis Ikan Air Tawar	Bontang Utara	Kelurahan Api-Api
		7. Pengembangan Komunitas Tata Busana	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pelatihan dan bantuan pengadaan mesin jahit	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pembentukan koperasi	Bontang Barat	Gunung Telihan
		8. Pengolahan Tepung Cangkang Kepiting	Bontang Utara	Bontang Kuala
		Pelatihan pembuatan produk tepung dan pengolahan kue	Bontang Utara	Bontang Kuala
		Fasilitasi legalisasi produk (PIRT & BPOM)	Bontang Utara	Bontang Kuala
		9. Ternak Mandiri	Bontang Utara	Loktuan
		Pembangunan Kantor Koperasi Ternak Mandiri	Bontang Utara	Loktuan
		10. EKOWISATA MANGROVE LESTARI INDAH	Bontang Utara dan Bontang Selatan	BontangKuala, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari
		Pengadaan Alat produksi dan perahu wisata (perahu fiber)	Bontang Utara dan Bontang Selatan	BontangKuala, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari
		Pelatihan sumber daya manusia	Bontang Utara dan Bontang Selatan	BontangKuala, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari
		Bantuan benih	Bontang Utara dan Bontang Selatan	BontangKuala, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari
		11. BUDIDAYA JAMUR LING ZHI TELIHAN	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pengadaan paranet, mesin parutan dan mesin tepung	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pelatihan kelembagaan, manajemen keuangan dan pengemasan produk	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Fasilitasi legalisasi produk jamur Ling Zhi dan bantuan baglock	Bontang Barat	Gunung Telihan
		12. BUDIDAYA LELE (Pemanfaatan Air Sungai untuk Budidaya Lele)	Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat	Api-Api, Kanaan dan Satimpo
		Pengadaan mesin pengelola pakan	Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat	Api-Api, Kanaan dan Satimpo
		Pelatihan kelembagaan, manajemen keuangan, pengemasan produk diversifikasi	Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat	Api-Api, Kanaan dan Satimpo
		Fasilitasi penelitian dengan BLH Kota Bontang untuk mengetahui kadar limbah air sungai	Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat	Api-Api, Kanaan dan Satimpo

No	PERUSAHAAN	Kegiatan	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4	5
		Hak Paten pemanfaatan Air sungai untuk budidaya lele	Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat	Api-API, Kanaan dan Satimpo
		13. KOCIBU (KOPERASI CIPTA BUSANA) FASHION	Bontang Selatan	Satimpo
		Pelatihan kelembagaan, manajemen keuangan dan pelatihan produksi kain perca	Bontang Selatan	Satimpo
		Pengadaan mesin obras, mesin produksi, bantuan peralatan menjahit	Bontang Selatan	Satimpo
		Fasilitasi pembentukan Lembaga Pendidikan & Pelatihan Kerja	Bontang Selatan	Satimpo
		14. PROGRAM BIODESEL (Pemanfaatan Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel)	Bontang Utara dan Bontang Selatan	Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah
		Pengadaan mesin uji coba, drum penampungan	Bontang Utara dan Bontang Selatan	Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah
		Sosialisasi dan uji coba biodiesel	Bontang Utara dan Bontang Selatan	Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah
		Integrasi Program Biodiesel dengan Kelompok Karya Bersama (TEKASALO)	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		15. MANGROVE EKOMODE	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pengadaan mesin canting kelewong	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pelatihan kelembagaan dan kewirausahaan	Bontang Barat	Gunung Telihan
		16. BUDIDAYA KEPITING BAKAU	Bontang Utara	Bontang Kuala
		Perbaikan fasilitas, pengadaan kapal ketinting, pengadaan benih	Bontang Utara	Bontang Kuala
		Pelatihan kewirausahaan dan budidaya kepiting bakau	Bontang Utara	Bontang Kuala
		17. TERNAK MANDIRI	Bontang Utara	Loktuan
		Pengadaan tempat pemotongan sapi	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Pelatihan pembuatan pakan, manajemen keuangan dan pelatihan kewirausahaan	Bontang Barat	Gunung Telihan
		Penambahan modal usaha (BMT)	Bontang Selatan	Satimpo

Tabel 6.2
Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Sosial

No	PERUSAHAAN	Kegiatan	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4	5
1	PT Pupuk Kaltim	1. Program Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan	Bontang Utara, Bontang Barat	Loktuan, Belimbing
		2. Pembayaran pengobatan masyarakat tidak mampu	Bontang Utara, Bontang Barat	Loktuan
		3. Bantuan sarana ibadah	Bontang Utara	Gn. Telihan
		4. Pemberian fasilitas untuk pengentasan kemiskinan	Bontang Utara	Loktuan
2	Bank Dhanarta	1. Pembangunan Sekolah Raudhatul Athfal Qur'ratul A'yun	Bontang Barat	Gunung Telihan
		2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga lanjut usia	Bontang Utara	Api-api
3	PT Kaltim Methanol Industri	1. Program beasiswa KMI	Bontang	
		2. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	Bontang Utara	

No	PERUSAHAAN	Kegiatan	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4	5
		3. Pemberian pelajaran tambahan bahasa Inggris	Bontang Utara, Bontang Barat	Loktuan, Guntung
		4. Pemberian bimbingan belajar kepada siswa SD	Bontang Utara	Loktuan, Guntung
		5. Bantuan buku bagi perpustakaan kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Loktuan
		6. Bantuan Alat band untuk pemuda Loktuan	Bontang Utara	Loktuan
		7. Bantuan alat olahraga untuk pemuda Loktuan	Bontang Utara	Loktuan
		8. Sumbangan untuk grup tari sebagai pelestarian budaya	Bontang Utara	Guntung
		9. Bantuan fasilitas pembangunan di sektor pendidikan	Bontang	
		10. Donor darah pada HUT ke-24 KMI	Bontang Utara	Loktuan
		11. Sunatan massal	Bontang Utara	Loktuan, Guntung
		12. Sumbangan rutin ke masyarakat sekitar	Bontang	
		13. Sumbangan ke beberapa Mesjid	Bontang Utara	Loktuan, Guntung
		14. Sumbangan ke pondok pesantren	Bontang, Sangatta	
4	PT Pertamina Gas	Bantuan Perlengkapan siswa dan fasilitas belajar mengajar bagi siswa kurang mampu	Bontang Utara	Guntung
5	PT United Tractors	1. Bantuan Dana Muscab Puskesmas Tg Laut	Bontang Selatan	Tg Laut
		2. Bantuan proposal Pemuda Pancasila	Bontang	
		3. Bantuan proposal Event Pangeran Antasari	Bontang	
		4. Bantuan Sertijab Rudal	Bontang Utara	Gunung Elai
		5. Bantuan komponen pendidikan Sekolah Binaan UT (SOBAT) SMK N 3 Bontang	Bontang Barat	Gunung Telihan
		6. Penilaian Uji Kompetensi Siswa SMK Sobat Bontang	Bontang	
		7. kegiatan Ranking 1 K3 YKPP	Bontang Selatan	Tg Laut
		8. Donor Darah Internal dan Siswa SMK Nusantara Mandiri	Bontang Selatan	Tg Laut
		9. Seminar Parenting bagi Ibu-ibu Periska UT	Bontang Selatan	Tg Laut
6	PT Badak NGL	1. Sosialisasi POSYANDU Berbas Pantai	Bontang Selatan	Berbas Pantai
		2. Renovasi POSYANDU Berbas Pantai	Bontang Selatan	Berbas Pantai
		3. Pengadaan perlengkapan POSYANDU	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		4. Pelayanan Kesehatan Ibu	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		5. Pelayanan Kesehatan Anak	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		6. Posyandu Lansia	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		7. Training Kader Posyandu	Bontang Selatan	Bontang Lestari

Tabel 6.3
Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Infrastruktur

No	PERUSAHAAN	Kegiatan	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	5	6
1	PT Pupuk Kaltim	Penanaman Pohon dan Mangrove	Bontang Utara	Loktuan
2	Bank Dhanarta	Penyediaan Bak Sampah	Bontang Selatan	Berebas Tengah
3	PT Kaltim Methanol Industri (KMI)	1. Pembangunan Infrastruktur PDAM dan sarana pemeliharaan rutin di RTH 3,5 Ha di Bontang Lestari	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		2. Pembangunan Terasering dan Jogging Track di area RTH 3,5 Ha di Bontang Lestari	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		3. Kemitraan dengan TNK	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		4. Manajemen pengelolaan sampah dan cara mendaur ulang	Bontang Utara	Loktuan
		5. Konservasi Hutan Mangrove dan pengelolaan hasil Bumi dari Hutan Mangrove	Bontang	TNK
		6. Partisipasi dalam Expo Bontang di bidang Lingkungan	Bontang	
		7. Pembuatan Rumah Sayur	Bontang utara	Guntung
4	PT Pertamina Gas	1. Pembinaan Wawasan Lingkungan dengan Sekolah SOBAT BUMI yang bersinergi dengan Adiwiyata	Bontang Barat	Belimbing
		2. Rehabilitasi Lahan Kritis Mangrove	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		3. Pembuatan sumur bor, toilet dan tandon Sekolah Adiwiyata	Bontang Barat	Belimbing
5	PT United Tractors	1. Penanaman 100 Pohon mangrove di Salebba pada Kegiatan Backpacker Race Competition	Bontang Utara	Bontang Baru
		2. Kerja Bakti bersama warga	Bontang Selatan	Tg Laut
6	PT Kaltim Daya Mandiri	1. Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove	Bontang Selatan	Tg Laut Indah
		2. Penghijauan RTH dan Hutan Lindung	Bontang Selatan	Bontang Lestari
7	PT Badak NGL	1. Pembuatan terumbu karang buatan (Bioreeftek)	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah
		2. Konservasi tanaman mangrove	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Bontang Lestari dan Bontang Kuala
		3. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Ekowisata Mangrove Lestari Indah	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Bontang Lestari dan Bontang Kuala
		4. Penanaman 100.000 mangrove di Ekowisata Mangrove Lestari Indah	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Bontang Lestari dan Bontang Kuala
		5. Kegiatan Bonles Ecoenergy	Bontang Selatan	Bontang Lestari

3. Permasalahan dan Solusi

Kebijakan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan perusahaan dan perbankan baik BUMN maupun swasta melalui forum CSR Kota Bontang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan antara lain :

- Masih ditemukan beberapa kegiatan perusahaan dalam program penanggulangan kemiskinan belum mengarah pada data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang, untuk itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bontang (Bappeda) telah menyiapkan data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang sebagai data sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang nantinya digunakan dalam program dan kegiatan CSR.
- Masih adanya program dan kegiatan CSR perusahaan yang bersifat karikatif (bersifat pemberian langsung yang habis pakai). Untuk itu Program dan kegiatan CSR diharapkan lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat serta dilakukan pendampingan dan pemberdayaan sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi
- Khusus CSR perbankan masih ditentukan oleh keputusan manajemen pusat sehingga dari sisi waktu dan realisasi pelaksanaan lebih lama, untuk itu diharapkan ada kebijakan dalam dunia perbankan untuk menentukan program dan kegiatan CSR agar dapat disusun sendiri dilevel daerah secara langsung.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaduan gerak yang dilaksanakan baik oleh segenap unsur daerah, maupun dengan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

Keberadaan instansi vertikal di dalam proses pembangunan di daerah juga memiliki peran yang cukup besar dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat serta sasaran yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sejalan hal tersebut, pada tahun 2015 sebagai upaya optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, telah dilakukan koordinasi dan kerjasama oleh Pemerintah Kota Bontang dengan instansi vertikal yang ada di Kota Bontang yaitu:

- a. Kodim 0908 Kota Bontang
- b. Den Arhanud Rudal
- c. Polres Kota Bontang
- d. Kantor Kementrian Agama Kota Bontang
- e. Kantor Pengadilan Agama Kota Bontang
- f. Kejaksaan Negeri Kota Bontang
- g. Pengadilan Negeri Kota Bontang
- h. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang
- i. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Kota Bontang
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang
- k. Balai Taman Nasional Kutai
- l. Badan Pusat Statistik Kota Bontang

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai perwujudan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan Instansi Vertikal, pada tahun 2015 telah

dilaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui SKPD/Unit Kerja Terkait Pemerintah Kota Bontang yang meliputi:

1. Kerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan seperti Peringatan Hari Kemerdekaan, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota, Peringatan hari Keluarga Nasional, Hari Anti Narkoba Internasional, Penyelenggaraan MTQ, dan lain-lain.
2. Kerjasama penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri sebagai pengacara pemerintah untuk kasus gugatan tanah,
3. Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum dan Sosial di Kawasan Hutan Lindung Kota Bontang dalam Tim Terpadu yang melibatkan Polresta Kota Bontang, Kodim 0908 Kota Bontang, Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Den Arhanud Rudal dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
4. Kerjasama pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (MTsN dan MAN) dan Pembinaan Keluarga Sakinah dengan Kantor Kementrian Agama Kota Bontang,
5. Penurapan Sungai Bontang yang dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer (KODIM) 0908 Bontang, melalui TMMD di Kelurahan Api-Api.
6. Peningkatan ketertiban umum dengan Kepolisian Resort Kota Bontang,
7. Kerjasama penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah dengan Badan Pusat Statistik.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah selama tahun 2015 berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan dan kendala yang berarti. Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dan dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas.

Demikian pula berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 disebutkan penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Sejalan hal tersebut pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang melakukan penataan batas wilayah baik batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur, maupun batas wilayah kelurahan di Kota Bontang.

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahun 2015 pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang yaitu Kegiatan Penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Kegiatan ini berupa Monitoring dan Penataan Patok Batas Daerah.

2. Permasalahan dan Solusi

Pembinaan batas wilayah di Kota Bontang khususnya kegiatan penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai

Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang pada tahun 2015 terlaksana dengan baik tanpa terjadi adanya gangguan yang signifikan. Hal ini dapat terwujud karena adanya kesadaran dan koordinasi serta kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa semakin baiknya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu menjaga situasi yang kondusif.

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Linmas dan Polisi Pamong Praja melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan kesiapan dan keahlian pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dalam upaya mencapai sasaran Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat tersebut, kebijakan yang ditetapkan adalah :

- a) Peningkatan Penataan terhadap produk hukum daerah (Perda)
- b) Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat
- c) Mendorong Terciptanya kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
- d) Melakukan penyuluhan lewat sosialisasi dan bekerjasama dengan aparat & instansi terkait dalam rangka terciptanya rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang pada tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan yaitu :

- a) Penataan peraturan perundang-undangan
- b) Peningkatan kesadaran hukum dan HAM
- c) Pelayanan dan Bantuan Hukum
- d) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f) Penanggulangan Dampak Bencana
- g) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- h) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- i) Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
- j) Fasilitas Pemantapan Multikultur dan Umat Beragama

3. Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Bontang menyadari heterogentinas penduduk di daerah ini memiliki potensi konflik horizontal yang sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu melaksanakan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan. Pembinaan dilaksanakan kepada organisasi masyarakat seperti paguyuban-paguyuban, organisasi kepemudaan dan juga organisasi politik serta keagamaan.

BAB VII

PENUTUP

Penyampaian LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bontang merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang selama Tahun 2015 yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2015 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 5 dari RPJMD Kota Bontang 2011-2016 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016.

Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Bontang.

Sejalan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota ini, semua pihak perlu memahami bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2015 ini bukan semata hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka, namun lebih dari itu dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya secara umum dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD Kota Bontang selama tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari kinerja pengelolaan APBD Kota Bontang maupun kinerja pelaksanaan program selama tahun 2015 yang diindikasikan dari tingkat realisasi APBD maupun tingkat pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan.





Namun demikian perlu disadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus disikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dicapai bukanlah karena tekad dan usaha Pemerintah Kota semata. Namun semua itu dapat dicapai berkat dukungan semua pihak di Kota Bontang yang telah ikut mengambil peran aktif dalam pembangunan di Kota ini.

Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam membangun Kota Bontang, pada tahun 2015 Pemerintah Kota berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik skala regional maupun nasional. Beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2015 meliputi:

1. Penghargaan SINDO Government Award Daerah Terbaik Kategori Pendidikan dari Kementerian Pendidikan RI.
2. Penghargaan Adiwiyata 2015 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.

3. Penghargaan Adiwiyata 2015 tingkat Provinsi Kaltim dari Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
5. Peringkat I Anugrah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi Kaltim.
6. Penghargaan Terbaik 3 Bidang Perhubungan Tata Nugraha Provinsi 2015.
7. Penghargaan Penyusunan Laporan SLHD Terbaik Harapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
8. Penghargaan Adiwiyata 2015 Tingkat Nasional dari Presiden RI.
9. Penghargaan Adiwiyata 2015 Tingkat Provinsi Kaltim dari Gubernur Kalimantan Timur.
10. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Administrasi Kependudukan dari Provinsi Kaltim 2015.
11. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Provinsi Kaltim 2015.
12. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Kependudukan dan KB dari Provinsi Kaltim 2015.
13. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Koperasi dari Provinsi Kaltim 2015.
14. Penghargaan Terbaik 3 Bidang Kebudayaan Kategori Kota dari Provinsi Kaltim 2015.
15. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Keolahragaan dari Provinsi Kaltim 2015.
16. Penghargaan Top 99 Reformasi Sistem Pelayanan yang Bersifat Represif Menjadi Humanis.
17. Penghargaan WTP BPK RI.
18. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Kelurahan dari Provinsi Kaltim 2015.
19. Penghargaan Terbaik 3 Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu dari Provinsi Kaltim 2015.
20. Penghargaan Terbaik 3 Bidang PKK dari Provinsi Kaltim 2015.

21. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Pengelola Kearsipan dari Provinsi Kaltim 2015.
22. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Perpustakaan dan Minat Baca dari Provinsi Kaltim 2015.
23. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Pariwisata Kategori Kota dari Provinsi Kaltim 2015.
24. Penghargaan Terbaik 2 Bidang Perikanan dan Kelautan dari Provinsi Kaltim 2015.
25. Penghargaan peringkat kelima dalam ajang Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015, kategori kota kecil.
26. Peringkat kedua tingkat nasional Program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015, dengan kategori kota kecil

Berbagai penghargaan yang telah diraih Kota Bontang sudah sepatutnya disyukuri dan dijadikan motivasi untuk berbuat lebih nyata daripada hanya mencela dan berbuat lebih baik daripada hanya mengkritik. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan Anggota DPRD Kota Bontang atas segala dukungan dan partisipasi aktifnya serta turut membantu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tahun 2015. Semoga segala usaha yang kita lakukan dalam membangun Kota Bontang selama ini bernilai ibadah di hadapan Allah SWT Amien!!!

LAMPIRAN MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 BERDASARKAN MISI RPJMD KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016

A. URUSAN WAJIB

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Misi 1
(Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bontang Yang Berahlak Mulia dan Profesional)

A.4.1.1 URUSAN PENDIDIKAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	19.737.956.000,00	98,93	14.021.841.654,00	71,04		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000,00	100,00	9.291.912,00	48,90	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	100,00	82.279.310,00	62,33	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.000.000,00	100,00	15.099.900,00	79,47	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional (46 unit)		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.500.000,00	100,00	14.476.000,00	99,83	Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	171.384.000,00	100,00	170.613.650,00	99,55	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	214.688.000,00	100,00	164.265.800,00	76,51	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	100,00	4.850.000,00	69,29	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	454.410.000,00	100,00	448.327.000,00	98,66	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000,00	85,00	880.000,00	10,35	Penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.344.000,00	100,00	505.267.500,00	98,43	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.165.000,00	100,00	31.724.000,00	98,63	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyediaan Makanan dan Minuman	121.440.000,00	100,00	115.345.800,00	94,98	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	995.700.000,00	100,00	978.810.607,00	98,30	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	17.034.825.000,00	100,00	11.480.610.175,00	67,39	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran sebanyak 315 orang		Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	769.980.000,00	100,00	734.440.500,00	95,38		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	736.080.000,00	100,00	705.155.500,00	95,80	Adanya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.900.000,00	100,00	29.285.000,00	86,39	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	101.320.000,00	100,00	95.070.000,00	93,83		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	101.320.000,00	100,00	95.070.000,00	93,83	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	361.100.000,00	100,00	319.427.449,00	88,46		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	361.100.000,00	100,00	319.427.449,00	88,46	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Dinas Pendidikan
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.000.000,00	100,00	7.900.000,00	98,75		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	100,00	950.000,00	95,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dinas Pendidikan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	100,00	950.000,00	95,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran		Dinas Pendidikan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Dinas Pendidikan
	Penyusunan Renja SKPD	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	Penyusunan Renja SKPD		Dinas Pendidikan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	Penyusunan Laporan Akuntabilitas		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	52.800.000,00	100,00	0	0		Meningkatnya Pelayanan Publik bidang Pendidikan	
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	52.800.000,00	100,00	0	0			Dinas Pendidikan
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	737.455.000,00	100,00	647.599.250,00	87,82		Penyampaian Informasi Pelayanan Pendidikan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	737.455.000,00	100,00	647.599.250,00	87,82	3 kegiatan hari besar nasional dan kota {Pameran Hari Pendidikan Nasional (Ekspresi Pelajar), HUT Kota Bontang, dan Pameran Pendidikan (Bontang Education Expo)}		Dinas Pendidikan
8	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.937.740.000,00	100,00	2.707.368.329,00	92,16		Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Pada Jenjang PAUD	
	Pembangunan Gedung Sekolah	634.180.000,00	100,00	587.104.000,00	92,58	Pembangunan gedung sekolah PAUD		Dinas Pendidikan
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	451.260.000,00	100,00	435.081.379,00	96,41	Pembangunan 2 unit ruang kelas baru		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	170.340.000,00	100,00	168.530.000,00	98,94	Pembangunan 1 unit ruang UKS PAUD		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	198.440.000,00	100,00	196.670.000,00	99,11	Pembangunan 1 unit ruang perpustakaan		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	24.320.000,00	100,00	23.600.000,00	97,04	Penyediaan paket buku dan alat tulis siswa		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	63.480.000,00	100,00	62.755.000,00	98,86	Penyediaan APE (Alat Permainan Edukatif) PAUD		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Meubelair Sekolah	178.940.000,00	100,00	176.363.000,00	98,56	Penyediaan meubelair lembaga PAUD		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	196.445.000,00	100,00	189.557.750,00	96,49	Pelaksanaan pelatihan cipta lagu anak		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	44.420.000,00	100,00	34.000.000,00	76,54	Penyediaan data dan informasi PAUD		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini	151.220.000,00	100,00	146.021.900,00	96,56	Pelaksanaan pelatihan pengembangan kurikulum PAUD		Dinas Pendidikan
	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	58.620.000,00	100,00	42.356.000,00	72,26	Penyusunan Dokumen perencanaan program PAUD		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	70.070.000,00	100,00	68.962.000,00	98,42	Keikutsertaan dalam pameran PAUD di wilayah provinsi Kalimantan Timur		Dinas Pendidikan
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	10.950.000,00	100,00	10.891.800,00	99,47	Penyusunan dokumen pelaporan penyelenggaraan PAUD		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Parenting Education	120.320.000,00	100,00	110.711.500,00	92,01	Penyelenggaraan Parenting Education		Dinas Pendidikan
	Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	384.960.000,00	100,00	336.963.000,00	87,53	Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	179.775.000,00	100,00	117.801.000,00	65,53	Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD		Dinas Pendidikan
9	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	25.932.476.299,00	93,98	20.730.580.426,00	79,94		Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	209.789.999,00	100,00	173.527.000,00	82,71	Perencanaan pembangunan RKB SDN 007 BU, SDN 006 BU dan SDN 004 BS		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah	2.813.160.000,00	100,00	2.788.284.004,00	99,12	Pembangunan 2 unit Lab IPA & komputer SMPN 6 dan SMPN 7		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	215.080.000,00	100,00	214.246.000,00	99,61	Pemasangan paving blok SLB Negeri		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung SD Nahdatul Ulama (NU)	1.003.460.000,00	100,00	918.621.640,00	91,55	Pembangunan 1 unit gedung SD NU		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	101.400.000,00	100,00	48.840.000,00	48,17	Perencanaan Perpustakaan SDN 010 BU dan SDN 012 BS		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	479.540.000,00	50,55	242.393.868,00	50,55	Pengadaan buku kurikulum 2013 jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Meubelair Sekolah	322.670.000,00	80,00	79.016.000,00	24,49	Pengadaan meubelair sekolah		Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	11.358.920.000,00	100,00	9.963.696.000,00	87,72	Pembangunan sekolah SDN 002 BB, SDN 002 BS, SMPN 8, SMPN 2; pengecatan SDN 004 BS, SDN 011 BU, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SDN 004 BB; rehabilitasi lantai SMPN 4		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	2.089.510.000,00	95,00	1.329.486.634,00	63,63	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	588.875.300,00	100,00	254.030.150,00	43,14	Peningkatan keterampilan siswa sesuai dengan bakatnya		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	845.432.000,00	100,00	665.151.800,00	78,68	Penyelenggaraan kegiatan implementasi kurikulum 2013		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	252.920.000,00	100,00	183.396.300,00	72,51	Penyelenggaraan kelompok belajar paket A setara SD		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	422.545.000,00	100,00	405.628.690,00	96,00	Penyelenggaraan kelompok belajar paket B setara SMP		Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	402.914.000,00	100,00	285.842.780,00	70,94	Pelaksanaan pelatihan tenaga administrasi sekolah SD dan SMP; Pelatihan pengembangan perpustakaan dan sekolah adiwiyata		Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	1.703.825.000,00	100,00	1.284.602.950,00	75,40	Pelaksanaan lomba-lomba sesuai kompetensi siswa		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	488.045.000,00	100,00	242.175.250,00	49,62	Pelatihan guru SD dan SMP dalam pengembangan pembelajaran berbasis ICT		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	89.410.000,00	100,00	55.576.000,00	62,16	Penyelenggaraan akreditasi sekolah		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	741.280.000,00	85,16	631.247.000,00	85,16	Pembangunan pagar sekolah SLB N, SMPN 9, SMPN 2; jalan SDN Gunung Elai		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Peraga Edukatif, Buku Referensi, dan Buku Pengayaan untuk Sekolah Dasar	1.803.700.000,00	75,00	964.818.360,00	53,49	Penyediaan alat peraga/praktik TK, SD, SMP; Pengadaan Komputer CBT; Pengadaan buku keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan umum dan teknologi jenjang SD/MI, buku ensiklopedia dan buku perpustakaan		Dinas Pendidikan
10	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	21.429.520.000,00	93,50	16.816.485.786,00	78,47		Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.889.530.000,00	57,00	1.502.598.484,00	52,00	Pembangunan 6 ruang RKB SMKN 1		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain	4.768.700.000,00	100,00	3.819.759.273,00	80,10	Pembangunan lab SMKN 2 dan pembangunan bengkel dan lab/ praktek SMKN 3		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Ibadah	1.552.680.000,00	100,00	1.426.317.000,00	91,86	Pembangunan sarana ibadah (Masjid SMKN 2, renovasi musholla SMKN 1 dan ruang pembelajaran ibadah SMKN 3)		Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	651.800.000,00	100,00	650.500.000,00	99,80	Pembangunan jalan SMKN 2; pagar SMKN 1 dan SMKN 3		Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	5.804.650.000,00	100,00	5.242.351.907,00	90,31	Pembangunan 1 unit kantor guru SMAN 2		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	1.022.820.000,00	75,00	504.986.559,00	49,37	Pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	373.850.000,00	100,00	236.595.700,00	63,29	Pelatihan guru yang kompeten dengan kurikulum yang tervalidasi		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	461.520.000,00	100,00	461.010.000,00	99,89	Penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan berprestasi		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	460.320.000,00	100,00	436.500.000,00	94,83	Penyelenggaraan kelompok belajar paket C setara SMA		Dinas Pendidikan
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	721.470.000,00	100,00	432.178.900,00	59,90	Pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional, Pembuatan dan pencetakan soal Tes Daya Serap (TDS), Kegiatan uji kompetensi siswa SMK		Dinas Pendidikan
	Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan	1.560.520.000,00	100,00	1.187.073.313,00	76,07	Penyelenggaraan berbagai ajang kreatifitas siswa (OSN SMA, OST SMK, O2SN SMA/SMK, FLS2N SMA/SMK, LCC Lalu lintas, LCC UUD 1945, Parade Cinta Tanah Air)		Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	508.980.000,00	100,00	371.702.500,00	73,03	Pelaksanaan lomba-lomba sesuai kompetensi siswa		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	652.680.000,00	83,49	544.912.150,00	83,49	Peningkatan keterampilan siswa sesuai dengan bakatnya		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
11	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	3.921.032.400,00	92,14	3.405.330.005,00	86,85		Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Non Formal	
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	276.300.000,00	100,00	208.605.000,00	75,50	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor		Dinas Pendidikan
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	139.160.000,00	0,00	0	0			Dinas Pendidikan
	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	86.520.000,00	100,00	73.577.900,00	85,04	Pembinaan lembaga pendidikan kursus		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	195.260.000,00	100,00	190.971.600,00	97,80	Pelaksanaan pelatihan pengembangan kelompok belajar keaksaraan fungsional		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	220.220.000,00	100,00	203.485.350,00	92,40	Pembinaan keterampilan hidup bagi warga belajar		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	187.620.000,00	100,00	184.580.000,00	98,38	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non Formal	18.350.000,00	100,00	18.350.000,00	100,00	Penyediaan data dan informasi PNF		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	72.920.000,00	100,00	68.288.400,00	93,65	Penyusunan Kurikulum, bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal		Dinas Pendidikan
	Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal	58.820.000,00	100,00	56.712.000,00	96,42	Penyusunan dokumen program PNF		Dinas Pendidikan
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	16.025.000,00	100,00	16.025.000,00	100,00	Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program PNF di 3 kecamatan		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar	1.685.380.000,00	100,00	1.652.640.000,00	98,06	Pembangunan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	652.136.000,00	100,00	485.130.055,00	74,39	Penyediaan sarana dan prasarana kantor UPT SKB		Dinas Pendidikan
	Peningkatan Mutu PTK PAUDNI	239.585.000,00	90,00	184.503.300,00	77,01	Pelaksanaan pelatihan tenaga pendidik SKB		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan	72.736.400,00	100,00	62.461.400,00	85,87	Pelaksanaan pelatihan tata boga dan kecantikan		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
12	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	38.582.685.000,00	96,67	35.492.612.838,00	91,99		Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	2.562.665.000,00	100,00	2.233.531.978,00	87,16	Penyediaan beasiswa bagi tenaga pendidik		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.877.725.000,00	80,00	2.032.028.496,00	70,61	Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi; Lomba Jambore; Kegiatan Pramuka; SDP (School Development Program)		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	25.673.015.000,00	100,00	25.371.308.864,00	98,82	Penyediaan tambahan perbaikan penghasilan bagi pendidik		Dinas Pendidikan
	Penilaian Angka Kredit	77.150.000,00	100,00	62.013.500,00	80,38	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi pendidik dan tenaga kependidikan		Dinas Pendidikan
	Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Terhadap Guru (Bantuan Keuangan Provinsi)	4.173.065.000,00	100,00	3.534.965.000,00	84,71	Penyediaan tambahan perbaikan penghasilan bagi pendidik		Dinas Pendidikan
	Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Terhadap Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)	3.219.065.000,00	100,00	2.258.765.000,00	70,17	Penyediaan tambahan perbaikan penghasilan bagi tenaga pendidik PAUD		Dinas Pendidikan
13	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	4.824.928.000,00	97,50	3.937.052.875,00	81,60		Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	
	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	3.210.636.000,00	100,00	2.922.222.725,00	91,02	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain di bidang pendidikan		Dinas Pendidikan
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	724.020.000,00	80,00	377.252.250,00	52,11	Penerapan sistem manajemen yang terintegrasi teknologi informasi		Dinas Pendidikan
	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	162.740.000,00	100,00	80.742.000,00	49,61	2 kegiatan perayaan hari besar nasional bidang pendidikan (Hari Pendidikan Nasional dan Hari Guru)		Dinas Pendidikan
	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	233.810.000,00	100,00	224.760.900,00	96,13	Pembinaan UKS di kota Bontang (Lomba Sekolah Sehat dan PMR)		Dinas Pendidikan
	Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Siswa (MOS)	379.740.000,00	100,00	297.260.000,00	78,28	Pembinaan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS)		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Jenjang SMA/SMK/MA	24.630.000,00	100,00	12.175.000,00	49,43	Penyediaan biaya operasional kegiatan BOSDA Provinsi jenjang SMA/MA/SMK Negeri		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.880.000,00	100,00	7.640.000,00	13,43	Penyediaan biaya operasional kegiatan tambahan penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)	32.472.000,00	100,00	15.000.000,00	46,19	Penyediaan biaya operasional kegiatan manajemen BOS (APBN)		Dinas Pendidikan
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	20.477.202.300,00	100,00	18.082.595.318,00	88,31		Tercapainya program wajib belajar 12 tahun	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan	39.665.000,00	100,00	35.775.300,00	90,19	Bantuan Operasional Sekolah untuk semua jenjang pendidikan selama 12 bulan		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	109.334.000,00	100,00	101.633.635,00	92,96	Dana BOSTK bagi 325 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	28.420.000,00	100,00	24.209.500,00	85,18	Dana BOSTK bagi 86 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	19.500.000,00	100,00	19.500.000,00	100,00	Dana BOSTK bagi 62 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	311.320.000,00	100,00	288.166.650,00	92,56	Dana BOSTK bagi 620 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	208.120.000,00	100,00	206.174.900,00	99,07	Dana BOSTK bagi 517 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	385.390.000,00	100,00	362.333.100,00	94,02	Dana BOSTK bagi 770 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	257.320.000,00	100,00	227.944.949,00	88,58	Dana BOSTK bagi 512 siswa		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	279.320.000,00	100,00	278.379.200,00	99,66	Dana BOSTK bagi 695 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	194.920.000,00	100,00	182.270.151,00	93,51	Dana BOSTK bagi 484 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	288.820.000,00	100,00	234.366.200,00	81,15	Dana BOSTK bagi 574 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	541.200.000,00	100,00	499.099.740,00	92,22	Dana BOSTK bagi 540 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	169.720.000,00	100,00	125.340.050,00	73,85	Dana BOSTK bagi 421 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	170.120.000,00	100,00	165.978.100,00	97,57	Dana BOSTK bagi 422 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	67.500.000,00	100,00	67.480.000,00	99,97	Dana BOSTK bagi 56 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	385.620.000,00	100,00	363.369.850,00	94,23	Dana BOSTK bagi 548 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	285.720.000,00	100,00	280.554.400,00	98,19	Dana BOSTK bagi 711 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	215.320.000,00	100,00	213.133.602,00	98,98	Dana BOSTK bagi 535 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	119.320.000,00	100,00	105.841.250,00	88,70	Dana BOSTK bagi 295 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	174.500.000,00	100,00	169.844.000,00	97,33	Dana BOSTK bagi 425 siswa		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	329.320.000,00	100,00	282.402.954,00	85,75	Dana BOSTK bagi 410 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	90.300.000,00	100,00	85.961.520,00	95,20	Dana BOSTK bagi 190 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	262.920.000,00	100,00	210.469.050,00	80,05	Dana BOSTK bagi 654 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	268.920.000,00	100,00	214.180.550,00	79,64	Dana BOSTK bagi 669 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	248.820.000,00	100,00	187.796.900,00	75,48	Dana BOSTK bagi 495 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	200.920.000,00	100,00	140.148.000,00	69,75	Dana BOSTK bagi 499 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	189.320.000,00	100,00	184.105.600,00	97,25	Dana BOSTK bagi 470 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	36.300.000,00	100,00	33.900.400,00	93,39	Dana BOSTK bagi 30 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	25.500.000,00	100,00	23.743.600,00	93,11	Dana BOSTK bagi 21 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	57.900.000,00	100,00	57.589.500,00	99,46	Dana BOSTK bagi 48 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	110.520.000,00	100,00	107.018.796,00	96,83	Dana BOSTK bagi 273 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	127.498.000,00	100,00	119.704.313,00	93,89	Dana BOSTK bagi 303 siswa		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	154.300.000,00	100,00	94.023.850,00	60,94	Dana BOSTK bagi 385 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	587.220.000,00	100,00	527.874.600,00	89,89	Dana BOSTK bagi 837 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	608.580.000,00	100,00	596.789.500,00	98,06	Dana BOSTK bagi 471 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	504.480.000,00	100,00	498.609.050,00	98,84	Dana BOSTK bagi 652 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	429.000.000,00	100,00	417.971.500,00	97,43	Dana BOSTK bagi 556 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	351.360.000,00	100,00	343.057.521,00	97,64	Dana BOSTK bagi 458 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	541.560.000,00	100,00	405.875.800,00	74,95	Dana BOSTK bagi 700 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	103.600.000,00	100,00	101.225.510,00	97,71	Dana BOSTK bagi 178 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	170.520.000,00	100,00	168.427.150,00	98,77	Dana BOSTK bagi 288 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	180.320.000,00	100,00	177.437.000,00	98,40	Dana BOSTK bagi 305 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 1 Bontang	1.235.320.000,00	100,00	1.091.528.000,00	88,36	Dana BOSTK bagi 617 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 2 Bontang	838.520.000,00	100,00	762.396.096,00	90,92	Dana BOSTK bagi 598 siswa		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 3 Bontang	781.820.000,00	100,00	685.929.730,00	87,73	Dana BOSTK bagi 526 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang	1.875.980.000,00	100,00	1.430.557.254,00	76,26	Dana BOSTK bagi 942 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 2 Bontang	858.880.000,00	100,00	667.215.841,00	77,68	Dana BOSTK bagi 577 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 3 Bontang	428.940.000,00	100,00	289.090.116,00	67,40	Dana BOSTK bagi 290 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB Negeri Bontang	132.415.300,00	100,00	129.701.230,00	97,95	Dana BOSTK bagi 85 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMA Negeri 1 Bontang	662.000.000,00	100,00	619.081.150,00	93,52	Dana BOSDA bagi 617 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMA Negeri 2 Bontang	585.000.000,00	100,00	558.780.308,00	95,52	Dana BOSDA bagi 598 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMA Negeri 3 Bontang	530.000.000,00	100,00	428.635.350,00	80,87	Dana BOSDA bagi 526 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMK Negeri 1 Bontang	1.455.000.000,00	100,00	1.336.792.235,00	91,88	Dana BOSDA bagi 942 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMK Negeri 2 Bontang	865.500.000,00	100,00	811.543.417,00	93,77	Dana BOSDA bagi 577 siswa		Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMK Negeri 3 Bontang	397.500.000,00	100,00	341.637.350,00	85,95	Dana BOSDA bagi 290 siswa		Dinas Pendidikan
15	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.229.750.000,00	63,33	665.960.400,00	54,15		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan	59.095.000,00	10,00	3.012.500,00	5,10	Penyelenggaraan pengelolaan dan penataan aset bidang pendidikan		Dinas Pendidikan
	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	823.255.000,00	100,00	577.977.500,00	70,21	Penyediaan penghargaan bagi siswa/siswi, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi		Dinas Pendidikan
	Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan	347.400.000,00	80,00	84.970.400,00	24,46	Penyusunan perencanaan program bidang pendidikan		Dinas Pendidikan
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBERMAKNAAN PENDIDIKAN	255.380.000,00	100,00	224.442.850,00	87,89		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	
	TFT Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berkarakter SD, SMP, dan SMA/SMK	255.380.000,00	100,00	224.442.850,00	87,89	Pelaksanaan pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk guru		Dinas Pendidikan
17	PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMI KOMUNITAS BONTANG	1.788.858.000,00	90,00	613.385.000,00	34,29		Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tinggi	
	Pembangunan Gedung Sekolah	1.182.160.000,00	80,00	149.735.000,00	12,67	Perencanaan pembangunan gedung Akademi Komunitas, masterplan gedung AK; perencanaan AMDAL BTP dan AK		Dinas Pendidikan
	Pemberian Beasiswa	606.698.000,00	100,00	463.650.000,00	76,42	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa Akademi Komunitas Bontang		Dinas Pendidikan
18	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	3.324.600.000,00	87,08	2.833.828.010,00	85,24		Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Inklusif	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Pendidikan Inklusif	485.375.000	100,00	480.218.000	98,94	Pembangunan 2 ruang sekolah inklusif SDN 003 BU		Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	310.710.000	100,00	291.137.000	93,7	Penyediaan alat peraga bagi anak berkebutuhan khusus jenjang SD dan SMP		Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Ringan/ Sedang Gedung Sekolah	218.380.000	100,00	119.151.000	54,56	Rehabilitasi 1 unit ruang kelas SDN 006 BU		Dinas Pendidikan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	353.540.000	100,00	262.295.410	74,19	Pelaksanaan Workshop Adaptasi Kurikulum, pembelajaran dan praktik lesson study sekolah inklusi; Workshop pembekalan dan peningkatan kompetensi GPK tentang pendidikan inklusif; Workshop pusat data, informasi dan publikasi; pelatihan CTL guru pesisir		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Center	1.134.830.000	100,00	1.116.991.000	98,43	Pembangunan sarana penunjang Autis Center (Jalan masuk, pos satpam, pagar, tempat parkir, taman dan lapangan)		Dinas Pendidikan
	Operasionalisasi Lembaga Autis Center	621.465.000	100,00	544.835.600	87,67	Penyediaan biaya operasional lembaga Autis Center		Dinas Pendidikan
	Pelatihan Tata Laksana Perilaku Penyandang Autisme di Kota Bontang	200.300.000	9,59	19.200.000	9,59	Pelaksanaan pelatihan tata laksana perilaku penyandang autisme		Dinas Pendidikan
19	PROGRAM PENDIDIKAN TECHNOPARK	1.544.500.500,00	66,67	901.893.550,00	58,39		Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tinggi	
	Penyelenggaraan Briging Training Bontang Techno Park	925.508.000	100,00	759.493.550	82,06	Penyelenggaraan pelatihan bagi siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi		Dinas Pendidikan
	Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas	193.832.500	100,00	142.400.000	73,47	Pelaksanaan pengembangan jurusan Akademi Komunitas oleh tim ahli		Dinas Pendidikan
	Operasionalisasi Lembaga Akademi Komunitas dan Bontang Techno Park	425.160.000	0,00	-	0	Penyediaan biaya operasional lembaga Akademi Komunitas dan Bontang Techno Park		Dinas Pendidikan
20	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	5.742.657.000,00	100,00	5.525.449.957	96,22		Meningkatnya peran sosial kemasyarakatan perguruan tinggi	
	Pembangunan Asrama Putri Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (KAPASISBON) Jl. Markisa Samarinda	3.406.032.000,00	100,00	3.371.729.000	98,99	Terlaksananya pembangunan asrama Putri keluarga pelajar dan mahasiswa (Kapasisbon) jalan Markisa Samarinda		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Tinggi	230.650.000,00	100,00	204.290.000	88,57	Fasilitasi pelaksanaan pertemuan HMB		Sekretariat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	1.485.965.000,00	100,00	1.439.965.000	96,90	Terlaksananya 12 asrama di Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Balikpapan dan Samarinda (7)		Sekretariat Daerah
	Peningkatan Peran Sosial Kemasyarakatan Ke Perguruan Tinggi	620.010.000,00	100,00	509.465.957	82,17	Lancarnya kegiatan perguruan tinggi		Sekretariat Daerah
	URUSAN PENDIDIKAN	153.759.940.499,00	96,11	127.763.264.197,00	83,09	20 PROGRAM; 176 KEGIATAN		

A.4.1.2 URUSAN KESEHATAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	30.165.720.947,00	100,00	28.694.509.412,00	95,12		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000,00	100,00	4.350.000,00	100,00	Tersedianya Materai 3000 dan 6000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.756.260.000,00	100,00	3.430.553.982,00	91,33	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, dan Gas		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	83.100.000,00	100,00	66.707.499,00	80,27	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 danPerpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	134.156.000,00	100,00	132.953.400,00	99,10	Belanja Alat Tulis Kantor, Peralatan Kelengkapan Komputer dan Peralatan Kelengkapan Printer		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.530.000,00	100,00	113.211.318,00	91,65	Belanja Barang Cetakan dan Pengandaan		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.475.000,00	100,00	7.475.000,00	100,00	Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	886.810.000,00	100,00	845.738.300,00	95,37	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.680.000,00	100,00	43.680.000,00	100,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.153.000,00	100,00	34.958.000,00	99,45	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, pengisian air minum isi ulang, sembako untuk tenga Farmasi		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	198.505.000,00	100,00	191.503.910,00	96,47	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Internal SKPD dan Tersedianya Makan Minum Tamu		Dinas Kesehatan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.166.282.000,00	100,00	2.135.175.662,00	98,56	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	22.726.419.947,00	100,00	21.688.202.341,00	95,43	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.679.460.000,00	99,56	6.327.669.480,00	82,40		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.469.580.000,00	96,50	1.433.654.400,00	97,56	Pembelian Sarana Ambulance Air dan Sepeda Motor		Dinas Kesehatan
	Pengadaan Meubelair	37.320.000,00	100,00	36.660.000,00	98,23	Belanja Filing Kabinet, Lemari Arsip, Kursi Tamu		Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.121.130.000,00	100,00	992.710.246,00	88,55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.924.930.000,00	100,00	2.394.047.635,00	81,85	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Kendaraan Dinas / Operasional		Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.143.300.000,00	100,00	641.929.790,00	56,15	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, Komputer, Printer, Mesin Absensi dan Mesin Fotocopy		Dinas Kesehatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	198.200.000,00	100,00	195.362.000,00	98,57	Belanja Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Bontang Selatan I, Puskesmas Bontang Barat dan Puskesmas Bontang Lestari dan Pembuatan Pojok Lakatasi, Ruang Barang Foging		Dinas Kesehatan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	250.000.000,00	100,00	158.798.178,00	63,52	Tersedianya sarana/ tempat meludah poli paru (1 paket) dan tersedianya pengaman toilet pasien RSUD (1 paket)		RSUD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	535.000.000,00	100,00	474.507.231,00	88,69	Terpeliharanya kanopi IGD, Pintu Utama dan Parkir (1 paket), keramik teras utama dan IGD (1 paket), Instalasi Fire Sprinkler (1 paket) Chiller (1 paket), pintu utama otomatis (1 paket), instalasi air bersih (1 paket), UPS Alkes (1 paket), dan rehabilitas gedung gudang (1 paket)		RSUD
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	582.180.000,00	100,00	568.922.000,00	97,72		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	582.180.000,00	100,00	568.922.000,00	97,72	Pembelian Pakaian Hari-Hari Tertentu (Pakaian Kerja Non PNS, Pakaian Olah Raga untuk Tenaga Dinas Kesehatan dan Puskesmas)		Dinas Kesehatan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.492.320.000,00	99,56	2.258.685.592,00	90,63		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.294.500.000,00	96,50	1.130.148.240,00	87,30	Belanja Kontribusi Diklat dan Senam Kesehatan Rutin		Dinas Kesehatan
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	50.500.000,00	100,00	48.216.500,00	95,48	Pertemuan Insan Kesehatan Berbudi Luhur, Pembinaan Mental Aparatur dan Pembinaan Mental Aparatur		Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan BTCLS	165.660.000,00	100,00	152.380.000,00	91,98	Jumlah peserta diklat BTCLS yang lulus (40 orang)		RSUD
	Pendidikan dan Pelatihan Exellent Service	80.420.000,00	100,00	69.031.800,00	85,84	Jumlah apartur peseerta diklat Excellent Service (40 orang)		RSUD
	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	615.000.000,00	100,00	615.000.000,00	100,00	Jumlah peserta alih jenjang menjadi S1 Program Ners (30 orang)		RSUD
	Pendidikan dan Pelatihan K3	42.800.000,00	100,00	25.683.000,00	60,01	Jumlah aparatur peserta diklat K3 (40 orang)		RSUD
	Bimtek Asuhan Keperawatan	116.520.000,00	100,00	101.120.852,00	86,78	Jumlah aparatur peserta diklat Asuhan Keperawatan (40 orang)		RSUD
	Pendidikan dan Pelatihan MPKP (Model Praktik Keperawatan Profesional	126.920.000,00	100,00	117.105.200,00	92,27	Jumlah aparatur peserta pelatihan MPKP (40 orang)		RSUD
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.500.000,00	92,95	23.407.000,00	99,60		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.250.000,00	100,00	3.225.000,00	99,23	Tersusunnya Dokumen LAKIP		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	78,84	950.000,00	95,00	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	19.250.000,00	100,00	19.232.000,00	99,91	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		Dinas Kesehatan
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	119.115.000,00	81,93	7.472.200,00	6,27		Meningkatnya Pelayanan Publik bidang Kesehatan	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Konsultasi dan Sertifikasi ISO 9001-2008	119.115.000,00	81,93	7.472.200,00	6,27	Konsultasi mengenai ISO 9001-2008		RSUD
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	72.800.000,00	100,00	72.147.600,00	99,10		Penyampaian Informasi Pelayanan Kesehatan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	72.800.000,00	100,00	72.147.600,00	99,10	Terlaksananya pameran pembangunan RSUD (5 hari), karnaval (1 hari)		RSUD
8	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	221.425.000,00	100,00	154.858.600,00	69,94		Ketersediaan Teknologi Informasi	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi	221.425.000,00	100,00	154.858.600,00	69,94	Tersedianya kelengkapan komputer (1 Tahun) dan peralatan jaringan komputer, terpeliharanya jaringan telepon (1 paket), mesin absensi (1 paket), jaringan komputer (1 paket)		RSUD
9	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.804.961.000,00	100,00	2.786.862.751,00	99,35		Pengadaan obat sesuai Standar ISO	
	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	2.475.410.000,00	100,00	2.470.195.301,00	99,79	Pengadaan Bahan Obat-Obatan, Pengadaan Alat Kedokteran Umum, Belanja Pemusnahan/Pembakaran Perbekalan Kesehatan		Dinas Kesehatan
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	329.551.000,00	100,00	316.667.450,00	96,09	Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan, Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit, Belanja modal pemeliharaan software/aplikasi/sistem informasi		Dinas Kesehatan
10	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.213.326.000,00	98,95	23.342.874.952,00	92,58		Kualitas penanganan luka di Puskesmas	
	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	8.000.000,00	98,65	6.690.000,00	83,63	Monev Pelaksanaan Program di Puskesmas		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembinaan Manajemen Puskesmas	305.275.000,00	100,00	262.207.406,00	85,89	Terlaksananya Kegiatan Akreditasi Puskesmas, Penilaian Kinerja Puskesmas, Implementasi Pasien Safety, Forum Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bimtek Pelayanan Pengobatan Dasar, Bimtek Yankestradkom, dan Bimtek Aplikasi LB Yankes FKTP		Dinas Kesehatan
	Pembinaan Kesehatan Khusus dan Olahraga	169.075.000,00	95,60	142.668.714,00	84,38	Jumlah pasien yang mendapatkan pely kes khusus(operasi katarak, dan Pendamping ODMK) serta penyelenggaraan upaya kes kerja, kes gigi & mulut, kes haji, kes jiwa dan kes olahraga, Bimtek Intelegensia, Kesehatan Hiperbarik		Dinas Kesehatan
	Pembinaan UKS	72.330.000,00	100,00	69.330.000,00	95,85	Lomba Dokter Kecil Tk Kota, Pelatihan Penanganan Gawat Darurat, Cetak Buku Anak Sekolah, Cetak Buku Anak Sekolah		Dinas Kesehatan
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)	163.770.000,00	100,00	151.269.400,00	92,37	Telaksananya Program JKN dan Jamkesprov Kaltim bagi Masyarakat Miskin		Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu	84.380.000,00	100,00	81.572.900,00	96,67	Jumlah kegiatan pelayanan P3K		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	107.130.000,00	100,00	102.829.100,00	95,99	Pembinaan Kader Lansia, Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah, Pelayanan Posyandu Lansia, POS UKK, Pos Bindu, Pusling dan Pengembangan ISO dan Manajemen Puskesmas		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	154.725.000,00	100,00	151.862.900,00	98,15	Terlaksananya Pelayanan Pos Terpadu (Pos Usila & Pos Bindu), Terlaksananya Pelayanan Posyandu Balita, Terlaksananya Sosialisasi Penjangkaran Kesehatan Anak Sekolah, Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor Puskesmas, Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Terlaksananya Minilokakarya Tribulanan Puskesmas, Terlaksananya Akreditasi Puskesmas & Patient Safety, Terlaksananya Pembinaan Sekolah Percontohan UKS, Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor Puskesmas		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	71.900.000,00	100,00	71.788.000,00	99,84	Terlaksananya pusling, posyandu balita, Posbindu dan Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Tradisional		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	184.700.000,00	100,00	174.499.350,00	94,48	Kegiatan UKS dan UKGS		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	166.010.000,00	90,00	155.231.450,00	93,51	kegiatan Posyandu, Posbindu, Terlaksananya Minilokakarya Puskesmas, Kegiatan Posyandu Usila, Posyandu Balita, Posbindu, Pos UKK, Sosialisasi PAK pada Pekerja, Kegiatan PHN, Kegiatan Pusling, Survei Kepuasan Pelanggan, Terlaksananya Minilokakarya Puskesmas, Pelayanan Posyandu Balita, Posyandu Usila, Posbindu selama 12 bulan, Pendataan dan Pembinaan UKK		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	133.565.000,00	99,82	133.236.650,00	99,75	Pembinaan Kader Posyandu Balita, Kegiatan PHN, Pertemuan Linsek, Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan		Dinas Kesehatan
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	22.450.905.000,00	99,96	20.995.548.482,00	93,52	Jasa Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Jasa Pelayanan Jamkesda Pegawai		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	259.265.000,00	93,99	228.058.470,00	87,96	Operasional Jamkesda		Dinas Kesehatan
	Pembinaan Tenaga Kesehatan	44.165.000,00	100,00	33.572.500,00	76,02	Kegiatan Registrasi Perijinan Tenaga Kesehatan, Kegiatan Monev Perijinan Tenaga Kesehatan, Tersedianya Software Kompetensi Nakes, Kegiatan Monev Perijinan Tenaga Kesehatan, Rakor Tenaga Kesehatan		Dinas Kesehatan
	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	10.300.000,00	100,00	9.800.000,00	95,15	Kegiatan Pemberdayaan Produk Makanan Kemasan, Obat Tradisional dan Kosmetik yang beredar		Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	153.775.000,00	100,00	151.221.000,00	98,34	Pelayanan Kesehatan Jaga (Pengganti / Hari Libur) dan Uang Makan Dokter Interensif		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Klinik Pegawai dan Klinik Tumbuh Kembang	219.830.000,00	100,00	150.532.508,00	68,48	Operasional Klinik Pegawai dan Klinik Tumbuh Kembang		Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	174.440.000,00	100,00	52.960.837,00	30,36	Terpeliharanya status kesehatan karyawan dan pasien yang beresiko (250 orang), tersedianya vaksin hepatitis (750 vaksin) dan Bahan habis Pakai (BHP) Laboratorium (1 paket)		RSUD
	Optimalisasi Pelayanan SKPD	61.850.000,00	100,00	37.744.819,00	61,03	Workshop peningkatan SDM (1 kali)		RSUD
	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	217.936.000,00	100,00	180.250.466,00	82,71	Pendataan dan Pembinaan UKK		SETDA
11	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	32.610.000,00	100,00	31.116.000,00	95,42		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	32.610.000,00	100,00	31.116.000,00	95,42	Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan 2 kali setahun, Pemeriksaan Rutin Mutu Pangan Beredar		Dinas Kesehatan
12	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.171.480.500,00	100,00	1.116.653.038,00	95,32		Meningkatnya Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Hidup Sehat	
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	344.295.000,00	100,00	328.616.730,00	95,45	Pelatihan Desa Siaga, Promosi Kesehatan di TV		Dinas Kesehatan
	Pembinaan kesehatan remaja	44.250.000,00	100,00	41.850.000,00	94,58	Promosi Kesehatan di Media Koran, Promosi Kesehatan di Radio, Terlaksananya lomba KKR, Terlaksananya pembinaan Remaja Non Formal		Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	25.665.000,00	100,00	23.665.000,00	92,21	Pertemuan Evaluasi Program Integrasi (remaja, uks, promkes), Pertemuan Program Promkes, Lomba PHBS Tk Kota, Pembinaan Kel PHBS Percontohan		Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	255.625.000,00	100,00	238.429.000,00	93,27	Survei PHBS Tk Kota		Dinas Kesehatan
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	64.480.000,00	100,00	64.423.660,00	99,91	Penyusunan Profil Promkes		Dinas Kesehatan
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	69.863.000,00	100,00	64.269.023,00	91,99	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Pelatihan Kelurahan Siaga Aktif, Musyawarah Masyarakat Kelurahan (Jejak Pendapat), Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa, Penyuluhan Kesehatan (Gimul, KRR, PHBS)		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	59.365.000,00	100,00	58.775.000,00	99,01	Refresing Kader Desa siaga, Penyuluhan Kesehatan (Masyarakat, KB, GSI dan PHBS di Sekolah), Survey Mawas Diri (SMD), Media Promkes, Pembinaan Dokter Kecil dan pembinaan kader KKR/ peer konselor		Dinas Kesehatan
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	74.540.000,00	100,00	74.513.600,00	99,96	Pelatihan Kader KRR, Pendataan PHBS, Media Promkes, Penyuluhan Kesehatan, pembinaan PHBS dan Desa Siaga di wilker PKM BU 1		Dinas Kesehatan
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	65.252.500,00	100,00	60.224.550,00	92,29	Pelatihan Kader KRR, Pelatihan Kelurahan Siaga Aktif, Lomba Penyuluhan Kader, Media Promkes, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan Dokter Kecil		Dinas Kesehatan
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	73.295.000,00	100,00	72.439.475,00	98,83	Pelatihan Kader KRR, Pelatihan Kelurahan Siaga Aktif, Pelatihan Dokter Kecil, Media Promkes, Sosialisasi Kelurahan Siaga, Survey PHBS anak sekolah		Dinas Kesehatan
	Pameran Pelayanan Publik	94.850.000,00	100,00	89.447.000,00	94,30	Bontang Expo dan Bontang City Carnaval (BCC)		Dinas Kesehatan
13	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	498.777.500,00	99,07	494.209.066,00	99,08		Meningkatnya Program Perbaikan Gizi di Masyarakat	
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00	100,00	Terlaksananya Penyusunan PSG		Dinas Kesehatan
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	131.080.000,00	100,00	131.065.000,00	99,99	Tersedianya Buffer Stock PMT Balita selama 3 Bulan, Tersedianya Pengukur Panjang Badan Bayi, Tersedianya Balok SKDN		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	16.190.000,00	100,00	16.115.000,00	99,54	Pelaksanaan Kegiatan Motivasi ASI Eksklusif, Pemantauan Gizi Buruk, Lomba Posyandu Purnama Mandiri (D/S dan Pelaporan Terbaik)		Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	23.775.000,00	100,00	23.774.396,00	100,00	Terlaksananya Swepping Vit A, Terlaksananya Pemantauan ASI Eksklusif, Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Gizi Lintas Sektor, Terlaksanaya PMT Lokal Klinik Gizi, Lomba Sertifikasi Posyandu, Pertemuan Evaluasi Program Gizi		Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	Terlaksananya Swepping Distribusi Vit A, Lomba ASI Eksklusif, Duta ASI sebanyak 6 kali, PMT Penyuluhan 3 bulan		Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	56.700.000,00	100,00	56.699.670,00	100,00	Terlaksananya Swepping Distribusi Vit A, Pelacakan Balita BGM/BGT, Pembelian PMT bagi bayi/balita gizi kurang selama 3 bulan		Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	20.500.000,00	94,01	18.500.000,00	90,24	Terlaksananya Pemantauan dan Swepping Distribusi Vit A, Terlaksananya Pemantauan dan Swepping ASI Eksklusif, Pemberdayaan DUTA ASI Eksklusif, Balita aktif ke Posyandu		Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	27.075.000,00	97,60	27.009.250,00	99,76	Terlaksananya Pemantauan dan Swepping Distribusi Vit A, Terlaksananya Motivasi ASI Eksklusif, Pembelian PMT bagi bayi/balita gizi kurang selama 3 bulan, Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Gizi Lintas Sektor, Hadiah u/ Posyandu dengan Cakupan D/S Tertinggi		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	207.757.500,00	100,00	205.345.750,00	98,84	Pelatihan Nutriclin, Pelatihan Pemetaan Masalah Kesehatan Masyarakat, Pelatihan Pedoman Asuhan Gizi Terstandar		Dinas Kesehatan
14	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1.402.152.000,00	96,56	1.333.977.158,00	95,14		Meningkatnya Pendampingan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	277.540.000,00	95,90	269.531.600,00	97,11	Terlaksananya Fogging Lalat di TPA, Terlaksananya Pengumpulan Limbah Medis, Terlaksananya Peusnahan Limbah Medis, Terlaksananya deklarasi STBM, Terlaksananya Verifikasi STBM, Pelatihan Hygiene Sanitasi DAM		Dinas Kesehatan
	Pengawasan Sarana Air Bersih	106.825.000,00	98,30	97.135.500,00	90,93	Jasa Pemeriksaan LAB (Air PDAM, Non PDAM, dan DAM), Koordinasi DAM dan PUSDAM, Pertemuan Koordinasi Non PDAM, Pertemuan Sanitasi Program SAB, Pengiriman Sampel Air, Penjamah bagi Pengelola Rumah Makan dan jasa Boga, Bimtek KIE Fasilitator Pangan Jajanan Anak Sekolah		Dinas Kesehatan
	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	128.310.000,00	100,00	127.305.000,00	99,22	Bimtek Hygine Sanitasi Kantin Sekolah dengan Metode PHAST, Pelatihan Fasilitator Pangan Jajanan Anak Sekolah, Pelatihan Hygiene Sanitasi Kantin Sekolah, Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman Siap Saji		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	83.665.000,00	100,00	76.793.150,00	91,79	Terlaksannya Inspeksi Sanitasi RS, Pelatihan Penanganan Limbah Medis, Petugas pengambilan sampel usap alat makmin RS, Pertemuan Petugas Sanitasi Program TTU,Pengiriman Sampel (Makan/ Minuman dan Limbah), Pemeriksaan sampel usap alat TTU 5 RS		Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	66.310.000,00	100,00	58.806.190,00	88,68	Sosialisasi Sanitasi Makanan Bagi Pedagang Keliling, Belanja modal pengadaan konstruksi septic tank, Jasa Pemeriksaan Sampel AIR		Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	42.845.000,00	100,00	40.414.466,00	94,33	Sosialisasi Pedagang makanan jajanan anak sekolah, Makan dan Sncak Bimtek PHAST, Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan lingkungan (STBM), Jasa Pemeriksaa Sampel Air		Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	14.050.000,00	100,00	12.714.000,00	90,49	Terpantaunya TPM, TTU yang memenuhi syarat, Jasa Pemeriksaa Sampel Air, Pemeriksaan Kimia IPAL		Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	38.360.000,00	62,96	37.270.200,00	97,16	Pelatihan Kader STBM, Kegiatan sosialisasi Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan, Kegiatan sosialisasi Hygiene Sanitasi Tempat Umum, Pemeriksaan Sampel Air		Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	24.275.000,00	98,08	21.618.325,00	89,06	Pembinaan TPM, Pembinaan TTU, Pembinaan DAMIU, Bimtek PHAS, Pemeriksaa Sampel Air		Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	20.125.000,00	100,00	19.827.250,00	98,52	Pembinaan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan, Pemeriksaan Sampel Air Sumur Gali		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	457.447.000,00	100,00	447.330.477,00	97,79	Pembinaan Perilaku Bersih, Sehat di Lingkungan Masyarakat dan operasional Forkohat		Dinas Kesehatan
	Pengembangan Pasar Sehat	73.900.000,00	100,00	72.001.000,00	97,43	Monev Pasar Sehat, Hasil Monev Pasar Sehat		Dinas Kesehatan
	Verifikasi Penerima Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada PDAM Tirta Taman	68.500.000,00	100,00	53.230.000,00	77,71	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		SETDA
15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	1.016.342.500,00	99,35	812.909.098,00	79,98		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	422.635.000,00	100,00	355.198.750,00	84,04	Terlaksananya fogging fokus, Terlaksananya pemantauan jentik oleh guru dan anak sekolah, Tersedianya dokumen pengendalian DBD		Dinas Kesehatan
	Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	259.857.500,00	100,00	168.618.100,00	64,89	Kegiatan VCT Mobile, Kelompok Perawatan Diri (KPD) Kusta, Monev P2M, Monev Kasus P2M		Dinas Kesehatan
	Peningkatan Imunisasi	33.550.000,00	100,00	25.300.000,00	75,41	Sosialisasi tentang Imunisasi		Dinas Kesehatan
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	23.250.000,00	100,00	13.280.000,00	57,12	Penyusunan Buletin Epidemiologi, Survey Sederhana DBD, Monev Surveilans		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular	68.770.000,00	100,00	45.865.500,00	66,69	Pelatihan Pengelolaan PPTM Puskesmas dan rumah Sakit, Deteksi Dini Masyarakat Khusus, Senam dan Sosialisasi PTM		Dinas Kesehatan
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	45.170.000,00	100,00	45.138.360,00	99,93	Terlaksananya Kegiatan P2		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	49.000.000,00	100,00	48.981.888,00	99,96	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta, TB, DBD, Terlaksananya Pemberian Imunisasi Pada Bayi dan Anak Sekolah, Terlaksananya Surveillance Terpadu Penyakit, Terbentuknya Paguyuban TB dan Kusta, Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Penyakit (TB, Kusta, DBD, Flu Burung, Diare, HIV, Imunisasi)		Dinas Kesehatan
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	8.350.000,00	100,00	8.350.000,00	100,00	- Terlaksananya Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi, BIAS, Pemantauan Jentik, RVS Kusta, Penyuluhan PTM,		Dinas Kesehatan
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	31.660.000,00	92,87	31.025.000,00	97,99	Peningkatan cakupan imunisasi, penurunan kasus penyakit menular, penurunan kasus TB& kusta		Dinas Kesehatan
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	10.850.000,00	100,00	8.300.000,00	76,50	Terlaksananya kegiatan upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2		Dinas Kesehatan
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	63.250.000,00	100,00	62.851.500,00	99,37	PMT Pemulihan Kusta, Kunjungan Lapangan, RVS Kusta		Dinas Kesehatan
16	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	5.950.000,00	100,00	5.866.000,00	98,59		Meningkatnya informasi kepuasan pasien	
	Penyusunan Profil Rumah Sakit	5.950.000,00	100,00	5.866.000,00	98,59	Tersedianya Buku Profil RSUD Tahun 2015 (70 eks) dan Buku Saku Tarif (20 eks)		RSUD
17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	70.500.000,00	100,00	48.000.000,00	68,09		Presentase pasien penderita penyakit gangguan jiwa terkontrol	
	Pelayanan Kesehatan Jiwa	70.500.000,00	100,00	48.000.000,00	68,09	Pasien penderita gangguan jiwa kurang mampu terlayani 100%		RSUD
18	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	8.433.902.176,00	51,50	4.754.969.731,00	56,38		Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembangunan Puskesmas	2.025.745.000,00	100,00	2.021.248.800,00	99,78	Pembangunan Puskesmas Poned BU II dan IPAL		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	242.356.500,00	100,00	230.865.409,00	95,26	Pemenuhan kebutuhan operasional Puskesmas Bontang Selatan		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	430.670.000,00	99,63	378.400.268,00	87,86	Pemenuhan kebutuhan operasional Puskesmas Bontang Selatan II		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	591.815.000,00	97,56	585.717.946,00	98,97	Pemenuhan kebutuhan oerasional Puskesmas Tanjung Laut		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	407.351.000,00	100,00	322.748.636,00	79,23	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	319.148.000,00	96,83	286.253.540,00	89,69	Tersedianya dana operasional Puskesmas Bontang Utara 2		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	266.110.500,00	99,93	246.393.331,00	92,59	Terlaksananya seluruh kegiatan operasional puskesmas		Dinas Kesehatan
	Pembangunan Puskesmas Bontang Selatan 2 (Lanjutan)	745.000.000,00	78,61	683.341.801,00	91,72	Gedung Puskesmas Bontang Selatan 2		Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	574.764.000,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP PKM Bontang Selatan 1	573.785.000,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP PKM Bontang Selatan 2	538.741.192,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP PKM Bontang Lestari	138.327.992,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP PKM Bontang Utara 1	576.376.000,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP PKM Bontang Utara 2	598.552.000,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
	Dana Kapitasi FKTP PKM Bontang Barat	405.159.992,00	-	-	-			Dinas Kesehatan
19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	2.405.925.000,00	82,19	1.407.896.500,00	58,52		Meningkatnya sarana dan prasaran rumah sakit	
	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	300.000.000,00	100,00	242.075.000,00	80,69	Tersedianya mobil jenazah (1 unit)		RSUD

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	446.620.000,00	100,00	379.778.000,00	85,03	Tersedianya peralatan dapur RSUD (1 paket)		RSUD
	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah	255.630.000,00	100,00	187.284.500,00	73,26	Tersedianya running text (1 unit), mesin absensi (1 unit), peralatan jaringan komputer (1 unit), CCTV (1 paket), Faximili (1 unit), penguat sinyal (1 unit), instalasi telepon (1 paket), software (1 ls)		RSUD
	Pengadaan Linen Rumah Sakit Umum Daerah	600.835.000,00	100,00	598.759.000,00	99,65	Tersedianya linen RSUD (1 paket)		RSUD
	Pembangunan Tempat Parkir Rumah Sakit	802.840.000,00	10,97	-	-	Tersedianya dokumen AMDAL RSUD yang baru		RSUD
20	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	1.931.250.000,00	62,97	1.076.494.875,00	55,74		Efektifitas sarana dan prasarana rumah sakit terpelihara	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	1.012.600.000,00	75,87	733.705.900,00	72,46	Tersedianya bahan kimia clorin (10 drum), Soda AS (4 zak), tawas (7 zak), Nutrien limbah (1 paket), terlaksananya pemeriksaan laboratorium (2 - 12 kali), terlaksananya pemeliharaan pengelolaan aror limbah dan air bersih (1 paket)		RSUD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	918.650.000,00	50,07	342.788.975,00	37,31	Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit (1 Tahun)		RSUD
21	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	2.111.940.000,00	98,74	1.817.217.286,00	86,04		Efektivitas sarana dan prasarana rumah sakit terpelihara	
	Peningkatan Cakupan Program Kesehatan Masyarakat	658.080.000,00	100,00	626.010.000,00	95,13	Pelatihan Pasien Safety, Resusitasi Neonatus, Manajemen Perawatan Luka, IVA Techique, dan Pelatihan Tehnik Promkes		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	288.340.000,00	89,90	247.887.923,00	85,97	Peningkatan Pelayanan Penderita Penyakit Jantung		Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	235.945.000,00	100,00	209.547.114,00	88,81	Seminar AIDS, Pelatihan CST, Penyuluhan Kelompok Resiko dan Rakor HIV/AIDS		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	230.710.000,00	100,00	207.693.366,00	90,02	Terlaksananya Seminar Kesehatan dan Pendampingan Penderita Kanker		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Ginjal	115.000.000,00	100,00	84.953.327,00	73,87	Jasa Pelayanan Cuci Darah		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	80.100.000,00	100,00	66.608.200,00	83,16	Terlaksananya monev TB, Terlaksananya promosi kesehatan TB ke masyarakat, Terlaksananya kunjungan ke penderita TB		Dinas Kesehatan
	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	500.715.000,00	100,00	371.517.356,00	74,20	Pasien dokter spesialis kemitraan terlayani 100%		RSUD
	Pelaksanaan Kegiatan FORKOHAT	3.050.000,00	100,00	3.000.000,00	98,36	Tercapainya 8 tatanan sehat Kota Sehat		Kelurahan
22	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	66.100.000,00	100,00	57.934.700,00	87,65		Meningkatnya perlindungan dan pelayanan terhadap ibu, bayi dan anak	
	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita	66.100.000,00	100,00	57.934.700,00	87,65	Sosialisasi Tk Kota Pelayanan Tumbuh Kembang Anak, Sosialisasi Tk Kota Program ASI Eksklusif, Penyusunan Draft Raperda ASI Eksklusif, Supervisi Program Kesehatan Anak, Pengadaan Cetakan		Dinas Kesehatan
23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	27.450.000,00	100,00	24.195.000,00	88,14		Meningkatnya pelayanan kesehatan kelompok masyarakat beresiko	
	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	27.450.000,00	100,00	24.195.000,00	88,14	Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia terpadu, Terlaksananya Pelatihan Konseling Kejiwaan		Dinas Kesehatan
24	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	336.075.000,00	99,97	315.916.683,00	94,00		Meningkatnya perlindungan dan pelayanan terhadap ibu, bayi dan anak	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	43.400.000,00	100,00	32.455.396,00	74,78	Pelayanan Ambulance GSI		Dinas Kesehatan
	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	75.400.000,00	100,00	70.450.000,00	93,44	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Ibu, Terlaksananya kegiatan managemen audit maternal perinatal		Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	22.020.000,00	100,00	20.103.000,00	91,29	Meningkatnya cakupan K4, persalinan nakes, komplikasi kebidanan yg di tangani, kunjungan nifas, KB Aktif, pelayanan anak balita		Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	32.075.000,00	100,00	32.051.220,00	99,93	Kegiatan Senam Hamil, Penyegaran Kader DDTKA, Kunjungan Rumah Bayi / Balita dengan Kunjungan Rendah oleh Kader, Kegiatan DDTKA di TK/PAUD, Penyuluhan KIA-KB		Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	30.870.000,00	100,00	29.470.000,00	95,46	Mapping Sasaran KIA Wilayah Laut dan Darat, Kunjungan rumah Kesakitan dan Kematian Bayi Neonatal dan Bayi Balita, Kunjungan rumah Kesakitan dan Kematian Bumil dan Bufas Resiko Tinggi, DDTKA Sekolah TK/PAUD		Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	58.290.000,00	100,00	57.551.907,00	98,73	Kelas Ibu Hamil, Maping Sasaran KIA, Kunjungan Rumah Bumil, Bulin dan Bufas Resti, Kegiatan DDTKA, Pelacakan Kasus AMP, Pembinaan Dukun Bayi		Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	45.220.000,00	99,78	45.101.160,00	99,74	Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak terlaksana dan terpantau		Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	28.800.000,00	100,00	28.734.000,00	99,77	DDTKA di TK / PAUD, DDTKA di Posyandu, Senam Hamil, Kunjungan Rumah Ibu dan Bayi, Maping Sasaran KIA		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
25	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	735.844.000,00	87,00	492.598.357,00	66,94		Meningkatnya regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	
	Penyusunan Regulasi Kesehatan	105.890.000,00	100,00	98.774.600,00	93,28	Penyusunan Perwali, Sosialisasi Perda Kesehatan		Dinas Kesehatan
	Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan	186.364.000,00	95,00	174.573.657,00	93,67	Sertifikasi ISO (Audit Surveillance)		Dinas Kesehatan
	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	45.525.000,00	40,00	40.800.000,00	89,62	Pengelolaan SIK Puskesmas, Maintenance SIK Puskesmas		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Profil Kesehatan	10.975.000,00	100,00	10.975.000,00	100,00	Dokumen Profil Kesehatan		Dinas Kesehatan
	Konsultasi dan Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit	387.090.000,00	100,00	167.475.100,00	43,27	Terlaksananya bimbingan teknis administrasi paripurna dan standar internasional 100%		RSUD
26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	56.000.000.000,00	100,00	55.472.123.962,00	99,06		Meningkatnya pelayanan rumah sakit BLUD	
	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD	44.129.660.000,00	100,00	45.229.339.321,00	102,49	Terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit BLUD 100%		RSUD
	Peningkatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit BLUD	11.870.340.000,00	100,00	10.242.784.641,00	86,29	Terselenggaranya pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit BLUD 100%		RSUD
27	PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN, WABAH DAN BENCANA	155.725.000,00	100,00	140.636.300,00	90,31		Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi wabah dan bencana	
	Pelayanan Penanggulangan Wabah	72.375.000,00	100,00	57.628.500,00	79,62	Pengawasan Pangan Event-Event Tertentu, KLB Kit Keracunan Pangan, Penanggulangan Peningkatan Insident Penyakit Potensial KLB / KLB		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Penanggulangan Bencana	83.350.000,00	100,00	83.007.800,00	99,59	Terlaksananya Pelayanan RHA dan TRC, Terlaksananya Supervisi Program Bencana, Pelatihan Disaster Management, Terlaksananya Pertemuan Rutin Penanggulangan Bencana, Tersedianya APD Bencana, Tersedianya Perahu Karet		Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
28	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	989.952.500,00	75,00	716.585.094,00	72,39		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar pelayanan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	620.000.000,00	55,00	459.175.000,00	74,06	Jumlah Alat-Alat Laboratorium, Bangunan Labkesda, Jenis Bahan Kimia		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	369.952.500,00	95,00	257.410.094,00	69,58	Jumlah Pelatihan Akreditasi, Operasional Labkesda		Dinas Kesehatan
	URUSAN KESEHATAN	146.766.784.123,00	92,66	134.356.708.435,00	91,54	28 PROGRAM; 156 KEGIATAN		

A.4.1.3 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.714.635.538,00	100,00	2.557.486.709,00	94,21		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.640.000,00	100,00	11.316.520,00	97,22	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000,00	100,00	26.773.622,00	79,68	Jumlah tagihan yang dibayarkan selama 1 tahun		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	33.050.000,00	100,00	32.650.000,00	98,79	Jumlah surat izin 43 kendaraan		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	87.231.400,00	100,00	86.911.850,00	99,63	Jumlah ATK yang memadai		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	159.690.000,00	100,00	158.966.500,00	99,55	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.543.000,00	100,00	7.543.000,00	100,00	Jumlah persediaan komponen listrik / penerangan		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.840.000,00	100,00	60.740.000,00	98,22	Jumlah sarana kantor		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.920.000,00	100,00	28.920.000,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan informasi		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.804.000,00	100,00	13.766.000,00	99,72	Jumlah kebutuhan untuk opersional		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Makanan dan Minuman	97.500.000,00	100,00	96.557.000,00	99,03	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia 1 Tahun		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	458.896.000,00	100,00	458.788.517,00	99,98	Jumlah laporan perjalanan dinas		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.720.921.138,00	100,00	1.574.553.700,00	91,49	Jumlah tenaga kerja PNS dan non PNS (5 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	714.760.000,00	100,00	713.857.700,00	99,87		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Meubelair	81.080.000,00	100,00	80.660.000,00	99,48	Jumlah meubelair (2 jenis)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	602.880.000,00	100,00	602.397.700,00	99,92	Jumlah kendaraan dinas/operasional (42 kendaraan)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	30.800.000,00	100,00	30.800.000,00	100,00	Jumlah komputer (40 unit)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	287.778.000,00	100,00	278.516.945,00	96,78		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	102.528.000,00	100,00	93.896.095,00	91,58	Jumlah diklat yang diikuti		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	185.250.000,00	100,00	184.620.850,00	99,66	Jumlah PLKB yang dinilai (18 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.375.000,00	100,00	1.375.000,00	100,00		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	375.000,00	100,00	375.000,00	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyusunan Renja SKPD	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	Jumlah dokumen Renja BPPKB TA 2015		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	Jumlah dokumen LAKIP BPPKB TA 2015		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	119.195.000,00	100,00	117.443.300,00	98,53		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	59.395.000,00	100,00	57.965.200,00	97,59	Bontang Expo		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	59.800.000,00	100,00	59.478.100,00	99,46	Jumlah Media penyampaian Informasi Publik		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
6	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	567.340.000,00	100,00	546.670.100,00	96,36		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala kekerasan terhadap perempuan dan anak	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.208.000,00	100,00	114.631.650,00	96,97	Jumlah pengurus PKK yang ikut serta dalam pembinaan keluarga yang berkualitas tingkat kelurahan		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI	92.690.000,00	100,00	90.578.850,00	97,72	Jumlah kecamatan dan RS yang mengikuti Penilaian GSI		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peringatan Hari Anak Nasional	70.215.000,00	100,00	66.378.000,00	94,54	Kegiatan anak-anak terakomodasi di tingkat kota (150 anak), pengiriman forum anak ke provinsi dan nasional		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peringatan Hari Ibu	141.645.000,00	100,00	137.448.000,00	97,04	Jumlah peserta peringatan Hari Ibu di Kota Bontang (500 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peringatan Hari Kartini	53.845.000,00	100,00	53.771.500,00	99,86	Jumlah peserta terselenggaranya peringatan Hari Kartini di Kota Bontang (500 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	90.737.000,00	100,00	83.862.100,00	92,42	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak Kota Bontang		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
7	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	431.574.700,00	100,00	418.884.088,00	97,06		Mengembangkan dan memperkuat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta dan penyelesaian perlindungan perempuan dan anak dari tingkat kekerasan	
	Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan	30.100.000,00	100,00	29.438.250,00	97,80	Jumlah peserta advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan (28 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	296.343.700,00	100,00	285.631.463,00	96,39	Penyelesaian kasus perempuan dan anak korban kekerasan (33 kasus) dan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan (20 lokasi)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	9.567.000,00	100,00	9.347.500,00	97,71	Kerjasama antar organisasi dan lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 100 organisasi		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	34.990.000,00	100,00	34.243.125,00	97,87	Jumlah lembaga yang mendukung pengarusutamaan gender dan anak sebanyak 34 SKPD		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	26.249.000,00	100,00	26.249.000,00	100,00	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Kaltim		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.975.000,00	100,00	5.963.500,00	99,81	Jumlah data perempuan dan anak		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	28.350.000,00	100,00	28.011.250,00	98,81	Jumlah Peserta dari perwakilan organisasi kemasyarakatan sebanyak 100 orang		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.947.450,00	100,00	57.379.450,00	92,63		Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	48.327.450,00	100,00	48.004.450,00	99,33	Jumlah SDM terlatih untuk pendampingan korban KDRT, penambahan wawasan pencatatan dan pelaporan korban KDRT (48 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	13.620.000,00	100,00	9.375.000,00	68,83	Jumlah Perwali yang terbit tentang perempuan dan anak korban kekerasan		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	236.337.000,00	100,00	223.194.675,00	94,44		Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	
	Pembinaan Organisasi Perempuan	41.695.000,00	100,00	41.692.000,00	99,99	Jumlah pembinaan organisasi perempuan (GOW Kota Bontang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	45.500.000,00	100,00	45.202.425,00	99,35	Jumlah kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan yang responsif gender (45 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	14.315.000,00	100,00	14.276.750,00	99,73	Jumlah kelompok ekonomi yang di bina di 15 Kelurahan (30 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Mengambil Keputusan	34.380.000,00	100,00	34.019.250,00	98,95	Jumlah peserta Workshop Peningkatan Perempuan Dalam Mengambil Keputusan (100 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peningkatan Kapasitas Anggota DWP	100.447.000,00	100,00	88.004.250,00	87,61	Peningkatan SDM anggota DWP (50 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.134.942.688,00	100,00	4.914.807.967,00	95,71	9 PROGRAM; 44 KEGIATAN		

A.4.1.4 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	565.758.000,00	100,00	560.671.650,00	99,10		Meningkatkan pemahaman tentang Program KB dan keluarga sejahtera, meningkatnya KB bagi keluarga miskin dan Meningkatkan pemahaman tentang Program KB dan keluarga sejahtera, meningkatnya KB bagi keluarga miskin dan pemahaman KB dalam keluarga	
	Pelayanan KIE	102.710.000,00	100,00	101.598.700,00	98,92	Pengetahuan PUS, Remaja, Pemuda, Perempuan dan Anak tentang empat pilar program KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Promosi Pelayanan KHIBA	40.605.000,00	100,00	40.262.900,00	99,16	Pengetahuan peserta tentang KHIBA		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (TKBK)	18.481.000,00	100,00	18.413.500,00	99,63	Pemasangan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin terlayani		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	80.227.000,00	100,00	78.959.650,00	98,42	Pemenang Lomba Pengelola KB Teladan (BKB, BLK, UPPKS, IMP, Keluarga Harmonis)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Harganas Tingkat Kota	116.815.000,00	100,00	115.173.900,00	98,60	Peringatan Hari Keluarga Nasional		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Sosialisasi KB	115.420.000,00	100,00	115.236.000,00	99,84	Sub pembantu pembina KB kelurhan dan genre (generasi berencana) yang memahami program KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyuluhan Pembinaan Pembentukan PIK-RR	35.225.000,00	100,00	35.006.500,00	99,38	PIK Remaja/ Mahasiswa		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	56.275.000,00	100,00	56.020.500,00	99,55	UPPKS yang terbina		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	406.465.000,00	100,00	399.532.500,00	98,29		Meningkatkan pemahaman usia kawin ideal dan kemampuan petugas KIE PKBR kepada masyarakat	
	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	129.070.000,00	100,00	128.157.800,00	99,29	Pemahaman pengelola dan pembina tentang KRR dan PKBR		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	76.605.000,00	100,00	75.321.200,00	98,32	Kompetensi Pendidik Sebaya (30 orang)dan Konselor Sebaya (30 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Kemah Bhakti Saka Kencana	50.820.000,00	100,00	50.400.500,00	99,17	Pemahaman dan pentingnya KRR bagi remaja dan lingkungan disekitarnya		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyuluhan Pembinaan Pembentukan PIK Remaja	149.970.000,00	100,00	145.653.000,00	97,12	PIK Remaja/ Mahasiswa		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
3	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	349.329.900,00	100,00	347.103.540,00	99,36		Meningkatnya pemahaman bagi calon peserta Kb dan terlatihnya petugas medis untuk pelayanan serta tersedia alat kesehatan dan konterasepsi	
	Pelayanan Konseling KB	49.087.400,00	100,00	48.916.400,00	99,65	Pemahaman kader pembantu pembina KB kelurahan tentang keunggulan macam-macam kontrasepsi		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	29.500.000,00	100,00	29.185.000,00	98,93	Pelayanan pemasangan alkon KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pelayanan KB Medis Operasi	77.890.000,00	100,00	77.863.000,00	99,97	Peserta KB Medis Operasi		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pelayanan Safari KB Implant dan IUD	21.751.500,00	100,00	21.628.200,00	99,43	Pelayanan KB IUD dan Implant		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis	88.880.000,00	100,00	87.868.090,00	98,86	1 paket alokon (terdiri dari alat kontrasepsi, obat-obatan side efect, cairan deskinfectan dan peralatn penunjang pelayanan)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Rakor Tim Penjaga Mutu Pelayanan KB	49.672.000,00	100,00	49.112.600,00	98,87	Rakor KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Workshop Pelayanan KB	32.549.000,00	100,00	32.530.250,00	99,94	Bidan yang memiliki sertifikasi IUD dan Implant		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
4	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	1.335.091.000,00	100,00	1.265.291.555,00	94,77		Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap KB serta terwujudnya persepsi yang sama terhadap pemahaman KB dan terciptanya data yang akurat	
	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	39.269.000,00	100,00	37.133.000,00	94,56	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	204.025.000,00	100,00	148.264.405,00	72,67	Persepsi yang sama tentang program KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	125.380.000,00	100,00	119.902.800,00	95,63	Database program KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Alat Kesehatan Reproduksi	13.380.000,00	100,00	13.022.500,00	97,33	Pelayanan KB Pria dan workshop partisipasi pria dalam ber-KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pembinaan IMP KB	633.355.000,00	100,00	632.042.500,00	99,79	Laporan Keluarga Berencana yang di buat setiap bulan selama satu tahun		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga	46.965.000,00	100,00	46.866.050,00	99,79	Memudahkan dalam mengakses data dan informasi KB		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Pengembangan Program SIDUGA	191.817.000,00	100,00	188.004.800,00	98,01	Database seluruh keluarga di kota bontang		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Penyampaian Informasi Program KB dan PP	80.900.000,00	100,00	80.055.500,00	98,96	Informasi program KB dan PP		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
5	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	49.905.000,00	100,00	48.193.500,00	96,57		Penyuluhan kesehatan kesehatan ibu dan anak dan meningkatnya pemahaman tentang masalah remaja	
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	39.805.000,00	100,00	39.093.500,00	98,21	Jumlah Wanita Usia Subur, Ibu Hamil dan ibu menyusui yang mengikuti kegiatan. 150 orang pada 3 kecamatan, masing-masing kecamatan 50 orang		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	10.100.000,00	100,00	9.100.000,00	90,10			Kelurahan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	205.855.000,00	100,00	202.111.102,00	98,18		Meningkatnya pengetahuan remaja tentang PIK dan program PKBR sebagai implementasi dari program tersebut	
	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	6.795.000,00	100,00	6.778.000,00	99,75	Pembentukan PIK Remaja sejumlah 2 kelompok		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah	5.110.000,00	100,00	5.096.500,00	99,74	Pengetahuan remaja pada satu kelompok remaja tentang PIK remaja dan Program GenRe (30 orang)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Lomba PIK Remaja se kota Bontang	68.870.000,00	100,00	65.605.200,00	95,26	Prestasi kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang telah diseleksi tingkat Kota di Tk. Propinsi dan Tk.Nasional		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	125.080.000,00	100,00	124.631.402,00	99,64	Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa tingkat Kota, partisipasi Anggota PIK remaja pada Jambore PIK Remaja Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
7	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	12.700.000,00	100,00	12.641.500,00	99,54		Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk pengetahuan tentang HIV/AIDS	
	Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	12.700.000,00	100,00	12.641.500,00	99,54	Remaja yang mengikuti penyuluhan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
8	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	61.525.000,00	100,00	60.008.500,00	97,54		Meningkatkan kualitas kelompok BKB di Kota Bontang	
	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	61.525.000,00	100,00	60.008.500,00	97,54	Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
9	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	41.110.000,00	100,00	38.450.000,00	93,53		Terlaksananya tenaga pendamping kelompok bina keluarga guna terlaksdananya pelatih tenaga pendamping BKB,BKR, dan BKL	
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	41.110.000,00	100,00	38.450.000,00	93,53	Kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
10	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	19.340.000,00	100,00	19.304.000,00	99,81		Meningkatnya keterpaduan poktan BKB dengan PAUD dan (Posyandu)	
	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	19.340.000,00	100,00	19.304.000,00	99,81	Kader BKB yang berkualitas		Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	3.047.078.900,00	100,00	2.953.307.847,00	96,92	10 PROGRAM; 37 KEGIATAN		

A.4.1.5 URUSAN SOSIAL

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.201.584.093,00	100,00	5.708.216.418,00	92,04		Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	100,00	5.048.770,00	84,15	Pengiriman surat/dokumen selama 1 tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.520.000,00	100,00	27.010.203,00	76,04	Terbayarnya tagihan telpon, listrik & air selama 1 tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.403.000,00	100,00	10.590.360,00	92,87	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional sebanyak 8 unit R4 dan 17 unit R2		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	96.778.000,00	100,00	93.005.070,00	96,10	Tersedianya ATK selama 1 tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.450.000,00	100,00	53.653.300,00	96,76	Tersedianya barang cetakan & penggandaan selama 1 Tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.323.520.000,00	100,00	2.235.181.240,00	96,20	Ketersediaan Listrik BLK Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.685.000,00	100,00	418.901.500,00	98,41	Bertambahnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dissosnaker		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	100,00	38.880.000,00	97,20	Tersedianya surat kabar harian dan buku perpustakaan sebanyak 5 item		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.900.000,00	100,00	24.529.000,00	98,51	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan, obat - obatan dan perlengkapan P3K selama 1 Tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Makanan dan Minuman	106.500.000,00	100,00	92.855.500,00	87,19	Tersedianya snack rapat dan makanan dan minuman tamu selama 1 Tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	560.310.000,00	100,00	558.415.200,00	99,66	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi-instansi terkait selama 1 Tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2.515.518.093,00	100,00	2.150.146.275,00	85,48	Tersedianya jasa tenaga administrasi sebanyak 27 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	537.515.000,00	100,00	522.013.950,00	97,12		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	501.240.000,00	100,00	495.156.750,00	98,79	Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas & operasional sebanyak 8 unit R4 dan 17 unit R2		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	24.000.000,00	100,00	14.645.000,00	61,02	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 Tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	12.275.000,00	100,00	12.212.200,00	99,49	Terlaksananya pemeliharaan komputer kantor selama 1 tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	252.622.500,00	95,29	182.207.788,00	72,13		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.300.000,00	100,00	43.000.000,00	94,92	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Pegawai		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	5.500.000,00	100,00	5.000.000,00	90,91	Terciptanya Kerjasama dan Kekompakan Berorganisasi		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Jaminan Pensiun, Hari Tua, dan Kesehatan	126.615.000,00	81,17	88.211.288,00	69,67	Dipahaminya Peraturan Pemerintah Terkait Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebanyak 81orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum TA. 2016	75.207.500,00	100,00	45.996.500,00	61,16	Dipahaminya Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah minimum Tahun 2016, sebanyak 50 org		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	74.910.000,00	100,00	74.032.375,00	98,83		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	74.910.000,00	100,00	74.032.375,00	98,83	Penyebarluasan pelayanan publik Dissosnaker		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA	2.018.369.000,00	100,00	1.749.013.681,00	86,65		Terwujudnya masyarakat petani, nelayan dan pedagang miskin yang mandiri serta SDM Kesos dengan kualitas pendamping sosial yang terampil	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	62.389.000,00	100,00	39.176.400,00	62,79	Terwujudnya SDM Karang Taruna yang berkompetensi (Pengetahuan Sikap dan Nilai) bagi16 Organisasi Karang Taruna		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	568.978.000,00	100,00	526.979.180,00	92,62	Keberfungsian Sosial keluarga FM, KMM, lansia produktif, cacat produktif dan PMKS lainnya sebanyak 100 KK dan 10 KUBE		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah dan Lingkungan Tidak Layak Huni (Bedah Kampung)	259.965.000,00	100,00	176.985.000,00	68,08	Terlaksananya fasilitasi rehab sebanyak 130 Unit dan 2 sarana lingkungan		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Monitoring dan Evaluasi KUBE, Penerima Bantuan Sosial, Rumah Tidak Layak Huni, Peserta PSBR, PSKW, PSAH, PSAD, PSTW	123.847.000,00	100,00	123.847.000,00	100,00	Tersedianya Database Program Pemberdayaan Fakir Miskin (DP2-FM)		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Sewa dan Operasional Rumah Singgah	127.670.000,00	100,00	122.490.001,00	95,94	Terpenuhinya Rumah Singgah		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin	723.885.000,00	100,00	655.055.450,00	90,49	Terperbaikinya 30 Rumah RTM		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pelatihan Tata Boga	54.815.000,00	100,00	54.815.000,00	100,00	Meningkatnya keterampilan 20 anggota RTM dalam membuat masakan (Kue)		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pengembangan Usaha Masyarakat	96.820.000,00	100,00	49.665.650,00	51,30	Meningkatnya keterampilan sebagai bekal pengembangan usaha bagi 30 orang peserta		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.116.861.530,00	100,00	934.629.214,00	83,68		Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat serta tercapainya sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	109.280.000,00	100,00	89.279.365,00	81,70	Keberfungsian Sosial Keluarga Beramasalah psikososial selama 1 Tahun		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penanganan Korban Bencana	229.430.000,00	100,00	190.182.000,00	82,89	Terrpenuhinya Kebutuhan korban bencana yang terjadi di Kota Bontang Tahun 2015		Dinas Sosial & Tenaga Kerja

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	507.820.000,00	100,00	456.520.000,00	89,90	Terpenuhinya Kesejahteraan masyarakat yang ditinggal mati/wafat keluarganya		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penanganan Terhadap Penyakit Kejiwaan, Keterlantaran Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis	56.535.000,00	100,00	50.716.400,00	89,71	Penanganan Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Keterlantaran, Gelandangan dan Pengemis sebanyak 20 Orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	15.720.000,00	100,00	14.742.000,00	93,78	Terlaksananya pemberian bantuan kepada lanjut usia tidak potensial sebanyak 30 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyaluran Beras Raskin	198.076.530,00	100,00	133.189.449,00	67,24	Tersalurnya Raskin kepada 5601 RTM		Kantor Pemberdayaan Masvarakat
7	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO	32.535.000,00	100,00	32.308.000,00	99,30		Peningkatan SDM Petugas dan Penghuni Panti asuhan	
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	32.535.000,00	100,00	32.308.000,00	99,30	Keberfungsian sosial bagi SDM PMKS sebanyak 15 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.526.033.000,00	100,00	1.166.038.076,00	76,41		Terwujudnya SDM kesejahteraan sosial masyarakat	
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	95.795.000,00	100,00	64.625.546,00	67,46	Terwujudnya sinergitas PSKS dalam Rangkaian event hari KSN yang diikuti 150 PSKS		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	58.465.000,00	100,00	58.215.000,00	99,57	Penilaian Kemampuan (Peka) Kelembagaan WKSBM dan Workshop Kelembagaan WKSBM		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyusunan Database PMKS	99.615.000,00	100,00	75.825.000,00	76,12	Penanganan PMKS berdasarkan database		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	296.860.000,00	100,00	287.732.630,00	96,93	Terlaksananya pemberian sembako dan rangkaian HUT Pahlawan 10 November bagi 22 veteran/viperi		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	41.460.000,00	100,00	35.330.000,00	85,21	Terwujudnya Anggota Tagana yang handal dan tertanganinya korban bencana		Dinas Sosial & Tenaga Kerja

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	5.780.000,00	100,00	5.630.000,00	97,40	Terverifikasinya pemohon hibah dan bansos		SETDA
	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	662.693.000,00	100,00	440.348.300,00	66,45	Terlaksananya sosialisasi Bontang Berzakat dan Pelatihan Amil Zakat		SETDA
	Peningkatan Pendidikan Kesejahteraan Ke Masyarakat	265.365.000,00	100,00	198.331.600,00	74,74	Terlaksananya Bimbingan fardu kifayah, Bimbingan Keluarga sakinah dan bimbingan agama		SETDA
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	349.485.000,00	100,00	270.195.500,00	77,31		Pemutakhiran Data peserta PBI Jamkesmas	
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	77.150.000,00	100,00	71.318.800,00	92,44	Memutus rantai kemiskinan dari sisi pendidikan dan kesehatan		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Sisdumas PBI Jamkesmas)	272.335.000,00	100,00	198.876.700,00	73,03	Pemutakhiran data peserta PBI Jamkesmas bagi 7.310 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	URUSAN SOSIAL	12.109.915.123,00	99,58	10.638.655.002,00	87,85	9 PROGRAM; 45 KEGIATAN		

A.4.1.6 URUSAN KETENAGAKERJAAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.517.500,00	100,00	642.379.568,00	98,00		Tersedianya Tenaga kerja terampil dan siap kerja	
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	248.105.000,00	100,00	238.612.204,00	96,17	Tersedianya pencari kerja yang siap kerja sebanyak 22 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pelatihan Tenaga Terampil Terapan TTG	245.117.500,00	100,00	242.487.364,00	98,93	Tenaga Kerja dapat menciptakan lapangan kerja melalui TTG sebanyak 20 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	162.295.000,00	100,00	161.280.000,00	99,37	Tenaga Kerja mampu membuka Lapangan usaha baru		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	878.807.000,00	100,00	821.790.500,00	93,51		Tersedianya Tenaga kerja terampil dan siap kerja	
	Pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Professional (TKPMP)	93.678.000,00	100,00	86.981.900,00	92,85	Calon Pencari kerja baru mandiri profesional siap menghadapi duina kerja		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Diklat Pemagangan Tenaga Kerja	155.089.000,00	100,00	145.616.800,00	93,89	Terlaksananya Pelatihan dan pemagangan kejuruan dan Perpajakan dan Sekretaris bagi 16 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	22.160.000,00	100,00	22.160.000,00	100,00	Media informasi bagi instansi pemerintah, perusahaan, pencari kerja 200 buletin		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	58.075.000,00	100,00	57.575.000,00	99,14	Terlatihnya Tenaga Kerja dalam bidang Rigger dan Operator Crane sebanyak 16 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru	480.800.000,00	100,00	443.655.800,00	92,27	Tenaga Kerja yang berproduktif dan mempunyai jiwa berusaha bagi 16 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pelatihan Kewirausahaan dan Produktifitas	64.005.000,00	100,00	63.505.000,00	99,22	Pengusaha kecil yang produktif dan mempunyai daya saing bagi 15 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Monitoring Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	100,00	2.296.000,00	45,92	Tersusunnya Laporan TKA Di Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	591.168.200,00	100,00	579.274.117,00	97,99		Tersusunnya pendapat, saran dan kebijakan ketenagakerjaan dan penyelesaian sejumlah masalah ketenagakerjaan	
	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	89.785.000,00	100,00	86.128.632,00	95,93	Terlaksananya diskusi panel ketenagakerjaan dengan peserta sebanyak 30 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Bimbingan Teknis Tentang Pembuatan Syarat-Syarat Kerja	19.997.500,00	100,00	18.247.400,00	91,25	Terlaksananya Bimtek pembuatan syarat-syarat kerja dengan peserta sebanyak 30 orang dari perusahaan di Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Bimbingan Teknis Tentang Pengupahan	19.367.200,00	100,00	18.617.200,00	96,13	Terlaksananya Bimtek pengupahan dengan peserta sebanyak 40 orang dari perusahaan di Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Peran dan Fungsi SP/SB	25.360.000,00	100,00	23.117.400,00	91,16	Terlaksananya Bimtek peningkatan peran dan fungsi SP/SB dengan peserta sebanyak 30 orang dari perusahaan di Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	30.187.000,00	100,00	26.691.985,00	88,42	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebaran Informasi HI dan Penanganan Kasus Perselisihan HI pada 20 perusahaan di Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pembinaan K3 Terpadu	27.535.000,00	100,00	27.535.000,00	100,00	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perusahaan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan Norma K3 di Tempat Kerja bagi 30 orang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Lembaga Kerjasama Tripartit	178.690.000,00	100,00	178.690.000,00	100,00	Terlaksananya 12x sidang LKS Tripartit		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Dewan Pengupahan Kota Bontang	145.460.000,00	100,00	145.460.000,00	100,00	Terlaksananay sidang Depeko 12x sidang dan survey IHK (Indeks Harga Konsumen) dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)		Dinas Sosial & Tenaga Kerja

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan	21.057.500,00	100,00	21.057.500,00	100,00	ditaatinya peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bagi 65 perusahaan		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Pemeriksaan dan Analisa Data Objek Pengawasan K3	7.344.000,00	100,00	7.344.000,00	100,00	Tersedianya Database objek pengawasan K3 dan peralatan di Perusahaan pada 25 perusahaan dan 40 Peralatan		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Peningkatan Kepesertaan Jamsostek	26.385.000,00	100,00	26.385.000,00	100,00	Terlaksananya sosialisasi kepesertaan Jamsostek dengan peserta sebanyak 20 perusahaan di Kota Bontang		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
4	PROGRAM PENATAAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN	171.735.000,00	100,00	171.735.000,00	100,00		Naskah Akademis Sebagai Dasar Penyusunan Perda Retribusi TKA	
	Penyusunan Naskah Akademis Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA)	14.100.000,00	100,00	14.100.000,00	100,00	Naskah Akademis sebagai Dasar Penyusunan Perda Retribusi TKA		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	Sosialisasi Bagi Mitra Kerja Dissosnaker Bontang	157.635.000,00	100,00	157.635.000,00	100,00	Memahami Peraturan bagi Mitra Kerja Dissosnaker sebanyak 150 peserta		Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	URUSAN KETENAGAKERJAAN	2.297.227.700,00	100,00	2.215.179.185,00	96,43	4 PROGRAM; 23 KEGIATAN		

A.4.1.6 URUSAN KEBUDAYAAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.891.641.733,00	100,00	1.783.933.203,00	94,31		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	100,00	6.390.000,00	88,75	Jumlah surat yang terkirim sesuai dengan kebutuhan		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.700.000,00	100,00	33.596.500,00	94,11	Komunikasi, penerangan dan kebutuhan air kantor		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.400.000,00	100,00	6.405.500,00	47,80	Tersedianya pemeliharaan perizinan kendaraan selama 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	100,00	4.248.000,00	84,96	Tersedianya jasa kebersihan kantor		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.353.000,00	100,00	55.689.590,00	92,27	Tersedianya alat tulis kantor		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.450.000,00	100,00	87.097.900,00	90,30	barang cetak dan penggandaan		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	100,00	6.350.000,00	97,69	Peralatan dan perlengkapan kantor		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.180.000,00	100,00	32.252.500,00	89,14	Tersedianya media cetak		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.500.000,00	100,00	14.294.500,00	98,58	Peningkatan kebersihan kantor		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.000.000,00	100,00	42.750.000,00	99,42	Terpenuhinya makanan/mimuman rapat dan kegiatan		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	425.188.000,00	100,00	425.164.638,00	99,99	Peningkatan kegiatan koordinasi dan konsultasi		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.148.170.733,00	100,00	1.069.694.075,00	93,17	Pemenuhan pembayaran jasa administrasi perkantoran		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	527.200.000,00	100,00	524.847.160,00	99,55		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	26.000.000,00	100,00	25.625.000,00	98,56	Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	140.360.000,00	100,00	139.566.530,00	99,43	terpeliharanya sarana gedung kantor aparatur selama 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	324.000.000,00	100,00	323.695.630,00	99,91	terpeliharanya kendaraan dinas opeasional 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.700.000,00	100,00	9.504.000,00	97,98	terpeliharanya sarana gedung kantor aparatur selama 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	100,00	9.406.000,00	94,06	Perralatan gedung kantor selama 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	17.140.000,00	100,00	17.050.000,00	99,47	terpeliharanya komputer selama 1 tahun		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	190.000.000,00	100,00	168.914.550,00	88,90		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	190.000.000,00	100,00	168.914.550,00	88,90	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00		Tercapainya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	1Dokumen laporan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar 10 buku		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	1 Dokumen laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 10 buku		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
5	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.602.945.000,00	50,00	1.377.196.450,00	85,92		Terjaganya nilai dan seni budaya Kota Bontang	
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	215.740.000,00	-	7.105.000,00	3,29	Terpromosinya seni budaya kota bontang ditingkat nasional		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	1.387.205.000,00	100,00	1.370.091.450,00	98,77	Terlaksananya pembinaan seni dan budaya di kota bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	2.972.283.000,00	83,33	2.792.735.525,00	93,96		Pelestarian nilai-nilai seni dan budaya Kota Bontang	
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	918.780.000,00	100,00	858.731.875,00	93,46	Meningkatkan dan melestarikan budaya daerah kota bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Dan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air	147.600.000,00	100,00	131.140.500,00	88,85	Terkajinya Potensi benda-benda Cagar Budaya kota Bontang oleh TIM BPCB		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	950.414.000,00	100,00	901.772.000,00	94,88	Menumbuh kembangkan kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	19.180.000,00	-	-	-			Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	930.350.000,00	100,00	895.132.150,00	96,21	Meningkatnya SDM Film Maker		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Lawatan Budaya	5.959.000,00	100,00	5.959.000,00	100,00	Terlaksananya Promosi Budaya		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
7	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	5.472.990.500,00	90,00	4.197.134.110,00	76,69		Terjaganya nilai dan seni budaya Kota Bontang	
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1.086.085.000,00	100,00	629.152.810,00	57,93	Menumbuhkan minat masyarakat terhadap seni dan budaya		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	69.735.000,00	100,00	68.558.800,00	98,31	Rumusan dan Inventarisasi perencanaan kegiatan kesenian di Kota Bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	797.649.000,00	100,00	561.883.000,00	70,44	menumbuhkan kembangkan seni dan budaya yang ada di kota bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	1.458.852.500,00	100,00	1.445.479.000,00	99,08	menumbuh kembangkan minat masyarakat terhadap seni dan budaya		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	272.184.000,00	100,00	41.842.000,00	15,37	terealisasinya Penulisan Buku Sejarah Kota Bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Festival Rebana se-Kota Bontang dan Lagu-Lagu Islami	446.620.000,00	100,00	434.386.600,00	97,26	Terlaksananya festival budaya Religi Ramadhan		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Festival Kesenian Rakyat	540.915.000,00	100,00	237.851.000,00	43,97	menumbuhkan kembangkan kebudayaan dan pariwisata kota bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Festival Budaya Pesisir	449.950.000,00	100,00	447.420.500,00	99,44	meningkatnya destinasi Pariwisata di Bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pengembangan Potensi Seni Peran Daerah	151.000.000,00	100,00	146.710.400,00	97,16	terlaksananya potensi seni peran daerah		Dinas Kebudayaan & Pariwisata

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengembangan Potensi Keragaman Budaya Masyarakat Bontang	200.000.000,00	100,00	183.850.000,00	91,93	terlaksananya potensi keragaman budaya masyarakat Bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	73.920.000,00	100,00	73.756.450,00	99,78		Meningkatnya kerjasama dalam seni dan budaya di Kota Bontang	
	Coaching Clinic Marching Band	73.920.000,00	100,00	73.756.450,00	99,78	Pengembangan Marching Band di Masyarakat Kota Bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	URUSAN KEBUDAYAAN	12.731.780.233,00	95,00	10.919.317.448,00	85,76	8 PROGRAM; 40 KEGIATAN		

A.4.1.8 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.953.055.318,00	97,41	2.712.049.599,00	91,84		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.950.000,00	100,00	4.073.000,00	45,51	Penyediaan jasa surat menyurat 5 paket		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	80,00	21.722.824,00	36,20	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.500.000,00	90,48	8.759.300,00	83,42	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional STNK 10 motor & 3 Mobil		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.097.500,00	100,00	56.097.500,00	100,00	Alat Tulis Kantor sebanyak 54 jenis		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.746.800,00	100,00	78.604.200,00	98,57	Barang Cetakan dan Penggandaan berupa 15 baliho, 9 spanduk, 1 banner		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.890.000,00	98,46	174.226.000,00	89,40	Peralatan rumah tangga selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.520.000,00	100,00	38.520.000,00	100,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 4 jenis		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.769.000,00	100,00	58.745.000,00	99,96	Penyediaan bahan logistik kantor selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Makanan dan Minuman	53.400.000,00	100,00	52.962.100,00	99,18	Penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	515.790.000,00	100,00	500.746.025,00	97,08	Adanya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.874.642.018,00	100,00	1.715.843.650,00	91,53	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran sebanyak selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	379.350.000,00	92,19	370.352.500,00	97,63		Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	346.700.000,00	100,00	343.506.500,00	99,08	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan sebanyak 5 unit mobil; 10 unit sepeda motor		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	32.650.000,00	84,38	26.846.000,00	82,22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	31.020.000,00	100,00	29.895.000,00	96,37		Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31.020.000,00	100,00	29.895.000,00	96,37	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 25 stel		Dinas Pemuda & Olahraga
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	298.520.000,00	100,00	241.569.902,00	80,92		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	298.520.000,00	100,00	241.569.902,00	80,92	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	125.000.000,00	100,00	94.300.000,00	75,44		Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD	
	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	125.000.000,00	100,00	94.300.000,00	75,44	Pesan layanan Masyarakat selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	113.840.000,00	100,00	102.068.500,00	89,66		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	113.840.000,00	100,00	102.068.500,00	89,66	Pameran pembangunan sebanyak 2 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	1.259.164.700,00	97,91	1.124.086.988,00	89,27		Terjalinnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat baik khususnya kalangan pemuda sebagai suksesor pembangunan	
	Peringatan Hari Gerakan Pramuka	85.475.000,00	100,00	61.855.500,00	72,37	Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan pemuda		Dinas Pemuda & Olahraga
	Fasilitasi Kegiatan Pramuka	537.689.700,00	95,00	469.191.200,00	87,26	Terlaksananya Kursus Orientasi Mabicab (Eselon II) Kota Bontang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	178.920.000,00	96,62	150.530.000,00	84,13	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam 2 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi Kegiatan Majelis Pembimbing Cabang Kwartir Cabang Kota Bontang	457.080.000,00	100,00	442.510.288,00	96,81	Terlaksananya kegiatan Majelis Pembimbing Cabang Kwartir Cabang Kota Bontang; 2 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	4.248.827.496,00	87,16	3.843.216.546,00	90,45		Hadirnya generasi muda yang memiliki nilai kompetensi tinggi dan berprestasi, sebagai aset bangsa dan penggerak pembangunan	
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	121.570.000,00	97,32	111.391.000,00	91,63	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda Kota Bontang untuk 1 organisasi		Dinas Pemuda & Olahraga
	Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	55.185.000,00	-	-	-	-		Dinas Pemuda & Olahraga
	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	81.935.000,00	100,00	66.585.000,00	81,27	Pelaksanaan peringantan hari sumpah pemuda 1 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	1.213.585.000,00	93,82	1.124.647.350,00	92,67	Tersedianya anggota paskibraka kota Bontang yang memiliki ketrampilan PBB, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan sebanyak 41 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	211.045.000,00	100,00	203.348.100,00	96,35	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi sebanyak 10 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	562.972.000,00	99,73	561.803.000,00	99,79	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra sebanyak 101 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	659.796.800,00	100,00	635.536.700,00	96,32	Peserta seleksi paskibraka sebanyak 150 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Fasilitasi Kegiatan KNPI Kota Bontang	294.070.000,00	80,70	95.944.000,00	32,63	Fasilitasi kegiatan KNPI selama 1 tahun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pertukaran Pemuda Antar Negara	58.864.696,00	100,00	58.857.396,00	99,99	Peserta pertukaran pemuda antar negara sebanyak 5 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Eskalasi Pembangunan Graha Pemuda Kota Bontang	989.804.000,00	100,00	985.104.000,00	99,53	Terbangunnya Gedung Graha Pemuda Kota Bontang 1 unit		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
9	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	335.900.000,00	95,66	286.192.400,00	85,20		Bertumbuh kembangnya semangat wirausaha yang diimbangi peningkatan kecakapan hidup pemuda berjiwa entrepreneur	
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	119.195.000,00	100,00	117.035.600,00	98,19	Peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 30 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor	59.770.000,00	87,33	49.747.600,00	83,23	Pengiriman pemuda pelopor sebanyak 2 pemuda		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pembinaan Kelompok Pemuda Produktif	156.935.000,00	99,66	119.409.200,00	76,09	Pembinaan Kelompok Pemuda Produktif sebanyak 15 orang		Dinas Pemuda & Olahraga
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	8.141.520.700,00	83,73	6.222.118.588,00	76,42		Meningkatnya prestasi olahraga Kota Bontang, serta terciptanya regenerasi atlit berprestasi melalui jalur pembinaan kemitraan dengan masyarakat	
	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	173.390.000,00	99,86	170.780.000,00	98,49	Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebanyak 1 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	371.460.000,00	57,03	218.560.000,00	58,84	Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi sebanyak 1 paket		Dinas Pemuda & Olahraga
	Peringatan Hari Olahraga Nasional	153.940.000,00	78,21	86.100.000,00	55,93	Peringatan Hari Olahraga Nasional sebanyak 1 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
	Liga Pendidikan Indonesia	408.100.000,00	98,13	378.211.000,00	92,68	Liga Pendidikan Indonesia 1 tun		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pengiriman Atlet Singa Cup	1.572.380.000,00	97,99	1.411.196.788,00	89,75	Pengiriman Atlet Singa Cup sebanyak 2 tim		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Walikota Cup	545.604.800,00	98,17	498.967.300,00	91,45	Turnamen Sepak Bola Walikota Cup 1 turnamen		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	744.742.500,00	99,93	593.944.550,00	79,75	Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14 sebanyak 3 turnamen		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pelaksanaan PERBAKIN Walikota Cup	350.080.000,00	17,19	59.950.000,00	17,12	PERBAKIN Walikota Cup sebanyak 1 turnamen		Dinas Pemuda & Olahraga

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kota Bontang (Seleksi POPPROV)	1.018.285.000,00	97,66	842.763.600,00	82,76	Seleksi POPROV sebanyak 19 cabor		Dinas Pemuda & Olahraga
	Fasilitasi Kegiatan Suratin Cup	617.730.000,00	48,15	161.273.100,00	26,11	Fasilitasi Kegiatan Suratin Cup sebanyak 1 tim		Dinas Pemuda & Olahraga
	Fasilitasi Kegiatan Liga Nusantara	439.228.400,00	100,00	392.101.200,00	89,27	Partisipasi Tim Sepakbola Kota Bontang dalam Liga Nusantara 1 tim		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pelaksanaan Kegiatan Korwil IMI	1.432.580.000,00	96,98	1.202.654.050,00	83,95	Terakomodirnya kegiatan-kegiatan Korwil IMI Kota Bontang sebanyak 3 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pelaksanaan Open Turnamen Sepakbola Galatua Se-Kaltim, Coaching Clinic Sepakbola dan Uji Tanding Galatua Kota Bontang	314.000.000,00	99,20	205.617.000,00	65,48	Terlaksananya Open Turnamen Sepakbola Galatua Se-Kaltim, Coaching Clinic Sepakbola dan Uji Tanding Galatua Kota Bontang sebanyak 2 kegiatan		Dinas Pemuda & Olahraga
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	28.812.319.000,00	69,59	22.920.077.700,00	79,55		Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	376.002.000,00	88,95	321.383.900,00	85,47	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga Kota Bontang 3 sapras		Dinas Pemuda & Olahraga
	Penyusunan Grand Design Dispora	200.660.000,00	-	-	-	-		Dinas Pemuda & Olahraga
	Pembuatan Sirkuit Balap Kota Bontang	10.681.507.000,00	89,42	10.662.145.300,00	99,82	1 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Sport Center Loktuan	17.554.150.000,00	100,00	11.936.548.500,00	68,00	Sport Center Seluas 1.617 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	46.698.517.214,00	89,81	37.945.927.723,00	81,26	11 PROGRAM; 52 KEGIATAN		

A.4.1.9 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.690.655.673,00	100,00	1.516.176.035,00	89,68		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000,00	100,00	5.400.000,00	84,38	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000,00	100,00	3.607.850,00	72,16	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.408.500,00	100,00	44.520.600,00	91,97	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.694.000,00	100,00	72.516.350,00	76,58	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00	100,00	920.000,00	76,67	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.470.000,00	100,00	176.855.000,00	98,00	Peralatan rumah tangga selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.841.970,00	100,00	24.583.000,00	91,58	Penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.040.000,00	100,00	8.850.000,00	63,03	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.800.000,00	100,00	11.734.100,00	91,67	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.160.000,00	100,00	48.656.000,00	88,21	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	569.773.810,00	100,00	510.183.835,00	89,54	Adanya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	675.867.393,00	100,00	608.349.300,00	90,01	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Kantor Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	200.460.000,00	100,00	195.939.500,00	97,74		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	18.220.000,00	100,00	17.165.000,00	94,21	Pembelian kendaraan dinas/operasional		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pengadaan Meubelair	25.320.000,00	100,00	22.880.000,00	90,36	Pembelian Meubelair		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132.820.000,00	100,00	132.459.500,00	99,73	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	22.100.000,00	100,00	21.435.000,00	96,99	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30.500.000,00	100,00	30.143.500,00	98,83		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	30.500.000,00	100,00	30.143.500,00	98,83	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	85.500.000,00	100,00	49.000.000,00	57,31		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	85.500.000,00	100,00	49.000.000,00	57,31	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	89.162.000,00	100,00	89.001.700,00	99,82		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	89.162.000,00	100,00	89.001.700,00	99,82	Terlaksananya pameran pembangunan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
6	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	3.029.117.000,00	98,33	2.225.143.395,00	73,46		Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Masyarakat	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	183.120.000,00	100,00	94.269.900,00	51,48	Terlaksanyan Monitoring Program 50 juta Per RT		Kantor Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	90.930.000,00	100,00	69.767.000,00	76,73	Pemanfaatan alat TTG oleh Masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam peningkatan produktifitas usaha		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan LPM	209.460.000,00	100,00	191.352.025,00	91,35	1. Pelaksanaan Rakor LPM. 2. Penilaian LPM Berprestasi		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Penyusunan Profil Kelurahan	89.492.000,00	100,00	9.267.000,00	10,36	Tersedianya data profil 15 Kelurahan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Perlombaan Kelurahan	91.157.000,00	100,00	46.487.000,00	51,00	Pelaksanaan Penilaian Kelurahan terbaik di 3 Kecamatan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK)	1.028.781.000,00	83,33	702.399.850,00	68,27	Terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih maju, bahagia, sehat dan Sejahtera, 2. Tertibnya administrasi PKK di Kecamatan dan Kelurahan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja I PKK)	451.485.000,00	100,00	412.285.500,00	91,32	Meningkatkan pemahaman tentang pengamalan pancasila dan pelaksanaan gotong royong		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja II PKK)	486.559.000,00	100,00	367.216.350,00	75,47	Meningkatkan pemahaman tentang Kehidupan berkoperasi dan pendidikan dan Keterampilan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja III PKK)	171.908.000,00	100,00	148.578.270,00	86,43	Meningkatkan pemahaman tentang program pangan, sandang dan Tata Laksana Rumah Tangga		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja IV PKK)	201.850.000,00	100,00	159.145.500,00	78,84	Meningkatkan pemahaman tentang program Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	24.375.000,00	100,00	24.375.000,00	100,00	Peningkatan administrasi & kegiatan pemerintahan kecamatan & kelurahan		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
7	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	610.145.000,00	100,00	502.185.075,00	82,31		Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Masyarakat	
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	56.505.000,00	100,00	54.405.000,00	96,28	Komitmen masyarakat dalam pembangunan		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Semangat Gotong Royong	137.610.000,00	100,00	132.080.000,00	95,98	Meningkatnya rasa gotong royong di masyarakat		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk Tokoh Masyarakat	324.495.000,00	100,00	234.513.500,00	72,27	Jumlah Tokoh Masyarakat yang paham tentang nilai-nilai berbudi Luhur dan dilaksanakan melalui post tes		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk Ketua RT	91.535.000,00	100,00	81.186.575,00	88,69	Jumlah RT yang paham tentang nilai-nilai berbudi Luhur dan dilaksanakan melalui post tes		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
8	PROGRAM PELATIHAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN	297.075.000,00	100,00	253.784.750,00	85,43		Pembinaan Kelompok Rumah Tangga Miskin	
	Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga	141.170.000,00	100,00	121.469.750,00	86,05	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga bagi RTM		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan SDM Tenaga Kerja Sopir	43.640.000,00	100,00	37.500.000,00	85,93	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja sopir bagi RTM		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan SDM Bagi Masyarakat yang Belum Bekerja	112.265.000,00	100,00	94.815.000,00	84,46	Terlaksananya Pelatihan Las bagi RTM		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	41.075.000,00	100,00	35.315.800,00	85,98		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bontang	
	Pembinaan/Bimbingan dan Evaluasi Kegiatan PKK	7.675.000,00	100,00	7.644.000,00	99,60	Pembinaan atau Bimbingan dan Evaluasi kegiatan PKK		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Pendidikan Keterampilan Masyarakat	6.150.000,00	100,00	6.100.000,00	99,19	Peningkatan atau Bimbingan dan Evaluasi kegiatan PKK		Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Perlombaan Berbagai Kegiatan Masyarakat	27.250.000,00	100,00	21.571.800,00	79,16	Lomba masyarakat		Kantor Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.073.689.673,00	99,59	4.896.689.755,00	80,62	9 PROGRAM; 41 KEGIATAN		

A.4.1.10 URUSAN PERPUSTAKAAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	570.880.500,00	100,00	539.448.200,00	94,49		Meningkatnya penyelenggaraan perpustakaan dan budaya baca	
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	33.020.500,00	100,00	23.050.000,00	69,81	9 Petugas layanan perpustakaan		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	99.410.000,00	100,00	95.547.200,00	96,11	Forum : Terlaksananya kegiatan Lomba Duta Baca (77 orang peserta) dan Lomba Bercerita (33 orang peserta)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	66.055.000,00	100,00	59.779.000,00	90,50	Forum : 1 x Diklat Pelatihan Bercerita dan Kegiatan Pameran Buku		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	35.410.000,00	100,00	26.600.000,00	75,12	Publikasi Media Cetak 1 tahun (selebaran, Leaflet, Baliho dan spanduk informasi		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	336.160.000,00	100,00	333.647.000,00	99,25	Terpenuhinya referensi dan koleksi katalog bahan pustaka		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	825.000,00	100,00	825.000,00	100,00	Meningkatnya data dan informasi layanan perpustakaan kelurahan.		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.458.758.035,00	100,00	3.161.572.225,00	91,41		Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	100,00	2.400.000,00	80,00	peningkatan layanan administrasi perkantoran		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.189.710.000,00	100,00	966.613.035,00	81,25	terlaksananya pembayaran Jasa komunikasi, Air dan Listrik selama 12 Bulan		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.700.000,00	100,00	5.551.700,00	47,45	3 STNK Kendaraan Roda 4 dan 2 STNK Kendaraan Roda 2 selama 1 Tahun		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	288.120.000,00	100,00	272.140.500,00	94,45	tersedianya 9 orang petugas		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentas

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.960.000,00	100,00	7.982.800,00	89,09	Peningkatan kinerja dalam mendukung tugas aparatur kantor		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	101.295.000,00	100,00	98.192.625,00	96,94	Belanja Barang dan Jasa : Belanja Alat Tulis Kantor (1 paket)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.469.000,00	100,00	48.549.720,00	70,91	Penjilidan dokumen/buku/laporan 5 x, Belanja Cetak, Penggandaan dan fotocopy 1 tahun, Belanja spanduk 12 lembar, Banner Elektronik 6 bulan		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	100,00	8.977.650,00	99,75	Belanja Barang dan Jasa : Belanja Bahan Pakai Habis (Peralatan listrik dan elektronik (12 bulan)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.900.000,00	100,00	372.618.800,00	97,57	Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal Pengadaan peralatan Kantor (1 paket)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.125.000,00	100,00	14.125.000,00	100,00	terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor.		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.120.000,00	100,00	32.070.000,00	99,84	Belanja Surat Kabar/Majalah (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.499.000,00	100,00	36.217.900,00	99,23	Belanja Bahan Pakai Habis (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Makanan dan Minuman	82.125.000,00	100,00	77.918.500,00	94,88	Belanja makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	412.600.000,00	100,00	411.671.470,00	99,77	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	819.135.035,00	100,00	806.542.525,00	98,46	Belanja Pegawai (Honorarium PNS) dan Belanja Barang dan Jasa (Belanja jasa kantor) (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	824.040.000,00	100,00	803.523.350,00	97,51		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	387.660.000,00	100,00	375.870.000,00	96,96	Kendaraan Operasional Akuisisi Arsip		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	184.440.000,00	100,00	178.050.600,00	96,54	Belanja Pegawai (Honorarium pegawai) 3 Ob, Belanja Barang /Jasa, Belanja Modal (1 paket)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	239.040.000,00	100,00	236.787.750,00	99,06	3 Unit Roda 4 dan 3 unit Roda 2		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.900.000,00	100,00	12.815.000,00	99,34	pemeliharaan peralatan gedung kantor (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	36.320.000,00	100,00	29.224.800,00	80,46		Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	36.320.000,00	100,00	29.224.800,00	80,46	tersedinay pakaian sebanyak 36 set		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	201.750.000,00	100,00	196.108.000,00	97,20		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	201.750.000,00	100,00	196.108.000,00	97,20	Kursus Singkat/Pelatihan dan Bimbingan Teknis (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	100,00		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja (15 buku)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran (15 buku)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyusunan Renja SKPD	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Tersedianya Laporan Rencana Kerja SKPD (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Tersedianya Laporan Akuntabilitas (1 tahun)		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	119.226.000,00	100,00	118.768.000,00	99,62		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	119.226.000,00	100,00	118.768.000,00	99,62	Kegiatan EXPO dan Bontang City Carnival (BCC) 2 kegiatan		Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	URUSAN PERPUSTAKAAN	5.213.574.535,00	100,00	4.851.244.575,00	93,05	7 PROGRAM; 33 KEGIATAN		

A.4.2.2 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.895.712.493,00	100,00	3.553.225.681,00	91,21		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.815.000,00	100,00	4.014.500,00	69,04	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.040.000,00	100,00	135.756.998,00	61,42	Pembayaran rekeninglistrik, telepon, internet, tv kabel selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.300.000,00	100,00	10.474.800,00	57,24	Pembayaran STNK dan KIT Kendaraan Dinas / Operasional		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	64.990.800,00	100,00	63.733.550,00	98,07	Tersedianya bahan pembersih kantor 1 paket		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	45.940.000,00	100,00	24.216.000,00	52,71	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	146.671.000,00	100,00	129.815.650,00	88,51	Tersedianya alat tulis kantor 63 jenis ATK		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.273.500,00	100,00	117.336.900,00	58,88	tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.499.700,00	100,00	54.345.100,00	97,92	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	958.090.000,00	100,00	910.407.240,00	95,02	Peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.440.000,00	100,00	43.440.000,00	100,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Makanan dan Minuman	83.906.000,00	100,00	69.169.000,00	82,44	Penyediaan makanan dan minumanselama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	488.520.000,00	100,00	488.030.293,00	99,90	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.510.906.493,00	100,00	1.451.205.650,00	96,05	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	53.320.000,00	100,00	51.280.000,00	96,17	Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	838.060.000,00	100,00	746.158.500,00	89,03		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	476.700.000,00	100,00	396.151.500,00	83,10	Adanya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	361.360.000,00	100,00	350.007.000,00	96,86	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	124.670.000,00	100,00	121.417.200,00	97,39		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	124.670.000,00	100,00	121.417.200,00	97,39	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	100,00	22.400.000,00	29,87		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	75.000.000,00	100,00	22.400.000,00	29,87	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	81.555.000,00	100,00	75.358.000,00	92,40		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	81.555.000,00	100,00	75.358.000,00	92,40	Terlaksananya pameran pembangunan		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
6	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.440.000,00	100,00	9.440.000,00	100,00			
	Penyusunan Profil SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 30 buku		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	Mobilisasi dan Pendistribusian e-KTP	440.000,00	100,00	440.000,00	100,00	Terlaksananya pendistribusian Data untuk E-KTP		Kecamatan
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.024.437.493,00	100,00	4.527.999.381,00	90,12	6 PROGRAM ; 21 KEGIATAN		

A.4.2.3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.851.110.953,00	92,35	7.983.182.043,00	90,19		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	100,00	5.010.000,00	69,58	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.120.000,00	100,00	107.173.229,00	56,97	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	45.470.000,00	97,77	15.913.800,00	35,00	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	232.824.900,00	100,00	172.623.430,00	74,14	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	296.258.700,00	96,25	199.059.629,00	67,19	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.090.000,00	100,00	21.633.000,00	93,69	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.051.000,00	100,00	29.854.600,00	76,45	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.748.500,00	100,00	50.025.370,00	98,58	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Makanan dan Minuman	222.269.000,00	100,00	201.111.321,00	90,48	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.946.170.000,00	100,00	1.854.733.884,00	95,30	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 32 orang		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	5.366.872.853,00	100,00	4.929.532.900,00	91,85	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran sebanyak 11 orang		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.996.000,00	100,00	3.844.280,00	96,20	Tesedianya jasa kebersihan kantor		Kantor Satpol
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.790.000,00	98,83	392.666.600,00	91,58	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kantor Satpol
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	250.000,00	-	-	-			Kantor Satpol

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.570.930.000,00	100,00	2.333.407.375,00	90,76		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.139.080.000,00	100,00	1.017.088.000,00	89,29	Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 mobil		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Pengadaan Meubelair	127.090.000,00	100,00	120.262.500,00	94,63	Pengadaan meubelair sebanyak 2 Set		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Pengadaan Peralatan Kerja	54.720.000,00	100,00	43.961.800,00	80,34	Tersedianya peralatan kerja		Badan Kesbangpol
	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	108.720.000,00	100,00	107.870.000,00	99,22	Sewa gedung kantor sebanyak 3 Sekretariat		Badan Kesbangpol
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.080.720.000,00	100,00	999.303.275,00	92,47	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 Tahun		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.900.000,00	100,00	18.640.000,00	69,29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun		Badan Kesbangpol
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.700.000,00	100,00	26.281.800,00	77,99	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun		Kantor Satpol
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	497.220.000,00	100,00	466.868.000,00	93,90		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	236.200.000,00	100,00	206.875.000,00	87,58	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	261.020.000,00	100,00	259.993.000,00	99,61	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kantor Satpol
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	572.500.000,00	95,00	367.315.500,00	64,16		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	572.500.000,00	95,00	367.315.500,00	64,16	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.400.000,00	83,33	10.100.000,00	81,45		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	100,00	500.000,00	33,33	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 buku		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyusunan Renja SKPD	5.900.000,00	100,00	5.100.000,00	86,44	Penyusunan Renja SKPD sebanyak 30 buku		Badan Kesbangpol
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Penyusunan Laporan Akuntabilitas sebanyak 10 buku		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
	Penyusunan Renstra SKPD	500.000,00	-	-	-	-		Kantor Satpol
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	22.200.000,00	100,00	11.192.500,00	50,42		Meningkatnya Pelayanan Publik bidang Pendidikan	
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	10.950.000,00	100,00	-	-	Dokumen mengenai Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah sebanyak 4 dokumen		Badan Kesbangpol
	Penyusunan Profil SKPD	11.250.000,00	100,00	11.192.500,00	99,49	Tersusunnya profil SKPD		Kantor Satpol
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	328.895.000,00	100,00	286.444.600,00	87,09		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	328.895.000,00	100,00	286.444.600,00	87,09	Terselenggaranya pameran pembangunan		Badan Kesbangpol; Kantor Satpol
8	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	775.973.000,00	72,94	414.020.100,00	53,35		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	80.308.000,00	91,95	33.779.100,00	42,06	Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kantor Satpol
	Penegakan Produk Hukum Daerah	354.320.000,00	72,74	147.551.000,00	41,64	Penegakan hukum daerah		Kantor Satpol
	Monitoring dan Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Nasional	80.945.000,00	-	-	-	-		Kantor Satpol
	Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi	240.000.000,00	100,00	212.290.000,00	88,45	Rakor SATPOL PP tingkat Provinsi		Kantor Satpol
	Perlombaan Memperingati HUT RI	20.400.000,00	100,00	20.400.000,00	100,00	Perlombaan HUT RI		B.KUALA
9	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	330.247.500,00	59,00	115.946.715,00	35,11		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	29.627.500,00	68,35	8.490.240,00	28,66	Kerjasama dengan aparat mengenai teknik pencegahan kejahatan		Kantor Satpol

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Monitoring Wilayah	169.520.000,00	9,56	12.286.475,00	7,25	Terlaksananya monitoring wilayah		Kantor Satpol
	Pelatihan PAM Pemilu/Pemilukada	131.100.000,00	99,10	95.170.000,00	72,59	Pelaksanaan pelatihan PAM Pemilu/Pemilukada		Kantor Satpol
10	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN	188.400.000,00	300,00	166.226.000,00	88,23		Terjalinnnya hubungan yang harmonis antar umat beragama	
	Pertemuan Antar Umat Beragama	29.665.000,00	100,00	27.665.000,00	93,26	Pertemuan antar umat beragama		Badan Kesbangpol
	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	108.085.000,00	100,00	94.105.000,00	87,07	Pelaksanaan Pentas Seni		Badan Kesbangpol
	Penyuluhan Hukum dan HAM	50.650.000,00	100,00	44.456.000,00	87,77	Penyuluhan Hukum dan HAM		Badan Kesbangpol
11	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	5.572.661.000,00	100,00	4.683.398.358,00	84,04		Forum dialog dan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan meningkat	
	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	364.910.000,00	100,00	289.349.400,00	79,29	Pemberdayaan FKUB		Badan Kesbangpol
	Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan	71.910.000,00	100,00	65.734.500,00	91,41	Penyuluhan kepada pelajar tentang wawasan kebangsaan		Badan Kesbangpol
	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	256.790.000,00	100,00	173.687.858,00	67,64	Tim Koordinasi Kominda tingkat Kota		Badan Kesbangpol
	Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	10.355.000,00	100,00	10.355.000,00	100,00	Pelaksanaan Pengawasan TKA		Badan Kesbangpol
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	900.105.000,00	100,00	682.113.600,00	75,78	Pemberdayaan FKDM		Badan Kesbangpol
	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	721.810.000,00	100,00	628.291.550,00	87,04	Terlaksananya Pemberdayaan FPK		Badan Kesbangpol
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	127.340.000,00	100,00	121.961.250,00	95,78	Upacara hari-hari besar Nasional		Badan Kesbangpol
	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	38.910.000,00	100,00	38.317.000,00	98,48	Terlaksananya Program kemitraan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan		Badan Kesbangpol
	Fasilitasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	116.240.000,00	100,00	89.042.900,00	76,60	Pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan		Badan Kesbangpol

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	98.255.000,00	100,00	40.611.500,00	41,33	Fasilitas pusat pendidikan wawasan kebangsaan		Badan Kesbangpol
	Perayaan HUT RI	892.343.000,00	100,00	846.083.500,00	94,82	Pelaksanaan peringatan HUT RI ke 70		SETDA
	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	647.650.000,00	100,00	593.434.300,00	91,63	Peringatan HUT Kota Bontang		SETDA
	Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Islam Kota Bontang	874.025.000,00	100,00	825.271.000,00	94,42	Peringatan Hari Besar Islam		SETDA
	Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	25.600.000,00	100,00	25.580.000,00	99,92	Pelaksanaan HUT Provinsi Kaltim & HUT Otonomi Daerah		SETDA
	Intensitas Komunikasi dan Ketertiban Umat Beragama	426.418.000,00	100,00	253.565.000,00	59,46	Jumlah Kelompok sasaran pembinaan		SETDA
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	12.544.000,00	76,53	2.400.000,00	19,13		Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.544.000,00	76,53	2.400.000,00	19,13	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di 15 Kelurahan		Kantor Satpol
13	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	1.078.205.000,00	100,00	771.562.600,00	71,56		Pelaksanaan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	
	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	1.078.205.000,00	100,00	771.562.600,00	71,56	Lingkungan Bebas Narkoba Kota Bontang		Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	1.370.303.000,00	99,82	1.083.154.667,00	79,04		Meningkatnya pembinaan politik masyarakat	
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	135.160.000,00	100,00	109.921.244,00	81,33	Koordinasi Forum Diskusi Politik Terbuka		Badan Kesbangpol
	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	10.406.000,00	100,00	10.405.000,00	99,99	Peneliti administrasi kelengkapan partai politik sebanyak 1 parpol		Badan Kesbangpol
	Verifikasi Data Orkemas	29.320.000,00	100,00	21.546.000,00	73,49	Verifikasi data terhadap 60 okermas		Badan Kesbangpol
	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	40.855.000,00	100,00	37.030.000,00	90,64	Partisipasi politik perempuan Kota Bontang		Badan Kesbangpol
	Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	89.080.000,00	100,00	81.524.000,00	91,52	Sosialisasi UU NO 17 Tahun 2013		Badan Kesbangpol

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	545.490.000,00	100,00	460.911.250,00	84,49	Penyelenggaraan Pilkada		Badan Kesbangpol
	Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan PEMILU	433.800.000,00	100,00	318.490.823,00	73,42	Persiapan penyelenggaraan PEMILU sebanyak 1 Kegiatan		Badan Kesbangpol
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	31.450.000,00	98,57	13.972.550,00	44,43	Penyuluhan terhadap 76 masyarakat		Kantor Satpol
	Persiapan dan Monitoring Pemilu 2015	54.742.000,00	100,00	29.353.800,00	53,62	Terlaksananya Monitoring pemilu		SETDA
14	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	1.037.360.000,00	32,95	235.431.000,00	22,70		Penanganan dan penanggulangan Bencana	
	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	129.460.000,00	4,38	5.675.000,00	4,38	Fasilitasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		BPBD
	Fasilitasi Kedaruratan Logistik	246.020.000,00	-	-	-	-	-	BPBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	216.520.000,00	7,32	10.680.000,00	4,93	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		BPBD
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran	121.915.000,00	-	-	-	-	-	BPBD
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	106.835.000,00	37,01	27.960.000,00	26,17	Penyuluhan terhadap pencegahan bahaya kebakaran		BPBD
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	164.660.000,00	100,00	150.560.000,00	91,44	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran		BPBD
	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	51.950.000,00	81,91	40.556.000,00	78,07	Inspeksi dan penarikan retribusi bidang PMK		BPBD
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	23.220.949.453,00	87,47	18.930.649.458,00	81,52	15 Program ; 77 Kegiatan		

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Misi 2
(Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan yang Baik)

A.4.2.1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.114.612.250,00	100,00	2.910.088.006,00	93,43		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	100,00	591.980,00	98,66	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000,00	100,00	37.543.422,00	70,31	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.600.000,00	100,00	8.873.900,00	70,43	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.500.000,00	100,00	137.526.250,00	97,88	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.150.000,00	100,00	84.907.750,00	90,18	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	100,00	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.240.000,00	100,00	123.320.000,00	90,52	Peralatan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.300.000,00	100,00	43.446.400,00	89,95	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.164.000,00	100,00	38.464.000,00	98,21	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	93.560.000,00	100,00	55.170.000,00	58,97	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.213.687.000,00	100,00	1.153.564.754,00	95,05	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.277.611.250,00	100,00	1.221.879.550,00	95,64	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	487.850.000,00	100,00	474.632.040,00	97,29		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	435.050.000,00	100,00	432.285.100,00	99,36	Adanya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	52.800.000,00	100,00	42.346.940,00	80,20	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	586.980.000,00	100,00	555.856.551,00	94,70		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	586.980.000,00	100,00	555.856.551,00	94,70	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	272.230.000,00	100,00	253.747.800,00	93,21		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	100.870.000,00	100,00	99.347.800,00	98,49	Terlaksananya pameran pembangunan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	171.360.000,00	100,00	154.400.000,00	90,10	Terpublikasinya kegiatan pembangunan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	19.490.000,00	100,00	14.500.000,00	74,40		Ketersediaan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pembangunan daerah	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Website Bappeda	19.490.000,00	100,00	14.500.000,00	74,40	Tersedianya informasi hasil pembangunan melalui website Bappeda		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	1.075.630.000,00	100,00	1.028.293.240,00	95,60		Ketersediaan Data dan Informasi Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bontang	266.200.000,00	100,00	248.235.700,00	93,25	Laporan Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Kota Bontang	242.360.000,00	100,00	225.426.990,00	93,01	Webgis Kota Bontang		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Evaluasi Capaian Kinerja SKPD.	511.450.000,00	100,00	501.508.050,00	98,06	Laporan evaluasi hasil capaian kinerja SKPD		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	55.620.000,00	100,00	53.122.500,00	95,51	Buku Database 8 Kelomok Data Informasi Pembanguna Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	711.566.000,00	100,00	678.559.575,00	95,36		Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan kota menengah dan besar	
	Pendampingan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)	30.845.000,00	100,00	24.024.000,00	77,89	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan	680.721.000,00	100,00	654.535.575,00	96,15	Dokumen Revisi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), Laporan Pelaksanaan Hibah Air Minum AUSAID Kota Bontang dan Laporan Pelaksanaan Hibah Australia Sanitasi Kota Bontang		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.863.946.500,00	100,00	4.618.517.144,00	94,95		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	248.134.000,00	100,00	174.740.500,00	70,42	Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penetapan RKPD	50.300.000,00	100,00	43.800.000,00	87,08	Dokumen Perwali RKPD		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	121.810.000,00	100,00	110.978.400,00	91,11	Dokumen LKPJ Walikota		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	51.952.000,00	100,00	39.425.100,00	75,89	Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	53.121.000,00	100,00	50.584.397,00	95,22	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan LKPJ Masa Akhir Jabatan Walikota	235.360.000,00	100,00	198.392.932,00	84,29	Tersusunnya LKPJ Masa Akhir Jabatan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Bontang	2.389.340.000,00	100,00	2.348.646.174,00	98,30	Terfasilitasinya penyelenggaraan ULP Kota Bontang		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	335.140.000,00	100,00	330.525.600,00	98,62	Kebijakan dan Program kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, ekonomi dan sosial		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	21.950.000,00	100,00	10.300.000,00	46,92	Dokumen Draft Rancangan Awal RKPD 2016		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	25.550.000,00	100,00	25.550.000,00	100,00	Dokumen RKPD Perubahan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Informasi Laporan Penyelenggaraan Program Unggulan Pembangunan Daerah	9.530.000,00	100,00	4.970.000,00	52,15	Dokumen Program Ungulan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Laporan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	44.185.000,00	100,00	36.025.000,00	81,53	Informasi Penyerapan Penyelenggaraan APBD melalui sistem monitoring TEPPA Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendaian Pembangunan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman	284.120.000,00	100,00	275.289.000,00	96,89	Koordinasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Workshop dan Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	81.050.000,00	100,00	68.889.836,00	85,00	Pemahaman tentang penyusunan IK dan IKU		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Kajian City Branding	454.849.500,00	100,00	452.481.939,00	99,48	Dokumen Hasil Kajian City Branding		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Naskah Teknokratis RPJMD	457.555.000,00	100,00	447.918.266,00	97,89	Dokumen kerangka akademis RPJMD 2016 - 2021		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	802.610.000,00	100,00	604.850.719,00	75,36		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	272.490.000,00	100,00	267.774.319,00	98,27	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan PNPM		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Tingkat Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan	33.645.000,00	100,00	29.365.000,00	87,28	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	81.295.000,00	100,00	73.125.400,00	89,95	Dokumen Sistem Informasi Kemiskinan berbasis spasial		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)	13.750.000,00	100,00	9.550.000,00	69,45	Laporan Pelaksanaan P4S		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kajian Ekonomi Non PDRB	220.670.000,00	100,00	217.286.000,00	98,47	Dokumen Hasil Kajian		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan	180.760.000,00	100,00	7.750.000,00	4,29	Fasilitasi Kegiatan PNPM		Dinas Pekerjaan Umum
11	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	1.084.768.000,00	100,00	974.467.017,00	89,83		Terintegrasinya perencanaan pembangunan sosial budaya	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	367.204.000,00	100,00	351.764.430,00	95,80	Laporan Rencana Aksi Pencapaian Inpres No 3 Tahun 2010		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	469.564.000,00	100,00	382.265.087,00	81,41	Perbaikan Capaian Tatanan Kota Sehat		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Kajian Teknis Berbudi Luhur	248.000.000,00	100,00	240.437.500,00	96,95	Dokumen Hasil Kajian		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	697.870.000,00	100,00	695.268.388,00	99,63		Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk pembangunan	
	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Bontang	438.500.000,00	100,00	436.805.888,00	99,61	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	259.370.000,00	100,00	258.462.500,00	99,65	Tersusunnya dokumen pemanfaatan gas untuk sektor transportasi		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	211.643.000,00	100,00	183.323.048,00	86,62		Terlaksananya evaluasi perencanaan daerah	
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	211.643.000,00	100,00	183.323.048,00	86,62	Daftar Program dan Kegiatan RKPD 1 Dokumen		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	269.390.000,00	100,00	207.838.286,00	77,15		Meningkatnya informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)	269.390.000,00	100,00	207.838.286,00	77,15	Pengembangan Software SIMREDA		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	8.950.000,00	100,00	8.600.000,00	96,09		Terwujudnya kerjasama Pembangunan antar Daerah	
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	8.950.000,00	100,00	8.600.000,00	96,09	Kerjasama dengan Pemkot/Swasta/KL		Sekretariat Daerah
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14.227.535.750,00	100,00	13.228.541.814,00	92,98	15 PROGRAM; 55 KEGIATAN		

A.4.2.4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	113.742.012.141,00	98,54	103.901.397.232,00	91,35		Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	155.748.000,00	98,53	132.773.510,00	85,25	Terlayani jasa surat menyurat		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.002.524.342,00	94,35	6.290.254.373,00	78,60	Meningkatnya pelayanan sarana komunikasi, air, penerangan dan internet		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	611.772.700,00	93,40	300.622.400,00	49,14	Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.890.114.350,00	99,86	8.425.031.352,00	94,77	Terjaganya kebersihan dan kerapian kantor		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.550.614.850,00	98,81	2.475.876.787,00	97,07	Tersedianya alat tulis kantor		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.876.903.600,00	99,37	3.368.941.764,00	86,90	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.806.000,00	95,15	372.892.500,00	93,04	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Sekretariat Daerah, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BPPM, Kecamatan dan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.274.429.000,00	99,49	11.037.027.180,00	97,89	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat,BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.353.560.200,00	100,00	4.020.050.100,00	92,34	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat,BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.720.768.000,00	98,58	8.356.846.370,00	95,83	Meningkatnya pelayanan kebutuhan makanan dan minuman		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat,BKD, BPPM, Kecamatan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	27.554.050.221,00	98,61	25.419.220.396,00	92,25	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah dapat dihadiri dengan baik		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat,BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	32.055.579.778,00	97,95	29.364.599.467,00	91,61	Tersedianya tenaga administrasi /teknis perkantoran		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat,BKD, BPPM, Kecamatan
	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	646.040.000,00	100,00	294.226.193,00	45,54	Transportasi dan akomodasi tamu pemerintah Kota Bontang		Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	3.410.000.000,00	100,00	2.843.956.250,00	83,40	Tersedianya tenaga keamanan lingkungan kantor		Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.960.000,00	100,00	67.982.000,00	95,80	3 paket		Sekretariat Dewan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	720.521.900,00	99,98	701.277.590,00	97,33	2 paket		Sekretariat Dewan
	Penataan Kearsipan Kantor	152.620.000,00	100,00	146.066.500,00	95,71	Tercapainya kearsipan yang akurat		DPPKA
	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	294.999.200,00	99,66	283.752.500,00	96,19	Terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat		Kelurahan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63.104.938.700,00	99,13	55.370.035.908,00	87,74		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.100.152.500,00	95,65	6.818.607.500,00	96,03	Tersedianya kendaraan dinas/operasional dari beberapa SKPD		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Pengadaan Meubelair	2.143.243.500,00	100,00	1.810.074.800,00	84,45	Kecukupan dan kualitas meublair kantor		Sekretariat Daerah, DPPKA, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan
	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.536.375.000,00	100,00	1.517.509.000,00	98,77	Tersedianya pengembangan instalasi telepon pemerintah Kota Bontang		Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	674.320.000,00	100,00	668.340.000,00	99,11	Tersedianya gedung penginapan, mes pemkot, deskpilkada dan rujab		Sekretariat Daerah, Kel. Guntung dan Kel. Berbas Pantai
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.120.860.000,00	100,00	966.363.600,00	86,22	Terpeliharanya rumah jabatan		Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.125.000.600,00	100,00	2.049.558.600,00	96,45	Terpeliharanya gedung kantor		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	393.080.000,00	100,00	286.122.925,00	72,79	Terpeliharanya mobil jabatan KDH/WKDH secara berkala/rutin		Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.111.311.000,00	99,87	9.256.908.176,00	91,55	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	280.505.000,00	97,00	234.524.500,00	83,61	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		Sekretariat Daerah, BPPM, Kec. Bontang Selatan, Kel. Gaunung Elai dan Kel. Tanjung Laut
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	211.810.000,00	100,00	76.745.000,00	36,23	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.273.444.000,00	95,86	4.994.809.291,00	94,72	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BKD, BPPM, Kecamatan dan Kelurahan
	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.345.480.000,00	100,00	1.259.160.920,00	93,58	Sewa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan pelayanan		Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	940.260.000,00	100,00	778.481.500,00	82,79	Terpenuhinya sarana umum		Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	2.403.472.000,00	100,00	2.360.051.500,00	98,19	Tersedianya bahan bakar dan pelumas genset/kendaraan dinas/operasional/jabatan		Sekretariat Daerah dan Kel. Api-api
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	743.259.000,00	100,00	713.252.400,00	95,96	1 paket terpenuhinya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/KDH/WKDH		Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Workshop Kendaraan	671.457.000,00	100,00	596.576.303,00	88,85	1 paket tersedianya peralatan dan perlengkapan workshop kendaraan		Sekretariat Daerah
	Pengadaan Taman, Pagar, Sound System Upacara, Pos Keamanan dan Portal/Palang Pintu Parkir	2.726.280.000,00	100,00	2.413.611.853,00	88,53	1 paket tersedianya taman		Sekretariat Daerah
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	20.949.150.000,00	100,00	16.297.814.990,00	77,80	11 paket		Sekretariat Dewan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.231.800,00	100,00	561.943.100,00	93,78	Terlasananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor		Inspektorat, DPPKA, Kec. Bontang Utara dan Kel. Bontang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur	2.000.000,00	100,00	1.980.000,00	99,00	Tersedianya meblair yang siap pakai		Kuala BPPM
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	896.838.000,00	100,00	878.400.850,00	97,94	Perlengkapan kantor yang tersedia		Kecamatan dan Kelurahan
	Pengadaan Komputer	159.730.000,00	88,89	148.391.800,00	92,90	Terlaksananya pengadaan komputer		Kec. Bontang Utara, Kec. Bontang Selatan, Kel. Loktuan, Kel. Berbas pantai, dan Kecamatan KORPRI
	Pembuatan Kanopi Gedung Kantor	191.080.000,00	100,00	189.099.000,00	98,96	Tersedianya tempat parkir kantor		Kecamatan Bontang Utara

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	226.500.000,00	100,00	212.974.000,00	94,03	Terpenuhinya peralatan kantor		Kec. Bontang Selatan, Kel. Api-api, Kel. Loktuan, Kel. Berbas Tengah, Kel. Tanjung Laut & Kel. Tanjung Laut Indah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	11.900.000,00	100,00	11.795.000,00	99,12	Terlaksananya pemeliharaan komputer 24 unit		Kecamatan Bontang Barat
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	268.199.300,00	100,00	266.939.300,00	99,53	1 tahun		BKD
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.423.542.000,00	100,00	1.374.333.250,00	96,54		Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	459.236.000,00	100,00	447.645.100,00	97,48	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Sekretariat Daerah dan Kel. Api-api
	Penunjang Tugas Kehumasan	62.640.000,00	100,00	61.726.500,00	98,54	Tersedianya pakaian kehumasan		Sekretariat Daerah dan Kel. Api-api
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	896.906.000,00	100,00	860.216.650,00	95,91			Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kecamatan dan Kelurahan KORPRI
	Apel Gabungan Anggota KORPRI	4.760.000,00	100,00	4.745.000,00	99,68	Terlaksananya apel gabungan KORPRI		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	6.848.729.600,00	99,33	6.318.202.728,00	92,25		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.476.145.800,00	96,47	6.017.602.328,00	92,92	Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	26.717.000,00	100,00	25.789.500,00	96,53	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi		Inspektorat; Kelurahan Api-api
	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	7.563.800,00	100,00	7.563.800,00	100,00	1 Perwali		Sekretariat Daerah
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	11.000.000,00	100,00	10.750.000,00	97,73	Terlaksananya 44 kali pembinaan		Sekretariat Dewan
	Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.172.000,00	100,00	31.064.200,00	53,40	45 SKDP yang mengikuti Workshop		Inspektorat
	Penyusunan Praperda	150.891.000,00	98,81	109.267.900,00	72,42	Tersusunya draft dan naskah akademik raperda penanaman modal Kota Bontang		BPPM
	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praia	118.240.000,00	100,00	116.165.000,00	98,25	Terselenggaranya kegiatan pelatihan Korsik		KORPRI

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	68.700.000,00	92,04	47.840.050,00	69,64		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	9.775.000,00	100,00	7.541.200,00	77,15	Tersedianya 1 dokumen laporan		Sekretariat Daerah, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BPPM, Kecamatan dan Kelurahan
	Penyusunan Renja SKPD	10.225.000,00	100,00	7.314.600,00	71,54	Tersedianya 1 dokumen laporan		Sekretariat Daerah, Inspektorat, BPPM, Kantor Sekretariat KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	11.125.000,00	95,45	9.789.200,00	87,99	Tersedianya 1 dokumen laporan		Sekretariat Daerah, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BPPM, Kecamatan dan Kelurahan
	Penyusunan Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	100,00	Tersedianya 1 dokumen perjanjian kinerja		Sekretariat Daerah
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.200.000,00	100,00	8.319.050,00	90,42	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		Sekretariat Daerah, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BPPM, Kecamatan dan Kelurahan
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.575.000,00	90,90	5.876.000,00	77,57	Tersusunnya dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan		DPPKA
	Review Renstra SKPD	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	Tersusunnya 1 dokumen		Kelurahan Tanjung Laut
	Penyusunan Renstra SKPD	11.800.000,00	50,00	-	-	Tersusunnya Rensta SKPD		Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan Tanjung Laut & Kelurahan Kanan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	Tersusunnya 1 dokumen		KORPRI
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1.565.010.000,00	92,91	1.352.908.300,00	86,45		Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Radio	53.600.000,00	100,00	33.400.000,00	62,31	25 dan 4320 ILM (iklan) dan berita radio terlayannya masyarakat melalui media radio		Sekretariat Daerah
	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	985.080.000,00	100,00	929.117.500,00	94,32	Terlaksananya penyebaran informasi hasil pelaksanaan program pembangunan pemkot Bontang melalui media		Sekretariat Daerah
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	452.170.000,00	66,17	319.676.800,00	70,70	1 dokumen laporan IKM		Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	4.880.000,00	100,00	4.448.350,00	91,15	1 dokumen laporan hibah dan bansos		Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Pengawasan Perizinan	56.630.000,00	100,00	56.465.650,00	99,71	Peningkatan monitoring realisasi investasi		BPPM
	Penyusunan Profil SKPD	12.650.000,00	91,30	9.800.000,00	77,47	Tersusunya profil SKPD		BPBD
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.740.702.500,00	99,96	1.693.101.019,00	97,27		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	1.712.352.500,00	99,91	1.664.751.019,00	97,22	Terlaksananya pameran pembangunan		Sekretariat Daerah, Sekretariat dewan, Kantor Sekretariat KORPRI, DPPKA, Inspektorat, BPPM, Kecamatan dan Kelurahan
	Silaturahmi Walikota Bersama Tokoh Masyarakat	28.350.000,00	100,00	28.350.000,00	100,00	Terbinanya silaturahmi masyarakat dengan walikota		Kelurahan Kanaan
8	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	2.319.528.500,00	89,35	2.029.537.563,00	87,50		Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
	Pelaksanaan e-Project Planning	34.350.000,00	100,00	31.610.000,00	92,02	3 dokumen laporan perencanaan sarapan fisik dan keuangan		Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Layanan Internet	699.960.000,00	100,00	696.784.000,00	99,55	12 paket internet		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan e-Procurement	463.600.000,00	94,00	425.807.073,00	91,85	45 RUP SKPD		Sekretariat Daerah
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perjalanan Dinas	22.050.000,00	93,00	20.970.000,00	95,10			Sekretariat Daerah
	Integrasi Sistem e-Government Pemerintah Kota Bontang	14.500.000,00	100,00	13.500.000,00	93,10	1 sistem informasi Pemerintah Kota Bontang		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelaksanaan e-Controlling	23.000.000,00	100,00	21.712.500,00	94,40	1 dokumen laporan pengendalian kegiatan SKPD		Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	403.161.000,00	100,00	357.160.890,00	88,59	1 aplikasi terbentuknya sistem informasi untuk manajemen administrasi pengelolaan gedung SETDA		Sekretariat Daerah
	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengelolaan Gudang	50.000.000,00	-	-	-			Sekretariat Daerah
	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	186.120.000,00	100,00	160.145.100,00	86,04	1 domain pemkot Bontang		Sekretariat Daerah
	Penyusunan SOP Tata Kelola Keamanan Informasi	94.900.000,00	100,00	49.660.000,00	52,33	1 dokumen SOP tata kelola keamanan informasi		Sekretariat Daerah
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	70.350.000,00	100,00	69.408.000,00	98,66	2 paket		Sekretariat Dewan
	Pengembangan dan Pemeliharaan Website DPPKA	57.620.000,00	100,00	48.150.000,00	83,56	Pengembangan dan pemeliharaan website		DPPKA
	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	34.450.000,00	76,56	17.650.000,00	51,23	SMS gateway yang berisi informasi perijinan		BPPM
	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	129.347.500,00	76,66	81.650.000,00	63,12	Terpeliharanya software kantor penunjang PTSP		BPPM
	Pembuatan Website Sekretariat Korpri Kota Bontang	36.120.000,00	100,00	35.330.000,00	97,81	Tersedianya website Sekretariat KORPRI		KORPRI
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	17.312.895.000,00	100,00	14.303.852.466,00	82,62		Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	580.480.000,00	100,00	409.833.287,00	70,60	Tersusunya 13 raperda		Sekretariat Dewan
	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	600.000.000,00	100,00	403.975.000,00	67,33	Terlaksananya 83 kegiatan		Sekretariat Dewan
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	529.200.000,00	100,00	503.287.790,00	95,10	Terlaksananya 220 kali rapat		Sekretariat Dewan
	Rapat-Rapat Paripurna	1.030.080.000,00	100,00	668.400.000,00	64,89	Terlaksananya 80 kali rapat paripurna		Sekretariat Dewan
	Kegiatan Reses	2.802.540.000,00	100,00	2.190.210.267,00	78,15	Terlaksannya 3 kali kegiatan reses		Sekretariat Dewan
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	47.400.000,00	100,00	30.513.800,00	64,38	Terlaksannya 30 kali kunjungankerja		Sekretariat Dewan
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	775.480.000,00	100,00	612.000.000,00	78,92	4 kali		Sekretariat Dewan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	336.000.000,00	100,00	336.000.000,00	100,00	1 paket		Sekretariat Dewan
	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	579.980.000,00	100,00	562.355.000,00	96,96	3 raperda		Sekretariat Dewan
	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	1.600.000,00	100,00	1.575.000,00	98,44	2 kajian perda		Sekretariat Dewan
	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	212.330.000,00	100,00	211.495.000,00	99,61	4 paket		Sekretariat Dewan
	Pelantikan Anggota DPRD	115.250.000,00	100,00	108.750.000,00	94,36	1 kali		Sekretariat Dewan
	Rapat-Rapat Fraksi	525.000.000,00	100,00	487.275.000,00	92,81	5 fraksi		Sekretariat Dewan
	Penyusunan Produk DPRD	206.500.000,00	100,00	196.300.000,00	95,06	7 dokumen		Sekretariat Dewan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	8.752.055.000,00	100,00	7.367.327.322,00	84,18	25 Orang		Sekretariat Dewan
	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	36 dokumen		Sekretariat Dewan
	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	60.000.000,00	100,00	58.930.000,00	98,22	1 perda P2APBD		Sekretariat Dewan
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	150.000.000,00	100,00	146.625.000,00	97,75	1 perda P2APBD		Sekretariat Dewan
10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	3.227.385.000,00	75,00	2.296.599.058,00	71,16		Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	333.030.000,00	100,00	323.945.000,00	97,27	5 kali dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat		Sekretariat Daerah
	Rapat Koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)	293.475.000,00	-	-	-	-		Sekretariat Daerah
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	566.560.000,00	100,00	491.413.400,00	86,74	Terlaksananya rapat koordinasi 77 kali dalam daerah dan 33 kali luar daerah		Sekretariat Daerah
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.034.320.000,00	100,00	1.481.240.658,00	72,81	Terlaksananya koordinasi 148 kali dalam daerah, 156 luar daerah dan 2 kali luar negri		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.998.220.000,00	99,99	6.045.850.500,00	86,39		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	237.260.000,00	100,00	212.456.000,00	89,55	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	282.130.000,00	100,00	281.460.000,00	99,76	Tersedianya 2 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	295.500.000,00	100,00	283.111.000,00	95,81	Tersedianya 2 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	235.500.000,00	100,00	126.550.200,00	53,74	Tersedianya 2 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	177.650.000,00	100,00	177.623.000,00	99,98	Tersedianya 2 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	181.900.000,00	100,00	181.000.000,00	99,51	Tersedianya 6 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	977.470.000,00	100,00	817.705.000,00	83,66	Tersedianya 50 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	445.720.000,00	100,00	253.314.600,00	56,83	Tersedianya 6 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	590.720.000,00	100,00	526.300.000,00	89,09	Tersedianya 50 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	509.220.000,00	100,00	379.075.400,00	74,44	Tersedianya 6 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	337.750.000,00	100,00	337.078.500,00	99,80	Tersedianya 50 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	314.300.000,00	100,00	314.140.000,00	99,95	1 perwali		DPPKA
	Penyusunan Pergeseran APBD	230.800.000,00	100,00	230.799.000,00	100,00	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	85.900.000,00	100,00	80.660.000,00	93,90	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penetapan Bendaharan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	11.100.000,00	100,00	-	-	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Bimtek Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	291.820.000,00	100,00	291.820.000,00	100,00	Terlaksananya bimtek yang diikuti 47 orang		DPPKA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD	96.300.000,00	100,00	91.740.000,00	95,26	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai	101.800.000,00	100,00	101.300.000,00	99,51	Terlaksananya 47 berita acara		DPPKA
	Pedoman Penyusunan RKA SKPD	117.860.000,00	100,00	60.235.000,00	51,11	Pedoman penyusunan RKA SKPD		DPPKA
	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	16.300.000,00	100,00	15.150.000,00	92,94	Tersusunnya 1 perda		DPPKA
	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	274.800.000,00	100,00	119.953.100,00	43,65	100%		DPPKA
	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	167.760.000,00	100,00	167.747.200,00	99,99	100%		DPPKA
	Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang	37.850.000,00	100,00	37.770.000,00	99,79	100%		DPPKA
	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	13.300.000,00	100,00	12.675.000,00	95,30	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Inventaris Data Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Atas LKPD	12.450.000,00	100,00	12.437.500,00	99,90	100%		DPPKA
	Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu Berbasis Akrua	451.560.000,00	100,00	449.810.000,00	99,61	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	251.800.000,00	99,82	242.990.000,00	96,50	100%		DPPKA
	Optimalisasi Tata Kelola Pendapatan Menggunakan Piranti Lunak	251.700.000,00	100,00	240.950.000,00	95,73	100%		DPPKA
12	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.299.722.450,00	100,00	1.840.036.007,00	80,01		Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.409.125.000,00	100,00	1.290.145.000,00	91,56	45 SKPD		Inspektorat
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	34.160.450,00	100,00	22.000.000,00	64,40	1 Laporan hasil Review RAPBD tahun 2016		Inspektorat
	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	161.426.000,00	100,00	67.510.650,00	41,82	1 laporan TLHP		Inspektorat

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS	142.510.000,00	100,00	124.052.500,00	87,05	1869 jumlah LP2P PNS Gol. III keatas yg diselesaikan		Inspektorat
	Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	91.650.000,00	100,00	91.650.000,00	100,00	45 LHE SAKIP SKPD yang diterbitkan		Inspektorat
	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan	15.260.000,00	100,00	15.260.000,00	100,00	1 LHR LKPD Kota Bontang TA.2014 yang diterbitkan		Inspektorat
	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	30.300.000,00	100,00	30.300.000,00	100,00	4 laporan pemantauan kepatuhan peraturan keuangan pemerintah Kota Bontang		Inspektorat
	Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	127.664.000,00	100,00	51.953.700,00	40,70	4 laporan hasil monitoring pelaksanaan RAD PPK Kota Bontang		Inspektorat
	Rekonsiliasi Temuan Hasil Pemeriksaan	176.845.000,00	100,00	130.800.857,00	73,96	2 laporan rekonsiliasi TLRHP BPK RI yang disusun		Inspektorat
	Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang	110.782.000,00	100,00	16.363.300,00	14,77	1 laporan evaluasi PMRB Kota Bontang		Inspektorat
13	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	418.880.000,00	100,00	319.763.492,00	76,34		Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	418.880.000,00	100,00	319.763.492,00	76,34	47 aparat pengawas yang mengikuti workshop penilaian hasil DA SKPD		Inspektorat
14	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	24.962.000,00	100,00	9.450.000,00	37,86		Terwujudnya ketatalaksanaan tugas pengawasan sesuai proses yang sederhana	
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	24.962.000,00	100,00	9.450.000,00	37,86	1 laporan review SOP urusan wajib pengawasan daerah		Inspektorat
15	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	92.100.000,00	100,00	12.540.000,00	13,62		Meningkatnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	
	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	92.100.000,00	100,00	12.540.000,00	13,62	4 kasus pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti selama setahun		Inspektorat
16	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	143.835.000,00	100,00	110.173.000,00	76,60		Terselenggranya kerjasama antar pemerintah Kota Bontang	Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	143.835.000,00	100,00	110.173.000,00	76,60	Terlaksananya 4 kegiatan APEKSI		Sekretariat Daerah
17	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.183.343.000,00	100,00	991.422.162,00	83,78		Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	27.330.000,00	100,00	26.345.000,00	96,40	Tersedianya 85 buku produk hukum yang terdokumentasikan		Sekretariat Daerah
	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	170.960.000,00	100,00	142.849.362,00	83,56	Tersedianya 6 raperda		Sekretariat Daerah
	Pelayanan dan Bantuan Hukum	335.600.000,00	100,00	258.909.000,00	77,15	Penanganan perkara (2 rakor dan 2 perkara)		Sekretariat Daerah
	Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	302.840.000,00	100,00	301.535.000,00	99,57	1 kali terlaksananya rapat evaluasi kebijakan perekonomian kota		Sekretariat Daerah
	Penyuluhan Hukum dan HAM	27.705.000,00	100,00	24.395.000,00	88,05	Terlaksananya sosialisasi kesadaran hukum dan HAM bagi masyarakat		Sekretariat Daerah
	Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)	14.150.000,00	100,00	14.150.000,00	100,00	1 dokumen program legislasi daerah tahun 2017		Sekretariat Daerah
	Penyusunan Desain Organisasi	41.620.000,00	100,00	34.102.600,00	81,94	Tersusunnya 1 dokumen dan 1 raperda kajian desain organisasi perangkat daerah		Sekretariat Daerah
	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	33.472.000,00	100,00	19.583.800,00	58,51	Tersedianya dokumen evaluasi ketatalaksanaan		Sekretariat Daerah
	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	121.632.000,00	100,00	87.215.400,00	71,70	Tersusnya raperda dan raperkada sesuai dengan perundang-undangan		Sekretariat Daerah
	Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah	31.562.000,00	100,00	27.864.000,00	88,28	Tersusunnya 1 perwali regulasi tata naskah dinas elektronik		Sekretariat Daerah
	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	36.472.000,00	100,00	32.073.000,00	87,94	Tersusunnya 1 perwali pedoman bidang ketatalaksanaan		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum	40.000.000,00	100,00	22.400.000,00	56,00	Terlaksananya 1 kegiatan		Sekretariat Dewan
18	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	194.432.750,00	99,80	185.122.500,00	95,21		Meningkatnya lingkungan hidup sehat	
	Lomba Pemukiman Tingkat RT	194.432.750,00	99,80	185.122.500,00	95,21	Terlasananya lomba pemukiman tingkat RT		Kelurahan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
19	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	281.605.000,00	87,50	186.493.950,00	66,23		Meningkatnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	237.400.000,00	100,00	152.006.750,00	64,03	Tersusunnya 1 dokumen pelaksanaan APBD tahun 2015 dan workshop		Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	44.205.000,00	75,00	34.487.200,00	78,02	Tersedianya 4 laporan pengendalian hasil		Sekretariat Daerah
20	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	1.857.175.000,00	99,01	1.488.755.300,00	80,16		Meningkatnya Pendapatan Daerah	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	523.020.000,00	99,93	521.577.500,00	99,72	Publikasi proses pemungutan pajak di Kota bontang dan Kajian Potensi PAD		DPPKA
	Penyusunan Target Anggaran Pendapatan Dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	320.000,00	100,00	-	-	Terlaksananya penyusunan target anggaran pendapatan dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah		DPPKA
	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	130.200.000,00	100,00	95.502.000,00	73,35	Tersebar nya SPPDT PBB kepada wajib pajak		DPPKA
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	52.170.000,00	100,00	51.340.000,00	98,41	Terpeliharanya sistem informasi pendapatan daerah		DPPKA
	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	Terlaksananya forum komunikasi dan konsolidasi daerah penghasil minyak dan gas bumi		DPPKA
	Fasilitasi Pengelolaan Pajak Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan	205.270.000,00	98,78	189.780.000,00	92,45	Meningkatnya PAD dari PBB pedesaan dan perkotaan		DPPKA
	Pemeliharaan SISMIOP PBB	63.995.000,00	94,80	50.247.500,00	78,52	Terpeliharanya SISMIOP PBB		DPPKA
	Penghapusan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bontang	5.925.000,00	100,00	5.750.000,00	97,05	Tersedianya data tentang penghapusan piutang pajak Pemerintah Kota Bontang		DPPKA
	Pemutakhiran Data Piutang PBB P-2 sebelum Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pajak PBB P-2 oleh Pemerintah Pusat	78.000.000,00	100,00	38.471.000,00	49,32	Validasi tunggakan pajak PBB P2 yang baik dan akurat di 15 kelurahan		DPPKA
	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	189.050.000,00	91,96	47.500.000,00	25,13	1 paket		DPPKA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang Daerah	13.700.000,00	100,00	13.375.000,00	97,63	Akuratnya informasi data pendapatan dan piutang dengan jumlah ketetapan yang dikeluarkan		DPPKA
	Pemeliharaan Tempat Pemasangan Reklame/Spanduk	40.575.000,00	100,00	39.080.800,00	96,32	Terpeliharanya tempat pemasangan Reklame/spanduk		DPPKA
	Peremajaan Data Objek PBB di Wilayah Kecamatan Bontang Utara	424.560.000,00	100,00	318.461.500,00	75,01	Terlaksananya peremajaan data objek PBB		DPPKA
	Fasilitasi Sistem Informasi Gateway PBB P-2	50.390.000,00	99,72	49.670.000,00	98,57	100%		DPPKA
	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	60.000.000,00	100,00	48.000.000,00	80,00	1 paket		DPPKA
21	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.769.720.200,00	100,00	5.417.160.894,00	93,89		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	
	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	47.562.000,00	100,00	44.774.300,00	94,14	Tersusunnya 3 dokumen ABK		Sekretariat Daerah
	Evaluasi Jabatan	80.950.000,00	100,00	79.810.000,00	98,59	Tersusunnya 3dokumen laporan evaluasi jabatan PNS		Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	2.390.045.000,00	100,00	2.383.003.927,00	99,71	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diikuti 251 orang		BKD
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	2.101.274.000,00	100,00	1.785.396.567,00	84,97	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural yang diikuti 54 orang		BKD
	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintahan	765.105.000,00	100,00	765.105.000,00	100,00	Jumlah peserta diklat 91 orang		BKD
	Diklat Keprotokolan	84.740.000,00	100,00	80.537.400,00	95,04	Jumlah peserta diklat 34 orang		BKD
	Diklat Pelayanan Prima	84.740.000,00	100,00	78.525.400,00	92,67	Jumlah peserta diklat 36 orang		BKD
	Diklat Pra Tugas	76.495.000,00	100,00	63.643.100,00	83,20	Jumlah peserta diklat 103 orang		BKD
	Diklat Teknis Motivasi	138.809.200,00	100,00	136.365.200,00	98,24	Jumlah peserta diklat 103 orang		BKD
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	3.702.118.800,00	99,80	3.260.124.756,00	88,06		Terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan pola karir	
	Evaluasi Tupoksi	11.190.000,00	100,00	11.160.000,00	99,73	Tersusunnya 4 perwali		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	54.300.000,00	100,00	54.075.000,00	99,59	1 CD (modul SKP, modul login, modul unit kerja) perbaikan SOTK, modul ASN (eselon)		BKD
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	19.300.000,00	100,00	19.300.000,00	100,00	1 tahun		BKD
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1.310.605.000,00	100,00	1.121.984.256,00	85,61	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 38 orang		BKD
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.500.000,00	100,00	4.400.000,00	58,67	Terlaksananya monitoring 16 kali		BKD
	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	22.700.000,00	100,00	22.700.000,00	100,00	Jumlah piagam 193 lembar		BKD
	Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah	76.625.000,00	100,00	61.059.000,00	79,69	Jumlah peserta 74 orang		BKD
	Proses Penanganan Kasus-Kasus Ijin Perceraian	8.300.000,00	100,00	8.300.000,00	100,00	Tersedianya 1 dokumen		BKD
	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	96.820.000,00	100,00	81.045.000,00	83,71	506 orang		BKD
	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	40.300.000,00	100,00	28.849.000,00	71,59	103 unit kerja		BKD
	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	306.570.000,00	100,00	238.355.000,00	77,75	288 orang		BKD
	Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS	17.850.000,00	100,00	17.542.000,00	98,27	258 orang		BKD
	Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS	22.800.000,00	100,00	18.425.000,00	80,81	251 orang		BKD
	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	89.852.500,00	95,00	77.115.500,00	85,82	1 dokumen		BKD
	Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Titipan Pegawai	15.800.000,00	100,00	15.800.000,00	100,00	41 orang		BKD
	Pengusulan Kartu Status Pegawai	19.300.000,00	100,00	19.300.000,00	100,00	64 kartu		BKD
	Pelaksanaan Assesment Pegawai	154.060.000,00	100,00	154.060.000,00	100,00	58 orang		BKD
	Rapat Koordinasi Kepegawaian	68.811.300,00	100,00	68.249.600,00	99,18	1 kali		BKD
	Pengusulan Pemberhentian PNS	29.300.000,00	100,00	27.800.000,00	94,88	21 orang		BKD
	Pelayanan dalam Penetapan/Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai	16.050.000,00	100,00	14.735.000,00	91,81	107 SKPD/unit		BKD

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelayanan dalam Penetapan dan Pencairan Tabungan Kesejahteraan Purna Tugas (TKPT)	8.300.000,00	100,00	8.300.000,00	100,00	107 SKPD/unit		BKD
	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Peremajaan Data SAPK	48.300.000,00	100,00	48.300.000,00	100,00	Tersedianya 2 dokumen		BKD
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	413.760.000,00	100,00	349.444.000,00	84,46	36 SKPD		BKD
	Monitoring Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	682.650.000,00	100,00	664.579.550,00	97,35	Tersedianya 2 dokumen		BKD
	Pembinaan Mental Spritual dan Komitmen Moral Aparatur	161.075.000,00	100,00	125.246.850,00	77,76	363 pegawai		BKD
23	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	533.508.000,00	100,00	510.503.065,00	95,69		Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah daerah	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pelayanan Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	533.508.000,00	100,00	510.503.065,00	95,69	Pelayan mess kota Bontang di Jakarta		Sekretariat Daerah
24	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	2.019.445.000,00	99,04	1.515.473.800,00	75,04		Meningkatnya manajemeinformasi kekayaan/aset daerah	
	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus dan Penyimpan Barang	109.080.000,00	100,00	97.617.700,00	89,49	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penghapusan Barang Milik Daerah	35.300.000,00	100,00	35.225.000,00	99,79	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	18.800.000,00	100,00	18.615.000,00	99,02	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	40.900.000,00	88,51	17.400.000,00	42,54	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU dan RKPBU)	16.300.000,00	100,00	14.050.000,00	86,20	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	172.360.000,00	100,00	117.782.000,00	68,33	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	276.580.000,00	100,00	275.940.000,00	99,77	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Rekonsiliasi Aset Sumber Dana BOS pada Sekolah Negeri TA. 2014	14.300.000,00	100,00	14.050.000,00	98,25	100%		DPPKA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pembantu Pengurus Barang dari UPTD dan SEKOLAH	644.035.000,00	100,00	377.109.900,00	58,55	100%		DPPKA
	Pembuatan Plang Aset Tanah	94.620.000,00	100,00	92.992.000,00	98,28	100%		DPPKA
	Pengembangan Sistem Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrual	488.980.000,00	100,00	428.250.700,00	87,58	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
	Sosialisasi Sistem Aplikasi Aset Daerah Berbasis Akrual	108.190.000,00	100,00	26.441.500,00	24,44	Tersedianya 1 dokumen		DPPKA
25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	980.035.000,00	100,00	958.473.700,00	97,80		Meningkatnya kapasitas lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	
	Perayaan HUT KORPRI	437.610.000,00	100,00	432.076.000,00	98,74	Terselenggaranya HUT KORPRI		KORPRI
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat KORPRI	3.500.000,00	100,00	2.252.800,00	64,37	2 mobil 1 motor		KORPRI
	Penyuluhan dan Sosialisasi LKBH	49.145.000,00	100,00	42.225.000,00	85,92	3 kegiatan sosialisasi dan penyuluhan LKBH		KORPRI
	Pembinaan Atlet Prestasi Anggota KORPRI	91.950.000,00	100,00	89.582.500,00	97,43	Terbinanya atlit KORPRI selama 1 tahun		KORPRI
	Pembinaan Grup Rebana Anggota KORPRI	60.070.000,00	100,00	59.072.500,00	98,34	Terbinanya group rebana selam 1 tahun		KORPRI
	Halal Bi Halal	332.360.000,00	100,00	327.864.900,00	98,65	Terlaksananya kegiatan halal bi halal		KORPRI
	Seleksi Penerimaan Anggota Korsik KORPRI Kota Bontang	5.400.000,00	100,00	5.400.000,00	100,00	35 orang mengikuti seleksi		KORPRI
26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	350.952.200,00	89,47	286.397.200,00	81,61		Meningkatnya pelayanan perijinan	
	Survey Lapangan untuk Proses Perizinan	17.503.200,00	84,07	1.103.200,00	6,30	Kegiatan survey lapangan		BPPM
	Peningkatan Pelayanan Perijinan	333.449.000,00	94,87	285.294.000,00	85,56	Terselenggaranya PTSP		BPPM
27	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	2.069.314.800,00	97,95	1.943.926.603,00	93,94		Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah atau kecamatan	
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	52.205.000,00	100,00	51.210.000,00	98,09	Penyusunan profil dan monografi serta SIMDESHAN		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	49.874.000,00	100,00	48.674.000,00	97,59	Terlasananya Musrenbang di kecamatan		Kecamatan
	Pembinaan Kelurahan	42.650.000,00	100,00	42.034.000,00	98,56	Terlaksananya pembinaan kelurahan		Kecamatan
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	89.369.000,00	100,00	88.769.000,00	99,33	Terlaksananya kegiatan pembinaaan dan monitoring		kecamatan
	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	1.440.000,00	100,00	1.440.000,00	100,00	Terbutuhnya kebutuhan administrasi pertanahan		Kecamatan
	Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan	419.000.000,00	100,00	388.539.176,00	92,73	Terlaksananya kegiatan kepramukaan		Kecamatan
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	142.595.000,00	100,00	137.529.351,00	96,45	Terlaksananya PATEN di kelurahan		Kecamatan
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	4.960.000,00	100,00	4.960.000,00	100,00	Terlaksananya pelaksanaan E-KTP		Kec. Bontang Selatan dan Kec. Bontang Barat
	Patroli Keamanan dan Ketertiban	11.900.000,00	100,00	11.900.000,00	100,00	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah		Kec. Bontang Selatan
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	427.247.500,00	97,05	396.989.260,00	92,92	Tercapainya pelayanan dan pembinaan masyarakat		Kelurahan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	182.515.000,00	100,00	181.503.000,00	99,45	Terlaksananya Musrenbang tingkat kelurahan		Kelurahan
	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	441.475.000,00	99,91	428.987.170,00	97,17	Partisipasi masyarkat dalam keamanan dan ketertiban		Kelurahan
	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	12.343.300,00	91,67	8.164.250,00	66,14	Tersedianya data informasi kependudukan		Kelurahan
	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	31.990.000,00	93,33	25.113.000,00	78,50	Terpenuhinya administrasi pertanahan		Kelurahan
	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	87.801.000,00	86,36	59.357.000,00	67,60	Tersusunya Profil dan monografi kelurahan		Kelurahan
	Sosialisasi Kelurahan Bebas Narkoba	71.950.000,00	98,85	68.757.396,00	95,56	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kelurahan bebas narkoba		Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Bontang Kuala
28	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.942.878.180,00	97,91	7.357.074.159,00	92,62		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Forum Keagamaan/Paguyuban	1.900.175.000,00	100,00	1.531.840.441,00	80,62	Terlaksananya pemberdayaan forum masyarakat di Kota Bontang		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Forum Keagamaan	134.335.000,00	99,66	129.512.500,00	96,41	Terlaksananya pemberdayaan forum masyarakat di Kota Bontang		Kec. Bontang Utara dan Kelurahan
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	182.887.000,00	100,00	179.823.790,00	98,33	Terlaksananya sosialisai Bulan Bakti Gotong Royong		Kecamatan dan Kelurahan
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	117.420.000,00	93,64	114.759.200,00	97,73	Terlaksananya FKDM		Kecamatan dan Kelurahan
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1.752.452.380,00	99,74	1.720.626.577,00	98,18	Terlaksananya kegiatan keagamaan		Kecamatan dan Kelurahan
	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	256.845.000,00	99,76	252.944.500,00	98,48	Terlaksananya kegiatan HUT RI		Kecamatan dan Kelurahan
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	70.119.000,00	100,00	70.119.000,00	100,00	Terlaksanya kegiatan UKS		Kecamatan
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	104.140.000,00	93,33	101.923.850,00	97,87	Terlaksananya kegiatan FPK		Kecamatan dan Kelurahan
	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	133.755.000,00	100,00	133.087.800,00	99,50	Terlaksananya kegiatan sosialisasi GSI		Kecamatan dan Kelurahan
	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	342.554.000,00	100,00	325.574.150,00	95,04	Terlaksananya kegiatan PKK		Kecamatan, kel. Bontang Kuala dan Kel. Ani-ani
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	375.149.000,00	100,00	357.686.084,00	95,35	Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat		Kecamatan dan Kelurahan
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	50.509.000,00	100,00	49.459.000,00	97,92	Terlaksananya Forum Kota Sehat Kecamatan		Kecamatan
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	40.400.000,00	66,67	38.280.500,00	94,75	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pembangunan		Kec. Bontang Selatan, Kel. Tanjung laut indah dan Kelurahan Telihan
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	1.625.365.800,00	99,91	1.539.544.455,00	94,72	Terlaksananya kegiatan PKK		Kelurahan
	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	154.865.000,00	99,67	145.391.162,00	93,88	Terlaksananya kegiatan LPM di kelurahan		Kelurahan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	203.355.000,00	100,00	191.101.900,00	93,97	Terlekasanya kegiatan Karang Taruna Kelurahan		Kelurahan
	Peningkatan Pelayanan Kegiatan di Masyarakat	4.350.000,00	100,00	-	-			Kelurahan
	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	45.290.000,00	100,00	44.456.060,00	98,16	Terciptanya keamanan lingkungan		Kelurahan
	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	13.475.000,00	100,00	13.386.000,00	99,34	Terlaksananya kegiatan PKK		Kelurahan
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	158.585.000,00	99,65	146.384.590,00	92,31	Terlaksananya lomba pokja sehat		Kecamatan dan Kelurahan
	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	266.552.000,00	100,00	261.022.600,00	97,93	Terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu terhadap masyarakat		Kelurahan
	Fasilitasi Kegiatan HUT Kota Bontang	8.200.000,00	100,00	8.050.000,00	98,17	Terlaksananya kegiatan HUT RI		Kelurahan
	Peningkatan Pembinaan Rukun Tetangga	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	100,00	Meningkatnya kesadaran menjaga ketertiban lingkungan		Kelurahan Kanaan
29	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	454.137.500,00	97,56	429.327.459,00	94,54		Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pembangunan lingkungan	
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	19.210.000,00	90,91	16.673.000,00	86,79	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan		Kecamatan dan Kelurahan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	221.475.000,00	99,34	201.413.890,00	90,94	Terlaksananya pengelolaan persampahan		Kelurahan dan Kecamatan
	Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	24.962.500,00	100,00	24.962.500,00	100,00	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pemabngunan		Kec. Bontang selatan dan Kel. Kanaan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	188.490.000,00	100,00	186.278.069,00	98,83	Terlaksananya kegiatan penghijauan		Kelurahan
30	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	34.191.301.800,00	99,94	33.544.173.124,00	98,11		Meningkatnya Fasilitasi partisipasi masyarakat	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan	24.900.000.000,00	99,98	24.452.062.471,00	98,20	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		Kelurahan
	Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT	9.291.301.800,00	99,90	9.092.110.653,00	97,86	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan		Kelurahan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)	146.390.000,00	100,00	128.660.000,00	87,89		Penerapan SPIP Kota Bontang sesuai tahapan	
	Pelaksanaan Diagnostic Assesment SKPD	100.490.000,00	100,00	100.490.000,00	100,00	6 SKPD penyelesaian		Inspektorat
	Monitoring dan Evalalusi Implementasi SPIP	45.900.000,00	100,00	28.170.000,00	61,37	1 laporan monitoring dan evaluasi yang telah diterbitkan		Inspektorat
32	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	469.170.000,00	100,00	459.987.900,00	98,04		Meningkatnya pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	34.900.000,00	100,00	32.405.000,00	92,85	Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi Camat dan Lurah		Sekretariat Daerah
	Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	136.050.000,00	100,00	131.735.000,00	96,83	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan pedoman adinistrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan		Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	298.220.000,00	100,00	295.847.900,00	99,20	Pelayanan perizinan dan non perizinan, pembinaan administrasi paten, sarana dan prasarana paten		Sekretariat Daerah
33	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN	285.620.000,00	100,00	236.817.750,00	82,91		Tertatanya Batas Wilayah Kota Bontang	Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Penataan Patok Batas Daerah	285.620.000,00	100,00	236.817.750,00	82,91	70 patok batas wilayah kota bontang, batas wilayah kelurahan		Sekretariat Daerah
34	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	14.874.771.400,00	100,00	12.241.361.115,00	82,30		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana peribadata	
	Pelaksanaan Safari Ramadhan	69.000.000,00	100,00	69.000.000,00	100,00	Terlaksananya 30 kunjungan safari ramadhan		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	2.602.410.000,00	100,00	2.094.154.810,00	80,47	Terlaksananya kegiatan MTQ		Sekretariat Daerah
	Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran	1.019.467.000,00	100,00	944.832.705,00	92,68	Dewan Hakim 50 orang dan kafilah 50 Orang		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	101.550.000,00	100,00	89.126.000,00	87,77	Terlaksananya pelayanan ibadah haji		Sekretariat Daerah

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	1.052.600.000,00	100,00	869.111.650,00	82,57	Mubaligh 200 orang		Sekretariat Daerah
	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	5.429.275.000,00	100,00	4.433.077.550,00	81,65	Ustad dan ustadzah 980 orang		Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Kristiani	1.419.600.400,00	100,00	1.204.097.800,00	84,82	Guru sekolah minggu 577 orang dan pendeta 57 orang		Sekretariat Daerah
	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	1.664.324.000,00	100,00	1.153.800.000,00	69,33	Terlaksananya ketenangan dan ketertiban dalam beribadah		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	512.830.000,00	100,00	471.424.000,00	91,93	Jumlah peserta lomba Festival anak sholeh		Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Hindu	448.245.000,00	100,00	379.044.100,00	84,56	Pemangku 10 orang		Sekretariat Daerah
	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	555.470.000,00	100,00	533.692.500,00	96,08	Terlaksananya perayaan natal dan paskah		Sekretariat Daerah
35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	276.544.000,00	100,00	252.239.600,00	91,21		Tercapainya Kinerja Pemerintah Kota Bontang	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kota Bontang	175.532.000,00	100,00	164.598.000,00	93,77	Tersusunnya 1 laporan kinerja pemerintah Kota Bontang		Sekretariat Daerah
	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	101.012.000,00	100,00	87.641.600,00	86,76	Tersusunnya 2 dokumen profil rupa bumi Kota Bontang		Sekretariat Daerah
36	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	325.480.000,00	-	-	-			
	Rapat Koordinasi Kebencanaan	211.400.000,00	-	-	-			BPBD
	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang	48.720.000,00	-	-	-			BPBD
	Pembuatan Laporan Daerah Rawan Bencana Tahunan	15.310.000,00	-	-	-			BPBD
	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	50.050.000,00	-	-	-			BPBD
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	299.239.105.521,00	96,76	268.419.115.610,00	89,70	36 PROGRAM; 305 KEGIATAN		

A.4.2.5 URUSAN KEARSIPAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	19.370.000,00	100,00	6.550.000,00	33,82		Peningkatan pelayanan pengembangan sistem informasi kearsipan	
	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	3.170.000,00	100,00	3.100.000,00	97,79	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Pengumpulan Data	12.550.000,00	100,00	-	-	Terkumpulnya data		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Pengklasifikasian Data	800.000,00	100,00	600.000,00	75,00	Jumlah Pengklasifikasian database kearsipan		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Penyusunan Sistem Katalog Data	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	Jumlah deskripsi arsip dan katalog data yang tersedia		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
2	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	89.686.000,00	100,00	76.255.200,00	85,02		Penyelamatan dan pelestarian arsip-arsip disemua instansi pemerintah maupun swasta	
	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	75.520.000,00	100,00	62.935.000,00	83,34	Jumlah sarana pengolahan, penyimpanan dan arsip dan fumigasi		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	4.500.000,00	100,00	4.254.200,00	94,54	Jumlah Laporan Arsip Keuangan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	9.666.000,00	100,00	9.066.000,00	93,79	Jumlah penduplikasian arsip foto yang bernilai sejarah		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
3	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	60.922.000,00	100,00	52.212.500,00	85,70		Pemeliharaan serta pelestarian sarana dan prasarana kearsipan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	54.922.000,00	100,00	46.212.500,00	84,14	1. Akuisisi 1 SKPD (Bag Humas); 2. Pemusnahan Arsip RSUD dan BAPPEDA; 3. Fumigasi seluruh Khasanah arsip dan koleksi Bahan Pustaka		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	Jumlah monitoring kearsipan		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	47.070.000,00	100,00	36.856.900,00	78,30		Pembekalan dan menyebarluaskan informasi arsip yang informasinya mempunyai nilai tinggi	
	Penyusun dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	2.250.000,00	100,00	-	-	-		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	12.550.000,00	100,00	9.950.000,00	79,28	Jumlah belanja sarana layanan informasi arsip yang tersedia		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	32.270.000,00	100,00	26.906.900,00	83,38	Sosialisasi/ Penyusunan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta sebanyak 1 kegiatan		Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
	URUSAN KEARSIPAN	217.048.000,00	100,00	171.874.600,00	79,19	4 PROGRAM; 12 KEGIATAN		

A.4.2.6 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	427.790.000,00	100,00	356.115.876,00	83,25		Terciptanya informasi dan Dokumentasi yang terbuka untuk masyarakat	
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	243.700.000,00	100,00	216.557.876,00	88,86	Terpublikasinya informasi secara up to date		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Jaringan	184.090.000,00	100,00	139.558.000,00	75,81	Terpeliharanya Jaringan TI Pemkot Bontang		Dishubkominfo
2	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	11.878.487.200,00		11.660.151.212,00	98,16		Interkoneksi perangkat TI keamanan data, terpeliharanya serta tersedianya saran dan prasarana TI	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	11.878.487.200,00		11.660.151.212,00	98,16	Terlaksananya Penyebaran Informasi Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Melalui Media Massa		Sekretariat Daerah
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.306.277.200,00	100,00	12.016.267.088,00	97,64	2 PROGRAM; 3 KEGIATAN		

A.4.2.7 URUSAN STATISTIK

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	598.585.000,00	100,00	488.369.369,00	81,59		Ketersediaan Data/ Informasi dan Statistik	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	166.560.000,00	100,00	131.265.275,00	78,81	Buku Indikator Kesejahtraan Rakyat, Buku Indeks Pembangunan Manusia		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	134.335.000,00	100,00	96.424.644,00	71,78	Buku Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	159.410.000,00	100,00	150.701.850,00	94,54	Buku Daerah Dalam Angka		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Laporan Tahunan Kota Bontang	138.280.000,00	100,00	109.977.600,00	79,53	Buku Laporan Tahunan/ Annual Report		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	URUSAN STATISTIK	598.585.000,00	100,00	488.369.369,00	81,59	1 PROGRAM; 4 KEGIATAN		

**Tabel 4.3. Program dan Kegiatan Misi 3
(Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup)**

A.4.3.1 URUSAN PERUMAHAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN	1.474.000.000,00	100,00	1.288.342.000,00	87,40		Terbangunnya Landscape dan Sarana Prasarana Umum Rusunawa	
	Pembuatan Landscape dan Sarana Prasarana Umum Rusunawa	1.474.000.000,00	100,00	1.288.342.000,00	87,40	Tempat parkir paving block seluas 300 m2		Dinas Pekerjaan Umum
2	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	11.010.000,00	100,00	11.010.000,00	100,00		Meningkatnya tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang ditangani	
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	11.010.000,00	100,00	11.010.000,00	100,00	Penanganan 10 kejadian kebakaran		Dinas Kebersihan & Pertamanan / Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PERUMAHAN	1.485.010.000,00	100,00	1.299.352.000,00	87,50	2 PROGRAM; 2 KEGIATAN		

A.4.3.2 URUSAN PENATAAN RUANG

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.638.894.700,00	100,00	2.511.168.556,00	95,16		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.355.000,00	100,00	4.980.000,00	93,00	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	100,00	14.784.946,00	61,60	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.000.000,00	100,00	10.501.000,00	80,78	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.256.000,00	100,00	87.788.000,00	99,47	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.271.000,00	100,00	65.799.800,00	99,29	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.062.000,00	100,00	121.872.000,00	81,21	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.200.000,00	100,00	34.200.000,00	97,16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.575.100,00	100,00	12.571.950,00	99,97	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.500.000,00	100,00	13.727.000,00	83,19	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.076.710.000,00	100,00	1.035.449.660,00	96,17	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.150.965.600,00	100,00	1.109.494.200,00	96,40	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Dinas Tata Ruang Kota
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	713.790.000,00	100,00	710.936.200,00	99,60		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	264.980.000,00	100,00	262.620.000,00	99,11	Tersedianya kendaraan dinas/operasional		Dinas Tata Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	384.420.000,00	100,00	384.291.550,00	99,97	Adanya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Dinas Tata Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	64.390.000,00	100,00	64.024.650,00	99,43	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan		Dinas Tata Ruang Kota

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	41.000.000,00	100,00	40.590.000,00	99,00		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	41.000.000,00	100,00	40.590.000,00	99,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Dinas Tata Ruang Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	345.040.000,00	100,00	320.963.896,00	93,02		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	345.040.000,00	100,00	320.963.896,00	93,02	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Dinas Tata Ruang Kota
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.250.000,00	100,00	3.800.000,00	72,38		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.050.000,00	100,00	-	-	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.050.000,00	100,00	950.000,00	90,48	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.050.000,00	100,00	950.000,00	90,48	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyusunan Renja SKPD	1.050.000,00	100,00	950.000,00	90,48	Penyusunan Renja SKPD		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	1.050.000,00	100,00	950.000,00	90,48	Penyusunan Laporan Akuntabilitas		Dinas Tata Ruang Kota
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	220.445.000,00	100,00	208.813.286,00	94,72		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	220.445.000,00	100,00	208.813.286,00	94,72	Terlaksananya pameran pembangunan		Dinas Tata Ruang Kota
7	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.934.436.000,00	100,00	1.920.352.306,00	99,27		Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang Sebagai Pedoman Pemanfaatan Ruang	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	55.000.000,00	100,00	48.277.500,00	87,78	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang dan RDTR (3x sosialisasi)		Dinas Tata Ruang Kota
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	673.480.000,00	100,00	668.245.000,00	99,22	Tersusunnya dokumen RTBL Bontang Kuala (1 Dokumen)		Dinas Tata Ruang Kota
	Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	31.800.000,00	100,00	31.755.000,00	99,86	- Terbitnya 219 SKTR - Terbitnya 11 Site Plan		Dinas Tata Ruang Kota

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyusunan Kebijakan Peraturan RTDR dan Zoning Regulation	992.760.000,00	100,00	991.518.306,00	99,87	- Naskah Akademik RDTR Kota Bontang - Peta RDTR - Rekomendasi BIG - Dokumen Revisi Raperda		Dinas Tata Ruang Kota
	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	181.396.000,00	100,00	180.556.500,00	99,54	- Database SIMTARU Kecamatan Bontang Utara - Database SIMTARU Kecamatan Bontang Selatan		Dinas Tata Ruang Kota
8	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	159.712.000,00	100,00	150.928.000,00	94,50		Tercapainya Pemanfaatan Ruang yang Sejalan dengan Perencanaan Tata Ruang	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	68.500.000,00	100,00	68.345.000,00	99,77	Teridentifikasinya pemanfaatan ruang (1 dokumen)		Dinas Tata Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	91.212.000,00	100,00	82.583.000,00	90,54	- Dokumen Pendampingan Kegiatan P2KH - Festival Bontang Hijau - Rencana Aksi RTH (Penanaman Mangrove di Bontang Kuala)		Dinas Tata Ruang Kota
9	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	488.504.000,00	100,00	463.725.621,00	94,93		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	
	Pembuatan Baliho Himbauan IMB	70.020.000,00	100,00	70.011.750,00	99,99	- Perawatan baliho di 4 titik - Penggantian materi baliho (6 kali per titik)		Dinas Tata Ruang Kota
	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB	118.940.000,00	100,00	116.292.250,00	97,77	Updating database Sistem Perizinan IMB		Dinas Tata Ruang Kota
	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.220.000,00	100,00	98.410.000,00	98,19	terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan hasil terdapatnya 60 bangunan yang disegel karena tidak memiliki IMB		Dinas Tata Ruang Kota
	Sosialisasi Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	35.800.000,00	100,00	20.214.000,00	56,46	Terlaksananya Sosialisasi tentang perizinan IMB (1 kali dgn mengundang seluruh SKPD terkait)		Dinas Tata Ruang Kota
	Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Proses IMB	48.800.000,00	100,00	48.766.000,00	99,93	Terbitnya 444 rekomendasi IMB		Dinas Tata Ruang Kota

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Koordinasi Penataan Ruang	114.724.000,00	100,00	110.031.621,00	95,91	2 Dokumen laporan semester-an BKPRD		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	URUSAN PENATAAN RUANG	6.547.071.700,00	100,00	6.331.277.865,00	96,70	9 PROGRAM; 35 KEGIATAN		

A.4.3.3 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.233.590.838,00	100,00	14.340.702.431,00	94,14		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.974.000,00	100,00	4.974.000,00	100,00	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.164.000,00	100,00	137.926.451,00	95,01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	86.490.000,00	97,66	82.428.380,00	95,30	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	161.240.040,00	100,00	160.609.320,00	99,61	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	134.959.000,00	98,72	98.032.560,00	72,64	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.270.000,00	100,00	196.360.000,00	99,54	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	900.000,00	100,00	320.000,00	35,56			Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.420.000,00	100,00	64.218.050,00	81,89	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.924.900,00	100,00	50.602.900,00	99,37	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Makanan dan Minuman	102.660.000,00	100,00	96.164.126,00	93,67	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	990.015.000,00	100,00	983.064.204,00	99,30	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	13.271.943.898,00	100,00	12.458.585.140,00	93,87	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Badan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.630.000,00	100,00	7.417.300,00	85,95	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		Dinas Kebersihan & Pertamanan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.562.631.500,00	100,00	5.246.609.368,00	94,32		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Meubelair	74.420.000,00	100,00	73.527.500,00	98,80	Tesedianya meubelair		Badan Lingkungan Hidup

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	126.380.000,00	100,00	117.037.000,00	92,61	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Badan Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.032.315.000,00	100,00	4.752.800.858,00	94,45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Badan Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.020.000,00	100,00	22.792.000,00	71,18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Badan Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	297.496.500,00	97,94	280.452.010,00	94,27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Dinas Kebersihan & Pertamanan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	62.500.000,00	100,00	62.390.700,00	99,83		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	61.000.000,00	100,00	60.905.700,00	99,85	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Badan Lingkungan Hidup
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.500.000,00	100,00	1.485.000,00	99,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Dinas Kebersihan & Pertamanan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	421.750.000,00	100,00	412.648.123,00	97,84		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	421.750.000,00	100,00	412.648.123,00	97,84	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Badan Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.000.000,00	100,00	4.200.000,00	84,00		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	100,00	750.000,00	75,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	100,00	850.000,00	85,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.000.000,00	100,00	950.000,00	95,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Penyusunan Renja SKPD	1.000.000,00	100,00	850.000,00	85,00	Penyusunan Renja SKPD		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	1.000.000,00	100,00	800.000,00	80,00	Penyusunan Laporan Akuntabilitas		Dinas Kebersihan & Pertamanan
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	230.465.000,00	100,00	224.403.600,00	97,37		Tingkat publikasi pembangunan	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	230.465.000,00	100,00	224.403.600,00	97,37	Terlaksananya pameran pembangunan		Badan Lingkungan Hidup

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	3.642.847.500,00	99,09	3.438.901.724,00	94,39		Presentase pelayanan persampahan meningkat	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.772.643.500,00	98,38	1.742.216.704,00	98,28	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	171.440.000,00	100,00	124.612.200,00	72,69	Terpeliharanya prasarana dan sarana persampahan, dengan target paket pekerjaan yaitu perlengkapan dan peralatan kerja petugas		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	89.140.000,00	100,00	84.195.000,00	94,45	Dilaksanakan publikasi kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran di kota Bontang; terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Monitoring dan Evaluasi Wilayah dan Titik Pantau Penilaian Adipura	1.023.390.000,00	98,44	941.808.500,00	92,03	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemeliharaan lingkungantitik pantau dan wilayah pantau penilaian Adipura untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih dan teduh		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	586.234.000,00	98,63	546.069.320,00	93,15	Tersedianya sarana dan prasarana TPA seperti Load Cell jembatan timbang, peralatan dan perlengkapan petugas TPA, sewa dump truck untuk penimbunan top soil, tera ulang jembatan timbang, mesin kompresor, mesin pendorong transfer air, mesin cuci kendaraan, filling kabinet, mesin AC, pintu hanggar, meja tamu, kulkas/ lemari es, perencanaan, konstruksi serta pengawasan semenisasi jalan kerja TPA, penampungan air bersih TPA, rumah mesin pompa dalam air tanah dan pompa atas pendorong transfer air TPA		Dinas Kebersihan & Pertamanan
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.964.996.730,00	100,00	1.836.584.555,00	93,47		Terwujudnya Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	98.700.000,00	100,00	75.851.100,00	76,85	- sosialisasi adipura - ekspose P1 - pemantauan ke 62 lokasi titik pantau adipura - Piala Adipura		Badan Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	175.435.000,00	100,00	144.466.825,00	82,35	- pengambilan sampel pada - air permukaan di 23 titik - air limbah di 23 titik - udara ambien 14 titik - udara emisi 14 titik (kerjasama dgn pihak ketiga lab balai riset dan standart samarinda)		Badan Lingkungan Hidup
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	16.150.000,00	100,00	14.226.800,00	88,09	- pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di 22 badan usaha		Badan Lingkungan Hidup
	Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	46.080.000,00	100,00	45.425.900,00	98,58	- Pemantauan ke 12 badan usaha yaitu, 10 Perusahaan swasta dan 2 Rumah Sakit		Badan Lingkungan Hidup
	Koordinasi penyusunan AMDAL	77.690.000,00	100,00	76.546.900,00	98,53	- penerimaan SPPL (113 keg) - pemeriksaan UKL-UPL (5 keg) - penilaian AMDAL (2 keg) - pemeriksaan DPLH (6 keg)		Badan Lingkungan Hidup
	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	789.200.600,00	100,00	761.997.650,00	96,55	- festival Mountain Bike (sarasehan, penanaman pohon, pembuatan lubang biopori, bike adventure) - pameran pekan lingkungan indonesia (PLI) - seminar lingkungan tentang mangrove		Badan Lingkungan Hidup
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	761.741.130,00	100,00	718.069.380,00	94,27	- karoseri mobil - alat lab water test kit, sound level meter,kalibrasi, reagen, pakaian lapangan,meja kerja lab, alat uji kualitas tanah (manual soil test, soil PH meter), opacity meter (uji kualitas udara)		Badan Lingkungan Hidup
9	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	707.287.000,00	100,00	663.507.350,00	93,81		Terwujudnya Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	46.280.000,00	100,00	43.848.000,00	94,75	Tersedianya satu paket alat sumur pantau di Kel. Loktuan		Badan Lingkungan Hidup
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	90.550.000,00	100,00	89.001.100,00	98,29	laporan kajian indeks persepsi masyarakat thd pengelolaan persampahan		Badan Lingkungan Hidup
	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	440.872.000,00	100,00	438.355.250,00	99,43	Laporan Kajian Sumur Injeksi		Badan Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	129.585.000,00	100,00	92.303.000,00	71,23	Tersedianya data Flora dan Fauna		Badan Lingkungan Hidup
10	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	370.461.000,00	100,00	354.957.000,00	95,81		Terwujudnya Sumber Daya Alam yang Asri melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam	
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	370.461.000,00	100,00	354.957.000,00	95,81	- monitoring kondisi pesisir dan laut melalui pemantauan di 1 stasiun terumbu karang, 2 stasiun padang lamun dan 2 stasiun rehabilitasi karang		Badan Lingkungan Hidup
11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	461.895.000,00	100,00	410.067.390,00	88,78		Meningkatnya Akses terhadap Informasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup	
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	132.810.000,00	100,00	124.765.250,00	93,94	- bimtek adiwiyata diikuti 40 peserta perwakilan sekolah - pembinaan di 20 sekolah adiwiyata - 20 papan informasi (reklame) - penilaian di 20 sekolah adiwiyata		Badan Lingkungan Hidup
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	185.060.000,00	100,00	157.129.700,00	84,91	dokumen SLHD		Badan Lingkungan Hidup
	Penguatan Jaringan Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	92.970.000,00	100,00	86.174.500,00	92,69	pengadaan peralatan jaringan komputer sistem informasi lingkungan (CPU all in one dan kelengkapannya)		Badan Lingkungan Hidup
	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	51.055.000,00	100,00	41.997.940,00	82,26	ada 9 pengaduan terkait dengan LH dan dapat terselesaikan		Badan Lingkungan Hidup

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN DIKAWASAN-KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN HUTAN	7.102.008.000,00	87,24	5.213.556.400,00	73,41		Ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi laut dan hutan	
	Pembangunan Terminal Kawasan Wisata Bontang Kuala	4.419.000.000,00	100,00	4.057.715.000,00	91,82	Terbangunya Terminal Kawaasan Wisata		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Turap Bumi Perkemahan dan Agro Wisata di Bontang Lestari	2.683.008.000,00	74,48	1.155.841.400,00	43,08	Terbangunnya Turap Bumi Perkemahan dan Agro Wisata di Bontang Lestari		Dinas Pekerjaan Umum
13	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	3.304.671.660,00	100,00	3.226.123.906,00	97,62		Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang Asri dan Bermanfaat bagi Kota Bontang	
	Penataan RTH	2.387.176.660,00	100,00	2.331.293.706,00	97,66	Terbangunnya RTH Kota Bontang; Terlaksananya pengadaan tanaman peneduh 6 jenis pohon, perlengkapan dekorasi		Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Pendampingan Pembangunan RTH Kota Bontang	469.560.000,00	100,00	468.717.000,00	99,82	Terlaksananya pendampingan pembangunan RTH Kota Bontang		Dinas Tata Ruang Kota
	Pemeliharaan RTH	447.935.000,00	100,00	426.113.200,00	95,13	Terlaksananya pemeliharaan taman kota, taman media jalan, tersedianya prasaran dan sarana pemeliharaan yakni : bahan baku bangunan; tanaman perdu; pupuk; alat/perlengkapan pemeliharaan taman; suku cadang mesin pemotong rumput; steager; bahan media tanam; mesin pemotong rumput; mesin pemangkas dahan; pompa air taman		Dinas Kebersihan & Pertamanan
14	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	14.537.493.060,00	99,84	14.165.578.489,00	97,44		Cakupan layanan penerangan jalan umum meningkat	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	3.694.386.400,00	99,95	3.371.582.489,00	91,26	Terpeliharanya utilitas seluruh lampu PJU dengan baik		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	10.843.106.660,00	99,72	10.793.996.000,00	99,55	Tersedianya Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum		Dinas Kebersihan & Pertamanan
15	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	22.655.000,00	100,00	20.011.200,00	88,33		Besarnya capaian rasio tempat pemakaman kumuh persatuan penduduk	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	22.655.000,00	100,00	20.011.200,00	88,33	terpenuhinya pemeliharaan areal lingkungan pemakaman melalui tersedianya kelengkapan petugas pemakaman		Dinas Kebersihan & Pertamanan
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	53.630.252.288,00	99,36	49.620.242.236,00	92,52	15 PROGRAM; 56 KEGIATAN		

Tabel 4.4. Program dan Kegiatan Misi 4
(Memperkuat Struktur Ekonomi dan Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air Bersih serta Infrastruktur Lainnya)

A.4.4.1 URUSAN PEKERJAAN UMUM

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.492.624.087,00	100,00	5.029.665.151,00	91,57		Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.160.000,00	100,00	4.560.000,00	88,37	Materai 6000 sebanyak 412 lembar		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.400.000,00	100,00	81.717.667,00	40,78	PLN (6bln), PDAM (4bln), Internet (5bln), Telepon& Fax (5bln)		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.050.000,00	100,00	11.406.500,00	49,49	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk roda 4 sebanyak 3 kali dan roda 2 sebanyak 2 kali		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	307.414.700,00	100,00	306.525.000,00	99,71	Alat tulis kantor untuk 1 tahun		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.860.000,00	100,00	178.422.200,00	90,63	12 jenis barang cetakan, penggandaan dan spanduk		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.950.000,00	100,00	9.490.000,00	95,38	12 jenis bahan komponen instalasi listrik		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	5 tabung		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.984.000,00	100,00	40.961.000,00	67,17	6 jenis bahan bacaan		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.195.000,00	100,00	75.124.500,00	96,07	21 jenis alat atau bahan kebersihan		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.800.000,00	100,00	10.825.000,00	16,71	300 Kotak		Dinas Pekerjaan Umum
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.884.600.000,00	100,00	1.783.305.234,00	94,63	Perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 436 kali dan luar daerah sebanyak 236 kali		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2.660.460.387,00	100,00	2.526.578.050,00	94,97	22 pegawai non pns dan Tunjangan PNS 8 Bulan		Dinas Pekerjaan Umum
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.397.944.000,00	100,00	1.363.302.082,00	97,52		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	184.990.000,00	100,00	184.810.000,00	99,90	6 jenis perlengkapan gedung kantor		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	242.040.000,00	100,00	224.766.880,00	92,86	15 jenis peralatan gedung kantor		Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	888.914.000,00	100,00	873.885.202,00	98,31	17 unit, 13 unit, 2 unit		Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	82.000.000,00	100,00	79.840.000,00	97,37	7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	54.000.000,00	100,00	50.545.000,00	93,60		Tercapainya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	54.000.000,00	100,00	50.545.000,00	93,60	Pakaian Non PNS 22 buah, Batik tradisional 85 buah		Dinas Pekerjaan Umum
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	984.610.000,00	100,00	562.624.783,00	57,14		Meningkatnya SDM bidang Teknis dan Non Teknis	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	824.610.000,00	100,00	402.624.783,00	48,83	Pendidikan dan pelatihan formal Gol IV sebanyak 3 kali, Gol III sebanyak 24 kali dan Gol II sebanyak 29 kali		Dinas Pekerjaan Umum
	Perumusan RANPERDA Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	160.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	1 dokumen Ranperda IUJK		Dinas Pekerjaan Umum
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.370.000,00	100,00	5.310.000,00	98,88		Tersedianya Laporan Capaian Kerja dan Keuangan	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.320.000,00	100,00	1.320.000,00	100,00	1 dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	975.000,00	100,00	975.000,00	100,00	1 dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00	100,00	1 dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyusunan Renja SKPD	975.000,00	100,00	975.000,00	100,00	1 dokumen Renja SKPD		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	1.050.000,00	100,00	990.000,00	94,29	1 dokumen Laporan Akuntabilitas		Dinas Pekerjaan Umum
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.375.000,00	100,00	-	-		Tercapainya Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bansos dan Hibah	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	5.375.000,00	100,00	-	-	1 dokumen Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah		Dinas Pekerjaan Umum
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	131.445.000,00	100,00	130.552.500,00	99,32		Masyarakat Lebih memahami tentang Pembangunan Infrastruktur Kota Bontang	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	131.445.000,00	100,00	130.552.500,00	99,32	1 kegiatan pameran pembangunan		Dinas Pekerjaan Umum
8	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	56.615.063.480,00	94,37	44.269.847.310,00	78,19		Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Satya Lencana Kelurahan Bontang Lestari	7.011.401.000,00	18,00	1.404.159.000,00	20,03	Bangunan Jalan Satya Lencana sepanjang 313 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jembatan Jalan Damai Tembus Perumahan HOP	4.754.447.423,00	100,00	4.753.377.000,00	99,98	1 unit Jembatan Jalan Damai Tembus Perumahan HOP, panjang 13 meter dan lebar 7,75 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jembatan dan Jalan Menuju Rusunawa	60.076.000,00	100,00	53.976.000,00	89,85	1 dokumen perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Menuju Rusunawa		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jalan dan Jembatan ke Pemakaman RT. 01, 02, 04 & 06 Kelurahan Guntung	1.256.678.457,00	100,00	1.256.405.000,00	99,98	Bangunan jalan menuju pemakaman RT. 01, 02, 04 & 06 Kelurahan Guntung sepanjang 409,5 meter dan lebar 5 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang (APBD Kota Bontang dan Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran)	205.000.000,00	100,00	204.575.400,00	99,79	1 dokumen review design Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jalan Karya Bakti Kelurahan Bontang Lestari	26.110.013.000,00	75,03	19.639.376.610,00	75,22	Bangunan Jalan Karya Bakti sepanjang 150 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Selat Bali Tembus Jalan Selat Selayar	48.715.000,00	100,00	48.335.500,00	99,22	1 dokumen perencanaan teknis Pembangunan Jalan Selat Bali Tembus Jalan Selat Selayar		Dinas Pekerjaan Umum
	DED Pembangunan Duct Bank Se-Kota Bontang	639.310.000,00	100,00	639.040.800,00	99,96	1 dokumen DED Pembangunan Duct Bank Se-Kota Bontang		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembangunan Jembatan Jalan Brokoli Kelurahan Gunung Elai	6.659.506.000,00	100,00	6.626.681.900,00	99,51	1 unit jembatan Jalan Brokoli, panjang 25 meter dan lebar 6 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Peredam Jalan Kawasan Bontang Kuala	1.395.257.600,00	100,00	1.393.035.000,00	99,84	Peredam jalan kawasan Bontang Kuala sepanjang 280 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	FS Pembangunan Jalan SP Bhayangkara - Jalan Ir. Simon Tampubolon	364.840.000,00	100,00	363.501.900,00	99,63	1 dokumen FS Pembangunan Jalan SP Bhayangkara - Jalan Ir. Simon Tampubolon		Dinas Pekerjaan Umum
	DED Pembangunan Jalan Jembatan Lok Tunggul	909.819.000,00	100,00	908.301.900,00	99,83	1 dokumen DED Pembangunan Jalan Jembatan Lok Tunggul		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Turap Jalan Tomat	200.000.000,00	100,00	169.505.700,00	84,75	Bangunan turap Jalan Tomat sepanjang 35,2 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Box Culvert Jalan Tennis	200.000.000,00	100,00	198.179.300,00	99,09	Bangunan box culvert Jalan Tennis sepanjang 5 m		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Box Culvert dan Drainase Jalan Selor	200.000.000,00	100,00	183.107.200,00	91,55	Bangunan drainase Jalan Selor sepanjang 21 meter dan Box culvert 6 x 5 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Turap Jalan Asmawarman (Persimpangan Jalan Surabaya)	200.000.000,00	100,00	168.778.100,00	84,39	Bangunan turap Jalan Asmawarman sepanjang 30,5 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jalan Tari Dewa-Dewa RT. 16	200.000.000,00	100,00	190.655.000,00	95,33	Bangunan Jalan Tari Dewa-Dewa RT. 16 sepanjang 51, 7 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Badan Jalan dan Drainase Jalan Tari Dewa-Dewa 3 RT.05	200.000.000,00	100,00	198.398.400,00	99,20	Badan jalan dan drainase Jalan Tari Dewa-Dewa 3 RT.05 sepanjang 100 m		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Jalan Abdi Negara Teluk Kadere Bontang Lestari	6.000.000.000,00	100,00	5.870.457.600,00	97,84	Bangunan Jalan Abdi Negara Teluk Kadere sepanjang 1.183 meter		Dinas Pekerjaan Umum
9	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	12.100.215.000,00	98,04	10.756.132.000,00	88,89		Meningkatkan proporsi saluran drainase dalam kondisi baik	
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Api-Api	870.445.000,00	100,00	867.792.000,00	99,70	Saluran drainase sepanjang 135,17 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Gunung Elai	886.358.000,00	100,00	860.023.000,00	97,03	Saluran drainase sepanjang 143,31 meter		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Bontang Kuala	1.538.603.000,00	100,00	1.534.864.000,00	99,76	Saluran drainase sepanjang 157,13 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Kanaan	868.089.000,00	100,00	865.461.000,00	99,70	Saluran drainase sepanjang 178,8 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Tanjung Laut Indah	1.734.247.000,00	56,84	897.083.000,00	51,73	Saluran drainase sepanjang 444,3 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Bontang Baru	2.308.801.000,00	100,00	2.273.372.000,00	98,47	Saluran drainase sepanjang 352,2 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Saluran Drainase dan Bangunan Persilangan Kelurahan Loktuan	1.253.672.000,00	100,00	1.051.740.000,00	83,89	Saluran drainase sepanjang 203 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Normalisasi Drainase RT 25, 26, 27 dan 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah	180.000.000,00	100,00	165.461.000,00	91,92	Normalisasi saluran drainase RT 25, 26, 27 dan 28 Kel. Tanjung Laut Indah sepanjang 720,9 meter dan bongkar pasang penutup parit sepanjang 210 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan dan Normalisasi Drainase Drainase Jl. Habibon, Selat alor I dan II Kelurahan Tanjung Laut	180.000.000,00	100,00	146.947.000,00	81,64	Normalisasi saluran drainase Jl. Habibon, Selat alor I dan II sepanjang 597,9 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan dan Normalisasi Drainase RT.20 & RT.21 Tanjung Laut Indah	150.000.000,00	100,00	137.932.000,00	91,95	Normalisasi saluran drainase RT.20 & RT.21 Kel. Tanjung Laut Indah sepanjang 49,26 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Normalisasi Drainase RT.04 Kel. Berbas Pantai	100.000.000,00	100,00	94.490.000,00	94,49	Normalisasi saluran drainase RT.04 Kel. Berbas Pantai sepanjang 231,9 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Normalisasi Drainase Belakang Pasar Malam RT.02 Kelurahan Berbas Pantai	100.000.000,00	100,00	88.376.000,00	88,38	Normalisasi saluran drainase belakang Pasar Malam RT.02 Kelurahan Berbas Pantai sepanjang 145,25 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Drainase RT. 23 Kelurahan Satimpo	175.000.000,00	100,00	166.366.000,00	95,07	Turap drainase RT. 23 Kelurahan Satimpo sepanjang 31,3 meter (1 sisi)		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penurapan Sungai RT. 21 Kelurahan Satimpo	175.000.000,00	100,00	169.913.000,00	97,09	Turap sungai RT. 21 Kelurahan Satimpo sepanjang 25 meter (1 sisi)		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Drainase Induk Jl. Pencak Silat RT. 12, Kel. Api-api	200.000.000,00	100,00	196.123.000,00	98,06	Bangunan drainase induk Jl. Pencak Silat RT. 12 Kel. Api-Api sepanjang 56 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Drainase RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan	200.000.000,00	100,00	194.590.000,00	97,30	Turap drainase RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan sepanjang 74, 5 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Drainase RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	200.000.000,00	100,00	194.339.000,00	97,17	Turap drainase RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan sepanjang 43 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Normalisasi Drainase RT. 14,17,18 Kelurahan Loktuan	200.000.000,00	100,00	186.185.000,00	93,09	Normalisasi drainase RT. 14,17,18 Kelurahan Loktuan sepanjang 595,8 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Penambahan Tinggi Siring Sungai Jalan Banjarmasin RT 21 Kelurahan Gunung Telihan	180.000.000,00	100,00	84.975.000,00	47,21	Penambahan tinggi siring sungai Jalan Banjarmasin RT 21 Kelurahan Gunung Telihan sepanjang 80 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Drainase Belakang MAN Kelurahan Bontang Kuala	200.000.000,00	100,00	197.277.000,00	98,64	Bangunan drainase belakang MAN Kelurahan Bontang Kuala sepanjang 158 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Sungai Jalan Mangga RT. 25 Kelurahan Satimpo	200.000.000,00	100,00	187.187.000,00	93,59	Turap sungai Jalan Mangga RT. 25 Kelurahan Satimpo sepanjang 26,78 meter (1 sisi)		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Jl. Atletik 2 RT 27 Kelurahan Api-Api	200.000.000,00	100,00	195.636.000,00	97,82	Turap Jl. Atletik 2 RT 27 Kelurahan Api-Api sepanjang 17,70 meter		Dinas Pekerjaan Umum
10	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	4.902.187.000,00	97,36	4.719.912.000,00	96,28		Berkurangnya wilayah aliran sungai rawan longsor	
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Kanaan	1.907.286.000,00	100,00	1.903.960.000,00	99,83	Turap sungai Bontang di Kelurahan Kanaan sepanjang 180,35 meter (1 sisi)		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	2.303.699.000,00	92,08	2.127.131.000,00	92,34	Turap Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai sepanjang 200,7 meter (2 sisi)		Dinas Pekerjaan Umum
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kuala	691.202.000,00	100,00	688.821.000,00	99,66	Turap Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kualai sepanjang 82 meter (1 sisi)		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
11	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	13.269.294.000,00	100,00	11.179.715.300,00	84,25		Meningkatkan proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan Letjen S. Parman	1.029.999.000,00	100,00	61.137.100,00	5,94	Rehab box culvert Jalan Letjen S. Parman sepanjang 20 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	4.341.000.000,00	100,00	4.073.152.000,00	93,83	Rehab / pemeliharaan jalan, badan jalan, turap dan drainase di Kecamatan Bontang Utara sepanjang 2.701 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	4.341.000.000,00	100,00	3.856.556.000,00	88,84	Rehab / pemeliharaan jalan, dinding penahan, badan jalan dan drainase sepanjang 3.416 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	2.797.000.000,00	100,00	2.447.682.000,00	87,51	Rehab / pemeliharaan jalan sepanjang 892 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan HM. Ardans	58.835.000,00	100,00	57.953.500,00	98,50	Rehab / pemeliharaan box culvert sepanjang 12 M		Dinas Pekerjaan Umum
	DED Pembangunan Drainase Jalan Kota Bontang	701.460.000,00	100,00	683.234.700,00	97,40	1 dokumen DED Pembangunan Drainase Jalan Kota Bontang		Dinas Pekerjaan Umum
12	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	5.572.200.000,00	100,00	5.467.590.000,00	98,12		Memenuhi kebutuhan air baku Kota Bontang	
	Normalisasi Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api (Bantuan Keuangan Provinsi)	4.551.536.000,00	99,20	4.464.833.000,00	98,10	Turap Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api sepanjang 457,5 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Normalisasi Saluran Drainase Belakang BRI	846.036.000,00	100,00	841.909.000,00	99,51	Drainase sepanjang 248,5 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Penyusunan FS Polder Tanjung Limau	174.628.000,00	100,00	160.848.000,00	92,11	1 dokumen FS Polder Tanjung Limau		Dinas Pekerjaan Umum
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	25.639.323.000,00	98,09	12.905.288.088,00	50,33		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan	16.942.150.000,00	82,81	4.699.564.000,00	27,74	Bangunan WTP Konvensional kapasitas 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Perencanaan Teknis Pembangunan Pompa Hidrant Kelurahan Guntung	55.720.000,00	100,00	55.412.000,00	99,45	1 dokumen perencanaan teknis Pembangunan Pompa Hidrant Kelurahan Guntung		Dinas Pekerjaan Umum
	Penambahan Jaringan dan Sambungan Rumah Sistem IPAL Berbas Pantai	1.415.206.000,00	100,00	1.415.052.000,00	99,99	207 Sambungan Rumah ke IPAL Berbas Pantai		Dinas Pekerjaan Umum
	Pengadaan dan Pemasangan Kelistrikan Sistem IPAL Guntung	880.054.000,00	100,00	879.954.000,00	99,99	1 paket instalasi listrik IPAL Guntung		Dinas Pekerjaan Umum
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi WTP Bontang Lestari	1.869.502.000,00	100,00	1.692.458.000,00	90,53	Jaringan pipa distribusi WTP Bontang Lestari sepanjang 30 Km		Dinas Pekerjaan Umum
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi DW Loktuan III	1.481.274.000,00	100,00	1.169.410.000,00	78,95	Pipa Transmisi DW Loktuan III sepanjang 30 Km		Dinas Pekerjaan Umum
	Penambahan Jaringan dan Sambungan Rumah Sistem IPAL Loktuan	1.447.345.000,00	100,00	1.447.195.000,00	99,99	190 Sambungan Rumah ke IPAL Loktuan		Dinas Pekerjaan Umum
	Penambahan Jaringan dan Sambungan Rumah Sistem IPAL Guntung	1.447.772.000,00	100,00	1.446.811.000,00	99,93	193 Sambungan Rumah ke IPAL Guntung		Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan IPAL Kota Bontang	100.300.000,00	100,00	99.432.088,00	99,13	Terpeliharanya IPAL Bontang Kuala dan IPAL Berbas Pantai		Dinas Kebersihan dan Pertamanan
14	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	5.565.300.000,00	100,00	5.394.845.000,00	96,94		Berkurangnya daerah luasan banjir	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	1.905.000.000,00	100,00	1.850.848.000,00	97,16	Perbaikan saluran, normalisasi saluran, turap dan drainase sepanjang 1.868 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	1.905.000.000,00	100,00	1.822.689.000,00	95,68	Perbaikan saluran, normalisasi saluran, pembangunan turap, box culvert dan saluran irigasi sepanjang 4.557 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	1.755.300.000,00	100,00	1.721.308.000,00	98,06	Pembangunan drainase,penurapan saluran drainase dan normalisasi drainase sepanjang 637 meter		Dinas Pekerjaan Umum
15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KECIPTAKARYAAN	5.112.030.000,00	100,00	4.747.323.000,00	92,87		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Keciptakaryaan	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Kegiatan Keciptakarya	5.112.030.000,00	100,00	4.747.323.000,00	92,87	7 paket kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum
16	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	105.670.000,00	100,00	98.175.000,00	92,91		Pemutakhiran data/informasi	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan HSPK	2.700.000,00	100,00	-	-	1 dokumen Data Informasi Kebutuhan Penyusunan HSPK		Dinas Pekerjaan Umum
	Pengembangan Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum	102.970.000,00	100,00	98.175.000,00	95,34	1 paket server dan kelengkapannya		Dinas Pekerjaan Umum
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	7.325.911.500,00	100,00	5.007.423.000,00	68,35			
	Pembangunan Kantor Kelurahan Guntung	2.697.700.000,00	100,00	2.696.831.000,00	99,97	Bangunan pendopo pendopo seluas 232 m2 dan Pematangan lahan sebesar 6.212,53 m3		Dinas Pekerjaan Umum
	Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kelurahan Loktuan	76.012.500,00	100,00	75.912.500,00	99,87	1 dokumen perencanaan teknis Pembangunan Kantor Kelurahan Loktuan		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bontang Kuala	4.094.595.000,00	100,00	1.777.880.500,00	43,42	Bangunan kantor seluas 700 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Ruang Tunggu Disdukcapil	457.604.000,00	100,00	456.799.000,00	99,82	Ruang tunggu kantor Disdukcapil seluas 155.625 m2		Dinas Pekerjaan Umum
18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	52.100.775.480,00	90,59	25.449.887.872,00	48,85		Tersedianya Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah yang Representatif	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang LAPAS	2.001.168.000,00	100,00	1.982.335.000,00	99,06	Semenisasi seluas 96,831 m2, parkir motor-mobil seluas 327,76 m2, Gazebo seluas 308,85 m2, pos jaga 30 m2 dan ornamen (pintu) seluas 13,2 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Revitalisasi POLRES Kota Bontang	10.299.261.000,00	57,04	2.198.311.200,00	21,34	Revitalisasi bangunan kantor POLRES seluas 1.365,1 M2		Dinas Pekerjaan Umum
	Renovasi Masjid Al-Firdaus Kompleks Kantor Pemkot Jl. Awang Long Kota Bontang	1.152.630.000,00	65,13	747.765.300,00	64,87	Renovasi Masjid Al-Firdaus Kompleks Kantor Pemkot seluas 110 M2		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembangunan Barak Bujang dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Jabatan Kejaksaan Negeri Kota Bontang	2.144.077.000,00	100,00	2.105.196.000,00	98,19	Bangunan Barak Bujang dan Rumah Jabatan seluas 397,2 M2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemerintah Daerah Kota Bontang	1.678.416.000,00	100,00	1.451.555.000,00	86,48	8 paket kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung pemerintah daerah		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi Kantor Polsek Kecamatan Bontang Selatan	514.440.000,00	100,00	480.885.000,00	93,48	Bangunan kantor Polsek Bontang Selatan seluas 67.5 M2		Dinas Pekerjaan Umum
	Perencanaan Teknis Pembangunan Balai Nikah KUA Kecamatan Bontang Selatan	54.900.000,00	100,00	53.881.000,00	98,14	1 dokumen perencanaan teknis Pembangunan Balai Nikah KUA Kecamatan Bontang Selatan		Dinas Pekerjaan Umum
	Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Bontang Barat	55.300.000,00	100,00	50.456.000,00	91,24	1 dokumen perencanaan teknis Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Bontang Barat		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Panti Sosial Terpadu	4.480.230.000,00	45,78	1.940.337.500,00	43,31	Bangunan Panti Sosial Terpadu seluas 335,08 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	3.198.345.000,00	42,01	689.966.000,00	21,57	Bangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seluas 491,12 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan BPU RT.09 Kelurahan Gunung Elai	3.000.000.000,00	100,00	2.787.160.000,00	92,91	Bangunan BPU RT.09 Kelurahan Gunung Elai seluas 348 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Kantor KODIM 0908	8.200.000.000,00	97,64	3.378.680.350,00	41,20	Bangunan Kantor KODIM 0908 seluas 1.096 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Revitalisasi Bangunan Asrama Putri KAPASISBON Makassar	481.230.000,00	100,00	141.994.722,00	29,51	1 dokumen perencanaan teknis Revitalisasi Bangunan Asrama Putri KAPASISBON Makassar		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehab Masjid Al-Amin Kelurahan Loktuan	959.617.000,00	100,00	958.305.000,00	99,86	Bangunan Masjid Al-Amin Kelurahan Loktuan seluas 783 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehab Masjid Al-Hikmah Kelurahan Guntung	1.500.000.000,00	100,00	1.004.773.400,00	66,98	Bangunan Masjid Al-Hikmah Kelurahan Guntung seluas 581,43 m2		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Rehab Masjid Al-Hijrah Kota Bontang	1.000.000.000,00	100,00	95.333.000,00	9,53	Bangunan Masjid Al-Hijrah seluas 2.032 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bontang (Lanjutan)	5.342.990.000,00	100,00	2.179.307.600,00	40,79	Bangunan Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bontang seluas 1.056 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Bangunan Balai Pertemuan Umum Selambai Kelurahan Loktuan	686.230.000,00	100,00	75.738.000,00	11,04	1 dokumen perencanaan teknis Pembangunan Balai Pertemuan Umum Selambai Kelurahan Loktuan seluas 128,05 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Perencanaan Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	56.940.000,00	100,00	55.891.000,00	98,16	1 dokumen perencanaan teknis Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Musholla Al-Ikhlas Pengadilan Negeri Kota Bontang	230.371.000,00	100,00	228.797.000,00	99,32	Bangunan Musholla Al-Ikhlas Pengadilan Negeri seluas 49 M2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pematangan Lahan Kantor Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Bontang	1.987.053.480,00	100,00	1.958.792.800,00	98,58	Pematangan Lahan Kantor Badan Narkotika Kota (BNK) seluas 7.337,9 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah	2.808.811.000,00	76,01	617.132.000,00	21,97	Rehab bangunan Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah seluas 899,76 M2		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Guest House Pengadilan Agama Kota Bontang	268.766.000,00	100,00	267.295.000,00	99,45	Bangunan rumah dinas eetua dan guest house Pengadilan Agama seluas 152 m2		Dinas Pekerjaan Umum
19	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	160.420.927.761,00	99,83	130.333.023.619,00	81,24		Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	
	Peningkatan Jalan Pattimura	1.851.972.000,00	100,00	1.851.582.000,00	99,98	Jalan Pattimura yang ditingkatkan (diaspal) sepanjang 571,8 meter (lebar 7 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Belimbing	17.006.150.000,00	100,00	8.386.572.009,00	49,31	Jalan dr. Cipto Mangun Kusumo yang ditingkatkan (diaspal) sepanjang 2.463 meter (lebar 5 - 15 meter)		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Jalan BTN-PKT	1.071.239.761,00	100,00	1.070.971.761,00	99,97	Jalan BTN-PKT yang ditingkatkan (diaspal) sepanjang 988 meter (lebar 6 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Belibis	1.281.780.000,00	100,00	1.279.847.900,00	99,85	Jalan Belibis yang ditingkatkan sepanjang 350 meter (lebar 5 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Baltim - Pagung	1.822.568.000,00	100,00	1.770.220.000,00	97,13	Jalan Baltim - Pagung yang ditingkatkan sepanjang 200 meter (lebar 4 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo Kelurahan Bontang lestari	6.817.441.000,00	100,00	88.884.000,00	1,30	Jalan Urip Soemoharjo yang ditingkatkan sepanjang 884 meter (lebar 14 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) Kelurahan Belimbing	12.000.000.000,00	100,00	7.523.110.100,00	62,69	Jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) yang ditingkatkan sepanjang 1.230 meter (lebar 2 - 14 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Penanganan Longsoran Jl. Soekarno-Hatta Bontang Lestari	11.274.056.000,00	100,00	11.249.490.700,00	99,78	2 buah bangunan dinding penahan tanah di titik longsoran Jl. Soekarno-Hatta		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Prestasi	4.836.932.000,00	100,00	4.835.197.200,00	99,96	Jalan Prestasi yang ditingkatkan sepanjang 1.800 meter (lebar 14 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Belibis 3	274.180.000,00	100,00	261.803.700,00	95,49	Jalan Belibis 3 yang ditingkatkan sepanjang 72 meter (lebar 6 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Mawar, Melati, dan Selat Banda 1	1.104.017.000,00	100,00	1.012.542.800,00	91,71	Jalan Mawar, Melati dan Selat Banda 1 yang ditingkatkan sepanjang 1.031 meter (lebar 5-6 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan dan Box Culvert Jalan Menuju Panggung Adat Kelurahan Guntung	921.177.000,00	100,00	870.817.000,00	94,53	Jalan yang ditingkatkan dan box culvert sepanjang 8,4 meter (lebar 6 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Halaman Parkir Masjid Darussalam HOP V	1.100.000.000,00	100,00	1.083.799.000,00	98,53	Pengaspalan halaman parkir Masjid Darussalam seluas 900 m2		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Bahu dan Drainase Jalan Selayar	200.000.000,00	100,00	192.272.600,00	96,14	Bahu jalan dan drainase sepanjang 100 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembuatan Drainase Jalan Pramuka 1	154.415.000,00	100,00	152.735.900,00	98,91	Drainase Jalan Pramuka 1 sepanjang 184 meter (tinggi 60-70 cm)		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pembuatan Penutup Parit Jalan Samratulangi	175.000.000,00	100,00	149.222.800,00	85,27	Penutup parit Jalan Samratulangi sepanjang 237 meter		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembuatan Drainase Jalan Semayang	130.000.000,00	100,00	128.723.200,00	99,02	Drainase Jalan Semayang sepanjang 224 meter (tinggi 1 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan dan Darinase Jalan Awang Long	200.000.000,00	100,00	165.477.100,00	82,74	Jalan dan Darinase Jalan Awang Long sepanjang 183 meter (tinggi 1,2 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembuatan Drainase Jalan Pramuka 3	200.000.000,00	100,00	196.285.800,00	98,14	Drainase Jalan Pramuka 3 sepanjang 355 meter (tinggi 0,40 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Belimbing (DAK Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan)	36.000.000.000,00	98,00	31.760.164.849,00	88,22	Jalan dr. Cipto Mangun Kusumo yang ditingkatkan sepanjang 3.335 meter (lebar 12 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) Kelurahan Belimbing (DAK Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan)	31.850.000.000,00	98,00	28.731.097.200,00	90,21	Jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) yang ditingkatkan sepanjang 1.671 meter (lebar 12 - 14 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (DAK Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan)	20.250.000.000,00	100,00	19.652.755.000,00	97,05	Jalan Urip Soemoharjo yang ditingkatkan sepanjang 804 Meter (lebar 14 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Jalan Prestasi (DAK Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan)	9.900.000.000,00	100,00	7.919.451.000,00	79,99	Jalan Prestasi yang ditingkatkan sepanjang 1.100 meter (lebar 14 meter)		Dinas Pekerjaan Umum
20	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	90.327.000.000,00	100,00	81.563.636.000,00	90,30		Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.930.885.000,00	96,54	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api sebanyak 13 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi B	1.000.000.000,00	100,00	820.133.000,00	82,01	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi C	2.415.000.000,00	100,00	2.341.207.000,00	96,94	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api sebanyak 12 paket		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi D	1.100.000.000,00	100,00	876.836.000,00	79,71	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi E	1.150.000.000,00	100,00	920.638.000,00	80,06	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi F	1.200.000.000,00	100,00	1.194.215.000,00	99,52	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.673.208.000,00	83,66	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru sebanyak 14 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi B	1.050.000.000,00	100,00	959.889.000,00	91,42	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi C	1.050.000.000,00	100,00	888.657.000,00	84,63	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi D	1.000.000.000,00	100,00	994.336.000,00	99,43	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.907.802.000,00	95,39	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing sebanyak 11 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing Seksi B	900.000.000,00	100,00	883.953.000,00	98,22	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing sebanyak 5 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing Seksi C	650.000.000,00	100,00	440.001.000,00	67,69	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing sebanyak 4 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing Seksi D	1.000.000.000,00	100,00	993.184.000,00	99,32	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing sebanyak 5 paket		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.793.447.000,00	89,67	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai sebanyak 11 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi B	1.050.000.000,00	100,00	1.041.873.000,00	99,23	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi C	1.250.000.000,00	100,00	1.212.368.000,00	96,99	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi D	1.200.000.000,00	100,00	1.192.610.000,00	99,38	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.927.332.000,00	96,37	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung sebanyak 10 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung Seksi B	1.300.000.000,00	100,00	1.293.507.000,00	99,50	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.618.755.000,00	80,94	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 13 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi B	1.150.000.000,00	100,00	1.136.853.000,00	98,86	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi C	1.150.000.000,00	100,00	1.133.162.000,00	98,54	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi D	1.200.000.000,00	100,00	1.184.719.000,00	98,73	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi E	1.200.000.000,00	100,00	1.188.119.000,00	99,01	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi F	1.100.000.000,00	100,00	1.087.913.000,00	98,90	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi G	1.000.000.000,00	100,00	970.355.000,00	97,04	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.788.397.000,00	89,42	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan sebanyak 11 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan Seksi B	1.000.000.000,00	100,00	978.513.000,00	97,85	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan Seksi C	1.100.000.000,00	100,00	1.084.147.000,00	98,56	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.804.319.000,00	90,22	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 10 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala Seksi B	1.300.000.000,00	100,00	1.282.130.000,00	98,63	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala Seksi C	1.250.000.000,00	100,00	1.221.049.000,00	97,68	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala Seksi D	1.500.000.000,00	100,00	1.474.316.000,00	98,29	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.622.422.000,00	81,12	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 11 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi B	1.100.000.000,00	100,00	1.077.929.000,00	97,99	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi C	1.150.000.000,00	100,00	952.411.000,00	82,82	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi D	1.000.000.000,00	100,00	921.760.000,00	92,18	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.991.958.000,00	99,60	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 10 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi B	1.000.000.000,00	100,00	958.762.000,00	95,88	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi C	1.300.000.000,00	100,00	940.229.000,00	72,33	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi D	1.400.000.000,00	100,00	1.390.913.000,00	99,35	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi E	1.400.000.000,00	100,00	1.390.547.000,00	99,32	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi F	1.450.000.000,00	100,00	1.439.066.000,00	99,25	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.622.131.000,00	81,11	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 13 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi B	1.150.000.000,00	100,00	862.891.000,00	75,03	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi C	1.200.000.000,00	100,00	1.170.542.000,00	97,55	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi D	1.150.000.000,00	100,00	957.833.000,00	83,29	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E	1.200.000.000,00	100,00	628.093.000,00	52,34	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi F	1.100.000.000,00	100,00	1.095.222.000,00	99,57	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi G	1.300.000.000,00	100,00	1.133.426.000,00	87,19	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.751.922.000,00	87,60	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 13 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai Seksi B	1.100.000.000,00	100,00	959.498.000,00	87,23	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai Seksi C	1.300.000.000,00	100,00	1.219.785.000,00	93,83	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai Seksi D	650.000.000,00	100,00	496.552.000,00	76,39	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.941.509.000,00	97,08	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo sebanyak 11 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo Seksi B	900.000.000,00	100,00	886.672.000,00	98,52	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo sebanyak 6 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo Seksi C	875.000.000,00	100,00	870.596.000,00	99,50	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo sebanyak 5 paket		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.497.271.000,00	74,86	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan sebanyak 12 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi B	1.250.000.000,00	100,00	960.165.000,00	76,81	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi C	1.200.000.000,00	100,00	1.026.555.000,00	85,55	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi D	900.000.000,00	100,00	821.975.000,00	91,33	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi E	950.000.000,00	100,00	943.733.000,00	99,34	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan sebanyak 7 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi F	875.000.000,00	100,00	850.505.000,00	97,20	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan sebanyak 5 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A	2.000.000.000,00	100,00	1.127.362.000,00	56,37	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 12 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi B	1.300.000.000,00	100,00	1.119.609.000,00	86,12	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi C	1.300.000.000,00	100,00	1.151.490.000,00	88,58	Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 8 paket		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berbas Pantai	562.000.000,00	100,00	543.474.000,00	96,70	1 buah lapangan sepak bola di Kelurahan Berbas Pantai		Dinas Pekerjaan Umum
	URUSAN PEKERJAAN UMUM	447.127.265.308,00	98,13	349.034.797.705,00	78,06	20 PROGRAM; 212 KEGIATAN		

A.4.4.2 URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.605.484.673,00	100,00	4.240.789.234,00	92,08		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Dishubkominfo
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	100,00	1.450.000,00	26,36	Jumlah surat yang terkirim sesuai dengan kebutuhan		Dishubkominfo
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.980.000,00	100,00	64.546.003,00	50,04	Komunikasi, penerangan dan kebutuhan air kantor		Dishubkominfo
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.823.500,00	100,00	61.394.325,00	97,73	Tersedianya alat tulis kantor		Dishubkominfo
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	122.310.000,00	100,00	104.982.410,00	85,83	barang cetak dan penggandaan		Dishubkominfo
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	100,00	7.307.400,00	97,43	Penerangan kantor		Dishubkominfo
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	361.940.000,00	100,00	312.182.000,00	86,25	Peralatan dan perlengkapan kantor		Dishubkominfo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.264.000,00	100,00	26.810.236,00	78,25	Tersedianya media cetak		Dishubkominfo
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.280.200,00	100,00	20.211.500,00	90,72	Peningkatan kebersihan kantor		Dishubkominfo
	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.500.000,00	100,00	19.160.000,00	85,16	Terpenuhinya makanan/mimuman rapat dan tamu		Dishubkominfo
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	987.500.000,00	100,00	986.919.685,00	99,94	Peningkatan kegiatan koordinasi dan konsultasi		Dishubkominfo
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2.801.867.473,00	100,00	2.588.760.675,00	92,39	Pemenuhan pembayaran jasa administrasi perkantoran		Dishubkominfo
	Penataan Kearsipan Kantor	48.019.500,00	100,00	47.065.000,00	98,01	Tertatanya kearsipan kantor		Dishubkominfo
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.388.650.000,00	100,00	1.250.104.910,00	90,02		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Dishubkominfo
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	244.760.000,00	100,00	244.360.000,00	99,84	Kendaraan dinas opeasional (1 unit mobil kepala bidang dan 2 unit sepeda motor)		Dishubkominfo
	Pengadaan Meubelair	73.020.000,00	100,00	71.847.900,00	98,39	Jumlah meubelair tersedia di pelabuhan loktuhan		Dishubkominfo
	Pengadaan Peralatan Kerja	29.700.000,00	100,00	28.500.000,00	95,96	Jumlah meubelair tersedia		Dishubkominfo

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.100.000,00	100,00	13.768.000,00	97,65	terpeliharanya sarana gedung kantor aparatur selama 1 tahun		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.008.070.000,00	100,00	874.060.410,00	86,71	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional aparatur sebanyak 32 unit		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.000.000,00	100,00	17.568.600,00	92,47	Perralatan gedung kantor selama 1 tahun		Dishubkominfo
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	176.690.000,00	100,00	171.776.800,00	97,22		Meningkatnya disiplin aparatur	Dishubkominfo
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	97.120.000,00	100,00	94.492.500,00	97,29	Tesedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Dishubkominfo
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	100,00	3.375.000,00	90,00	Tersedianyapakaian kerja lapangan 15 buah		Dishubkominfo
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	75.820.000,00	100,00	73.909.300,00	97,48	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 172 stel		Dishubkominfo
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	291.660.000,00	100,00	250.740.575,00	85,97		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Dishubkominfo
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	291.660.000,00	100,00	250.740.575,00	85,97	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Dishubkominfo
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.000.000,00	25,00	220.000,00	22,00		Tercapaiannya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dishubkominfo
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	250.000,00	-	-	-	1 Dokumen laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 10 buku		Dishubkominfo
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	250.000,00	-	-	-	1 Dokumen laporan akhir 10 buku		Dishubkominfo
	Penyusunan Renja SKPD	250.000,00	100,00	220.000,00	88,00	1 Dokumen renja 10 buku		Dishubkominfo
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	250.000,00	-	-	-	1 Dokumen LAKIP 10 buku		Dishubkominfo
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	145.205.000,00	100,00	127.270.000,00	87,65		Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Dishubkominfo
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	145.205.000,00	100,00	127.270.000,00	87,65	Jumlah stan Bontang Expo		Dishubkominfo

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
7	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	5.017.350.000,00	100,00	4.414.310.658,00	87,98		Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang optimal	Dishubkominfo
	Pembuatan Website Profil SKPD	59.815.000,00	100,00	56.980.000,00	95,26	Tersedianyan Website profil SKPD		Dishubkominfo
	Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang	4.460.015.000,00	100,00	3.953.521.158,00	88,64	Pusat data center kota Bontang		Dishubkominfo
	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	400.000.000,00	100,00	336.249.500,00	84,06	Sistem informasi menejemen/SIM LLAJ		Dishubkominfo
	Pengadaan GPS, Altimeter, Theodolit, Compas dan Distance Meter	97.520.000,00	100,00	67.560.000,00	69,28	TERMS, Teodolit, GPS dan Distance Meter		Dishubkominfo
8	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	4.322.389.975,00	88,89	4.101.488.332,00	94,89		Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishubkominfo
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	75.000.000,00	100,00	65.540.040,00	87,39	Peralatan terminal		Dishubkominfo
	Pengadaan Patok Pengaman (Delineator)	150.780.000,00	100,00	127.600.000,00	84,63	Jumlah Delineator yang tersedia 325 unit		Dishubkominfo
	Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada Alur Pelayaran Pelabuhan Loktuan	1.416.209.124,00	100,00	1.343.054.000,00	94,83	Pembangunan sarana bantu navigasi pelabuhan loktuan		Dishubkominfo
	Revitalisasi Terminal	1.173.195.351,00	100,00	1.091.931.632,00	93,07	Revitalisasi Terminal		Dishubkominfo
	DED Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu/Kapal Selambai Loktuan	403.730.000,00	100,00	402.072.000,00	99,59	DED pembangunan dermaga tambatan perahu/kapal selambai Loktuan		Dishubkominfo
	DED Pembangunan Lahan Parkir Selambai Loktuan	241.235.500,00	100,00	241.235.500,00	100,00	DED pembangunan lahan parkir selambai Loktuan		Dishubkominfo
	Pengadaan Alat Keselamatan Transportasi Darat (DAK Keselamatan Transportasi Darat)	639.060.000,00	100,00	617.182.865,00	96,58	Fasilitas keselamatan jalan		Dishubkominfo
	Pendampingan Pengadaan Alat Keselamatan Transportasi Darat	223.180.000,00	100,00	212.872.295,00	95,38	Pendampingan kegiatan keselamtan transportasi darat		Dishubkominfo

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
9	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1.347.910.000,00	83,33	1.231.326.350,00	91,35		Berfungsinya fasilitas LLAJ	Dishubkominfo
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	45.660.000,00	-	-	-	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	641.450.000,00	100,00	591.280.000,00	92,18	Fasilitas lalu lintas jalan		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross	199.500.000,00	100,00	192.489.000,00	96,49	Tersedianya marka jalan dan lalu lintas yang aman		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	142.860.000,00	100,00	136.664.000,00	95,66	Berfungsinya APILL dengan baik		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan	170.000.000,00	100,00	163.914.850,00	96,42	Jumlah median terpelihara 1700 M2		Dishubkominfo
	Pengadaan Alat Monitoring Dan Informasi APILL	148.440.000,00	100,00	146.978.500,00	99,02	Alat monitoring dan informasi APILL		Dishubkominfo
10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.129.425.000,00	92,86	933.527.050,00	82,66		Meningkatnya pelayanan angkutan bagi masyarakat	Dishubkominfo
	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	9.000.000,00	100,00	8.778.000,00	97,53	Profil uji kelayakan		Dishubkominfo
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.300.000,00	100,00	11.450.000,00	49,14	Terlaksananya rapat forum LLAJ		Dishubkominfo
	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	31.990.000,00	100,00	16.806.000,00	52,54	Pembinaan dan penertiban LLAJ		Dishubkominfo
	Pendataan, Pengukuran dan Pendaftaran Kapal	17.250.000,00	100,00	15.030.000,00	87,13	Data jumlah dan ukuran kapal		Dishubkominfo
	Pengadaan Plat Nomor Tanda Selar	48.000.000,00	100,00	46.200.000,00	96,25	Jumlah tanda selar tersedia		Dishubkominfo
	Pengadaan Cetak Formulir Sertifikat Kapal Danpas Kecil untuk Kapal GT 7 ke Bawah	32.000.000,00	100,00	18.832.000,00	58,85	Jumlah cetak sebanyak 3200 lembar		Dishubkominfo
	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran	230.640.000,00	100,00	191.665.500,00	83,10	Pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran		Dishubkominfo
	Sosialisasi Awak Kapal Untuk Kapal GT 7 ke Bawah	22.375.000,00	100,00	19.907.500,00	88,97	Diklat awak kapal GT 7 ke bawah		Dishubkominfo

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	149.950.000,00	100,00	84.399.800,00	56,29	Kegiatan lomba tertib lalu lintas dan AKUT		Dishubkominfo
	Pekan Keselamatan Transportasi Darat	73.900.000,00	100,00	58.482.500,00	79,14	Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas		Dishubkominfo
	Pengawasan Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah	19.950.000,00	100,00	8.600.000,00	43,11	Jumlah kapal yang terawasi		Dishubkominfo
	Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Angkutan Laut	75.520.000,00	100,00	61.132.500,00	80,95	Fasilitas keselamatan pelayaran		Dishubkominfo
	Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	395.550.000,00	100,00	392.243.250,00	99,16	Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi		Dishubkominfo
11	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	4.163.930.000,00	100,00	4.009.938.415,00	96,30		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishubkominfo
	Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Umum Kota Bontang	24.000.000,00	100,00	6.550.000,00	27,29	Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Umum Kota Bontang		Dishubkominfo
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Loktuan	50.900.000,00	100,00	29.620.000,00	58,19	Fasilitas pelabuhan loktuan sebanyak 22 unit		Dishubkominfo
	Pembangunan Bandara Kota Bontang	3.512.630.000,00	100,00	3.419.446.115,00	97,35	Bandara baru kota Bontang		Dishubkominfo
	Pemeliharaan Pelabuhan Umum Loktuan	576.400.000,00	100,00	554.322.300,00	96,17	Keramik lantai gedung kantor, lampu parkir dan halaman		Dishubkominfo
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.235.160.000,00	100,00	1.200.414.710,00	97,19		Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Dishubkominfo
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	162.000.000,00	100,00	160.974.000,00	99,37	Jumlah RPPJ terpasang 10 unit		Dishubkominfo
	Kegiatan Survey Lalin Terpadu	73.100.000,00	100,00	65.716.000,00	89,90	Dokumen data base dan perencanaan LLAJ		Dishubkominfo

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross	146.080.000,00	100,00	141.949.520,00	97,17	Tersedianya marka jalan dan zebra cross		Dishubkominfo
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Laut	52.100.000,00	100,00	48.615.090,00	93,31	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan laut natal dan tahun baru		Dishubkominfo
	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengendalian Lalu Lintas	36.000.000,00	100,00	34.760.000,00	96,56	Peralatan pengendalian LLAJ		Dishubkominfo
	Monitoring & Evaluasi Penertiban Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	5.800.000,00	100,00	5.800.000,00	100,00	Penggunaan daerah milik jalan (DAMIJA) sesuai fungsi		Dishubkominfo
	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	160.080.000,00	100,00	158.655.000,00	99,11	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan		Dishubkominfo
	Pengadaan Fasilitas Penyebrangan Pejalan Kaki (Pelican Crossing)	600.000.000,00	100,00	583.945.100,00	97,32	Fasilitas penyebrangan pejalan kaki		Dishubkominfo
13	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.964.500.000,00	50,00	1.964.500.000,00	100,00		Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Dishubkominfo
	Pengadaan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor	1.964.500.000,00	100,00	1.964.500.000,00	100,00	Mobil uji kendaraan bermotor		Dishubkominfo
14	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS	374.385.000,00	66,67	214.980.200,00	57,42		Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam menggunakan frekuensi radio	Dishubkominfo
	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	186.610.000,00	100,00	156.824.000,00	84,04	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas		Dishubkominfo
	Penyusunan Raperda Fasilitas Lalu Lintas Jalan	125.000.000,00	-	-	-	Raperda LLAJ		Dishubkominfo
	Pengamanan dan Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Laut Pelabuhan Umum Loktuan	62.775.000,00	100,00	58.156.200,00	92,64	Pengamanan dan pengendalian arus mudik dan arus balik		Dishubkominfo
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO	151.409.000,00	100,00	135.701.000,00	89,63		Terciptanya pemahaman pengguna frekuensi yang tertib	Dishubkominfo
	Penyusunan Cell Plan Kota Bontang	151.409.000,00	100,00	135.701.000,00	89,63	Kalian zona cell plan Kota Bontang		Dishubkominfo

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
16	PROGRAM SOSIALISASI KKOP DAN PEMBINAAN BIDANG POSTEL	48.850.000,00	100,00	18.550.000,00	37,97		Meningkatnya pemahaman dan pembinaan KKOP dan Postel	Dishubkominfo
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Postel	19.500.000,00	100,00	16.750.000,00	85,90	Sosialisasi peraturan bidang postel		Dishubkominfo
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	29.350.000,00	100,00	1.800.000,00	6,13	Data teknis menara telekomunikasi di Kota Bontang		Dishubkominfo
	URUSAN PERHUBUNGAN	26.363.998.648,00	92,55	24.265.638.234,00	92,04	16 PROGRAM; 77 KEGIATAN		

A.4.4.3 URUSAN PERTANAHAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	909.958.000,00	88,24	587.359.158,00	64,55		Tertibnya Administrasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bontang	
	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	327.150.000,00	52,94	79.743.940,00	24,38	Proses sertifikasi yang masuk ke BPN sebanyak 10 bidang		Sekretariat Daerah
	Pelatihan Tenaga Teknis Pertanahan	77.702.000,00	100,00	66.760.300,00	85,92	- Pelatihan ke BIG yg diikuti oleh kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait (sekitar 25 peserta) - Sosialisasi Peraturan tentang Pengadaan Lahan yang diikuti seluruh SKPD (sekitar 100 peserta)		Sekretariat Daerah
	Inventarisasi Permasalahan Tanah	481.344.000,00	100,00	436.354.918,00	90,65	Terselesaikannya kasus pertanahan (5 kasus selesai dari 6 kasus)		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Ijin Pinjam Pakai Lahan	23.762.000,00	100,00	4.500.000,00	18,94	Fasilitasi Izin Pinjam Pakai RSUD		Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	91.815.850.000,00	81,25	71.399.398.240,00	77,76		Terpenuhinya lahan untuk fasilitas umum dan	
	Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	91.815.850.000,00	81,25	71.399.398.240,00	77,76	Terlaksananya Pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebanyak 12 bidang		Sekretariat Daerah
	URUSAN PERTANAHAN	92.725.808.000,00	86,84	71.986.757.398,00	77,63	2 PROGRAM; 5 KEGIATAN		

A.4.4.4 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.629.175.178,00	97,47	7.150.881.834,00	93,73		Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.320.000,00	100,00	4.119.960,00	65,19	Jumlah surat terkirim selama 6 bulan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000,00	97,75	27.743.498,00	51,95	Pembayaran rekening listrik,telepone,internet,tv kabel selama 12 bulan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24.700.000,00	100,00	18.168.620,00	73,56	Pembayaran STNK & KIR Kendaraan dinas/operasional		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.095.000,00	100,00	29.001.500,00	99,68	Tersediannya bahan pembersih kantor 1 paket		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	193.961.500,00	100,00	193.319.050,00	99,67	Tersediannya alat tulis kantor 63 jenis ATK		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	136.170.000,00	100,00	136.011.440,00	99,88	Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan 1 paket		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.930.000,00	100,00	9.890.100,00	99,60	Jumlah Komponen Listrik penerangan Bangunan Kantor 10 jenis		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	653.260.000,00	98,47	564.493.500,00	86,41	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51.420.000,00	100,00	49.920.000,00	97,08	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 6 bulan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.505.000,00	73,42	54.504.650,00	73,16	Tersedianya bahan logistik kantor 1 Paket		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Makanan dan Minuman	190.760.000,00	100,00	181.710.000,00	95,26	Tersedianya Makanan dan minuman Rapat dan Tamu 12 bulan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	985.900.000,00	99,95	979.370.282,00	99,34	Jumlah Aparatur yang melaksanakan Rapat Koordinasi/Konsultasi 137 org		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	5.219.753.678,00	100,00	4.902.629.234,00	93,92	Tersedianya Tenaga Administrasi / Teknis perkantoran 89 org.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.306.240.000,00	100,00	1.283.096.750,00	98,23		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	376.560.000,00	100,00	353.630.000,00	93,91	kendaraan Roda 4 Station dan Pick Up sebanyak 2 unit		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000,00	100,00	19.956.750,00	99,78	Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor 1 gedung		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	820.680.000,00	100,00	820.520.000,00	99,98	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 40 kendaraan dinas		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	89.000.000,00	100,00	88.990.000,00	99,99	Terpeliharnya kualitas Perlengkapan gedung Kantor 12 bulan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	264.560.000,00	100,00	263.483.000,00	99,59		Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	70.720.000,00	100,00	70.720.000,00	100,00	Jumlah Pegawai 67 Org.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	193.840.000,00	100,00	192.763.000,00	99,44	Jumlah Pegawai 59 Org.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	395.420.000,00	99,89	376.092.484,00	95,11		Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	395.420.000,00	99,89	376.092.484,00	95,11	Jumlah Pegawai yg Diklat,137 org.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	56.500.000,00	100,00	55.825.000,00	98,81		Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pelaksanaan Jumat Bersih	56.500.000,00	100,00	55.825.000,00	98,81	Tertatanya kerapian,keindahan dan kebersihan lingkup pasar dan sekeliling pasar,3 pasar		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
6	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF	247.942.000,00	98,70	231.028.800,00	93,18		Terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	104.040.000,00	97,40	99.648.800,00	95,78	Menumbuhkan jiwa wira usaha baru yang mandiri berpotensi kepada peningkatan kesejahteraan umum bagi 30 pelaku usaha.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM	104.300.000,00	100,00	104.200.000,00	99,90	Memberikan Peluang usaha serta jaringan kemitraan dengan pihak luar		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	39.602.000,00	100,00	27.180.000,00	68,63			Sekretariat Daerah
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	427.222.500,00	100,00	398.247.900,00	93,22		Meningkatnya keahlian SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi	
	Pembinaan dan Fasilitasi Wira Usaha Baru	230.152.500,00	100,00	228.536.500,00	99,30	Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi wirausaha baru		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Sosialisasi Penataan dan Perijinan Toko Modern	27.150.000,00	100,00	27.147.100,00	99,99	Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penataan dan perijinan toko.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	169.920.000,00	100,00	142.564.300,00	83,90			Sekretariat Daerah
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	464.257.000,00	84,46	399.757.600,00	86,11		Terlaksananya pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	186.260.000,00	99,83	181.487.000,00	97,44	Meningkatkan jaringan pemasaran produk unggulan UKM Kota Bontang		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyediaan Permodalan bagi UKM dan Koperasi	16.890.000,00	100,00	16.665.000,00	98,67	Terlaksananya suatu Forum komunikasi bagi 100 pelaku UKM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir	105.545.000,00	50,00	75.481.800,00	71,52	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pelatihan Manajemen dan Inovasi Usaha	38.631.000,00	100,00	33.761.000,00	87,39	Terlaksananya pelatihan bagi 30 pelaku UKM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Verifikasi dan Penetapan Penerima Dana Bergulir	65.266.000,00	72,47	41.000.000,00	62,82	Pelaksanaan verifikasi serta penetapan penerima dana bergulir		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga	51.665.000,00	100,00	51.362.800,00	99,42	Terlaksananya penjajakan kerjasama bidang perekonomian antar pemerintah kota/kabupaten/prov		Sekretariat Daerah
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	148.052.500,00	98,41	142.013.250,00	95,92		Terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	37.780.000,00	95,24	35.868.000,00	94,94	Meningkatkan kualitas koperasindi Kota Bontang sebanyak 50 Koperasi		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pelatihan Pengawas Koperasi	40.467.500,00	100,00	37.099.000,00	91,68	Pelatihan Pengawasan Koperasi sebanyak 30 orang		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Kegiatan Study Komparatif	69.805.000,00	100,00	69.046.250,00	98,91	Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha koperasi		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
10	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	116.690.000,00	100,00	111.332.500,00	95,41		Terwujudnya peningkatan kelembagaan koperasi dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
	Peringatan Hari Gerakan Koperasi	72.892.500,00	100,00	70.085.000,00	96,15	Terlaksananya kegiatan Olah Raga (jalan santai)		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penilaian Kesehatan KSP/USP	19.425.000,00	100,00	16.875.000,00	86,87	Tersedianya data penilaian tingkat kesehatan KSP/KJKS dan USP/UJKS Koperasi		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif	14.047.500,00	100,00	14.047.500,00	100,00	Memperbaiki dan mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif sebanyak 15 koperasi		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Monitoring Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM	10.325.000,00	100,00	10.325.000,00	100,00	Teridentifikasinya permasalahan dan kondisi Dana Bergulir Kementerian koperasi dan UKM.		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
11	PROGRAM PENGUATAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KECIL	382.639.500,00	100,00	346.390.280,00	90,53		Terlaksananya penguatan pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil	
	Pelatihan Keterampilan Berusaha, Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin	207.999.500,00	100,00	173.350.280,00	83,34	Terwujudnya kelompok usaha RTM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Perluasan Usaha bagi UMKM	174.640.000,00	100,00	173.040.000,00	99,08	Tersediannya kawasan usaha PKL/UKM yang refresentatif		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.438.698.678,00	97,25	10.758.149.398,00	94,05	11 PROGRAM; 42 KEGIATAN		

A.4.4.5 URUSAN PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	924.590.000,00	97,04	880.859.788,00	95,27		Meningkatnya jumlah investor (PMDN/PMA)	
	Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Kota Bontang dan Provinsi Kaltim	47.310.000,00	100,00	33.104.988,00	69,97	Terlaksananya rakor peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA) kota bontang dan prov kaltim		Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Promosi Investasi	861.980.000,00	99,95	833.354.800,00	96,68	Terselenggaranya promosi dan masuknya investor ke Kota Bontang		BPPM
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website BPPM	15.300.000,00	94,12	14.400.000,00	94,12	Update website BPPM		BPPM
2	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	483.241.000,00	95,60	465.537.750,00	96,34		Meningkatnya jumlah investasi	
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	351.320.000,00		343.230.500,00	97,70	1 dokumen Raperda pengelolaan kawasan industri Kota Bontang		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	121.411.000,00	92,17	111.899.250,00	92,17	Peningkatan monitoring investasi		BPPM
	Monitoring dan Pengendalian Investasi	10.510.000,00	99,03	10.408.000,00	99,03	Peningkatan monitoring investasi		BPPM
	URUSAN PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI	1.407.831.000,00	97,05	1.346.397.538,00	95,64	2 PROGRAM; 6 KEGIATAN		

A.4.4.6 URUSAN KETAHANAN PANGAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	608.242.500,00	80,46	260.575.000,00	42,84		Meningkatnya ketersediaan pangan	
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	565.642.500,00	60,92	230.320.000,00	40,72	Terlaksananya Penganekaragaman Konsumsi Pangan		Kantor Ketahanan Pangan
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	42.600.000,00	100,00	30.255.000,00	71,02	Pengembangan Sistem Informasi		Kantor Ketahanan Pangan
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.017.335.000,00	99,82	759.499.876,00	74,66		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.470.000,00	100,00	1.470.000,00	100,00	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.600.000,00	100,00	4.382.076,00	19,39	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.200.000,00	100,00	22.763.400,00	98,12	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.890.000,00	98,00	39.629.650,00	86,36	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.820.000,00	100,00	207.259.650,00	90,98	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.700.000,00	100,00	8.950.000,00	92,27	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.705.000,00	100,00	8.307.000,00	95,43	Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.750.000,00	100,00	3.525.000,00	16,21	Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	261.200.000,00	100,00	97.588.600,00	37,36	Adanya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan		Kantor Ketahanan Pangan

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	335.000.000,00	100,00	305.624.500,00	91,23	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Kantor Ketahanan Pangan
	Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	Tersedianya gedung kantor		Kantor Ketahanan Pangan
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	799.175.000,00	100,00	727.776.600,00	91,07		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	559.740.000,00	100,00	517.620.000,00	92,48	Pembelian kendaraan dinas/operasional		Kantor Ketahanan Pangan
	Pengadaan Meubelair	176.415.000,00	100,00	168.141.600,00	95,31	Pembelian Meubelair		Kantor Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	54.420.000,00	100,00	40.515.000,00	74,45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kantor Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.600.000,00	100,00	1.500.000,00	17,44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kantor Ketahanan Pangan
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.900.000,00	100,00	19.764.000,00	70,84		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	27.900.000,00	100,00	19.764.000,00	70,84	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Kantor Ketahanan Pangan
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	89.000.000,00	100,00	70.529.700,00	79,25		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	89.000.000,00	100,00	70.529.700,00	79,25	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		Kantor Ketahanan Pangan
	URUSAN KETAHANAN PANGAN	2.541.652.500,00	97,84	1.838.145.176,00	72,32	5 PROGRAM; 19 KEGIATAN		

B. URUSAN PILIHAN

**Tabel 4.5. Program dan Kegiatan Misi 3
(Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup)**

B.4.3.1 URUSAN KEHUTANAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	202.530.000,00	100,00	200.500.000,00	99,00		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hutan Kemasyarakatan dan terfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam kegiatan usulan Hutan Kemasyarakatan	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	202.530.000,00	100,00	200.500.000,00	99,00	Terlaksananya perencanaan dan inventaris hutan dalam kawasan hutan seluas 10 Ha		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
2	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	859.405.000,00	100,00	802.044.565,00	93,33		Berkurangnya lahan kritis di Kota Bontang dengan dilakukannya rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman pohon baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan	
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	78.000.000,00	100,00	77.208.800,00	98,99	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penanaman Pohon pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	141.060.000,00	100,00	107.669.500,00	76,33	Terlaksananya penghijauan kawasan ruang terbuka hijau seluas 25 Ha		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pemeliharaan Kawasan Hutan Lindung/Mangrove/Wisata	55.620.000,00	100,00	51.180.000,00	92,02	Meningkatnya penghijauan lingkungan seluas 25 Ha		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	584.725.000,00	100,00	565.986.265,00	96,80	Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Lindung dan Mangrove seluas 50 Ha		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	URUSAN KEHUTANAN	1.061.935.000,00	100,00	1.002.544.565,00	94,41	2 PROGRAM; 5 KEGIATAN		

B.4.3.2 URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.239.931.822,00	100,00	5.931.075.875,00	95,05		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000,00	100,00	15.424.320,00	90,73	200 pengiriman, bahan pakai habis 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,00	100,00	4.979.500,00	11,86	1 tahun (Belanja telepon, air, listrik, internet modem)		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	33.900.000,00	100,00	18.653.040,00	55,02	Perawatan kendaraan bermotor 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	164.481.000,00	100,00	162.889.150,00	99,03	Bahan habis pakai 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	257.105.000,00	100,00	254.071.250,00	98,82	Cetak spanduk 75 lembar, foto-foto dinas 150 lembar, pembuatan back drop dan kayu 3, karangan bunga 5 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.742.000,00	100,00	13.725.000,00	77,36	Lampu SL 20 watt 45 buah, lampu pijar 50 buah, kabel gulung 3 buah, kabel 7 buah, battery AA 30 buah, battery AAA 30 buah, battery tanggung 30 buah, battery HK 20 buah, terminal kontak 30 buah, stop kontak		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.808.660,00	100,00	135.441.375,00	89,22	Pengadaan AC 2 unit, komputer PC 6 unit, printer 12 unit, meja rapat 1 set, meja infokus 1 unit, kursi rapat (RPH) 8 buah, kursi rapat 9 buah		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	100,00	8.700.000,00	96,67	Panci besar 2 buah, panci kecil 2 buah, termos 1 buah, wajan 2 buah, baskom 2 buah, piring 5 lusin, mangkuk 5 lusin, gelas 10 lusin, sendok 5 lusin, garpu 5 lusin, ember air 1buah		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.280.000,00	100,00	36.306.000,00	87,95	Jasa kantor surat kabar/majalah 1 tahun, buku perpustakaan 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.625.000,00	100,00	50.428.000,00	99,61	Logistik 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Makanan dan Minuman	68.100.000,00	100,00	66.009.000,00	96,93	Makanan dan minuman 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.377.930.000,00	100,00	1.377.261.440,00	99,95	Perjalanan dinas 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	3.933.285.162,00	100,00	3.718.127.800,00	94,53	Kinerja PNS 9 bulan, jasa pelayanan administrasi 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Monitoring Barang Inventaris Kantor	75.675.000,00	100,00	69.060.000,00	91,26	Tersedianya website DPKP		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.204.590.000,00	100,00	1.128.554.600,00	93,69		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	66.240.000,00	100,00	28.114.000,00	42,44	Partisi kantor 1 paket, pemeliharaan gedung kantor 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.013.900.000,00	100,00	1.000.219.600,00	98,65	Perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	71.750.000,00	100,00	54.896.000,00	76,51	AC 10 unit, gedung kantor 1 tahun, komputer 35 unit, printer 30 unit, mesin absensi 3 kali, mesin fotocopy 2 kali		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	22.100.000,00	100,00	19.325.000,00	87,44	Pemeliharaan komputer 6 paket, laptop 8 paket, anti virus 10 buah, windows 8 buah, printer 9 buah, isi ulang 10 kali		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	30.600.000,00	100,00	26.000.000,00	84,97	Bola volly 2 buah, bola kaki 2 buah, shuttle cock 40 slop, bola ping pong 10 kotak, lapangan tenis meja 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73.400.000,00	100,00	72.672.200,00	99,01		Meningkatnya disiplin aparatur SKPD	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	73.400.000,00	100,00	72.672.200,00	99,01	Pakaian kerja non PNS 63 stel, pakaian sipil lengkap 2 stel		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	935.000.000,00	100,00	934.883.178,00	99,99		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	935.000.000,00	100,00	934.883.178,00	99,99	Pelatihan advanced 12 OP, kontribusi 1 tahun, perjalanan dinas 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	63.504.000,00	100,00	23.580.000,00	37,13		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kinerja	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	624.000,00	100,00	600.000,00	96,15	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.120.000,00	100,00	960.000,00	85,71	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyusunan Laporan Statistik	59.040.000,00	100,00	19.400.000,00	32,86	Tersedianya laporan statistik		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyusunan Renja SKPD	1.120.000,00	100,00	1.120.000,00	100,00	Penyusunan Renja SKPD		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	500.000,00	100,00	400.000,00	80,00	Penyusunan Laporan Akuntabilitas		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	358.955.000,00	100,00	328.107.650,00	91,41		Meningkatnya tenaga manajerial kelompok dan pewirausaha pengolah hasil perikanan terampil	
	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Nelayan	358.955.000,00	100,00	328.107.650,00	91,41	Terlaksananya pembinaan kelembagaan nelayan dan manajemen kelompok nelayan 150 orang/ 30 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	1.932.490.000,00	42,07	807.198.900,00	41,77		Menurunnya pelanggaran di laut	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (DAK Kelautan dan Perikanan)	1.932.490.000,00	42,07	807.198.900,00	41,77	Rehabilitasi karang 1300 unit, kapal operasional 1 unit, alat selam 1 paket, papan informasi 4 unit, rambu 8 unit, pos jaga kawasan 1 unit		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
8	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT	101.795.000,00	100,00	97.867.940,00	96,14		Terdapatnya rehabilitasi karang dan Pelatihan Budidaya Karang	
	Pengawasan Perikanan dan Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan (WASKAN)	101.795.000,00	100,00	97.867.940,00	96,14	Meningkatkan pengawasan sektor perikanan dan mutu hasil pengolahan hasil perikanan (Waskan) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta pengawasan sumberdaya kelautan 4 orang		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
9	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT	914.370.000,00	100,00	910.039.500,00	99,53		Terdapatnya rehabilitasi karang dan Pelatihan Budidaya Karang	
	Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias	914.370.000,00	100,00	910.039.500,00	99,53	Meningkatnya ekosistem karang yang direhabilitasi seluas 4 Ha		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
10	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	4.121.899.568,00	100,00	3.942.511.738,00	95,65		Meningkatnya keterampilan pembudidaya ikan serta berkembangnya budidaya ikan di masyarakat	
	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	73.373.000,00	100,00	72.613.000,00	98,96	Meningkatnya keterampilan, pengetahuan dan hasil budidaya ikan sebanyak 30 orang/ kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	2.090.402.568,00	100,00	2.038.499.278,00	97,52	Meningkatnya Keterampilan, Pengetahuan dan hasil Budidaya Ikan sebanyak 20 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	692.294.000,00	100,00	591.529.160,00	85,44	Kegiatan operasional BBIP 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	1.007.620.000,00	100,00	985.307.329,00	97,79	Konstruksi jembatan 1 paket, konstruksi BBU/I 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	19.480.000,00	100,00	19.355.000,00	99,36	Tersedianya Data Statistik Perikanan Budidaya		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pendampingan Kegiatan Proyek APBN Perikanan Budidaya	238.730.000,00	100,00	235.207.971,00	98,52	Tersedianya Pendampingan Kegiatan Proyek APBN Perikanan Budidaya sebanyak 2 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	5.379.507.840,00	100,00	5.234.720.182,00	97,31		Terlaksananya pembinaan teknis, Bantuan dan Peningkatan SDM Bagi Nelayan Tangkap	
	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	57.700.000,00	100,00	36.100.000,00	62,56	Pembinaan nelayan tangkap (6 jpl x 3 org x 4 bulan) = 72 jpl		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Fasilitasi Bantuan Sarana bagi Nelayan Tangkap	1.212.970.000,00	100,00	1.199.739.000,00	98,91	Meningkatnya sarana penangkapan dan meningkatnya penghasilan nelayan terhadap 50 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pengoperasian PPI/TPI	467.163.840,00	100,00	460.495.328,00	98,57	Bahan bakar genset mesin pemotong rumput dan pompa air (24 x 10 liter = 240 liter), oli 10 liter x 12 bulan = 120 liter, oli kompresor selam 12 liter		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pembangunan Fasilitas PPI/TPI	210.470.000,00	100,00	174.265.730,00	82,80	Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun, konsultasi kajian akademik 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	15.314.000,00	100,00	15.124.000,00	98,76	Tersedianya statistik perikanan tangkap		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	105.690.000,00	100,00	91.005.600,00	86,11	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perijinan bagi Nelayan tangkap		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Kelautan dan Perikanan)	1.730.750.000,00	100,00	1.697.627.698,00	98,09	Kapal nelayan tang14 unit, alat tangkap ikan 45 unit, sarana penangkapan ikan 26 unit		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pendampingan Kegiatan Proyek APBN Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	274.450.000,00	100,00	265.744.602,00	96,83	115 unit dan 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK Kelautan dan Perikanan)	1.305.000.000,00	100,00	1.294.618.224,00	99,20	Lantai jemur 3 unit, gudang penyimpanan rumput laut 3 unit		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
12	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	1.147.543.000,00	96,77	963.768.200,00	83,99		Tertib administrasi serta meningkatnya produksi perikanan	
	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perikanan	192.329.000,00	100,00	156.466.500,00	81,35	110 orang/ 25 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pembinaan dan Promosi Hasil Perikanan dan Kelautan	262.880.000,00	100,00	252.345.800,00	95,99	3 pameran dan 1 karnaval		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Optimalisasi Perizinan Usaha Perikanan	28.200.000,00	100,00	26.800.000,00	95,04	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan,Pertanian dan Peternakan sebanyak 15		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK Kelautan dan Perikanan)	275.000.000,00	100,00	228.772.500,00	83,19	Spinner machine 5 unit, hand sealer 5 unit, freezer 5 unit, mesin penggiling 5 unit, kendaraan roda 3 = 3 unit		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pendampingan Kegiatan Proyek APBN Kawasan Konservasi	361.534.000,00	80,64	281.233.400,00	77,79	3 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pendampingan Kegiatan Proyek APBN Pengolah Perikanan	27.600.000,00	100,00	18.150.000,00	65,76	3 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
13	PROGRAM PEMETAAN RUANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT, PESISIR, DAN PULAU PULAU KECIL	1.003.497.500,00	98,77	988.626.250,00	98,52		Terlaksananya Pengelolaan Konservasi Perairan Kota Bontang	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kota Bontang	603.060.000,00	97,54	588.220.000,00	97,54	Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Lembaga Pengelolaaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Review Database dan Kajian Potensi Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	400.437.500,00	100,00	400.406.250,00	99,99	Dokumen Review Database dan Kajian Potensi Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN	23.476.483.730,00	98,52	21.363.606.213,00	91,00	13 PROGRAM; 54 KEGIATAN		

B. URUSAN PILIHAN

Tabel 4.6. Program dan Kegiatan Misi 4
(Memperkuat Struktur Ekonomi dan Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air Bersih serta Infrastruktur Lainnya)

B.4.4.1 URUSAN PERTANIAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	261.017.800,00	45,35	72.106.219,00	27,63			
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	172.040.000,00	50,00	51.604.019,00	30,00	Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan		Kantor Ketahanan Pangan
	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	88.977.800,00	40,70	20.502.200,00	23,04	Terlaksananya Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan		Kantor Ketahanan Pangan
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	765.920.000,00	100,00	718.980.100,00	93,87		Bertambahnya wawasan dan pengetahuan petani	
	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	342.665.000,00	100,00	333.235.750,00	97,25	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebanyak 30 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	423.255.000,00	100,00	385.744.350,00	91,14	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh selama 1 tahun		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	69.820.000,00	100,00	68.235.500,00	97,73		Meningkatnya penerapan TTB dalam bidang pertanian	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	69.820.000,00	100,00	68.235.500,00	97,73	Sarana pertanian 10 unit, pelatihan petani 10 orang		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
4	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	673.975.000,00	100,00	659.466.300,00	97,85		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan	
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	306.095.000,00	100,00	299.118.000,00	97,72	Penyerahan bibit, pupuk 1 paket kepada 20 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	367.880.000,00	100,00	360.348.300,00	97,95	Tersedianya bibit unggul pertanian dan perkebunan 1 paket		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	114.000.000,00	100,00	109.000.000,00	95,61		Tersedianya tenaga penyuluh pertanian	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Bantuan Keuangan Provinsi)	114.000.000,00	100,00	109.000.000,00	95,61	Insentif penyuluh pertanian lapangan sebanyak 7 orang		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	163.695.000,00	100,00	148.781.550,00	90,89		Tersedianya ternak yang sehat dan bermutu	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	163.695.000,00	100,00	148.781.550,00	90,89	Meningkatnya Kesehatan dan Mutu Hasil Ternak		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	160.078.000,00	100,00	155.035.000,00	96,85		Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit ternak	
	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	23.078.000,00	100,00	18.885.000,00	81,83	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 50 orang		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	45.700.000,00	100,00	45.200.000,00	98,91	Tersedianya ternakunggas untuk 10 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat	91.300.000,00	100,00	90.950.000,00	99,62	Meningkatkan Kesejahteran peternak dan pendataan statistik peternakan 5 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
8	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	336.405.000,00	100,00	333.385.117,00	99,10		Tersedinya sarana dan Prasarana Pasar untuk Hasil Peternakan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Hasil Produksi Peternakan	336.405.000,00	100,00	333.385.117,00	99,10	Kebersihan gedung 12 OK, BBM untuk jet washer (2 liter x 360 hari = 720 liter), oli pelumas 12 liter		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
9	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	90.520.000,00	100,00	90.175.000,00	99,62		Tersedianya sarana pemanfaatan limbah ternak	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	90.520.000,00	100,00	90.175.000,00	99,62	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Peternakan 3 kelompok		Dinas Perikanan, Kelautan & Pertanian
	URUSAN PERTANIAN	2.635.430.800,00	92,19	2.355.164.786,00	89,37	9 PROGRAM; 14 KEGIATAN		

B.4.4.2 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3.450.000,00	100,00	3.450.000,00	100,00			
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Mineral Non Logam dan Batuan	3.450.000,00	100,00	3.450.000,00	100,00	- Dokumen pengawasan kegiatan penambangan Galian C		Disperindagkop & UMKM
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG	3.450.000,00	100,00	3.450.000,00	100,00			
	Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah	3.450.000,00	100,00	3.450.000,00	100,00	- Dokumen pengawasan kegiatan mineral non logam dan batuan		Disperindagkop & UMKM
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	288.730.000,00	99,71	287.980.000,00	99,74			
	Pembinaan dan Pengawasan K3 Energi Ketenagalistrikan	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	- Dokumen pembinaan dan pengawasan K3 Energi Ketenagalistrikan		Disperindagkop & UMKM
	Peresmian Instalasi PLTS Komunal Kota Bontang	34.025.000,00	99,12	33.725.000,00	99,12	- Acara seremonial peresmian PLTS Komunal di gusung		Disperindagkop & UMKM
	Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang	251.705.000,00	100,00	251.255.000,00	99,82	- Pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga		Disperindagkop & UMKM
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI SUMBER ENERGI GAS DAN BAHAN BAKAR MINYAK	28.675.000,00	12,82	3.675.000,00	12,82			
	Monitoring terhadap Distribusi dan Tata Niaga BBM Bersubsidi	28.675.000,00	12,82	3.675.000,00	12,82	- Dokumen monitoring terhadap distribusi dan tata niaga BBM Bersubsidi		Disperindagkop & UMKM
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI	253.317.500,00	100,00	234.900.000,00	92,73			
	Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat	219.010.000,00	100,00	200.680.000,00	91,63	- Pengadaan 8 tiang listrik di nyerakat kiri		Disperindagkop & UMKM
	Peresmian Instalasi Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Kota Bontang	34.307.500,00	100,00	34.220.000,00	99,74	- Acara seremonial peresmian instalasi jaringan gas di gunung telihan		Disperindagkop & UMKM

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	577.622.500,00	88,99	533.455.000,00	92,35	5 PROGRAM; 8 KEGIATAN		

B.4.4.3 URUSAN PARIWISATA

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	376.763.400,00	100,00	375.067.400,00	99,55		Meningkatnya sarana rumah adat di kota bontang	
	Pembangunan Lumbung dan Prasarana Penunjang Rumah Adat Toraja Kelurahan Kanaan (Lanjutan)	376.763.400,00	100,00	375.067.400,00	99,55	Tersedianya lumbung dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang rumah adat toraja		Dinas Pekerjaan Umum
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	897.400.000,00	100,00	813.675.291,00	90,67		Meningkatnya Wisatawan ke Kota Bontang	
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	461.890.000,00	100,00	406.490.451,00	88,01	terisinya stand pameran dan terpromosinya potensi pariwisata kota didalam dan luar daerah		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	285.510.000,00	100,00	257.624.840,00	90,23	terlaksananya koordinasi dan pelatihan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan pariwisata		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pembuatan Peralatan Pendukung Promosi Pariwisata	150.000.000,00	100,00	149.560.000,00	99,71	terciptanya peralatan pendukung promosi pariwisata		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.390.160.000,00	100,00	1.236.995.000,00	88,98		Meningkatnya nilai dan fasilitas objek pariwisata	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.390.160.000,00	100,00	1.236.995.000,00	88,98	kenyamanan berwisata		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	782.848.000,00	100,00	724.803.340,00	92,59		Meningkatnya Kesadaran dalam Pengelolaan Pariwisata	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	473.428.000,00	100,00	427.343.340,00	90,27	terpromosinya kuliner kota bontang dan pembinaan PAPI Pariwisata		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Pemilihan Putra Putri Pariwisata	309.420.000,00	100,00	297.460.000,00	96,13	terciptanya mitra kerja pariwisata yang siap mempromosikan pariwisata Kota bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	505.720.000,00	100,00	439.298.400,00	86,87		Meningkatnya kemitraan dalam pengelolaan kekayaan budaya Kota Bontang	

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	505.720.000,00	100,00	439.298.400,00	86,87	terpromosinya kuliner kota bontang		Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	URUSAN PARIWISATA	3.952.891.400,00	100,00	3.589.839.431,00	90,82	5 PROGRAM; 8 KEGIATAN		

B.4.4.4 URUSAN PERDAGANGAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	21.192.780.000,00	100,00	20.195.073.500,00	95,29		Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	
	Pembangunan Pasar Rawa Indah	20.916.830.000,00	100,00	20.098.816.500,00	96,09	1 Unit pasar rawa indah		Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan	189.180.000,00	100,00	9.781.000,00	5,17	Review design pasar citra mas Loktuan		Dinas Pekerjaan Umum
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	210.910.000,00	99,90	192.262.000,00	91,16		Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengawasan pengamanan perdagangan	
	Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok	38.830.000,00	100,00	29.720.000,00	76,54	Kebijakan strategis perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pengawasan Makanan dan Minuman yang Beredar di Pasaran	56.290.000,00	100,00	55.877.000,00	99,27	Kebijakan strategis perlindungan dan pengamanan perdagangan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	115.790.000,00	99,69	106.665.000,00	92,12	Laporan Hasil Fasilitasi tertib ukur, ukur ulang dan tera ulang di 15 Kelurahan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	129.270.000,00	99,49	123.436.980,00	95,49		Terlaksananya peningkatan dan pengembangan ekspor	
	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	87.410.000,00	98,97	82.572.140,00	94,47	1 kali pelaksanaan pameran		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Hasil Komoditi Laut Yang Berorientasi Ekspor	41.860.000,00	100,00	40.864.840,00	97,62	Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha (UKM)		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
4	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.482.315.000,00	98,95	1.433.582.082,00	96,71		Terlaksananya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri	71.335.000,00	100,00	71.090.050,00	99,66	Terbentuknya Sentra PKL		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	190.770.000,00	95,28	169.385.000,00	88,79	56 Org tenaga lapangan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Peningkatan Sarana Pasar Tradisional	270.640.000,00	100,00	264.176.200,00	97,61	Menunjang aktifitas perdagangan yg aman dan nyaman di 3 pasar		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal	592.830.000,00	98,43	577.007.332,00	97,33	Pelaksanaan pameran sebanyak 6 pameran		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	326.160.000,00	100,00	325.438.500,00	99,78	Masyarakat (RTM) yang memanfaatkan sembako murah. 15 Kelurahan 6097 RTM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih	30.580.000,00	100,00	26.485.000,00	86,61	Pelaksanaan monitoring di 3 pasar		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
5	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	83.195.000,00	85,15	75.900.936,00	91,23		Terlaksananya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	
	Pelatihan Manajemen Pedagang eceran	58.780.000,00	100,00	53.026.036,00	90,21	Meningkatnya kesejahteraan pedagang pasar Kota Bontang sebanyak 90 pedagang		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Penyuluhan hak dan kewajiban Pedagang Pasar	13.010.000,00	100,00	13.009.900,00	100,00	Penyuluhan di 3 pasar		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pendataan Ulang Pedagang Pasar pada 3 Pasar Tradisional	11.405.000,00	55,46	9.865.000,00	86,50	tersedianya data jumlah seluruh pedagangsebanyak 1 dokumen		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	86.770.000,00	100,00	86.476.000,00	99,66	Tersedianya alat penunjang kebersihan pasar sebanyak 7 paket		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	URUSAN PERDAGANGAN	23.098.470.000,00	96,93	22.020.255.498,00	95,33	5 PROGRAM; 17 KEGIATAN		

B.4.4.5 URUSAN INDUSTRI

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output	Outcome	SKPD
			Fisik	Keuangan				
			%	Rp	%			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	732.516.000,00	100,00	705.494.148,00	96,31		Terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.820.000,00	100,00	12.820.000,00	100,00	Dokumen monev di 30 IKM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	89.281.000,00	100,00	88.199.000,00	98,79	Terfasilitasinya pendampingan terhadap IKM sebanyak 25 Orang		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	222.660.000,00	100,00	222.062.800,00	99,73	Terlaksananya 2 kali pelatihan CEFE		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM	88.000.000,00	100,00	82.124.500,00	93,32	Terbitnya sertifikat halal pelaku IKM untuk 15 IKM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Promosi Produk Unggulan Kota Bontang	115.260.000,00	100,00	100.795.598,00	87,45	Pelaksanaan 1 kali pameran produk unggulan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	Pengembangan OVOP	204.495.000,00	100,00	199.492.250,00	97,55	RTM di 2 Kelurahan		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
2	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	60.220.000,00	100,00	55.887.500,00	92,81		Terlaksananya peningkatan kemampuan teknologi industri	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan	60.220.000,00	100,00	55.887.500,00	92,81	50 Desain bagi IKM		Dinas Perindustrian, Koperasi & UMKM
	URUSAN INDUSTRI	792.736.000,00	100,00	761.381.648,00	96,04	2 PROGRAM; 7 KEGIATAN		